

**EVALUASI KINERJA KEUANGAN PT. KERETA API
(PERSERO) SEBELUM DAN SETELAH PERUBAHAN
STATUS BADAN HUKUM PERUSAHAAN
MENJADI PT (PERSERO)**

SKRIPSI



Oleh :

Nama : Sandra Kartika Dewi
Nomor Mahasiswa : 00. 311. 225
Program Studi : Manajemen
Bidang Konsentrasi : Keuangan

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
FAKULTAS EKONOMI
YOGYAKARTA
2004**

**EVALUASI KINERJA KEUANGAN PT. KERETA API (PERSERO)
SEBELUM DAN SETELAH PERUBAHAN STATUS BADAN HUKUM
PERUSAHAAN MENJADI PT (PERSERO)**

SKRIPSI

ditulis dan diajukan untuk memenuhi syarat ujian akhir guna
memperoleh gelar Sarjana Strata-1 di Program Studi Manajemen,
Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Indonesia



Oleh :

Nama : Sandra Kartika Dewi
Nomor Mahasiswa : 00. 311. 225
Program Studi : Manajemen
Bidang Konsentrasi : Keuangan

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
FAKULTAS EKONOMI
YOGYAKARTA
2004

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

“Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan orang lain untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi. Apabila kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya sanggup menerima hukuman/sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku.”

Yogyakarta, April 2004

Penulis,



SANDRA KARTIKA DEWI

HALAMAN PENGESAHAN

Bismillahirrahmanirrohim

SKRIPSI BERJUDUL:

**EVALUASI KINERJA KEUANGAN PT. KERETA API (PERSERO)
SEBELUM DAN SETELAH PERUBAHAN STATUS BADAN HUKUM
PERUSAHAAN MENJADI PT (PERSERO)**

Nama : Sandra Kartika Dewi
Nomor Mahasiswa : 00. 311. 225
Program Studi : Manajemen
Bidang Konsentrasi : Keuangan

Yogyakarta, April 2004
Telah disetujui dan disahkan oleh
Dosen Pembimbing,



Drs. H. Abdul Moin, MBA

HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Telah dipertahankan/diuji dan disahkan
untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar
Sarjana Strata-1 di Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Indonesia

Nama : Sandra Kartika Dewi
Nomor Mahasiswa : 00. 311. 225
Program Studi : Manajemen
Bidang Konsentrasi : Keuangan

Yogyakarta, April 2004
Disahkan oleh

Pembimbing Skripsi : Drs. H. Abdul Moin, MBA



Penguji : Drs. Zaenal Arifin, M.Si



Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Indonesia



Suwarsono Muhammad, MA

ABSTRAK

Latar belakang penulisan ini adalah terjadinya perubahan status badan hukum perusahaan kereta api dari perusahaan umum (Perumka) menjadi perusahaan perseroan (PT.KAI (Persero)). Adanya perubahan status badan hukum tersebut mempunyai kontribusi yang cukup besar dalam menentukan arah dan kebijakan perusahaan kereta api dalam pengelolaan asset, hutang dan modalnya, sehingga mengakibatkan perubahan dalam pos-pos neraca, laporan rugi laba dan perubahan ekuitas. Dasar penelitian ini adalah menguji apakah terdapat perbedaan kinerja keuangan yang signifikan dalam perusahaan kereta api antara sebelum dan setelah perubahan status badan hukum dari perusahaan umum menjadi perusahaan perseroan. Standar pengukuran kinerja keuangan perusahaan BUMN tersebut mengacu pada Keputusan Menteri BUMN Nomor: KEP-100/MBU/2002 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Perusahaan. Penilaian tersebut terdiri dari 8 indikator yaitu Imbalan Kepada Pemegang Saham (ROE), Imbalan Investasi (ROI), Rasio Kas, Rasio Lancar, *Collection Periods*, Perputaran Persediaan, Perputaran Total Assets, dan Rasio Modal Sendiri Terhadap Total Aktiva dengan total bobot skor maksimal 50 untuk perusahaan Infrastruktur.

Selanjutnya penelitian ini mengolah data historis yang tersedia dalam laporan keuangan per 31 Desember dari tahun 1994 sampai tahun 2002. Untuk menguji hipotesa, digunakan metode Time Series Analysis dan uji statistik yaitu *Paired Sample T Test* (uji t untuk dua sample yang berpasangan), *Wilcoxon's Signed Rank Test* (uji peringkat bertanda wilcoxon). *Time Series* digunakan untuk melihat kecenderungan atau trend dan memperhalus fluktuasi yang terjadi dalam tahun data, *Paired Sample T Test* dalam kasus ini digunakan untuk uji signifikansi. Sedangkan *Wilcoxon's Signed Rank Test* digunakan untuk uji hipotesa dengan menguji perbedaan antara sebelum dan setelah perubahan status badan hukum perusahaan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa rasio-rasio aktivitas bergerak semakin efektif namun tidak signifikan, sedangkan rasio solvabilitas mengalami peningkatan dan signifikan dengan α 5%, selama perusahaan berada dalam periode PT. KAI (Persero). Sedangkan pengujian hipotesa menggunakan uji *Wilcoxon* diperoleh Z hitung $-1,260$ (Z didasarkan pada rangking yang positif) atau lebih kecil dari Z tabel $-1,645$ dengan α 5%. Dengan demikian H_0 yang menyatakan bahwa "tidak ada perbedaan kinerja keuangan PT. KAI (Persero) antara sebelum dan sesudah perubahan status badan hukum perusahaan menjadi perusahaan perseroan" diterima. Bobot skor keseluruhan yang diperoleh atas dasar penilaian menurut Keputusan Menteri BUMN No:KEP-100/MBU/2002 juga tidak mengindikasikan peningkatan tingkat kesehatan perusahaan.

MOTTO

“Allah menganugerahkan al hikmah (kefahaman yang dalam tentang Al Qur’an dan As Sunnah) kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan barang siapa yang dianugerahi al hikmah itu, ia benar-benar telah dianugerahi karunia yang banyak. Dan hanya orang-orang yang berakallah yang dapat mengambil pelajaran (dari firman Allah)”

(Q.S. Al Baqarah (2) : 269)

“Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sepadan dengan kemampuannya. Ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya.”

(Q.S. Al Baqarah (2) : 286)

PERSEMBAHAN

... kupersembahkan kepada orang-orang tercinta yang telah memberikan do'a,
inspirasi dan dorongan semangat kepadaku selama ini:

Untuk Keluarga Besarku:
Eyang Kakung dan Eyang Putri,
Bapak dan Ibu,
Pade Jon, Budhe Tatik, Bulik Endang, Mas Bambang, Om Yuz,
Bulik Elly dan Mas Indro, dan semua adek-adekku,
Untuk A' Shohib,

Dan Almamaterku.....

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmannirrohim

Alhamdulillah rabbil 'aalamiin. Segala puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, shalawat serta salam senantiasa kita curahkan ke pangkuan Nabi Muhammad SAW, Rasul penutup segala utusan.

Dengan mengucapkan kata syukur yang tiada putus, karena hanya berkat rahmat dan ridlo Illahi sajalah penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul : **EVALUASI KINERJA KEUANGAN PT. KERETA API (PERSERO) SEBELUM DAN SETELAH PERUBAHAN STATUS BADAN HUKUM PERUSAHAAN MENJADI PT (PERSERO).**

Maksud dari penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi persyaratan didalam memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Penyusun menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan dan kelemahan serta masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu, segala saran, kritik dan sumbangan pikiran yang bersifat membangun dari pihak-pihak yang berkepentingan terhadap skripsi ini akan sangat penyusun harapkan.

Dalam kesempatan ini, kami tak lupa menghaturkan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya dan penghargaan yang setulus-tulusnya atas segala bantuan, bimbingan serta saran-saran dari berbagai pihak, baik dalam penyusunan skripsi maupun dalam penelitian di lapangan untuk memperoleh data-data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini, yaitu :

1. Bapak Dr. Ir. Luthfi Hasan, MS., selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Drs. H. Suwarsono, MA., selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.
3. Bapak Drs. H. Mochamad Nasito, MM., selaku Dosen Pembimbing Akademik, serta Ibu Sri Rejeki, selaku Pembantu Wali penulis yang telah banyak membantu penulis dari awal semester sampai penyelesaian skripsi.
4. Bapak Drs. H. Abdul Moin, MBA., selaku Dosen Pembimbing dalam penyusunan skripsi ini, yang telah memberikan bimbingan dan dorongan kepada penulis sehingga tersusunnya skripsi ini.
5. Para dosen dan karyawan di lingkungan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan dan bantuan akademik kepada penyusun.
6. Bapak Drs. Imam Pamudji, selaku Direktur Keuangan Kantor Pusat PT. Kereta Api (Persero), yang telah membatu ijin penelitian.
7. Bapak Drs. Sunarjo, selaku Kepala Seksi Akuntansi Umum Kantor Pusat PT. Kereta Api (Persero), yang telah memberikan pengarahan dan bimbingannya dalam penyajian data dan informasi.
8. Bapak Drs. Solihin, selaku Kepala Seksi Anggaran Kantor Pusat PT. Kereta Api (Persero), yang telah memberikan komentar dan penjelasan sehingga membantu kelancaran skripsi ini.
9. Pakde Indarto yang telah memberikan saran, nasehat dan membuka jalan pemikiran penulis dari awal hingga terselesainya skripsi ini.
10. Petugas perpustakaan Fakultas Ekonomi yang banyak membantu penulis

11. Untuk A' Shohib Zaeni,... "I can't be what I wanna be without you", serta keluarga besar A' Shohib, Ibu Isti dan Bapak Nasir, Mba' Ochie dan keluarga, Mba' Icha dan keluarga, terima kasih atas dukungannya.
12. Untuk sahabat-sahabatku: Ika Puji, Utiya Anissa, Nurul, Santi C, Alita Puji, Anie Rahmawati dan Erna Yulianti, serta teman-teman kostku: Tatik, Nilam, Endah, Dewi, terima kasih atas dukungan dan persahabatan yang indah ini.
13. Untuk teman-teman angkatan 2000 yang telah banyak memberikan saran atas penyusunan skripsi ini.

Demikian pula kepada semua pihak yang telah memberikan bantuannya baik berupa data dan berbagai bentuk lainnya mulai dari penelitian sampai penyusunan skripsi ini, kami mengucapkan terima kasih.

Yogyakarta, April 2004

Penulis

SANDRA KARTIKA DEWI

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI	iv
ABSTRAK	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Pokok Masalah	6
1.3 Batasan Masalah	7
1.4 Maksud dan Tujuan Penelitian	8
1.5 Manfaat Penelitian	8
1.6 Sistematika Pembahasan	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
2.1 Hasil Penelitian Terdahulu	11
2.2 Landasan Teori	13

2.2.1 Laporan Keuangan	13
2.2.1.1 Pengertian Laporan Keuangan	15
2.2.1.2 Bentuk, Fungsi dan Tujuan Laporan Keuangan	17
1) Bentuk Laporan Keuangan	17
2) Fungsi Laporan Keuangan	20
3) Tujuan Laporan Keuangan	22
2.2.1.3 Sifat dan Keterbatasan Laporan Keuangan	23
2.2.1.4 Arti Pentingnya Analisa Laporan Keuangan	26
2.2.2 Evaluasi	29
2.2.2.1 Pengertian Evaluasi	29
2.2.2.2 Evaluasi Kinerja	29
2.2.3 Kinerja	30
2.2.3.1 Pengertian Kinerja	30
2.2.3.2 Kinerja Keuangan	31
2.2.3.3 Penilaian Kinerja Perusahaan	32
2.2.4 Rasio Keuangan Menurut Keputusan Menteri BUMN No : KEP-100/MBU/2002	37
2.2.5 Pengertian Perubahan (Ditinjau Dari Segi Manajemen)	46
2.2.6 Pengertian Badan Hukum	47
2.2.7 Pengertian Perusahaan	48
2.2.7.1 Perusahaan Negara	49
1) Perusahaan Jawatan (Perjan)	50
2) Perusahaan Umum (Perum)	50
3) Perusahaan Perseroan (Persero)	51

BAB III OBJEK DAN METODE PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian	54
3.1.1 Lokasi Penelitian	56
3.1.2 Sejarah Singkat dan Perkembangan PT. Kereta Api (Persero)	56
3.1.3 Struktur Organisasi dan Uraian Tugas PT. Kereta Api (Persero) ...	60

3.1.4 Falsafah, Visi dan Misi, Maksud dan Tujuan, Sasaran dan Arah Pengembangan PT. Kereta Api (Persero)	65
3.1.4.1 Falsafah PT. Kereta Api (Persero)	65
3.1.4.2 Visi dan Misi PT. Kereta Api (Persero)	65
3.1.4.3 Maksud dan Tujuan PT. Kereta Api (Persero)	66
3.1.4.4 Sasaran dan Arah Pengembangan PT. Kereta Api (Persero)	66
3.2 Metode Penelitian	67
3.2.1 Metode Penelitian yang Digunakan	67
3.2.2 Operasionalisasi Variabel	68
3.2.3 Rancangan Pengujian Hiopotesis	69
3.2.4 Data dan Teknik Pengumpulan Data	70
3.2.4.1 Jenis Data dan Sumber Data	70
3.2.4.2 Teknik Pengumpulan Data	71
3.2.5 Teknik Pengolahan dan Analisis Data	71
3.2.5.1 Teknik Pengolahan Data	71
3.2.5.2 Teknik Analisis Data	73
1) Analisis Perhitungan Kinerja Keuangan Perusahaan	73
2) Analisis Statistik	74

BAB IV ANALISA DAN PEMBAHASAN

4.1 Analisa Rasio Keuangan Menurut Kep Men BUMN No: KEP-100/MBU/2002	79
4.1.1 Analisa Likuiditas	79
4.1.1.1 Current ratio	80
1) Pada Saat Perusahaan Berstatus Perum	80
2) Pada Saat Perusahaan Berstatus Perusahaan Perseroan	83
3) Rekapitulasi Analisa Current Ratio Sebelum dan Sesudah Perubahan Status	86

4.1.1.2 Cash ratio	89
1) Pada Saat Perusahaan Berstatus Perum	89
2) Pada Saat Perusahaan Berstatus Perusahaan Perseroan	92
3) Rekapitulasi Analisa Cash Ratio Sebelum dan Sesudah Perubahan Status	95
4.1.2 Analisa Rentabilitas	98
4.1.2.1 ROE	98
1) Pada Saat Perusahaan Berstatus Perum	98
2) Pada Saat Perusahaan Berstatus Perusahaan Perseroan	102
3) Rekapitulasi Analisa ROE Sebelum dan Sesudah Perubahan Status	104
4.1.2.2 ROI	106
1) Pada Saat Perusahaan Berstatus Perum	106
2) Pada Saat Perusahaan Berstatus Perusahaan Perseroan	109
3) Rekapitulasi Analisa ROI Sebelum dan Sesudah Perubahan Status	112
4.1.3 Analisa Aktivitas	114
4.1.3.1 Collection Periods	114
1) Pada Saat Perusahaan Berstatus Perum	115
2) Pada Saat Perusahaan Berstatus Perusahaan Perseroan	118
3) Rekapitulasi Analisa Collection Periods Sebelum dan Sesudah Perubahan Status	120
4.1.3.2 Perputaran Persediaan	122
1) Pada Saat Perusahaan Berstatus Perum	123
2) Pada Saat Perusahaan Berstatus Perusahaan Perseroan	126
3) Rekapitulasi Analisa Perputaran Persediaan Sebelum dan Sesudah Perubahan Status	128
4.1.3.3 Total Assets Turnover	130

1) Pada Saat Perusahaan Berstatus Perum	130
2) Pada Saat Perusahaan Berstatus Perusahaan Perseroan	133
3) Rekapitulasi Analisa Total Assets Turnover Sebelum dan Sesudah Perubahan Status	136
4.1.4 Analisa Solvabilitas	137
4.1.4.1 Total Modal Sendiri terhadap Total Aktiva	138
1) Pada Saat Perusahaan Berstatus Perum	138
2) Pada Saat Perusahaan Berstatus Perusahaan Perseroan	141
3) Rekapitulasi Analisa Total Modal Sendiri terhadap Total Aktiva Sebelum dan Sesudah Perubahan Status	144
4.1.5 Penilaian Tingkat Kesehatan Perusahaan Secara Keseluruhan	147
4.2 Uji Signifikansi Menggunakan Paired Sample T Test	150
4.3 Analisa Statistik Non Parametrik Menggunakan Uji Peringkat Bertanda Wilcoxon	153

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan	158
5.2 Saran	161

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
2.1 Daftar Indikator dan Bobot Aspek Keuangan	37
2.2 Daftar Skor Penilaian Return On Equity	39
2.3 Daftar Skor Penilaian Return On Investment.....	40
2.4 Daftar Skor Penilaian Cash Ratio	41
2.5 Daftar Skor Penilaian Current Ratio.....	42
2.6 Daftar Skor Penilaian Collection Periods.....	43
2.7 Daftar Skor Penilaian Perputaran Persediaan.....	44
2.8 Daftar Skor Penilaian Perputaraan Total Assets.....	45
2.9 Daftar Skor Penilaian Rasio Modal Sendiri Terhadap Total Assets.....	46
3.1 Kronologis Bentuk Perusahaan	59
3.2 Operasionalisasi Variabel.....	69
4.1 Current Ratio PERUMKA (dalam jutaan rupiah) Tahun Periode 1994-1998.....	80
4.2 Current Ratio PT. KAI (dalam jutaan rupiah) Tahun Periode 1999-2002.....	83
4.3 Cash Ratio PERUMKA (dalam jutaan rupiah) Tahun Periode 1994-1998.....	89
4.4 Cash Ratio PT. KAI (dalam jutaan rupiah) Tahun Periode 1999-2002.....	93
4.5 Return On Equity PERUMKA (dalam jutaan rupiah) Tahun Periode 1994-1998.....	99
4.6 Return On Equity PT. KAI (dalam jutaan rupiah) Tahun Periode 1999-2002.....	102
4.7 Return On Investment PERUMKA (dalam jutaan rupiah) Tahun Periode 1994-1998.....	107
4.8 Return On Investment PT. KAI (dalam jutaan rupiah) Tahun Periode 1999-2002.....	110

4.9	Collection Periods PERUMKA (dalam jutaan rupiah)	
	Tahun Periode 1994-1998.....	115
4.10	Collection Periods PT. KAI (dalam jutaan rupiah)	
	Tahun Periode 1999-2002.....	118
4.11	Perputaran Persediaan PERUMKA (dalam jutaan rupiah)	
	Tahun Periode 1994-1998.....	123
4.12	Perputaran Persediaan PT. KAI (dalam jutaan rupiah)	
	Tahun Periode 1999-2002.....	126
4.13	Perputaran Total Assets (TATO) PERUMKA (dalam jutaan rupiah)	
	Tahun Periode 1994-1998.....	131
4.14	Perputaran Total Assets (TATO) PT. KAI (dalam jutaan rupiah)	
	Tahun Periode 1999-2002.....	134
4.15	Total Modal Sendiri PERUMKA (dalam jutaan rupiah)	
	Tahun Periode 1994-1998.....	139
4.16	Total Modal Sendiri PT. KAI (dalam jutaan rupiah)	
	Tahun Periode 1999-2002.....	142
4.17	Rekapitulasi Penilaian Tingkat Kesehatan Perusahaan Kereta Api Sebelum dan Sesudah Perubahan Status Badan Hukum	
	Tahun Periode 1994 – 2002.....	146
4.18	ROE : Paired Sample Correlations.....	151
4.19	ROI : Paired Sample Correlations.....	151
4.20	Collection Periods : Paired Sample Correlations.....	152
4.21	Perputaran Persediaan : Paired Sample Correlations.....	152
4.22	Total Asset Turnover : Paired Sample Correlations.....	152
4.23	TMS Terhadap TA : Paired Sample Correlations.....	153
4.24	Rata-rata Rasio Keuangan Sebelum dan Sesudah Perubahan Status Badan Hukum.....	155

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
4.1 Current Ratio: Aktual VS Moving Average	87
4.2 Cash Ratio: Aktual VS Moving Average	96
4.3 ROE: Aktual VS Moving Average.....	104
4.4 ROI: Aktual VS Moving Average.....	112
4.5 Collection Periods: Aktual VS Moving Average.....	121
4.6 Perputaran Persediaan: Aktual VS Moving Average.....	128
4.7 Total Assets Turnover: Aktual VS Moving Average.....	136
4.8 TMS terhadap TA: Aktual VS Moving Average.....	144
4.9 Hasil Analisa Wilcoxon.....	156

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
I. Keputusan Menteri BUMN Nomor: KEP-100/MBU/2002 Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan BUMN	164
II. Struktur Organisasi PT. Kereta Api (Persero) Tingkat Kantor Pusat ...	192
III. Laporan Keuangan Pokok: Neraca dan Laporan Rugi Laba Perusahaan Kereta Api	204

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan ekonomi yang semakin pesat mengakibatkan dunia usaha menghadapi permasalahan yang semakin kompleks dan dinamis. Untuk menghadapi permasalahan tersebut, berbagai cara telah dilakukan oleh masing-masing perusahaan, baik dalam bidang pemasaran, promosi dan keuangan. Keberhasilan suatu perusahaan tidak hanya didukung oleh banyaknya fasilitas yang ditawarkan kepada konsumennya tetapi juga harus memperhitungkan faktor penunjang yang lain terutama dari segi promosi, sumber daya manusia yang handal serta kualitas pelayanan yang baik dan memuaskan. Perusahaan dituntut untuk inovatif dan mampu melakukan penyesuaian diri terhadap perubahan-perubahan yang terjadi dan yang akan terjadi dalam lingkungannya, baik perubahan ekonomi nasional, peraturan pemerintah, kondisi konsumen maupun kemampuan pesaing. Dengan adanya kinerja yang baik maka perusahaan diharapkan dapat tumbuh, berkembang dan berkesinambungan untuk mencapai tujuan perusahaan. Manajemen yang handal dan professional, transparansi serta akuntabilitas adalah syarat mutlak yang dapat menjamin pengelolaan yang baik sebuah perusahaan. **PT. Kereta Api (Persero)** merupakan salah satu **Perusahaan Milik Negara (BUMN)** yang berupaya untuk mewujudkan pengelolaan yang baik dengan sistem operasi yang terkendali dan kualitas pelayanan yang memuaskan.

BUMN menurut bentuk perusahaannya dibagi atas PERJAN, PERUM dan PERSERO, dimana untuk selanjutnya bentuk perusahaan ini akan mendasari perusahaan dalam kegiatan operasinya. Bentuk perusahaan tersebut juga dapat menentukan kinerja perusahaan secara keseluruhan. Sebagai Perusahaan Milik Pemerintah (BUMN), Perusahaan Kereta Api dituntut untuk dapat mengelola sumber-sumber penting yang terkait dalam bidang usahanya, yaitu dalam menyediakan sarana transportasi yang bermanfaat untuk kepentingan umum.

Adanya persaingan yang ketat dewasa ini di antara moda transportasi ditambah lagi dengan adanya perang tarif terutama dengan kapal udara menyebabkan manajemen perusahaan Kereta Api menetapkan berbagai kebijakan, diantaranya adalah mengganti status perusahaan BUMN tersebut menjadi perusahaan yang bisa mencari keuntungan untuk terus bisa eksis dalam persaingan global. Oleh karena itu, diharapkan dalam bentuk usaha Persero, PT. KAI mampu menghasilkan keuntungan/laba dalam kegiatan operasinya. Lain halnya ketika sebelum menjadi perusahaan perseroan, perjan misalnya, terdapat subsidi atau bantuan dari pemerintah dalam usahanya karena merupakan orientasi pelayanan sepenuhnya kepada masyarakat. Dalam bentuk perseroan, perusahaan Kereta Api dituntut untuk mandiri namun juga konsisten dalam bidangnya serta berdaya saing kuat di pasar terutama di pasar dalam negeri sesuai dengan tujuan perusahaan.

Berubahnya nama organisasi pengelola perkereta-apian menyiratkan dilemma, yaitu antara kereta api untuk angkutan rakyat yang murah dan kereta api sebagai jasa angkutan yang mendatangkan untung, sebagaimana dinyatakan dalam sebuah tulisan di majalah Tempo, sebagai berikut:

“Dulu, organisasi perkereta-apian bernama Djawatan Kereta Api(DKA), menyiratkan bahwa makna Djawatan adalah untuk melayani masyarakat. Pada tahun 1963, DKA berubah status menjadi PNKA atau Perusahaan Negara Kereta Api. Ini bukan sekedar ganti nama, melainkan terkandung maksud bahwa perkereta apian boleh mencari pemasukan sendiri, dan pemerintah dalam hal ini hanyalah sebagai pemegang saham. Namun pada tahun 1973 nama “PNKA” dikembalikan lagi menjadi Djawatan (PJKA), perkereta-apian sepenuhnya dikelola lewat birokrasi pemerintah. Eloknya, justru ketika bernama PJKA ini jumlah subsidi malah turun. Tahun anggaran 1988-1989, misalnya, subsidi hanya Rp. 32,8 miliar, sementara tahun sebelumnya Rp. 34,8 miliar. Tahun berikutnya, 1989-1990, subsidi tinggal Rp. 31,5 miliar. Pada tahun 1991 pemerintah memberi kesempatan kepada PJKA untuk mengembangkan diri, dan statusnya diubah lagi menjadi Perumka, Perusahaan Umum Kereta Api.” (Tempo, 6 januari 2002)

Pada posisi ini, Perumka (Perusahaan Umum Kereta Api) berada diantara perusahaan jawatan dan perseroan terbatas yaitu diperbolehkan mencari untung tanpa mengabaikan tujuan semula yaitu melayani transportasi untuk rakyat kebanyakan, dan kemudian kebijakan tersebut dikenal dengan manajemen subsidi silang. Kemudian, dalam rangka *Loan Agreement* No. 4106-IND tanggal 15 Januari 1997 berupa bantuan proyek dari Bank Dunia (*World Bank*), yang lebih dikenal dengan Proyek Efisiensi Perkeretaapian atau “*Railway Efficiency Project*” (REP), maka sasaran pengembangan diarahkan pada peningkatan efisiensi dan kualitas pelayanan yang ditempuh melalui 8 (delapan) kebijakan, yaitu:

1. Memperjelas peranan antara pemilik (*owner*), pengatur (*regulator*) dan pengelola (*operator*);
2. Melakukan restrukturisasi Perumka, termasuk merubah strategi Perusahaan Umum menjadi Perseroan Terbatas;
3. Kebijaksanaan pentarifan dan pemberian kompensasi dari Pemerintah kepada Perumka atas penyediaan kereta api non komersial, yang tarifnya ditetapkan oleh Pemerintah;

4. Rencana jangka panjang dituangkan dalam Perencanaan Perusahaan (*Corporate Planning*), yang dijabarkan ke dalam rencana kerja anggaran perusahaan secara tahunan;
5. Penggunaan peraturan dan prosedur dalam setiap kegiatan;
6. Peningkatan peran serta sektor swasta;
7. Peningkatan SDM;
8. Pembangunan yang berwawasan lingkungan dan keselamatan masyarakat.

Sejalan dengan maksud REP tersebut, dengan PP No. 19 Tahun 1998, tanggal 3 Februari 1998, Pemerintah menetapkan pengalihan bentuk Perusahaan Umum (Perumka) menjadi Perusahaan Perseroan (Persero), yang secara 'de facto' dilakukan tanggal 1 Juni 1999. Dengan demikian, dalam bentuk Perusahaan Perseroan, seperti yang telah disebutkan diatas, sisi bisnis perkereta apian menjadi lebih besar dari pada sisi pelayanannya. Diharapkan perusahaan juga akan memberikan suatu prestasi yang lebih besar dari pada sebelumnya.

Prestasi perusahaan dapat dinilai dari besarnya kinerja keuangan selama periode tertentu. Kinerja keuangan perusahaan bisa diamati dari laporan keuangan yang dikeluarkan perusahaan secara periodik. Kinerja keuangan yang lebih fundamental dalam menjelaskan beberapa kekuatan dan kelemahan keuangan perusahaan adalah rasio keuangan. Melalui rasio keuangan kita bisa membuat perbandingan yang berarti terutama dalam membandingkan rasio keuangan perusahaan dari waktu ke waktu untuk mengamati kecenderungan (trend) yang sedang terjadi.

Pada dasarnya, pengukuran mengenai kinerja sudah banyak dilakukan oleh para ahli dalam berbagai bidang dan sektor baik itu perusahaan-perusahaan *go public* maupun perusahaan yang belum *go public*. Mereka yang menganalisa kinerja perusahaan diantaranya dilakukan oleh **Machfoedz** (1999) yang melakukan evaluasi kinerja sebelum dan sesudah *go public*, dengan mengevaluasi kinerja perbankan dengan 22 bank yang telah *go public* sebagai sample, dan hasilnya tidak ada perbedaan kinerja perusahaan sebelum dan sesudah *go public*. Sedangkan penelitian terhadap BUMN dilakukan oleh **Koeswoyo dan Yuliani** (2001) yang mengevaluasi kinerja keuangan BUMN sebelum dan sesudah *go public*, dan sample yang digunakan adalah BUMN yang telah *listed* selama 5 tahun (1995-2000) dan menyusun laporan keuangan selama kurun waktu 4 tahun baik sebelum dan sesudah penawaran umum perdana. Hasil pengujian hipotesis menyimpulkan tidak terjadi peningkatan yang signifikan terhadap kinerja BUMN antara masa setelah IPO dan sebelum IPO (*Initial Public Offering*). Penulis meletakkan penelitian menurut *Machfoedz* (1999) dan *Koeswoyo dan Yuliani* (2001) dikarenakan keduanya sama-sama meneliti perubahan dari kinerja akan dua waktu yang berbeda.

Karena sebab-sebab itulah penulis tertarik untuk mengevaluasi kinerja dalam perusahaan BUMN tersebut dikarenakan tidak semua BUMN mengadakan perubahan status badan hukumnya yang kemudian akan mempengaruhi struktur modalnya dan memberikan dampak pada kinerja perusahaan. Selain itu hanya sedikit studi-studi keuangan mengenai pengukuran keuangan dengan memfokuskan studi keuangannya pada perubahan status perusahaan. Sebagai

salah satu Badan Usaha Milik Negara, dalam menilai tingkat kesehatan kinerja perusahaan, PT. Kereta Api (Persero) mengacu pada Keputusan Menteri BUMN Nomor: KEP-100/MBU/2002 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan BUMN.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis bermaksud untuk melakukan penelitian dengan mengajukan judul skripsi :

“EVALUASI KINERJA KEUANGAN PT. KERETA API (PERSERO) SEBELUM DAN SETELAH PERUBAHAN STATUS BADAN HUKUM PERUSAHAAN MENJADI PT (PERSERO)”

1.2 Pokok Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka masalah utama yang penulis akan teliti adalah *apakah ada hubungan antara perubahan status badan hukum perusahaan dengan kinerja keuangannya pada perusahaan kereta api*. Penelitian yang lebih mendalam akan ditunjukkan untuk melihat pengaruh indikator-indikator penilaian kinerja berdasarkan Keputusan Menteri BUMN NO: KEP-100/MBU/2002 yaitu Imbalan kepada pemegang saham (Return On Equity), imbalan investasi (Return On Investment), rasio kas, rasio lancar, collection periods, perputaran persediaan, perputaran total asset dan rasio modal sendiri terhadap total aktiva. Untuk kemudian penulis memfokuskan pada dua hal yang akan diteliti yaitu:

1. Apakah perubahan bentuk badan hukum Perusahaan Kereta Api dari perusahaan umum menjadi perusahaan perseroan akan membawa peningkatan terhadap kinerja keuangannya.

2. Apa sajakah faktor dominan diantara berbagai indikator keuangan yang mempengaruhi peningkatan kinerja keuangan perusahaan kereta api.

1.3 Batasan Masalah

Untuk lebih memudahkan dalam penelitian, penulis membatasi permasalahan yang akan diteliti, diantaranya adalah:

1. Kinerja yang akan diteliti adalah kinerja dalam aspek keuangan
2. Penilaian kinerja keuangan perusahaan menggunakan *Keputusan Menteri BUMN No:KEP-100/MBU/2002*, tanggal 4 Juni 2002, sebagai alat ukur.
3. Data yang digunakan diambil dari Perusahaan Milik Negara yaitu PT. KAI (Persero)
4. Data yang dipergunakan adalah laporan keuangan perusahaan yaitu laporan neraca, laporan rugi laba dan laporan perubahan ekuitas dari :
 - a. Pada saat status badan hukumnya menjadi PT. Kereta Api (Persero), data dari tahun 1999 sampai dengan 2002. (4 tahun dalam masa status perusahaan adalah perusahaan perseroan)
 - b. Pada saat status badan hukumnya menjadi Perumka (Perusahaan Umum Kereta Api), data dari tahun 1994 sampai dengan 1998. (5 tahun dalam masa status perusahaan adalah perusahaan umum)

1.4 Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud penelitian ini adalah untuk mendapatkan informasi dan data yang digunakan sebagai bahan analisis untuk diteliti sejauh mana perubahan bentuk

badan hukum dalam suatu perusahaan membawa pengaruh terhadap kinerja keuangannya. Hasil penelitian ini oleh penulis akan digunakan sebagai bahan penyusunan skripsi guna memenuhi satu syarat dalam memperoleh gelar kesarjanaan pada Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui apakah perubahan status badan hukum suatu perusahaan akan mempengaruhi kinerja keuangannya.
2. Menganalisa diantara berbagai indikator keuangan, faktor-faktor dominan yang berpengaruh terhadap perubahan kinerja keuangan sebelum dan setelah perubahan status badan hukum perusahaan.
3. Menganalisa apakah perubahan status badan hukum tersebut mempunyai manfaat secara keuangan.

1.5 Manfaat penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan harapan akan memiliki kegunaan ilmiah sebagai masukan baru dan juga sebagai bahan referensi bagi penelitian-penelitian lainnya. Hasil penelitian diharapkan pula dapat berguna bagi:

- a. Bagi peneliti, yaitu sebagai tambahan pengetahuan mengapa perusahaan terutama BUMN menerapkan kebijakan mengganti status badan hukum perusahaannya. Selain juga menjadi sarana penerapan teori terutama teori yang berhubungan dengan dengan pengukuran kinerja Keuangan

- b. Bagi manajemen perusahaan (Perusahaan BUMN), yaitu sebagai masukan dalam menentukan arah kebijakan.
- c. Pemerintah sebagai pemegang saham terbesar dalam BUMN, yaitu sebagai bahan pertimbangan apakah perubahan status ini menguntungkan baik itu secara finansial maupun pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.

1.6 Sistematika Pembahasan

Latar belakang penelitian ini adalah terjadinya perubahan status badan hukum perusahaan kereta api dari perusahaan umum menjadi perusahaan perseroan. Adanya perubahan status badan hukum perusahaan tersebut mempunyai kontribusi yang cukup besar dalam menentukan arah dan kebijakan perusahaan kereta api dalam pengelolaan asset, hutang dan modalnya, sehingga mengakibatkan perubahan dalam pos-pos neraca, laporan rugi laba dan perubahan ekuitas. Berdasar latar belakang masalah diatas, maka dirumuskan mengenai pokok permasalahan yaitu apakah perubahan status badan hukum perusahaan kereta api dari Perumka menjadi PT. KAI (Persero) akan meningkatkan kinerja keuangan perusahaannya.

Pada bagian berikutnya (BabII), dipaparkan berbagai teori manajemen dengan fokus manajemen keuangan yang relevan dan menjadi acuan melakukan analisa permasalahan dalam penelitian ini. Pada bab ini dijelaskan mengenai kinerja keuangan yang mengacu pada penilaian menurut Keputusan Menteri BUMN No:KEP-100/MBU/2002 tentang Penilaian Kesehatan BUMN serta pengertian Badan Hukum Perusahaan BUMN yang terdiri dari Perjan, Perum dan Persero.

Untuk mendapatkan gambaran umum mengenai perusahaan yang menjadi obyek penelitian, maka pada Bab III akan dibahas secara keseluruhan. Selanjutnya dijelaskan pula mengenai metode penelitian beserta rancangan pengujian hipotesa. Berdasarkan data keuangan dan non keuangan yang telah diperoleh dari perusahaan, maka akan dilakukan analisa untuk membuktikan hipotesa dan menjawab pokok permasalahan. Penulis menggunakan rasio finansial menurut Keputusan Menteri BUMN No: KEP-100/MBU/2002 dan pengujian hipotesa menggunakan uji statistik non parametrik yaitu menggunakan Uji Peringkat Bertanda Wilcoxon (*Wilcoxon's Signed Rank Test*).

Pada bagian akhir akan dibahas tentang kesimpulan yang diperoleh berdasarkan hasil analisa serta saran-saran yang bisa diberikan kepada perusahaan untuk dapat meningkatkan kinerjanya.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Hasil Penelitian Terdahulu

Prestasi perusahaan dapat dinilai dari besarnya kinerja keuangan selama periode tertentu. Kinerja keuangan perusahaan bisa diamati dari laporan keuangan yang dikeluarkan perusahaan secara periodik. Kinerja keuangan yang lebih fundamental dalam menjelaskan beberapa kekuatan dan kelemahan keuangan perusahaan adalah rasio keuangan. Melalui rasio keuangan kita bisa membuat perbandingan yang berarti terutama dalam membandingkan rasio keuangan perusahaan dari waktu ke waktu untuk mengamati kecenderungan (trend) yang sedang terjadi.

Penulis dalam penelitian ini memfokuskan pada kinerja keuangan pada dua periode waktu yang berbeda. Pada dasarnya, pengukuran mengenai kinerja sudah banyak dilakukan oleh para ahli dalam berbagai bidang dan sektor baik itu perusahaan-perusahaan *go public* maupun perusahaan yang belum *go public*. Para ahli yang mengukur kinerja keuangan dalam dua periode waktu yang berbeda itu di antaranya adalah:

- a. **Pangastuti** (1992), menganalisa perbandingan terhadap perusahaan manufaktur sebelum dan sesudah *go public*. Rasio yang dipakai adalah likuiditas, solvabilitas dan profitabilitas. Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa perusahaan yang melakukan *initial offering* (IPO) –yang menandakan

sebuah perusahaan telah menjadi perusahaan publik—berpengaruh positif terhadap tingkat efisiensi perusahaan.

- b. **Machfoedz** (1999), melakukan evaluasi kinerja sebelum dan sesudah *go public*, dengan mengevaluasi kinerja perbankan dengan 22 bank yang telah *go public* sebagai sample. Hasilnya tidak ada perbedaan kinerja perusahaan sebelum dan sesudah *go public*.
- c. **Koeswoyo dan Yuliani** (2001), mengevaluasi kinerja keuangan BUMN sebelum dan sesudah *go public*, dengan menggunakan sample perusahaan BUMN yang telah *listed* selama 5 tahun (1995-2000) dan menyusun laporan keuangan selama kurun waktu 4 tahun baik sebelum dan sesudah penawaran umum perdana. Hasil pengujian hipotesis menyimpulkan tidak terjadi peningkatan yang signifikan terhadap kinerja BUMN antara masa setelah IPO dengan sebelum IPO.
- d. **Mucharina** (2002), dalam skripsinya mengevaluasi kinerja keuangan PT. Indonesia Satellite Corporation Tbk (PT. Indosat Tbk) dan PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk (PT. Telkom Tbk) sebelum dan selama krisis ekonomi di Indonesia. Penelitiannya menggunakan variabel aktiva, hutang/kewajiban, modal, penghasilan dan beban serta menganalisa rasio likuiditas, rasio rentabilitas, rasio solvabilitas dan rasio aktivitas. Standar pengukurannya memakai SK. MenKeu RI No. 198/KMK.016/1998. Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa adanya krisis ekonomi yang melanda Indonesia ikut mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan tetapi tidak menurunkan tingkat kesehatan perusahaan, sedangkan komponen yang

mempengaruhi kinerja keuangan mengalami fluktuasi. Ini berarti antara kinerja keuangan perusahaan pada saat sebelum krisis dan pada saat krisis memang mengalami perbedaan terutama pada saat awal terjadinya krisis ekonomi.

- e. **Damaianty** (2001) dalam skripsinya menganalisa perbedaan kinerja keuangan dan likuiditas saham sebelum dan setelah emisi bukti right (studi pada perusahaan yang terdaftar di BEJ). Penelitian ini menggunakan hipotesa adanya perbedaan terhadap kinerja keuangan perusahaan dan setelah emisi bukti right terjadi perbedaan pada likuiditas saham. Penelitian ini menggunakan variabel rasio lancar, rasio hutang dan ROA (kinerja keuangan perusahaan) dan likuiditas saham. Dari penelitian tersebut ditarik kesimpulan bahwa tidak ada perbedaan pada kinerja dan likuiditas saham sebelum dan setelah emisi bukti right. Ditolaknya hipotesa yang dikemukakannya disebabkan karena kondisi perekonomian Indonesia yang memburuk dan melemahnya nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika sehingga perusahaan cenderung tidak dapat membayar hutang-hutangnya walau adanya dana segar yang masuk dari penerbitan bukti right.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Laporan Keuangan

Sebagai suatu sistem informasi, akuntansi yang kita kenal didefinisikan sebagai suatu proses pencatatan, penggolongan, peringkasan, pelaporan, dan penganalisaan data keuangan suatu organisasi. Akuntansi menurut **Jusuf** (1997,

hlm. 4) didefinisikan sebagai suatu disiplin yang menyediakan informasi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan secara efisien dan mengawasi kegiatan-kegiatan suatu organisasi. Data dan informasi yang diolah seharusnya relevan dengan permasalahan yang akan dianalisis. Informasi yang dihasilkan tersebut kemudian diperlukan untuk menghasilkan perencanaan yang efektif, pengawasan dan pengambilan keputusan, serta sebagai alat pertanggung jawaban organisasi kepada para investor, kreditur, badan pemerintah dan sebagainya. Sebagai suatu sistem informasi, akuntansi sangat diperlukan terutama bagi pihak manajemen atau perusahaan untuk mengevaluasi dan mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan operasional perusahaan. Akuntansi juga dapat disimpulkan sebagai aktivitas yang menyediakan informasi kuantitatif terutama yang bersifat keuangan (Akuntansi Keuangan) yang bertujuan utama menghasilkan laporan keuangan untuk pihak luar (ekstern). Yang dimaksud pihak luar adalah pihak-pihak diluar manajemen perusahaan, seperti para investor, dimana laporan keuangan tersebut diperlukan untuk mengevaluasi dan memperkirakan pendapatan yang akan diperoleh dari investasinya, para kreditur, instansi pemerintah dimana laporan keuangan tersebut dapat digunakan sebagai sarana untuk dapat menetapkan pajak dan mengawasi perusahaan serta para pemakai lainnya.

Sedangkan informasi akuntansi yang bertujuan utama menghasilkan informasi untuk kepentingan manajemen yang mana sifat informasinya sangat mendalam serta diperlukan dalam perencanaan dan pengambilan keputusan manajemen disebut sebagai Akuntansi Manajemen. Informasi ini biasanya tidak

dipublikasikan kepada umum. Oleh karena itu, informasi akuntansi yang disajikan berbeda-beda menurut sisi pemakainya.

“Laporan Keuangan adalah hasil dari proses akuntansi” (Jusuf, 1997, hlm. 11). Dari proses akuntansi, menghasilkan data dan laporan-laporan yang dapat dipergunakan sesuai dengan keperluan pihak-pihak pemakai. Hal ini berarti proses akuntansi yang dibutuhkan oleh penanam modal, organisasi buruh, kreditur, badan atau instansi tertentu atau yang dibutuhkan oleh umum adalah proses akuntansi yang menghasilkan laporan keuangan.

2.2.1.1 Pengertian Laporan Keuangan

Laporan Keuangan merupakan informasi utama dalam pelaporan keuangan. Dari laporan keuangan bisa digambarkan kondisi keuangan suatu perusahaan pada saat tertentu. Berikut definisi laporan keuangan menurut beberapa pakar :

- a. Menurut **Westor dan Copeland** (1987, hlm. 17), yang dimaksud dengan laporan keuangan adalah: “Melaporkan prestasi histories dari suatu perusahaan dan memberikan dasar, bersama dengan analisis bisnis dan ekonomi, memproyeksikan dan peramalan untuk masa depan”.
- b. Menurut **Ikatan Akuntan Indonesia** (1996)

Laporan Keuangan merupakan bagian dari proses laporan keuangan. Laporan Keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan rugi laba, laporan perubahan posisi keuangan yang dapat disajikan dalam berbagai cara, misalnya sebagai laporan arus kas, laporan arus dana, catatan dan laporan lain seperti materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan. Disamping itu, termasuk juga skedul dan informasi tambahan yang berkaitan dengan laporan tersebut, misalnya laporan keuangan segmen industri dan geografis serta pengaruh perubahan harga.

- c. Menurut **Munawir** (2000, hlm. 4), yang dimaksud dengan laporan keuangan adalah: “Hasil dari proses akuntansi yang dapat dipergunakan sebagai alat untuk berkomunikasi antar data atau aktivitas suatu perusahaan dengan pihak yang berkepentingan dengan data atau aktivitas perusahaan”.
- d. Menurut **Myer** dalam bukunya *Financial Statement Analysis* (1961), laporan keuangan adalah:

Dua daftar yang disusun oleh akuntan pada akhir periode untuk suatu perusahaan. Kedua daftar itu adalah daftar neraca atau daftar posisi keuangan dan daftar pendapatan atau rugi laba. Pada akhir-akhir ini sudah menjadi kesepakatan bagi perseroan-perseroan untuk menambahkan daftar ketiga yaitu daftar surplus atau daftar laba yang tidak dibagikan (laba yang ditahan).

Definisi-definisi di atas dapat disimpulkan, bahwa laporan keuangan sangat penting karena menyajikan informasi-informasi yang terkait dengan keuangan yang digunakan untuk memperoleh laba atau keuntungan dan meramalkan masa depan perusahaan. Laporan keuangan melaporkan posisi keuangan perusahaan pada saat tertentu maupun hasil operasinya selama periode tertentu. Dari sudut investor, meramalkan masa depan merupakan hal terpenting dari analisis keuangan, sedangkan dari sudut manajemen analisis laporan keuangan berguna sebagai cara untuk mengantisipasi keadaan di masa mendatang, dan yang lebih penting adalah sebagai titik tolak bagi tindakan perencanaan yang akan mempengaruhi jalannya kejadian di masa mendatang.

Berbagai laporan keuangan yang disampaikan oleh perusahaan kepada pemegang sahamnya, laporan tahunan merupakan laporan yang terpenting. Seperti

yang dijelaskan oleh **Brigham** dalam bukunya *Fundamentals of Financial Management* menjelaskan bahwa “Annual report is a issued annually by a corporation to its stockholders. It contains basic financial statements, as well as management’s opinion of past year’s operations and the firm’s future prospects”.(Brigham, 1992, hlm. 35)

Jadi ada dua jenis informasi yang disajikan dalam laporan tahunan ini. Pertama, adalah bagian uraian (verbal) yang berupa kata pengantar dari presiden direktur yang menggambarkan hasil operasi perusahaan selama tahun lalu serta membahas perkembangan-perkembangan baru yang akan mempengaruhi kelanjutan perusahaan di masa yang akan datang. Kedua, adalah laporan tahunan yang terdiri dari empat laporan keuangan pertama yang meliputi perhitungan rugi laba, neraca, perhitungan laba yang ditahan dan laporan arus kas (laporan peredaran dana). Secara bersama-sama laporan ini akan memberikan gambaran akuntansi atas operasi serta posisi keuangan perusahaan.

2.2.1.2 Bentuk, Fungsi dan Tujuan Laporan Keuangan

1) Bentuk Laporan Keuangan

“... laporan keuangan pada umumnya terdiri dari neraca, laporan rugi laba, dan laporan perubahan modal atau laba yang ditahan...”, demikian menurut **Munawir** (2000, hlm. 13) dalam bukunya *Analisa Laporan Keuangan*. Sebelum menganalisa suatu laporan keuangan, hendaknya penganalisa mengetahui terlebih dahulu bentuk-bentuk maupun prinsip-prinsip penyusunan laporan keuangan serta masalah-masalah yang timbul dalam penyusunan laporan keuangan.

Pengertian masing-masing bagian dari laporan keuangan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Neraca

Pengertian neraca menurut **Munawir** (2000, hlm. 13):

Neraca adalah laporan yang sistematis tentang aktifa, hutang serta modal dari suatu perusahaan pada suatu saat tertentu. Jadi tujuan neraca adalah untuk menunjukkan posisi keuangan suatu perusahaan pada suatu tanggal tertentu, biasanya pada waktu buku-buku ditutup dan ditentukan sisanya pada suatu akhir tahun fiskal atau tahun kalender, sehingga neraca sering disebut dengan *Balance Sheet*.

Pengertian neraca menurut **Jusuf** (1997, hlm. 21), adalah “suatu daftar yang menggambarkan aktifa (harta kekayaan), kewajiban dan modal yang dimiliki oleh suatu perusahaan pada suatu saat tertentu”.

2. Laporan Rugi Laba

Pengertian laporan rugi laba menurut **Harnanto** (1985, hlm.21), adalah “suatu laporan atas dasar sukses yang dicapai dan kegagalan yang diderita suatu perusahaan didalam menjalankan usahanya dalam jangka waktu (periode) tertentu itu dinilai atau diukur”. Sedangkan menurut **Jusuf** (1997, hlm. 54), adalah “...laporan rugi laba menggambarkan keberhasilan atau kegagalan operasi perusahaan dalam upaya mencapai tujuannya”. Tambahnya lagi “isi laporan rugi laba terdiri atas tiga komponen pokok, yakni: pendapatan, biaya, dan laba atau rugi”.

3. Lapcran Perubahan Modal atau Laporan Laba yang Ditahan

Menurut **Munawir** (2000, hlm. 27), “laba atau rugi yang timbul secara insidentil dapat diklasifikasikan tersendiri dalam laporan-laporan Rugi-Laba

atau dicantumkan dalam ‘Laporan Laba Yang Ditahan’ (*Retained earning statement*) atau dalam ‘Laporan Perubahan Modal’ tergantung pada konsep yang diambil perusahaan”. Ditambahkan pula, laporan rugi laba dan dalam laporan laba yang ditahan hanya berisi *net income* yang ditransfer dari laporan rugi laba, deklarasi (pembayaran) defiden, dan penyesihan dari laba (*appropriation of retained earning*). Menurut **Jusuf** (1997, hlm. 25) “laporan perubahan modal sering disebut sebagai ‘jembatan’ antara laporan rugi laba dengan laporan neraca”. Dikatakan lagi bahwa “...data laba atau rugi yang tercantum dalam laporan rugi laba pada akhirnya akan mempengaruhi modal yang tercantum dalam neraca. Pengaruh laba atau rugi terhadap modal diperhitungkan dalam laporan perubahan modal”.

Menurut **Harahap** (1999, hlm. 106) laporan keuangan dibedakan menurut jenisnya yaitu Laporan Keuangan Utama dan Laporan Keuangan Pendukung, yang dapat disebutkan sebagai berikut:

1. Daftar Neraca yang menggambarkan posisi keuangan perusahaan pada suatu tanggal tertentu;
2. perhitungan Laba Rugi yang menggambarkan jumlah hasil, biaya dan laba rugi perusahaan pada suatu periode tertentu;
3. laporan Sumber dan Penggunaan, yang memuat sumber dan pengeluaran perusahaan selama satu periode;
4. laporan Arus Kas yang menggambarkan sebagai sumber dan penggunaan kas dalam suatu periode;

5. laporan Harga Pokok Produksi yang menggambarkan unsur yang diperhitungkan dalam harga pokok produksi suatu barang. Dalam hal tertentu harga pokok produksi (HPPd) ini disatukan dalam laporan harga pokok penjualan (HPPj). $HPPj = HPPd + \text{persediaan awal} - \text{persediaan akhir}$. Harga pokok penjualan adalah harga pokok produksi ditambah dengan persediaan barang awal dikurangi persediaan barang akhir;
6. laporan Laba Ditahan, menjelaskan posisi laba ditahan yang tidak dibagikan kepada pemilik saham;
7. laporan Perubahan Modal, menjelaskan perubahan posisi modal baik saham dalam PT ataupun modal dalam perusahaan perseroan;
8. dalam suatu kajian dikenal Laporan Kegiatan Keuangan. Laporan ini menggambarkan transaksi laporan keuangan perusahaan yang mempengaruhi kas atau ekuivalen kas. Laporan ini jarang dipergunakan. Laporan ini merupakan rekomendasi Trueblood Committee tahun 1974.

2) Fungsi Laporan Keuangan

Menurut **Harnanto** (1985) dalam bukunya *Analisis Laporan Keuangan* yang disajikan kepada semua pihak yang terkait pada eksistensi suatu perusahaan mempunyai fungsi yang sangat penting. "...pada hakekatnya merupakan alat komunikasi. Artinya laporan keuangan itu adalah suatu alat yang digunakan untuk mengkomunikasikan informasi keuangan dari suatu perusahaan dan kegiatan-kegiatannya pada mereka yang berkepentingan dengan perusahaan tersebut". Dalam hal ini ada dua pihak yang berkepentingan, yaitu pihak intern dan pihak

ekstern. Dalam menyajikan laporan keuangan, antara pihak yang membutuhkan yaitu pihak intern dan ekstern berbeda. Laporan keuangan lebih ditujukan untuk pihak ekstern, namun demikian bukan berarti perusahaan tidak membutuhkan laporan keuangan. **Harnanto** (1985, hlm. 11) menyebutkan bahwa laporan yang disajikan pada perusahaan berisi informasi-informasi yang dapat dipergunakan perusahaan khususnya manajemen untuk:

1. Merumuskan, melaksanakan dan mengadakan penilaian terhadap kebijaksanaan-kebijaksanaan yang dianggap perlu;
2. mengorganisasi dan mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan atau aktifitas dalam perusahaan;
3. merencanakan dan mengendalikan kegiatan atau aktifitas sehari-hari (dalam) perusahaan;
4. mempelajari aspek, tahap-tahap kegiatan tertentu dalam perusahaan;
5. menilai keadaan atau posisi keuangan dan hasil usaha perusahaan.

Selain itu, laporan keuangan berfungsi sebagai pertanggungjawaban manajemen pada semua pihak yang menanamkan dan mempercayakan pengelolaan dananya di dalam perusahaan tersebut, terutama kepada pemilik. Oleh karena itu, laporan keuangan menurut fungsinya sangat penting terutama bagi pihak-pihak yang membutuhkan data atau informasi mengenai keuangan suatu perusahaan.

3) Tujuan Laporan Keuangan

Prinsip Akuntansi Indonesia (1984) menyatakan bahwa tujuan laporan keuangan adalah sebagai berikut:

1. Untuk memberikan informasi keuangan yang dapat dipercaya mengenai aktiva dan kewajiban serta modal suatu perusahaan;
2. untuk memberikan informasi yang dapat dipercaya mengenai perubahan dalam aktiva netto (aktiva-kewajiban) suatu perusahaan yang timbul dari kegiatan usaha dalam rangka memperoleh laba;
3. untuk memberikan informasi keuangan yang membantu para pemakai laporan didalam menaksir potensi perusahaan dalam menghasilkan laba;
4. untuk memberikan informasi penting lainnya mengenai perubahan dalam aktiva dan kewajiban suatu perusahaan, seperti informasi mengenai aktifitas pembiayaan dan investasi.

Harnanto (1984, hlm. 10-11), menyatakan bahwa laporan keuangan sebagai hasil akhir dari penyelenggaraan akuntansi di dalam suatu perusahaan, hanya mampu menghasilkan informasi sesuai dengan kegunaan akuntansi, yaitu:

1. Untuk mengukur sumber-sumber ekonomi yang dimiliki oleh perusahaan, seperti kas, persediaan, mesin dan alat pabrik;
2. untuk menentukan dan menggambarkan kewajiban-kewajiban dan modal atau hak-hak para pemilik dalam perusahaan, seperti: hutang dagang dan saham yang beredar;
3. untuk mengukur perubahan dalam sumber-sumber, kewajiban modal, seperti: berkurangnya kas untuk pembayaran hutang dagang, gaji dan upah;

4. untuk menentukan laba atau rugi periodik dari usaha perusahaan;
5. untuk menyatakan aspek lain-lain mengenai kegiatan perusahaan, dalam satuan mata uang sebagai alat pengukurnya.

2.2.1.3 Sifat dan Keterbatasan Laporan Keuangan

Menurut **Munawir** (2000, hlm. 6), “laporan keuangan dipersiapkan atau dibuat dengan maksud untuk memberikan gambaran atau laporan kemajuan (*Progress Report*) secara periodik yang dilakukan pihak manajemen yang bersangkutan”. Ini berarti laporan keuangan adalah hasil suatu *progress report* keuangan dan bersifat historis serta menyeluruh yang terdiri dari data-data suatu kombinasi antara:

- a. Fakta yang telah dicatat (*Recorded Fact*), yang berarti bahwa laporan keuangan ini dibuat atas dasar fakta-fakta dari catatan akuntansi dan segala sesuatunya bersifat historis.
- b. Prinsip-prinsip dan kebiasaan-kebiasaan didalam akuntansi (*accounting convention and postulate*), artinya data yang dicatat itu didasarkan pada prosedur maupun anggapan-anggapan tertentu yang merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang lazim (*general accepted accounting principles*); dengan kegunaan untuk memudahkan pencatatan (*expediensi*) atau untuk keseragaman.
- c. Pendapat pribadi (*personal judgment*) yang dimaksudkan bahwa pencatatan transaksi telah diatur oleh konvensi-konvensi atau dalil-dalil yang sudah ditetapkan dan menjadi standar praktek pembukuan, sedangkan judgment

tergantung pada kemampuan atau integritas pembuatnya yang dikombinasikan dengan fakta.

Mengingat sifat-sifat laporan keuangan, maka dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan tersebut mempunyai keterbatasan, seperti yang ditambahkan oleh **Munawir** (2000, hlm. 9) antara lain:

- a. Laporan keuangan bukan merupakan laporan yang final, karena itu hal-hal yang dilaporkan dalam laporan keuangan tidak menunjukkan realisasi atau nilai likuidasi dimana dalam interm report ini terdapat atau terkandung pendapat-pendapat pribadi;
- b. laporan keuangan menunjukkan angka dalam rupiah yang kelihatannya bersifat pasti dan tetap, tetapi sebenarnya dasar penyusunannya dengan standar nilai yang mungkin berbeda atau berubah-ubah;
- c. laporan keuangan disusun berdasarkan hasil pencatatan transaksi keuangan yang lalu, jadi suatu analisa dengan membandingkan data beberapa tahun tanpa membuat penyesuaian terhadap perubahan tingkat harga akan diperoleh kesimpulan yang keliru;
- d. laporan keuangan tidak mencerminkan berbagai faktor yang dapat mempengaruhi posisi atau keadaan keuangan perusahaan karena faktor-faktor tersebut tidak dinyatakan dengan satuan uang (*dikuantifisir*).

Menurut Prinsip-prinsip Akuntansi Indonesia (**Ikatan Akuntan Indonesia**, 1974, hlm. 14) menjelaskan tentang sifat dan keterbatasan laporan keuangan, sebagai berikut:

- a. Laporan keuangan ialah laporan yang bersifat sejarah dan terdapat keterbatasan dalam kegunaannya, karena masih diperlukan ramalan-ramalan oleh para investor.
- b. Laporan keuangan itu bersifat umum dan bukan untuk memenuhi keperluan tiap-tiap pemakai. Data-data yang disajikan dalam laporan keuangan itu berkaitan satu sama lain secara fundamental.
- c. Laporan keuangan itu sebagai hasil dari pemakaian stelsel timbulnya hak dan kewajiban dalam akuntansi. Dalam proses penyusunannya tidak dapat dilepaskan dari penaksiran-penaksiran dan pertimbangan-pertimbangan. Namun perlu diuji melalui bukti-bukti ataupun cara-cara penghitungan yang masuk akal.
- d. Laporan keuangan bersifat konservatif dalam sikapnya menghadapi ketidakpastian.
- e. Laporan keuangan itu lebih menekankan bagaimana keadaan sebenarnya peristiwa-peristiwa itu dilihat dari sudut pandang ekonomi dari pada berpegang pada formalnya.
- f. Laporan keuangan itu menggunakan istilah-istilah teknis, dalam hubungan ini sering kedatangan istilah-istilah umum yang dipakai diberikan pengertian yang khusus, di lain pihak laporan keuangan itu mengikuti kelaziman-kelaziman dan perkembangan dunia usaha.

Jadi laporan keuangan itu merupakan suatu daftar yang berdasarkan fakta-fakta memperlihatkan nilai dari perusahaan pada suatu waktu tertentu sesuai dengan kondisi ekonomi pada saat itu.

2.2.1.4 Arti Pentingnya Analisis Laporan Keuangan

Laporan keuangan dapat memberikan ihtisar atau gambaran mengenai keadaan finansial suatu perusahaan, perlu kita mengadakan interpretasi atau analisa terhadap data finansial dari perusahaan yang bersangkutan. Keadaan finansial tersebut tercermin dalam neraca dimana terdapat nilai aktiva, hutang, dan modal sendiri pada suatu saat tertentu dan laporan rugi laba yang di dalamnya terdapat hasil-hasil yang telah dicapai selama suatu periode tertentu, yang biasanya meliputi periode satu tahun.

Pengertian tentang analisa laporan keuangan oleh **Bernstein** (1983, hlm. 3), menjelaskan sebagai berikut: “Analisa laporan keuangan mencakup penerapan metode dan teknik analisis atas laporan keuangan dan data lainnya untuk melihat dari laporan itu ukuran-ukuran dan hubungan tertentu yang sangat berguna dalam proses pengambilan keputusan” (**Harahap**, 1999, hlm. 190). Sedangkan **Foster** (1986, hlm. 58) mengartikan analisa laporan keuangan yaitu: “Mempelajari hubungan-hubungan didalam suatu set laporan keuangan pada suatu saat tertentu dan kecenderungan-kecenderungan dari hubungan ini sepanjang waktu” (**Harahap**, 1999, hlm. 191). Menurut **Bernstein** (1983, hlm. 62), mengemukakan bahwa analisa laporan keuangan merupakan kebalikan dari kegiatan pembukuan. Jika proses pembukuan dimulai dari transaksi, dicatat ke buku, diproses dan akhirnya menjadi laporan keuangan. Kegiatan dimulai dari laporan keuangan ditelusuri ke buku sampai ke transaksi perusahaan (**Harahap**, 1999, hlm. 191).

Telah dikemukakan di muka, bahwa laporan keuangan sangat penting nilainya bagi pihak intern dan ekstern, mereka yang berkepentingan terhadap posisi keuangan dan perkembangan suatu perusahaan adalah:

1. Pemilik Perusahaan (Pemegang Saham)

Bagi pemilik perusahaan, laporan keuangan dimaksudkan untuk:

- a. Menilai prestasi atau hasil yang diperoleh manajemen.
- b. Mengetahui hasil deviden yang akan diterima.
- c. Menilai posisi keuangan perusahaan dan pertumbuhannya.
- d. Mengetahui nilai saham dan laba per lembar saham.
- e. Sebagai dasar untuk memprediksi perusahaan di masa yang akan datang.
- f. Sebagai dasar untuk mempertimbangkan menambah atau mengurangi investasi.

2. Manajemen Perusahaan

- a. Alat untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan kepada pemilik.
- b. Mengukur tingkat biaya dari setiap kegiatan operasi perusahaan, divisi, bagian atau segmen tertentu.
- c. Mengukur tingkat efisiensi dan tingkat keuntungan perusahaan, divisi, bagian atau segmen tertentu.
- d. Menilai hasil kerja individu yang diberi tugas dan tanggung jawab.
- e. Untuk menjadi bahan pertimbangan dalam menyusun perkara yang lebih baik dan memperbaiki sistem pengawasan serta menentukan kebijaksanaan yang lebih tepat.

3. Investor

- a. Menilai kondisi keuangan dan hasil usaha perusahaan.
 - b. Menilai kemungkinan menanamkan dana dalam perusahaan.
 - c. Menilai kemungkinan divestasi (menarik investasi) dari perusahaan.
 - d. Menjadi dasar untuk memprediksikan kondisi perusahaan di masa yang akan datang.
4. Kreditur atau Banker atau Supplier
- a. Menilai kondisi keuangan dan hasil usaha perusahaan, baik jangka pendek maupun jangka panjang
 - b. Menilai kualitas jaminan kredit atau investasi untuk menopang kredit yang akan diberikan
 - c. Melihat dan memprediksi prospek keuntungan yang mungkin diperoleh dari perusahaan atau menilai *rate of return* perusahaan.
 - d. Menilai kemampuan likuiditas, solvabilitas, rentabilitas perusahaan sebagai dasar dalam pertimbangan keputusan kredit.
 - e. Menilai sejauh mana perusahaan mengikuti perjanjian kredit yang sudah disepakati.
5. Pemerintah
- a. Menghitung dan menetapkan jumlah pajak yang harus dibayar oleh perusahaan.
 - b. Sebagai dasar dalam menetapkan kebijaksanaan baru
 - c. Menilai apakah perusahaan memerlukan bantuan atau tindakan lain.
 - d. Menilai kepatuhan perusahaan terhadap aturan yang telah ditetapkan.

- f. Bagi lembaga pemerintah lainnya, dapat dijadikan bahan penyusunan data dan statistik.

2.2.2 Evaluasi

2.2.2.1 Pengertian Evaluasi

Pengertian evaluasi menurut *Ensiklopedia Ekonomi* (1982, hlm. 399) adalah “menilai, menaksir, menghargai, atau menentukan suatu nilai; menetapkan harganya, jumlahnya, atau kapasitasnya sesuatu”. Pengertian evaluasi menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (1995, hlm. 401) adalah “penilaian: hasil, memberikan penilaian”.

2.2.2.2 Evaluasi Kinerja

Keberhasilan suatu organisasi bukan hanya tergantung pada bagaimana organisasi melaksanakan aktifitas kesehariannya semata, tetapi bagaimana aktifitasnya tersebut dalam suatu kerangka perencanaan strategi. Perusahaan yang efektif dan efisien dapat mendorong suatu inovasi untuk mempertajam arah dan peningkatan kelayakan kegiatan, program maupun kebijakan. Semua itu memerlukan usaha yang terencana.

Evaluasi kinerja menjadi hal yang penting untuk seluruh program manajemen publik, karena apa yang dapat diukur berarti dapat dikerjakan. Demikian menurut **Triyono** dalam *Jurnal Akuntansi dan Keuangan* (2002, hlm. 149), evaluasi kinerja akan memberikan beberapa manfaat sebagai berikut:

- a. Dapat meningkatkan **kuualitas** pengambilan keputusan.

- b. Menilai pertanggungjawaban pencapaian tujuan menjadi publik atas program-programnya.
- c. Membuat kebijakan anggaran.
- d. Mempertanggungjawabkan sumber daya yang dipercayakan.
- e. Mengelola kegiatan secara efisien.

Evaluasi kinerja didasarkan pada suatu indikator tertentu, ini berarti penentuan indikator kinerja menjadi penting. Dalam penetapan indikator, perusahaan perlu mengidentifikasi pengukuran yang dapat digunakan untuk menilai kinerja selama periode tertentu.

Evaluasi kinerja merupakan teknik penting lain yang digunakan untuk membangun tenaga kerja yang efektif. Dikemukakan oleh **Daft** dalam bukunya *Management* yang dialihbahasakan oleh **Salim, dkk** (2001, hlm. 537), evaluasi kinerja (*performance appraisal*) adalah “proses penentuan nilai atau manfaat dari suatu pekerjaan melalui kajian atas kandungan kerja”. Evaluasi kinerja ini menurutnya terdiri dari langkah-langkah pengamatan dan penilaian atas kinerja karyawan, pencatatan hasil evaluasi, dan penyediaan umpan balik kepada karyawan (2001, hlm. 532).

2.2.3 Kinerja

2.2.3.1 Pengertian Kinerja

Pengertian Kinerja berdasarkan *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (1995, hlm. 503) dapat diartikan sebagai “Sesuatu yang dicapai, prestasi yang diperlihatkan, kemampuan kerja (tentang peralatan). Berkinerja yaitu berkemampuan dengan

menggunakan tenaga”. Kinerja keuangan yang dimaksud di atas adalah menggambarkan kemampuan kerja manajemen dalam mencapai prestasi kerjanya. Dapat juga dikatakan bahwa prestasi yang diwujudkan melalui kerja yang telah dilakukan secara maksimal dan dituangkan dalam satu laporan.

Pengertian Kinerja oleh **Daft** dalam bukunya *Management* yang dialihbahasakan oleh **Salim, dkk** (2001, hlm. 15) menjelaskan bahwa “Kinerja adalah kemampuan organisasi untuk meraih tujuan-tujuannya melalui pemakaian sumber daya secara efisien dan efektif”. Kinerja dalam pengertian di atas lebih ditekankan kepada tanggung jawab organisasi secara keseluruhan atau atas sebuah departemen atau divisi. Sedangkan efektifitas (*Effectiveness*) organisasi menurutnya (2001, hlm. 14) adalah “Derajat seberapa jauh organisasi berhasil mencapai sasaran yang ditetapkan”. Lanjutnya, “efisiensi (*Efficiency*) organisasi berhubungan dengan jumlah sumber daya yang digunakan untuk mencapai sebuah tujuan organisasi”. Efisiensi didasarkan pada berapa banyak bahan baku, uang dan orang-orang yang diperlukan untuk menghasilkan suatu volume output.

2.2.3.2 Kinerja Keuangan

Harahap (1998, hlm. 190) menyatakan bahwa untuk mengetahui kinerja keuangan suatu perusahaan diperlukan suatu analisa laporan keuangan. Analisa laporan keuangan terdiri dari dua kata, yaitu analisa dan laporan keuangan. Kata ‘analisa’ adalah menguraikan sesuatu unit menjadi bagian unit terkecil. Sedangkan ‘laporan keuangan’ adalah neraca, laba rugi dan arus kas. Sehingga, menurutnya bila kedua pengertian ini digabungkan akan berarti menguraikan pos-

pos laporan keuangan menjadi unit informasi yang lebih kecil dan melihat hubungannya yang bersifat signifikan atau yang mempunyai makna antara satu dengan yang lain, baik antara data kuantitatif maupun data non kuantitatif dengan tujuan untuk mengetahui kondisi keuangan lebih dalam yang sangat penting dalam proses menghasilkan keputusan-keputusan yang tepat.

2.2.3.3 Penilaian Kinerja Perusahaan

Penilaian kinerja pada dasarnya merupakan penilaian perilaku manusia dalam melaksanakan peran yang dimainkan dalam mencapai tujuan organisasi. Pengertian penilaian kinerja menurut **Siegel** dan **Markoci** dalam bukunya *Behavioral Accounting*, yang dikutip oleh **Mulyadi** dalam bukunya *Akuntansi Manajemen: Konsep, Manfaat dan Rekayasa* adalah sebagai berikut: “Penilaian Kinerja adalah penentuan secara periodik efektifitas operasional suatu organisasi, bagian organisasi dan karyawannya berdasarkan sasaran, standar dan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya”, (**Mulyadi**, 1993, hlm. 419).

Dalam Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 826/KMK.013/1992 disebutkan bahwa: “Kinerja adalah prestasi yang dicapai oleh BUMN dalam suatu periode tertentu yang mencerminkan tingkat kesehatan BUMN”. Sedangkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 198/KMK.016/1998 Pasal 1 angka 1, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri BUMN Nomor: KEP-100/MBU/2002 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan BUMN, Pasal 1 angka 1 disebutkan bahwa: “Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya dalam keputusan ini disingkat BUMN, adalah Perusahaan Perseroan (PERSERO)

sebagaimana yang dimaksudkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 dan Perusahaan Umum (PERUM) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1998”.

Jadi tingkat kesehatan BUMN tercermin dalam peningkatan efisiensi dan produktivitasnya. Efisiensi dimaksud adalah kemampuan untuk memperoleh hasil tertentu dengan menggunakan masukan (input) yang serendah-rendahnya, sedangkan produktivitas yang dimaksud adalah kemampuan untuk memperoleh hasil yang sebesar-besarnya dengan menggunakan masukan (input) tertentu.

Siegel dan Marconi dalam bukunya *Behavioral Accounting*, yang dikutip oleh **Mulyadi** (1993, hal. 420) yang dikutip dalam bukunya *Akuntansi Manajemen: Konsep, Manfaat dan Rekayasa*, menerangkan mengenai manfaat penilaian kinerja bagi manajemen dan tahap penilaian kinerja. Manfaat penilaian kinerja bagi manajemen, adalah sebagai berikut:

1. Mengelola operasi organisasi secara efektif dan efisien melalui pemotivasian karyawan secara maksimum.
2. Membantu pengambilan keputusan yang bersangkutan dengan karyawan, seperti: promosi, transfer, dan pemberhentian.
3. Mengidentifikasi kebutuhan pelatihan dan pengembangan karyawan untuk menyediakan kriteria seleksi dan evaluasi program pelatihan karyawan.
4. Menyediakan umpan balik bagi karyawan mengenai bagaimana alasan mereka menilai kinerja mereka.
5. Menyediakan suatu dasar bagi distribusi penghargaan.

Lanjutnya, **Mulyadi** (1993, hlm. 424) menjelaskan tahap penilaian kinerja dilaksanakan dalam dua tahap utama, yaitu tahap persiapan dan tahap penilaian.

Tahap persiapan terdiri dari tiga tahap, yaitu:

1. Penentuan daerah pertanggungjawaban dan manajer yang bertanggung jawab.
2. Penentuan kriteria yang dipakai untuk mengukur kinerja.
3. Pengukuran kinerja sesungguhnya.

Sedangkan tahap penilaian terdiri dari tiga tahap, yaitu:

1. Perbandingan kinerja sesungguhnya dengan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.
2. Penentuan penyebab timbulnya penyimpangan kinerja sesungguhnya dari yang ditetapkan dalam standar.
3. Penegakan perilaku yang diinginkan dan tindakan yang digunakan untuk mencegah perilaku yang tidak diinginkan.

Sebagai salah satu Badan Usaha Milik Negara, dalam menilai tingkat kesehatan kinerja keuangan suatu perusahaan, PT. Kereta Api (Persero) mengacu pada Keputusan Menteri BUMN Nomor: KEP-100/MBU/2002 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Badan Usaha Milik Negara. Tingkat kesehatan BUMN ditetapkan berdasarkan penilaian terhadap kinerja yang meliputi: aspek keuangan, aspek operasional, dan aspek administrasi. Penilaian tingkat kesehatan BUMN, sesuai dengan surat keputusan tersebut, hanya diterapkan bagi BUMN apabila hasil pemeriksaan akuntan terhadap perhitungan tahunan perusahaan yang bersangkutan dinyatakan dalam kualifikasi 'Wajar Tanpa Pengecualian' atau

‘Wajar Dengan Pengecualian’ dari akuntan publik atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

BUMN Infrastruktur adalah BUMN yang kegiatannya menyediakan barang dan jasa untuk kepentingan masyarakat luas, yang bidang usahanya meliputi:

1. Pembangkitan transmisi atau pendistribusian tenaga listrik.
2. Pengadaan dan atau pengoperasian sarana pendukung, pelayanan angkutan barang atau penumpang baik laut, udara, atau kereta api.
3. Jalan atau jembatan tol, dermaga, pelabuhan laut atau sungai atau danau, lapangan terbang dan udara.
4. Bendungan dan irigasi.

Sedangkan tolak ukur mengenai Penilaian Tingkat Kesehatan Perusahaan BUMN, digolongkan menjadi:

1. Sehat, yang terdiri dari:
 - AAA apabila skor total (TS) lebih besar dari 95
 - AA apabila $80 < TS \leq 95$
 - A apabila $65 < TS \leq 80$
2. Kurang sehat, yang terdiri dari :
 - BBB apabila $50 < TS \leq 65$
 - BB apabila $40 < TS \leq 60$
 - B apabila $30 < TS \leq 40$

3. Tidak sehat, yang terdiri dari

CCC apabila $20 < TS \leq 30$

CC apabila $10 < TS \leq 20$

C apabila $TS < 10$

Tolak ukur penilaian tingkat kesehatan BUMN diatas berdasarkan penilaian terhadap kinerja perusahaan yang meliputi penilaian aspek keuangan, aspek operasional dan aspek administrasi. Sedangkan dalam penelitian ini, penulis melakukan analisa terhadap aspek keuangannya saja.

PT. KAI (Persero) merupakan salah satu perusahaan BUMN Infrastruktur dimana indikator penilaian tingkat kesehatannya disesuaikan dengan penilaian BUMN Infrastruktur dengan total bobot 50 menurut Kep Men BUMN NO:KEP-100/MBU/2002. Sehingga indikator berdasarkan aspek keuangan dapat diubah menjadi:

1. Sehat, yang terdiri dari:

AAA apabila skor total (TS) lebih besar dari 47,5

AA apabila $40 < TS \leq 47,5$

A apabila $32,5 < TS \leq 40$

2. Kurang sehat, yang terdiri dari :

BBB apabila $25 < TS \leq 32,5$

BB apabila $20 < TS \leq 25$

B apabila $15 < TS \leq 20$

3. Tidak sehat, yang terdiri dari

CCC apabila $10 < TS \leq 15$

CC apabila $5 < TS \leq 10$

C apabila $TS < 5$

Adapun indikator penilaian kinerja keuangan beserta bobotnya untuk BUMN Infrastrktur, adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1
Daftar Indikator dan Bobot Aspek Keuangan

INDIKATOR	BOBOT
Return On Equity (ROE)	15
Return On Investment (ROI)	10
Cash Ratio	3
Current Ratio	4
Collection Periods	4
Inventory Turn Over	4
Total Assets Turn Over	4
Total Equity to Total assets	6
Total Bobot	50

Sumber : Keputusan. Menteri BUMN No: KEP-100/MBU/2002

2.2.4 Rasio Keuangan Menurut Keputusan Menteri BUMN Nomor: KEP-100/MBU/2002

Analisis rasio merupakan langkah pertama dalam analisis keuangan, yang dirancang untuk memperlihatkan hubungan di antara perkiraan-perkiraan laporan keuangan. Dalam melakukan penilaian kinerja keuangan perusahaan BUMN, digunakan indikator metode penilaian yang disesuaikan dengan Keputusan Menteri BUMN No: KEP-100/MBU/2002, sebagai berikut:

1. *Return On Equity* (ROE)

Perhitungan dilakukan dengan menggunakan rumus:

$$\text{ROE} = \frac{\text{Laba setelah pajak}}{\text{Modal sendiri}} \times 100\%$$

Menurut **Weston** dan **Brigham** dalam bukunya *Dasar-dasar Manajemen Keuangan* yang dialihbahasakan oleh **Sirait** (1994, hlm, 305), menerangkan bahwa "*Return On Equity* adalah rasio laba bersih setelah pajak terhadap ekuitas saham biasa; rasio ini mengukur tingkat pengambilan atas investasi bagi pemegang saham biasa". Menurut Keputusan Menteri BUMN No: KEP-100/MBU/2002, laba setelah pajak adalah laba setelah pajak dikurangi dengan laba hasil penjualan dari aktiva tetap, aktiva non produktif, aktiva lain-lain dan saham penyertaan langsung; serta seluruh modal sendiri adalah seluruh komponen modal sendiri dalam neraca perusahaan pada posisi akhir tahun buku dikurangi dengan komponen modal yang digunakan untuk membiayai aktiva tetap dalam pelaksanaan dan laba tahun berjalan. Dalam modal sendiri tersebut termasuk komponen kewajiban yang belum ditetapkan statusnya. Aktiva tetap dalam pelaksanaan adalah posisi pada akhir tahun buku aktiva yang sedang dalam tahap pembangunan.

Tabel 2.2
Daftar Skor Penilaian Return On Equity

Return On Equity (%)	Skor
15 < ROE	15
13 < ROE ≤ 15	13,0
11 < ROE ≤ 13	12
9 < ROE ≤ 11	10,5
7,9 < ROE ≤ 9	9
6,6 < ROE ≤ 7,9	7,5
5,3 < ROE ≤ 6,6	6
4 < ROE ≤ 5,3	5
2,5 < ROE ≤ 4	4
1 < ROE ≤ 2,5	3
0 < ROE ≤ 1	1,5
ROE ≤ 0	1

Sumber : Keputusan Menteri BUMN No: KEP-100/MBU/2002

2. Return On Investment (ROI)

Perhitungan dilakukan dengan menggunakan rumus:

$$\text{ROI} = \frac{\text{EBIT} + \text{Penyusutan}}{\text{Capital Employeed}} \times 100\%$$

Pengertian *Return On Investment* menurut **Sartono**, dalam bukunya *Manajemen Keuangan Teori dan Aplikasi*, (1995, hlm. 123) menjelaskan bahwa “*Return On Investment* menunjukkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba dari aktiva yang dipergunakan”. Menurut Keputusan Menteri BUMN No: KEP-100/MBU/2002, menerangkan bahwa EBIT adalah laba sebelum bunga dan pajak dikurangi laba dari hasil penjualan dari aktiva tetap, aktiva lain-lain, aktiva non produktif dan saham penyertaan langsung. Sedangkan *capital employed* adalah posisi pada akhir tahun buku total aktiva dikurangi aktiva tetap dalam pelaksanaan.

Tabel 2.3
Daftar Skor Penilaian Return On Investment

Return On Investment (%)	Skor
18 < ROI	10
15 < ROI ≤ 18	9
13 < ROI ≤ 15	8
12 < ROI ≤ 13	7
10,5 < ROI ≤ 12	6
9 < ROI ≤ 10,5	5
7 < ROI ≤ 9	4
5 < ROI ≤ 7	3,5
3 < ROI ≤ 5	3
1 < ROI ≤ 3	2,5
0 < ROI ≤ 1	2
ROI < 0	0

Sumber : Keputusan Menteri BUMN No: KEP-100/MBU/2002

3. Cash Ratio

Perhitungan dilakukan dengan rumus:

$$\text{Cash Ratio} = \frac{\text{Kas} + \text{Bank} + \text{Surat berharga jangka pendek}}{\text{Current Liabilities}} \times 100\%$$

Pengertian Cash Ratio menurut **Riyanto** dalam bukunya *Dasar-dasar Pembelanjaan Perusahaan* (1994, hlm. 332), menjelaskan bahwa “Cash Ratio adalah kemampuan untuk membayar hutang yang segera harus dipenuhi dengan kas yang tersedia dalam perusahaan dan efek yang segera dapat diluangkan”. Menurut Keputusan Menteri BUMN No: KEP-100/MBU/2002, menjelaskan bahwa kas, bank dan surat berharga jangka pendek adalah posisi masing-masing pada akhir tahun buku, dan *current liabilities* adalah posisi seluruh kewajiban lancar pada akhir tahun buku.

Tabel 2.4
Daftar Skor Penilaian Cash Ratio

Cash Ratio (%)	Skor
$X \geq 35$	3
$25 \leq x < 35$	2,5
$15 \leq x < 25$	2
$10 \leq x < 15$	1,5
$5 \leq x < 10$	1
$0 \leq x < 5$	0

Sumber : Keputusan Menteri BUMN No: KEP-100/MBU/2002

4. *Current Ratio*

Perhitungan dilakukan dengan menggunakan rumus:

$$\text{Current Ratio} = \frac{\text{Current Assets}}{\text{Current Liabilities}} \times 100\%$$

Menurut **Weston** dan **Brigham** dalam bukunya *Dasar-dasar Manajemen* yang dialihbahasakan oleh **Sirait** (1994, hlm. 295), menerangkan bahwa “*Current Ratio* (rasio Lancar) menunjukkan sampai sejauh mana tagihan-tagihan jangka pendek dari para kreditur dapat dipenuhi dengan aktiva yang diharapkan akan dikonversi menjadi uang tunai dalam waktu dekat”. Menurut Keputusan Menteri BUMN No: KEP-100/MBU/2002, menjelaskan bahwa *current asset* adalah posisi total aktiva lancar pada akhir tahun buku. Sedangkan *current liabilities* adalah posisi total kewajiban lancar pada akhir tahun buku.

Tabel 2.5
Daftar Skor Penilaian Current Ratio

Current Ratio (%)	Skor
$125 \leq x$	3
$110 \leq x < 125$	2,5
$100 \leq x < 110$	2
$95 \leq x < 100$	1,5
$90 \leq x < 95$	1
$X < 5$	0

Sumber : Keputusan Menteri BUMN No: KEP-100/MBU/2002

5. Collection Periods

Perhitungan dilakukan dengan menggunakan rumus:

$$\text{Collection Perriods} = \frac{\text{Total piutang usaha}}{\text{Total pendapatan usaha}} \times 365 \text{ hari}$$

Menurut **Sartono**, dalam bukunya *Manajemen Keuangan Teori dan Aplikasi* (1995, hlm. 117), menerangkan bahwa “periode pengumpulan piutang adalah hari yang diperlukan untuk mengubah piutang menjadi kas”. Sedangkan definisi menurut Keputusan Menteri BUMN No: KEP-100/MBU/2002 mengenai total piutang usaha adalah posisi piutang usaha setelah dikurangi cadangan penyisihan piutang pada akhir tahun buku. Sedangkan total pendapatan usaha adalah jumlah pendapatan usaha selama tahun buku.

Tabel 2.6
Daftar Skor Penilaian Collection Periods

Collection Periods (hari)	Skor
$x \leq 60$	4
$60 < x \leq 90$	3,5
$90 < x \leq 120$	3
$120 < x \leq 150$	2,5
$150 < x \leq 180$	2
$180 < x \leq 210$	1,6
$210 < x \leq 240$	1,2
$240 < x \leq 270$	0,8
$270 < x \leq 300$	0,4
$300 < x$	0

Sumber : Keputusan Menteri BUMN No: KEP-100/MBU/2002

6 Perputaran Persediaan

Perhitungan dilakukan dengan menggunakan rumus:

$$\text{Perputaran Persediaan} = \frac{\text{Total persediaan}}{\text{Total pendapatan usaha}} \times 365 \text{ hari}$$

Menurut **Weston** dan **Brigham** dalam bukunya *Dasar-dasar Manajemen* yang dialihbahasakan oleh **Sirait** (1994, hlm. 296), menerangkan bahwa “Rasio Perputaran Persediaan adalah rasio yang dihitung dengan jalan membagi penjualan dengan persediaan”. Pengertian Total Persediaan menurut Keputusan Menteri BUMN No: KEP-100/MBU/2002 adalah seluruh persediaan yang digunakan untuk proses produksi pada akhir tahun buku yang terdiri dari persediaan bahan baku, persediaan barang setengah jadi dan persediaan barang jadi ditambah persediaan peralatan dan suku cadang. Sedangkan pengertian Total Pendapatan Usaha adalah total pendapatan usaha dalam tahun buku yang bersangkutan.

Tabel 2.7
Daftar Skor Penilaian Perputaran Persediaan

Perputaran Persediaan (hari)	Skor
$x \leq 60$	4
$60 < x \leq 90$	3,5
$90 < x \leq 120$	3
$120 < x \leq 150$	2,5
$150 < x \leq 180$	2
$180 < x \leq 210$	1,6
$210 < x \leq 240$	1,2
$240 < x \leq 270$	0,8
$270 < x \leq 300$	0,4
$300 < x$	0

Sumber : Keputusan Menteri BUMN No: KEP-100/MBU/2002

7. Total Asset Turn Over (TATO)

Perhitungan dilakukan dengan menggunakan rumus:

$$\text{Total Asset Turn Over} = \frac{\text{Total Pendapatan}}{\text{Capital Employed}} \times 100\%$$

Menurut **Weston** dan **Brigham** dalam bukunya *Dasar-dasar Manajemen* yang dialihbahasakan oleh **Sirait** (1994, hlm. 299), menerangkan bahwa “Rasio Perputaran Total Aktiva (Total Asset Turn Over) merupakan rasio pengelolaan aktiva yang mengukur perputaran atau pemanfaatan dari semua aktifa perusahaan”. Menurut Keputusan Menteri BUMN No: KEP-100/MBU/2002 menerangkan definisi total pendapatan yaitu total pendapatan usaha dan non usaha tidak termasuk pendapatan hasil penjualan aktifa tetap. Sedangkan *capital employed* adalah posisi pada akhir tahun buku total aktiva dikurangi aktiva tetap dalam pelaksanaan.

Tabel 2.8
Daftar Skor Penilaian Perputaran Total Asset

Perputaran TATO (hari)	Skor
$120 < x$	4
$105 < x \leq 120$	3,5
$90 < x \leq 105$	3
$75 < x \leq 90$	2,5
$60 < x \leq 75$	2
$40 < x \leq 60$	1,5
$20 < x \leq 40$	1
$x \leq 20$	0,5

Sumber : Keputusan Menteri BUMN No: KEP-100/MBU/2002

8. Rasio Total Modal Sendiri Terhadap Total Asset

Perhitungan dilakukan dengan menggunakan rumus:

$$\text{TMS} = \frac{\text{Total modal sendiri}}{\text{Total asset}} \times 100\%$$

Menurut Keputusan Menteri BUMN No: KEP-100/MBU/2002 menjelaskan bahwa pengertian total modal sendiri adalah seluruh komponen modal sendiri pada akhir tahun buku di luar dana-dana yang belum ditetapkan statusnya. Sedangkan total asset dikurangi dengan dana-dana yang belum ditetapkan statusnya pada posisi akhir tahun buku yang bersangkutan.

Tabel 2.9
Daftar Skor Penilaian Rasio Modal Sendiri Terhadap Total Asset

	TMS terhadap TA (%)	Skor
$x < 0$		0
$0 \leq x < 10$		2
$10 \leq x < 20$		3
$20 \leq x < 30$		4
$30 \leq x < 40$		6
$40 \leq x < 50$		5,5
$50 \leq x < 60$		5
$60 \leq x < 70$		4,0
$70 \leq x < 80$		4,25
$80 \leq x < 90$		4
$90 \leq x < 100$		3,5

Sumber : Keputusan Menteri BUMN No: KEP-100/MBU/2002

Adapun cara perhitungan kinerja BUMN, adalah sebagai berikut:

1. Menghitung rasio-rasio yang telah ditentukan dalam indikator-indikator penilaian.
2. Mengukur perolehan nilai dari indikator tersebut dengan skor yang telah ditetapkan.
3. Menjumlahkan keseluruhan skor tersebut.
4. Menggolongkan tingkat kesehatan kinerja keuangan perusahaan BUMN dengan cara mencocokkannya dengan kategori kesehatan kinerja yang telah ditetapkan.

2.2.5 Pengertian Perubahan (Ditinjau Dari Segi Manajemen)

Perubahan merupakan kata yang sering dipakai di halaman-halaman bisnis di surat kabar di dunia. Menurut **Gibson, Donnely, dan Ivancevic** dalam bukunya *Manajemen* yang telah dialihbahasakan oleh **Tjiptowardoyo dan Nurmawan** (1995, hlm. 127), menjelaskan bahwa “Perubahan adalah suatu kondisi yang

mudah menyebar, terus menerus dan permanen bagi semua organisasi. Para Manajer yang efektif harus memandang bahwa mengelola perubahan adalah tanggung jawab integral, bukan tanggung jawab tambahan. Namun kita harus menerima kenyataan bahwa tidak semua organisasi akan berhasil membuat perubahan”.

Upaya mengadakan perubahan mungkin memusatkan perhatian pada cara organisasi disusun, perilaku pegawai atau teknologi yang digunakan dalam menyelesaikan pekerjaan.

2.2.6 Pengertian Badan Hukum

Hukum menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (1995, hlm.) adalah “Peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang di keluarkan oleh penguasa, pemerintah/otoritas; undang-undang, peraturan dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat; patokan (kaidah/ketentuan) mengenai peristiwa (alam dan sebagainya) yang tertentu; keputusan (pertimbangan) yang ditetapkan oleh hakim (dulu pengadilan); vonis”.

Dewasa ini dalam pergaulan hukum dan kepustakaan, istilah badan hukum sudah lazim digunakan bahkan sudah menjadi hukum yang resmi di Indonesia. Menurut **Ali** dalam bukunya *Badan Hukum* (1981, hlm.14) menyatakan bahwa “Badan Hukum merupakan terjemahan istilah hukum Belanda yaitu *rechtsperson*”. Badan Hukum merupakan subyek hukum selain manusia yang mencakup hal sebagai berikut (**Ali**, 1931, hlm.21):

- a. Perkumpulan orang (organisasi);

- b. dapat melakukan perbuatan hukum, dalam hubungan-hubungan hukum;
- c. mempunyai harta kekayaan tersendiri;
- d. mempunyai pengurus;
- e. mempunyai hak dan kewajiban;
- f. dapat menggugat atau digugat di depan pengadilan.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa Badan Hukum itu adalah segala sesuatu yang berdasarkan tuntutan kebutuhan masyarakat yang demikian itu oleh hukum diakui sebagai pendukung hak dan kewajiban. Badan Hukum yang dimaksud menurut **Widjaya** (2000, hlm. 128) adalah PT, Negara, Badan-Badan Internasional dan lain-lain sejenisnya.

2.2.7 Pengertian Perusahaan

Arti Perusahaan menurut **Kansil** (1995, hlm. 1) "...adalah suatu pengertian ekonomi yang dipakai dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), namun KUHD sendiri tidak memberikan penafsiran atau penjelasan resmi tentang apakah perusahaan itu". Lanjutnya dikatakan bahwa suatu perusahaan harus mempunyai unsur-unsur:

- a. Terus-menerus atau tidak terputus-putus;
- b. secara terang-terangan (karena berhubungan dengan pihak ketiga);
- c. dalam kualitas tertentu (karena dalam lapangan perniagaan);
- d. menyerahkan barang-barang;
- e. mengadakan perjanjian-perjanjian perdagangan;
- f. harus bermaksud memperoleh laba.

2.2.7.1 Perusahaan Negara

Perusahaan Negara yaitu perusahaan yang modalnya dimiliki oleh Negara dan merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan selain itu ada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang bisa berupa Perusahaan Daerah (PD) atau bisa berupa PT. Perusahaan Negara menurut Undang-Undang Nomor 19 Prp Tahun 1960 adalah semua perusahaan dalam bentuk apapun yang modalnya untuk seluruhnya merupakan kekayaan Negara RI, kecuali ditentukan lain berdasarkan undang-undang. Perusahaan Negara dibedakan antara :Perusahaan Jawatan (PERJAN), Perusahaan Umum(PERUM), dan Perusahaan Perseroan(PERSERO).

BUMN menurut **Widjaya** (2000, hlm. 71), adalah "...perusahaan milik negara yang melakukan kegiatan menghasilkan barang dan jasa serta mengelola sumber-sumber alam yang menguasai hajat hidup orang banyak untuk kepentingan masyarakat". Dalam menjalankan usahanya, kegiatan BUMN lebih ditunjukkan untuk memberikan pelayanan umum kepada masyarakat. Tetapi BUMN juga mempunyai misi untuk mencari laba, khususnya pada Perum dan Persero.

Menurut Keputusan Menteri BUMN No: KEP-100/MBU/2002 tidak dijelaskan tentang pengertian Perusahaan Negara, hanya disebutkan mengenai BUMN yang mana BUMN tersebut berbentuk Perusahaan^{Perseroan} (PERSERO) dan Perusahaan Umum (PERUM). Tetapi istilah Perusahaan Jawatan (PERJAN) tidak lagi termasuk kategori perusahaan BUMN. Namun penulis merasa perlu untuk menjelaskan pengertian Perusahaan Negara sebagaimana yang telah dikategorikan oleh **Widjaya** (2000, hlm. 71).

1) Perusahaan Jawatan

Perusahaan Jawatan atau PERJAN (*Departement Agency*) adalah semua perusahaan yang didirikan dan diatur menurut ketentuan-ketentuan *IBW Stb. 1927:419*, dan berdasarkan Penjelasan Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 1967 tentang Pengarahan dan Penyederhanaan Perusahaan Negara kedalam tiga Bentuk Usaha Negara, maka ciri-ciri pokok PERJAN adalah sebagai berikut:

- Makna Usaha adalah “public service” artinya pengabdian serta pelayanan kepada masyarakat dengan syarat-syarat efisiensi dan efektivitas serta dilakukan secara ekonomis(kehematan) dan manajemen yang efektif dengan cara yang baik dan memuaskan
- Sebagai salah satu bagian dari susunan Departemen/Direktorat Jendral/Pemerintahan Daerah maka PERJAN mempunyai hubungan hukum public.
- Hubungan usaha antara Pemerintah yang melayani dan masyarakat yang dilayani, sekalipun terdapat bantuan/subsidi, harus selalu didasarkan pada *business-zakelijk, costs accounting principles* dan *management effectiveness*.
- Pengawasan dilakukan baik secara hirarki maupun secara fungsional seperti bagian-bagian lain dari suatu Departemen/Pemerintahan Daerah.

2) Perusahaan Umum

Perusahaan Umum atau PERUM (*Public Corporation*) merupakan salah satu bentuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang diatur menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 13 Tahun 1998 tanggal 17 Januari 1998 dan

Undang-undang No. 9 Tahun 1969 tentang Bentuk-bentuk Usaha Negara. Modal PERUM seluruhnya dimiliki oleh negara yaitu berupa kekayaan negara yang dipisahkan. Modal PERUM ini tidak dibagi atas saham.

Maksud dan tujuan PERUM adalah menyelenggarakan usaha yang bertujuan untuk kemanfaatan umum atau *publik utility* berupa penyediaan barang dan atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus memupuk keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan. Sifat usaha PERUM lebih berat pada pelayanan demi kemanfaatan umum, baik pelayanan maupun penyediaan barang dan jasa. Meskipun demikian, sebagai badan usaha diupayakan untuk tetap mandiri. Oleh karena itu, PERUM harus mendapat laba agar bisa hidup berkelanjutan. Ini berarti pada prinsipnya secara finansial, PERUM harus berdiri sendiri, kecuali apabila karena politik Pemerintah mengenai tarif dan harga tidak mengijinkan tercapainya tujuan ini.

Pengadaan barang dan jasa PERUM yang menggunakan dana langsung dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pelaksanaan APBN. Pinjaman luar negeri dilakukan oleh PERUM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang masih berlaku.

3) Perusahaan Perseroan

Perusahaan Perseroan atau PERSERO (*Public Company*) adalah merupakan salah satu bentuk usaha Negara yang timbul kemudian dalam upaya Pemerintah untuk mengatur bentuk-bentuk usaha Negara yang semula berbentuk PN atau

Perusahaan Negara berdasarkan Undang-undang No. 9 Prp. Tahun 1960. namun kemudian ternyata Usaha Negara dalam bentuk PN ini dirasakan tidak efisien.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah mengenai PERSERO (PP No. 12 Tahun 1998), maka dalam Pasal 1 diatur bahwa PERSERO adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dibentuk berdasarkan Undang-undang No. 9 Tahun 1969 yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) yang seluruh atau paling sedikit 51% saham yang dikeluarkan dimiliki oleh Negara melalui penyertaan modal secara langsung.

PERSERO didirikan dengan maksud dan tujuan:

- a. Menyediakan barang dan atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat baik di pasar dalam negeri maupun internasional atau meningkatkan nilai PERSERO.
- b. Hal ini akan dicapai apabila PERSERO yang bersangkutan dapat memenuhi permintaan pasar melalui penyediaan barang dan atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat baik di pasar dalam negeri maupun internasional. Jika keuntungan usaha sebagai hasil kinerja PERSERO dapat meningkatkan nilai PERSERO yang bersangkutan, maka hal ini akan memberikan manfaat bagi pemegang saham, karyawan dan kreditur; dan
- c. memupuk keuntungan guna meningkatkan nilai perusahaan.
- d. PERSERO dengan sifat usaha tertentu dapat melaksanakan tugas khusus untuk menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum, dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan PERSERO.

- e. Meskipun PERSERO didirikan dengan maksud dan tujuan untuk mencari keuntungan, namun PERSERO dapatlah didirikan untuk melaksanakan penugasan khusus, yakni PERSERO yang sifat usahanya untuk melaksanakan pelayanan kepentingan masyarakat luas dan adanya kebutuhan yang mendesak.

Dalam PERSERO diukur juga tingkat kesehatan yang ditetapkan setiap tahun yang merupakan hasil pengurusan oleh Direksi. Tingkat kesehatan tersebut dibedakan atas Sehat, Kurang Sehat dan Tidak Sehat. Perbedaan tingkat kesehatan dimaksudkan di atas dilakukan sesuai dengan kondisi keuangan dan sifat penugasan PERSERO. Keputusan Menteri BUMN No: KEP-100/MBU/2002 mengenai tingkat kinerja didasarkan pada kriteria ekonomis dan kriteria lain yang perlu diperhatikan. Termasuk di dalam kriteria ekonomis adalah ukuran Rentabilitas, Likuiditas dan Solvabilitas (RSL) dengan bobot tertentu. PERSERO yang sehat selama 2 (dua) tahun berturut-turut dapat mempersiapkan diri dan mengambil langkah-langkah untuk menjadi PERSERO Terbuka.

BAB III

OBJEK DAN METODE PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan kerangka pemikiran yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, maka obyek penelitian yang akan diteliti adalah mengenai kinerja keuangan pada PT. Kereta Api (Persero) sebelum dan setelah perubahan status badan hukum perusahaan menjadi perusahaan perseroan.

Dalam penelitian ini kinerja keuangan diukur menggunakan acuan Keputusan Menteri BUMN No. KEP-100/MBU/2002 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan BUMN. Dalam laporan perhitungan rugi laba perusahaan sebelum dan sesudah perubahan status menjadi perusahaan perseroan terdapat perubahan terutama pada sisi pendapatan dan Biaya Operasi Tak Langsung (BOTL). Perubahan ini dimulai sejak dikeluarkannya Surat Keputusan Bersama 3 (Tiga) Menteri yaitu Menteri Perhubungan, Menteri Keuangan, dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan, masing-masing dengan No. KM 19/Tahun 1999, No. 83/KMK.03/1999 dan No. KEP. 024/K/03/1999 tanggal 4 Maret 1999 (SKB 3 Menteri), yang dimaksud untuk lebih meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan peningkatan pelayanan angkutan kereta api. Surat Keputusan tersebut mengatur pembagian kewajiban atau tanggung jawab yang wajib diemban baik oleh Pemerintah maupun oleh Perseroan berkenaan dengan jasa angkutan kereta api.

Pada sisi pendapatan sesudah dikeluarkannya SKB 3 Menteri tersebut terdapat komponen *Public Service Obligation* (PSO), yang berupa subsidi pemerintah kepada penumpang kereta api untuk kelas ekonomi yang dihitung berdasarkan selisih antara

biaya yang dikeluarkan untuk operasi kereta api sesuai dengan kriteria dan tolak ukur pelayanan umum angkutan kereta api dengan biaya angkutan penumpang yang tarifnya ditetapkan oleh pemerintah. Sedangkan pada sisi Biaya Operasi Tak Langsung (BOTL) sesudah diberlakukannya SKB 3 Menteri terdapat komponen Infrastruktur *Maintenance and Operation* (IMO) yaitu bentuk subsidi yang harus disediakan pemerintah sesuai dengan UU No. 13 Tahun 1992 dimana prasarana pokok kereta api tidak lagi merupakan aset perseroan melainkan menjadi aset pemerintah. Oleh karena itu pemerintah memiliki kewajiban untuk membiayai perawatan dan pengoperasian prasarana pokok tersebut. Di lain pihak, karena prasarana pokok kereta api merupakan aset pemerintah, maka persero sebagai pengguna prasarana pokok tersebut wajib membayar biaya penggunaan (retribusi) kepada pemerintah. Biaya ini disebut *Track Access Charge* (TAC). Realisasi ketiga komponen tersebut tercermin dalam laporan rugi laba setelah perubahan status badan hukum PT. Kereta Api menjadi Perusahaan Perseroan. Pada saat statusnya Perusahaan Umum, dalam laporan rugi laba tidak dicantumkan komponen-komponen tersebut. Hanya pada saat berstatus Perusahaan Umum, pada sisi pendapatan terdapat kompensasi pemerintah. Dan ketika berstatus perseroan, kompensasi pemerintah berubah menjadi komponen PSO.

Dalam perhitungan neraca, perubahan juga terjadi pada sisi kewajiban jangka panjang perusahaan. Setelah diberlakukannya *Sub Loan Agreement* (SLA) yang merupakan penerusan pinjaman Pemerintah Indonesia No. SLA-946/DP3/1997 tanggal 15 April 1997 dalam rangka penggunaan dana dari *Internasional Bank of Reconstruction and Development* (IBRD), maka dalam neraca pada sisi kewajiban

jangka panjang terdapat hutang *Sub Loan Agreement* yang pada saat berstatus Perusahaan Umum tidak terdapat kewajiban seperti yang disebutkan di atas.

Adapun data yang dipilih untuk diteliti adalah data pada saat berstatus Perusahaan Umum dengan mengambil 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 1994 sampai dengan 1998, dan pada saat berstatus Perusahaan Perseroan dengan mengambil 4 (empat) tahun yaitu dari tahun 1999 sampai dengan 2002. Dari data tersebut diharapkan akan diperoleh suatu gambaran pada laporan keuangan yang menyatakan adanya perbedaan kinerja keuangan setelah perusahaan merubah nama dan status badan hukumnya menjadi Perusahaan Perseroan.

3.1.1 Lokasi Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Kantor Pusat PT. Kereta Api (Persero) Jl. Perintis Kemerdekaan No. 1 Bandung dan Perpustakaan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.

3.1.2 Sejarah Singkat dan Perkembangan PT. Kereta Api (Persero)

Kehadiran kereta api di Indonesia ditandai dengan pencangkulan pertama oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda, Mr. L.A.J Baron Sloet van den Beele yang membangun jalan kereta api di desa Kemijen pada tanggal 17 Juni 1864. pembangunan diprakarsai oleh '*Naamlooze Venootschap Nederlandsch Indische Spooreweg Maatschappij*' (NV. NISM) yang dipimpin oleh *Ir. J.P de Bordes* dari Kemijen menuju Desa Tanggung (25 Km) dengan lebar sepur 1435 mm. Ruas jalan ini dibuka untuk angkutan umum tanggal 10 Agustus 1867.

Keberhasilan swasta, NV. NISM membangun jalan kereta api antara Kemijen-Tanggung, yang kemudian pada tanggal 10 Februari 1870 dapat menghubungkan kota Semarang-Surakarta (110 Km), akhirnya mendorong minat investor untuk membangun jalan kereta api di daerah lainnya. Tidak mengherankan, kalau pertumbuhan panjang jalan rel antara 1864 sampai 1900 tumbuh dengan cepat.

Selain di Jawa, pembangunan jalan kereta api dilakukan di Sumatera Selatan (1914), Sumatera Barat (1891), Sumatera Utara (1886), Aceh (1874), bahkan tahun 1922 di Sulawesi juga telah dibangun jalan kereta api sepanjang 47 Km antara Makasar-Takalar, yang pengoperasiannya dilakukan tanggal 1 Juli 1923, sisanya Ujung Pandang-Maros belum sempat diselesaikan. Sedangkan di Kalimantan meskipun belum sempat dibangun, studi jalan kereta api Pontianak-Sambas (220 Km) sudah diselesaikan. Demikian juga di Pulau Bali dan Lombok, juga pernah dilakukan studi pembangunan jalan kereta api.

Sampai tahun 1939, panjang jalan kereta api di Indonesia mencapai 6.811 Km. Tapi, pada tahun 1950 panjangnya berkurang menjadi 5.910 Km, kurang lebih 901 Km raib, yang diperkirakan karena dibongkar semasa pendudukan Jepang dan di angkut ke Burma untuk pembangunan jalan kereta api di sana. Sedangkan pada pendudukan Jepang, seluruh lintasan diambil alih oleh bala tentara Jepang, untuk pengelolaannya Jepang membentuk sebuah perusahaan dengan nama "*Rikuku Kyoku*" yang kemudian dirubah menjadi "*Tedsudo Kyoku*" yang berkantor pusat di Bandung. Sedangkan untuk jaringan kereta api Sumatera diberi nama "*Tedsudo Tai*" yang berkantor pusat di Bukit Tinggi.

Setelah kemerdekaan Indonesia diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945, karyawan kereta api yang tergabung dalam "*Angkatan Moeda Kereta Api*" (AMKA)

mengambil alih kekuasaan perkeretaapian dari tangan Jepang. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 28 September 1945 yang kemudian ditetapkan sebagai Hari Kereta Api Indonesia serta dibentuknya "*Djawatan Kereta Api Republik Indonesia*" (DKARI).

Meskipun DKARI telah terbentuk, namun tidak semua perusahaan kereta api telah menyatu. Sedikitnya, ada 11 perusahaan kereta api swasta di Jawa dan 1 swasta (*Deli Spoorweg Maatschapij*) di Sumatera Utara yang masih terpisah dengan DKARI. Lima tahun kemudian, berdasarkan Pengumuman Menteri Perhubungan, Tenaga dan Pekerjaan Umum No: tanggal 6 Januari 1950, ditetapkan bahwa mulai 1 Januari 1950, DKARI dan "*Staat-spoor Wegen en Verenigde Spoorweg Bedrijf*" (SS/VS) digabung menjadi satu perusahaan kereta api bernama "*Djawatan Kereta Api*" (DKA).

Dalam rangka pembenahan badan usaha, Pemerintah mengeluarkan UU No. 19 tahun 1960, yang menetapkan bentuk usaha BUMN. Atas dasar UU ini, dengan Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 1963, tanggal 25 Mei 1963, dibentuk "*Perusahaan Negara Kereta Api*" (PNKA), sehingga Djawatan Kereta Api dilebur ke dalamnya. Sejak itu, semua perusahaan kereta api di Indonesia terkena "integrasi" ke dalam suatu wadah PNKA, termasuk kereta api di Sumatera Utara yang sebelumnya dikelola oleh DSM. Masih dalam rangka pembenahan BUMN, Pemerintah mengeluarkan UU No. 9 Tahun 1969 tanggal 1 Agustus 1969, yang menetapkan jenis BUMN menjadi 3 yaitu Perseroan, Perusahaan Umum, dan Perusahaan Jawatan. Sejalan dengan undang-undang yang dimaksud, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 1971, tanggal 15 September 1971, bentuk perusahaan PNKA mengalami perubahan menjadi "*Perusahaan Jawatan Kereta Api*" (PJKA) dan menjadi salah satu organisasi yang berada di bawah naungan Departemen Perhubungan. Selanjutnya, berdasarkan PP No. 57 Tahun 1990, pada tanggal 2

Januari 1991, PJKA mengalami perubahan menjadi Perusahaan Umum Kereta Api disingkat Perumka. Sejalan dengan perubahan status ini, kinerja perkeretaapian di Indonesia kian membaik. Perubahan status ini dimaksudkan untuk memberikan peluang kepada Perumka agar lebih luas dalam mengembangkan dirinya. Kemudian berdasarkan PP No. 19 Tahun 1998 tanggal 3 Februari 1998, Pemerintah kembali melakukan pengalihan bentuk Perusahaan Umum (Perum) Kereta Api menjadi Perusahaan Perseroan berbentuk Perseroan Terbatas. Perubahan status ini dimaksudkan untuk menyelenggarakan usaha sebagai berikut:

- a. Usaha pengangkutan orang dan barang dengan kereta api
- b. Kegiatan perawatan prasarana perkeretaapian
- c. Pengusahaan prasarana kereta api
- d. Pengusahaan usaha penunjang prasarana dan sarana kereta api.

Tabel 3.1
Kronologis Bentuk Perusahaan

PERIODE	STATUS	DASAR HUKUM
1864	Pembangunan jalan KA sepanjang 26 Km antara Kemijen-Tanggung oleh Hindia belanda	
1864-1945	Staat Spoorweggen (SS) Verenigde Spoorwegenbedrijf (VS) Deli Spoorweg Mastchapij (DSM)	IBW
1945-1950 1950-1963	Djawatan Kereta Api (DKA) Djawatan Kereta Api Republik Indonesia (DKARI)	
1963-1971 1971-1991 1991-1998	Perusahaan Negara Kereta Api (PNKA) Perusahaan Jawatan Kereta Api (PJKA) Perusahaan Umum Kereta Api (Perumka)	PP 22 Th. 1963 PP 61 Th. 1971 PP 57 Th. 1990
1998- sekarang	PT. Kereta Api (Persero)	PP 19 Th. 1998 Keppres 39 Th. 1999 Akta Notaris Imas Fatimah No. 2 Th. 1999

Sumber: <http://www.kereta-api.com>.

3.1.3 Struktur Organisasi dan Uraian Tugas PT. Kereta Api (Persero)

Struktur Organisasi dan Tata Kerja PT. Kereta Api (Persero) dibentuk berdasarkan PP No. 19 Tahun 1998 tanggal 3 Februari 1998. susunan organisasi yang berlaku saat ini adalah sebagai berikut:

1. Dewan Komisaris
2. Tingkat Pusat
3. Tingkat Eksploitasi (di Sumatera)
4. Tingkat Daerah Operasi (di Jawa)
5. Tingkat Inspeksi
6. Tingkat UPT

Sebagai penjabaran dari Peraturan Pemerintah tersebut, Direksi PT. Kereta Api menerbitkan Surat Keputusan KEP.U/OT.003/XI/03/KA-99 tanggal 8 Nopember 1999 mengenai Susunan Organisasi dan Tata Kerja Di Tingkat Direktorat, Pusat dan Satuan Pengawasan Intern Di Lingkungan Kantor Pusat PT. KAI (Persero). Susunan organisasi yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. *Direksi*, dipimpin oleh seorang Direktur Utama, yang tugas dan wewenangnya adalah:
 - a. Pembuat dan pemberi masukan pertimbangan dan sasaran untuk kebijakan teknis.
 - b. Bertindak untuk dan atas nama direksi untuk semua bidang.
 - c. Memimpin kegiatan direktorat.
 - d. Melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan kebijaksanaan direksi.

2. *Direktorat*, yang meliputi:

a. Direktorat Keuangan

Direktorat Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Direktorat (Direktur) yang bertanggung jawab kepada Direktur Utama. Tugas utamanya adalah melaksanakan sebagian tugas Direktur Utama dalam merumuskan kebijaksanaan serta mengelola keuangan perusahaan yang meliputi Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) tahunan, penyediaan dana baik untuk modal kerja dan investasi, perhitungan PSO, IMO dan TAC, pelaksanaan administrasi keuangan/perbendaharaan, pelaksanaan akuntansi manajemen, akuntansi keuangan, serta membantu pengurusan barang inventaris kekayaan milik negara. Direktorat Keuangan terdiri dari Sub Direktorat Pendanaan, Sub Direktorat Pendayagunaan Keuangan, dan Sub Direktorat Akuntansi.

b. Direktorat Teknik

Direktorat teknik dipimpin oleh seorang Kepala Direktorat (Direktur) yang bertanggung jawab kepada Direktur Utama. Tugas utamanya adalah melaksanakan sebagian tugas Direktur Utama dalam perumusan kebijaksanaan teknis dan perumusan pembinaan pemeliharaan prasarana pokok yang berupa jalan rel, jembatan, perangkat sinyal, telekomunikasi, dan instalasi listrik umum dan listrik aliran atas serta pemeliharaan dan perbaikan sarana Balai Yasa, perencanaan maupun pemeriksaan kelaikan sarana dan prasarana pendayagunaan tanah dan bangunan. Direktorat Teknik terdiri dari Sub Direktorat Perencanaan Teknik, Sub Direktorat Jalan Rel dan Jembatan,

Sub Direktorat Tanah dan Bangunan, Sub Direktorat Sinyal, Telekomunikasi dan Listrik, serta Sub Direktorat Balai Yasa.

c. Direktorat Operasi dan Pemasaran

Direktorat Operasi dan Pemasaran dipimpin oleh seorang Kepala Direktorat (Direktur) yang bertanggung jawab kepada Direktur Utama. Tugasnya melaksanakan sebagian tugas Direktur Utama dalam perumusan kebijaksanaan teknis dan perumusan pedoman pembinaan teknis operasional serta menyusun program operasi lalu lintas perjalanan kereta api, program pemasaran angkutan penumpang dan barang, program pemeliharaan dan pengoperasian sarana traksi di lintas beserta pengendaliannya, dan program pengusahaan jasa angkutan lain yang terkait dengan tugas pokok. Direktorat Operasi dan Pemasaran terdiri dari Sub Direktorat Traksi, Sub Direktorat Lalu lintas, Sub Direktorat Pemasaran Angkutan Penumpang, Sub Direktorat Pemasaran Angkutan Barang, Sub Direktorat Diversifikasi Usaha.

d. Direktorat Personalia dan Umum.

Direktorat Personalia dan Umum dipimpin oleh seorang Kepala Direktorat (Direktur) yang bertanggung jawab kepada Direktur Utama. Tugasnya melaksanakan sebagian tugas Direktur Utama dalam penyusunan rencana pengembangan, produktifitas pengendalian personil, serta penyusunan program pembinaan Hygiene perusahaan, kesehatan dan keselamatan kerja, pelaksanaan program mutasi dan administrasi personalia, pelaksanaan kegiatan administrasi umum, kerumahtanggaan dan protokoler, pelaksanaan kegiatan hukum dan hubungan antar lembaga, serta penyusunan program dan pelaksanaan hubungan masyarakat. Direktorat Personalia dan Umum terdiri

dari Sub Direktorat Perencanaan, Pengembangan dan Pengendalian Personalia, Sub Direktorat Administrasi Personalia, Sub Direktorat Administrasi Umum, Kerumahtanggaan dan Protokoler, Sub Direktorat Hukum dan Hubungan Antar Lembaga, dan Sub Direktorat Humas.

e. Direktorat Pengembangan dan Usaha

Direktorat Pengembangan dan Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Direktorat (Direktur) yang bertanggung jawab kepada Direktur Utama. Tugasnya melaksanakan sebagian tugas Direktur Utama dalam pengelolaan investasi perusahaan yang bersifat pengembangan usaha baik dari dana internal maupun eksternal, serta merencanakan pemanfaatan aset non produktif dengan berdasarkan prinsip kelayakan finansial, merencanakan investasi untuk rehabilitasi aset dukung fasilitas operasional dan pemeliharaan dengan berdasarkan prinsip kelayakan finansial. Direktorat Pengembangan dan Usaha terdiri dari Sub Direktorat Investasi dan Sub Direktorat Pengembangan dan Pemanfaatan Aset Non Produktif.

3. *Pusat.*

a. Pusat Perencanaan dan Pengembangan

Pusat Perencanaan dan Pengembangan dipimpin oleh seorang Kepala Direktorat (Direktur) yang bertanggung jawab kepada Direktur Utama. Tugasnya melaksanakan sebagian tugas Direktur Utama dalam penyusunan sistem informasi dan evaluasi perusahaan, pengembangan organisasi dan tata laksana, penelitian dan pengembangan kelaikan dan analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL). Pusat Perencanaan dan Pengembangan terdiri dari Bidang Penyusunan Rencana Jangka Panjang dan Pengembangan Pasar,

Bidang Sistem Informasi dan Evaluasi Perusahaan, Bidang Penelitian dan Pengembangan Kelaikan dan Analisis Dampak Lingkungan, serta Bidang Pengembangan Organisasi dan Tata Laksana.

b. Pusat Pendidikan dan Latihan

Pusat Pendidikan dan Latihan dipimpin oleh seorang Kepala Direktorat (Direktur) yang bertanggung jawab kepada Direktur Utama. Tugasnya melaksanakan sebagian tugas Direktur Utama dalam membina, mengendalikan, mengevaluasi, dan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan di lingkungan perusahaan serta pendidikan dan pelatihan lainnya sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Pusat Pendidikan dan Latihan terdiri dari Bidang Bina Program Penyelenggaraan, Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Kesekretariatan, serta Balai-balai Pendidikan dan Pelatihan.

c. Pusat Logistik

Pusat Logistik dipimpin oleh seorang Kepala Direktorat (Direktur) yang bertanggung jawab kepada Direktur Utama. Tugasnya melaksanakan sebagian tugas Direktur Utama dalam menganalisis dan merencanakan pengadaan barang, pengaturan pengendalian persediaan barang-barang, penyusunan program barang penyimpanan dan distribusi, penghapusan barang perusahaan dan pembinaan personil logistik serta melaksanakan pembinaan dan koordinasi terhadap unit-unit pelaksanaan teknis yang melaksanakan tugas logistik pergudangan, inklaring, dan percetakan. Pusat Logistik terdiri dari Bidang Perencanaan dan Pengadaan, Bidang Inventori dan Pengendalian, Unit Pelaksana Teknis (UPT) Grafika, Unit Pelaksana Teknis (UPT) Gudang Persediaan, Unit Pelaksana Teknis (UPT) Inklaring.

4. Satuan Pengawasan Intern

Satuan Pusat Pengawasan Intern (SPI) dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Pengawasan Intern yang bertanggung jawab kepada Direktur Utama. Tugasnya membantu Direktur Utama dalam mengadakan pemeriksaan intern perusahaan dan memberikan saran perbaikan. Satuan Pengawasan Intern terdiri atas Pengawas I, Pengawas II, Pengawas III, Pengawas Khusus, dan Bagian Tata Usaha.

3.1.4 Falsafah, Visi dan Misi, Maksud dan Tujuan, Sasaran dan Arah Pengembangan PT. Kereta Api (Persero)

3.1.4.1 Falsafah PT. Kereta Api (Persero)

Penyediaan jasa angkutan kereta api harus diselenggarakan dengan efektif dan efisien, berprinsip pada ekonomi perusahaan dengan mutu pelayanan yang makin baik dan berwawasan pada:

- a. Tanggap terhadap lingkungan.
- b. Kebanggaan terhadap perusahaan.
- c. Peningkatan pelayanan secara efektif dan efisien.
- d. Mendorong pembangunan.
- e. Kemauan untuk bekerja keras dan sadar usaha dan biaya.

3.1.4.2 Visi dan Misi PT. Kereta Api (Persero)

Visi PT. Kereta Api (Persero) adalah Terwujudnya Kereta Api sebagai pilihan utama jasa transportasi yang mengutamakan keselamatan, kehandalan dan pelayanan. Sedangkan Misi PT. Kereta Api (Persero) adalah Mewujudkan jasa pelayanan

transportasi massal dengan menghasilkan jasa sesuai dengan kebutuhan pelanggan dan penugasan Pemerintah, tingkat keselamatan dan pelayanan yang semakin tinggi dan penyelenggaraan semakin efisien.

3.1.4.3 Maksud dan Tujuan PT. Kereta Api (Persero)

Maksudnya adalah mengusahakan pelayanan jasa angkutan kereta api dalam rangka memperlancar arus perpindahan orang dan/atau barang secara massal untuk menunjang pembangunan nasional. Tujuannya adalah untuk turut serta melaksanakan dan menunjang kebijaksanaan dan program Pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional khususnya di bidang transportasi, dengan menyediakan barang dan atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat di pasar dalam negeri ataupun internasional di bidang perkereta-apian yang meliputi usaha pengangkutan orang dan barang dengan kereta api, kegiatan perawatan prasarana perkereta-apian , perusahaan prasarana perkereta-apian, perusahaan usaha penunjang prasarana dan sarana kereta api dan kemanfaatan umum dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas.

3.1.4.4 Sasaran dan Arah Pengembangan PT. Kereta Api (Persero)

Berdasarkan falsafah, visi dan misi, maksud dan tujuan serta dengan tetap mengacu kepada kebijakan pemerintah melalui Peraturan Menteri Perhubungan maupun Menteri Keuangan serta peraturan yang berlaku, maka sasaran PT. Kereta Api (Persero) adalah terus menerus berupaya secara bertahap meningkatkan kinerja pelayanan dan keuangannya, yang akan dicapai dengan berbagai strategi pertumbuhan antara lain peningkatan produktivitas, efektivitas dan efisiensi. Dalam

hal ini PT. Kereta Api (Persero) juga berupaya mempertahankan bobot kondisi keuangan minimum sehat dengan bobot pelayanan minimum baik. Sasaran ditetapkan dengan berpedoman pada isi pokok perusahaan, yaitu:

- a. Peningkatan ketersediaan aset dan produktifitas.
- b. Pemanfaatan peluang menaikkan pangsa penumpang angkutan komersial.
- c. Kebutuhan Investasi.

Pengembangan perusahaan diarahkan untuk peningkatan kinerja finansial masing-masing segmen usaha dengan menekankan pada usaha inti (*core bussines*), yaitu jasa angkutan penumpang dan barang. Usaha yang dilakukan untuk menjadikan kereta api sebagai sebagai pilihan utama transportasi darat, adalah dengan cara efisiensi pengusahaan dan investasi yang selektif, sehingga pelayanan dan keuangan perusahaan menjadi semakin baik.

3.2 Metode Penelitian

3.2.1 Metode Penelitian yang Digunakan

Metode yang diutamakan dalam penelitian ini adalah metode analisis dengan pendekatan kuantitatif, yaitu metode yang menganalisa dan menginterpretasikan serta menganalisis hubungan antara fenomena yang diselidiki, dalam rangka memperoleh gambaran secara sistematis akan kinerja perusahaan dimana pembahasan lebih banyak berhubungan dengan rasio-rasio serta rumus-rumus yang bersumber dari laporan keuangan perusahaan, kemudian menganalisis hubungan antara variabel yang terlibat di dalamnya.

Dajan (1986, hlm. 17) menyatakan bahwa data kuantitatif merupakan serangkaian observasi atau pengukuran yang dapat dinyatakan dalam angka-angka.

Tambahnya (1986, hlm. 21) "...data kuantitatif yang dikumpulkan seyogyanya harus akurat, up to date, komprehensif dan relevan bagi persoalan yang diteliti. Data demikian itu dapat saja merupakan data intern dan ekstern. Penggunaan data primer lebih dianjurkan daripada data sekunder".

3.2.2 Operasionalisasi Variabel

Dalam penelitian ini, penulis akan menganalisa kinerja keuangan PT. Kereta Api (Persero) sebelum dan sesudah perusahaan menjadi perusahaan Persero. Sebelum, dalam hal ini adalah ketika perusahaan berstatus Perusahaan Umum (Perum) dan sesudah adalah perusahaan pada waktu berstatus Perusahaan Perseroan. Kinerja keuangan diproksikan dengan rasio-rasio keuangan menurut Keputusan Menteri BUMN No. KEP-100/MBU/2002 yang disesuaikan dengan data yang telah tersedia. Untuk lebih jelasnya indikator, skala dan ukuran dapat dilihat dalam tabel operasionalisasi variabel sebagai berikut:

Tabel 3.2
Operasionalisasi Variabel

Variabel	Konsep Variabel	Indikator	Sub Variabel	Ukuran	Skala
Kinerja Perusahaan	Perestasi yang dicapai oleh perusahaan dalam suatu periode tertentu yang mencerminkan penilaian kinerja yang berdasarkan kepada Kep. Menteri BUMN No. KEP-100/MBU/2002	ROE	$\frac{\text{Laba Setelah Pajak}}{\text{Modal Sendiri}} \times 100$	%	Rasio
		ROI	$\frac{\text{EBIT} + \text{Penyusutan}}{\text{Capital Employed}} \times 100$	%	Rasio
		Rasio Kas	$\frac{\text{Kas} + \text{Bank} + \text{Srt. Berharga Jk. Pdk}}{\text{Current Liabilities}} \times 100$	%	Rasio
		Rasio Lancar	$\frac{\text{Current Asset}}{\text{Current Liabilities}} \times 100$	%	Rasio
		Collection Periods	$\frac{\text{Total Piutang Usaha}}{\text{Total Pendapatan Usaha}} \times 365$	hari	
		Perputaran Persediaan	$\frac{\text{Total Persediaan}}{\text{Total Pendapatan Usaha}} \times 365$	hari	
		Perputaran Total Asset	$\frac{\text{Total Pendapatan}}{\text{Capital Employed}} \times 100$	%	Rasio
		Rasio Modal Sendiri Terhadap Total Aktiva	$\frac{\text{Total Modal Sendiri}}{\text{Total Asset}} \times 100$	%	Rasio

3.2.3 Rancangan Pengujian Hipotesis

Dalam penelitian ini, hipotesis disusun berdasarkan kerangka pemikiran yang termuat dalam identifikasi masalah. Hipotesis yang penulis ajukan adalah “Terdapat

Pengaruh Perubahan Status Badan Hukum Perusahaan dengan Kinerja Keuangannya”.

Ho: Tidak ada perbedaan kinerja keuangan PT. Kereta Api (Persero) antara sebelum dan sesudah perubahan status badan hukum perusahaan menjadi perusahaan perseroan.

Ha: Kinerja keuangan PT. Kereta Api (Persero) **lebih besar** dari pada kinerja keuangan sebelum perusahaan mejadi Perusahaan Perseroan (dalam hal ini ketika perusahaan berbentuk Perum).

3.2.4 Data dan Teknik Pengumpulan Data

3.2.4.1 Jenis Data dan Sumber Data

Data yang tersedia adalah data ekstern yang dapat dikelompokkan dalam dua jenis, yaitu: Data Primer dan Data Sekunder. Data Primer merupakan data yang dikumpulkan dan berhubungan langsung dengan penelitian yang dilakukan. Dengan data primer penulis dapat melihat kenyataan yang sebenarnya dari masalah yang dianalisa dengan data yang didapatkan langsung dari perusahaan yang menjadi obyek penelitian. Data sekunder merupakan data yang mendukung data primer.

Menurut pentingnya data, penulis membutuhkan data umum seperti: Sejarah dan Perkembangan Perusahaan, Letak Perusahaan atau Lokasi, Struktur Organisasi Perusahaan, Personalia/SDM, Kegiatan Usaha, Modal Perusahaan. Selain data umum, penulis juga membutuhkan data khusus seperti: Neraca Keuangan, Laporan Rugi Laba, Laporan Perubahan Ekuitas Perusahaan sebelum dan sesudah Perusahaan menjadi Perusahaan Perseroan, dengan mengambil data dari tahun 1994 sampai dengan 2002.

3.2.4.2 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan dua cara, yaitu Studi Kepustakaan (*Library Research*) dan Penelitian Lapangan (*Field Research*).

a. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Merupakan penelitian yang dilakukan dengan membaca buku-buku, artikel dan semua yang berhubungan dengan obyek penelitian dengan harapan dapat memberikan informasi atau data yang bersifat ilmiah dan teoritis serta membantu penulis dalam menganalisa, mengambil kesimpulan dan saran-saran.

b. Studi Lapangan (*Field Research*)

Dilakukan dengan metode survei atau observasi untuk mendapatkan laporan keuangan serta informasi yang berkaitan dengan obyek penelitian yang tidak dipublikasikan dan mendapatkan informasi tentang cara penilaian kinerja perusahaan.

3.2.5 Teknik Pengolahan dan Analisis Data

3.2.5.1 Teknik Pengolahan Data

Penulis menerapkan pendekatan utama yaitu pendekatan analisis kuantitatif dan melengkapinya dengan pendekatan analisis kualitatif, dengan berdasarkan pada laporan keuangan perusahaan yang tersaji. Data yang telah diperoleh tersebut kemudian diolah dengan menggunakan indikator kinerja perusahaan BUMN sesuai dengan Keputusan Menteri BUMN No. KEP-100/MBU/2002 dan dasar-dasar statistika, sehingga menghasilkan data kuantitatif. Selanjutnya data kuantitatif tersebut dijelaskan secara kualitatif dengan berdasarkan landasan teori yang kuat serta sesuai dengan prinsip teori analisis laporan keuangan perusahaan dan data-data

statistik, melalui berbagai studi literatur sebagaimana telah dijelaskan sehingga diharapkan dapat diperoleh suatu kesimpulan secara ilmiah. Adapun tahapan pengolahan data adalah sebagai berikut:

1. Menyiapkan hipotesa nol dan hipotesa alternatifnya dan menetapkan taraf signifikansi.
2. Mengumpulkan data laporan keuangan yang dibutuhkan sesuai dengan alat ukur kinerja keuangan perusahaan, yaitu dengan menggunakan penilaian menurut Keputusan Menteri BUMN No. KEP-100/MBU/2002.
3. Menghitung perubahan kinerja keuangan per periode dengan metode *Time Series* untuk membandingkan dan mengamati kecenderungan atau trend rasio-rasio finansial perusahaan dari satu periode ke periode lainnya. Dengan alat analisis yang ditentukan penulis membandingkan kinerja keuangan sebelum perubahan status perusahaan yakni pada saat perusahaan berbentuk Perusahaan Umum (Perum) dan setelah perubahan status perusahaan menjadi Perusahaan perseroan.
4. Hasil analisa menurut Keputusan Menteri BUMN No: KEP-100/MBU/2002 dan metode time series tersebut, akan diolah lebih lanjut untuk mengetahui ada tidaknya peningkatan per indikator yang signifikan antara sebelum dan sesudah perubahan status dengan menggunakan uji t untuk dua sample yang berpasangan (Paired).
5. Mengevaluasi keseluruhan dan mempersiapkan data yang telah diolah untuk menguji hipotesa. Dalam hal ini penulis menggunakan alat analisis statistik non parametrik, yaitu dengan Uji Peringkat Tanda Wilcoxon (*Wilcoxon Signed Ranks Test*). Dengan uji ini diharapkan dapat diperoleh gambaran mengenai pola bentuk

pengaruh serta derajat pengaruh yang ada di antara indikator-indikator keuangan sebelum dan setelah perubahan status badan hukum tersebut.

3.2.5.2 Teknik Analisis Data

Penulis menggunakan Analisis Statistika yaitu analisis yang dilakukan dengan menggunakan teknik statistika. Teknik ini dipergunakan untuk membuktikan hipotesis penelitian yang diajukan sebelumnya, serta Analisis Deskriptif yaitu analisis dengan merinci dan menjelaskan keterkaitan data penelitian yang biasanya tercantum dalam bentuk tabel dan analisis didasarkan pada data di tabel tersebut.

1) Analisis Perhitungan Kinerja Keuangan Perusahaan

Dalam melakukan analisis ini, perhitungan yang digunakan adalah metode perhitungan analisis rasio keuangan pada perusahaan BUMN, sesuai dengan Keputusan Menteri BUMN No. KEP-100/MBU/2002 dengan indikator-indikator keuangan seperti: Imbalan kepada pemegang saham/*Return On Equity* (ROE), Imbalan investasi/*Return On Investment* (ROI), Rasio kas, Rasio lancar, *Collection Periods*, Perputaran persediaan, Perputaran total asset dan Rasio modal sendiri terhadap total aktiva.

Setelah menghitung setiap indikator keuangan diatas, maka dapat disimpulkan nilai skor masing-masing sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri BUMN tersebut. Kemudian langkah berikutnya adalah menjumlah nilai bobot masing-masing perhitungan indikator keuangan tersebut dan memberi kriteria dengan metode kualitatif.

2) Analisis Statistik

Setelah diperoleh hasil perhitungan kinerja keuangan perusahaan masing-masing periode, maka dilakukan analisis statistik untuk mengolah data-data tersebut dan memperoleh informasi yang berguna terutama untuk memperoleh gambaran adanya atau tidak adanya hubungan antara kinerja keuangan sebelum dan sesudah perubahan status badan hukum perusahaan tersebut, serta melihat indikator keuangan yang paling berpengaruh dalam perubahan kinerja keuangan tersebut.

Analisis yang digunakan seperti yang telah disebutkan dalam teknik pengolahan data yaitu menggunakan metode *Time Series Analisis*, uji t (*Paired Sample T Test*) dan *Wilcoxon Signed Ranks Test*.

Langkah pertama setelah mengevaluasi kinerja keuangan dengan alat yang telah tersedia dan dihasilkan suatu perhitungan tertentu, adalah menganalisa kembali hasil tersebut menggunakan *Time Series Analisis*. Menurut **Mason dan Lind** (1999, hlm. 317) “Deret berkala (*time series*) adalah sekumpulan data yang dicatat selama periode tertentu, umumnya berupa data mingguan, bulanan, kuartalan, atau tahunan”. Langkah ini dilakukan dengan jalan membandingkan rasio-rasio finansial perusahaan dari satu periode ke periode lainnya. Perbandingan ini dilakukan untuk mengamati kecenderungan atau trend yang terjadi selama tahun data. Dari hasil perhitungan, kecenderungan yang terjadi pada tiap indikator dianalisa kembali menggunakan uji t (*Paired Sample T Test*) untuk mengetahui apakah ada peningkatan yang signifikan. Menurut **Santosa** (2000, hlm. 155), *Paired Sample T Test* merupakan salah satu uji statistik inferensi untuk menganalisa perbandingan dua sample yang berpasangan. Tambahnya, “dua sample yang berpasangan diartikan sebagai sebuah sample dengan subyek yang sama namun mengalami dua perlakuan atau pengukuran yang berbeda”.

Langkah selanjutnya adalah menguji hipotesa yaitu menguji ada tidaknya hubungan antara perubahan status badan hukum dengan kinerja keuangan perusahaannya, yaitu dengan menggunakan *Wilcoxon Signed Ranks Test*. Menurut **Mason dan Lind** (1999, hlm.195) uji Wilcoxon merupakan uji mengenai perbedaan peringkat bertanda yang sesuai. Tambahnya lagi, “Persyaratan yang diperlukan adalah data setidaknya harus berbentuk ordinal dan kedua sampel harus berhubungan (berpasangan)”. **Siegel** (1997, hlm. 94) menyatakan bahwa dalam tehnik uji perangkat bertanda Wilcoxon ini “...terdapat kelebihan-kelebihan yang ada dibandingkan uji t beda dua sampel”. **Koeswoyo dan Yuliani** (2001, hlm 51) juga menggunakan tehnik uji Wilcoxon dalam menganalisa kinerja perusahaan BUMN sebelum dan sesudah go publik dengan sampel 22 bank yang telah go publik. **Koeswoyo dan Yuliani** (2001, hlm. 51) juga menambahkan bahwa uji statistik ini akan memberikan hasil lebih tepat untuk 2 populasi yang berkelanjutan dan tidak memerlukan pengujian asumsi normalitas serta lebih konservatif untuk 2 populasi yang bersifat diskrit. Seperti telah diuraikan diatas, tehnik pengujian Wilcoxon ini relatif cukup sederhana, dan tidak membutuhkan berbagai macam asumsi yang harus dipenuhi seperti pengujian-pengujian lainnya, misalnya tentang sifat dan bentuk distribusinya dan parameter populasinya. **Santosa** (2000, hlm. 301) menyebutkan bahwa metode non parametrik mempunyai banyak keunggulan diantaranya adalah data tidak harus berdistribusi normal/uji distribusi bebas, data bisa dipakai untuk level data nominal maupun ordinal, dan pengujiannya cenderung lebih sederhana dan mudah dimengerti. Akan tetapi juga pengujian dengan metode non parametrik ini juga mempunyai kelemahan seperti tidak adanya sistematika yang jelas serta kesederhanaan metodenya sehingga hasilnya bisa meragukan.

Selanjutnya, dalam analisa menggunakan metode *Wilcoxon's Signed Rank Test*, besarnya nilai statistik atau Z hitung secara manual dapat dicari menggunakan rumus:

$$Z = \frac{T - [1/4 (N+1)]}{\sqrt{1/24 (N) (N+1) (2N+1)}}$$

Dimana :

T= Selisih terkecil dari hasil perhitungan tiap indikator keuangan yaitu antara sebelum dan sesudah perubahan status badan hukum perusahaan kereta api menjadi perusahaan perseroan.

N= Jumlah sampel atau pengamatan (penulis menggunakan sampel 9 tahun yaitu 5 tahun dalam periode Perumka dan 4 tahun dalam periode PT. KAI (Persero)). Jumlah sampel yang dalam perhitungan mempunyai tanda + (positif) atau - (negatif), sedangkan untuk sampel yang mempunyai tanda 'ties'(sama) tidak dimasukkan dalam perhitungan.

Sedangkan data dengan metode *Wilcoxon's Signed Rank Test* yang diolah menggunakan SPSS, akan muncul hasil atau Output berupa *Npar Tests, Wilcoxon's Signed Rank Test* dan *Test Statistik Wilcoxon*. Dengan keterangan sebagai berikut:

- *Mean Rank* yaitu rata-rata yang didapat dengan menggunakan rangking dari selisih data.
- *Sum of Ranks* yaitu jumlah atau total rangking dari selisih data.
- *Negative Ranks* yaitu selisih antara 'sesudah' dan 'sebelum' yang bernilai negatif, dalam artian angka 'sesudah' lebih kecil dari 'sebelum'.
- *Positive Ranks* yaitu selisih antara 'sesudah' dan 'sebelum' yang bernilai positif, dalam artian angka 'sesudah' lebih besar dari 'sebelum'.

- *Ties* yaitu data ‘sesudah’ dan ‘sebelum’ yang bernilai sama. Jika ada data yang bernilai sama dan berselisih 0, maka untuk perhitungan selanjutnya data tersebut dibuang atau tidak dimasukkan dalam jumlah sampel.
- *Z* dalam tabel test statistik Wilcoxon berarti *Z* yang diperoleh dari hasil perhitungan.
- *Asymp. Sig (2-tailed)* yaitu probabilitas dari hasil analisa dalam uji 2 sisi.

Sebagai pedoman yang digunakan dalam analisa Wilcoxon adalah jumlah selisih yang paling kecil. Dasar pengambilan keputusan adalah:

- Dengan membandingkan angka *Z* hitung dengan *Z* tabel:

Jika $Z \text{ hitung} < Z \text{ tabel}$, maka H_0 diterima.

Jika $Z \text{ hitung} > Z \text{ tabel}$, maka H_0 ditolak.

- Dengan melihat angka probabilitas:

Jika Probabilitas $> \alpha$, maka H_0 diterima

Jika Probabilitas $< \alpha$, maka H_0 ditolak.

Dari hipotesa yang dikemukakan di muka, maka penulis menggunakan taraf signifikansi (α) 5 %, dengan ‘uji 1 (satu) sisi’ yaitu menguji H_a apakah terdapat ‘peningkatan’ setelah perusahaan berubah status badan hukumnya menjadi PT. KAI (Persero) ataukah tidak.

Setelah dilakukan pengujian dengan maka dapat ditarik kesimpulan apakah H_0 diterima ataukah H_0 ditolak.

BAB IV

ANALISA DAN PEMBAHASAN

Penilaian kinerja keuangan penting dilakukan oleh pihak-pihak yang berkompeten dalam kelancaran aktifitas operasi perusahaan disamping yang paling utama yaitu pihak manajemen perusahaan itu sendiri. Hal ini disebabkan karena penilaian kinerja menyangkut efektifitas dan efisiensi baik dalam hal mencari maupun menggunakan dana. Penilaian kinerja keuangan perusahaan pada dasarnya memiliki standar untuk perbandingan seperti penggunaan rata-rata industri dan/atau ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah terutama untuk perusahaan BUMN.

Sebagai salah satu perusahaan BUMN infrastruktur yang bergerak di sektor perhubungan, PT. KAI (Persero) mengacu pada ketentuan pemerintah yaitu Keputusan Menteri BUMN No: KEP-100/MBU/2002 sebagai standar untuk mengetahui tingkat kesehatan perusahaannya. Apakah nanti setelah analisa, perusahaannya tergolong dalam kategori sehat, kurang sehat ataukah tidak sehat.

Menurut Keputusan Menteri BUMN tersebut tingkat kesehatan BUMN dinilai berdasarkan aspek keuangan, aspek operasional dan aspek administrasi. Namun penulis hanya memfokuskan pada aspek keuangannya saja. Hal-hal yang meliputi aspek keuangan ada tiga, yaitu:

1. Likuiditas: *Current Ratio* (Rasio Lancar), *Cash Ratio* (Rasio Kas)
2. Rentabilitas: ROE (Imbalan kepada Pemegang Saham), ROI (Imbalan Investasi)

3. Aktifitas: *Collection Periods* (CP), Perputaran Persediaan (PP), Perputaran Total Asset (TATO)

4. Solvabilitas: Modal Sendiri terhadap Total Aktiva (TMS terhadap TA)

Perhitungan didasarkan pada periode tahunan (per 31 Desember), dengan data yang diambil: sebelum perubahan status perusahaan yaitu pada saat perusahaan berstatus Perusahaan Umum (Perum) dengan mengambil sampel 5 (lima) tahun (1994-1998) dan sesudah perubahan status perusahaan yaitu pada saat perusahaan berstatus Perseroan Terbatas (Persero) dengan mengambil sampel empat tahun (1999-2002). Dari hasil perhitungan ini diharapkan dapat diketahui tingkat kesehatan perusahaan dengan standar Keputusan Menteri BUMN tersebut. Selanjutnya penulis menggunakan Analisa Statistik Non Parametrik yaitu Uji Peringkat Bertanda Wilcoxon (*Willcoxon Signed Rank Test*) untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan reaksi signifikan terhadap rasio keuangannya dengan diubahnya status badan hukum perusahaan kereta api tersebut dari Perusahaan Umum menjadi Perusahaan Perseroan.

4.1 Analisa Rasio Keuangan Menurut Keputusan Menteri BUMN No: KEP 100/MBU/2002

4.1.1 Analisa Likuiditas

Likuiditas suatu perusahaan didefinisikan sebagai kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajibannya yang sudah jatuh tempo. Sedangkan Rasio Likuiditas merupakan rasio yang menunjukkan hubungan kas dan aktiva lancarnya dengan kewajiban lancar. Hal ini dapat berarti bahwa apakah

perusahaan memiliki sumber dana yang cukup untuk membayar kreditur saat kewajiban itu jatuh tempo dalam jangka pendek. Analisa likuiditas yang dihitung dalam bab ini meliputi Rasio Lancar (*Current Ratio*) dan Rasio Kas (*Cash Ratio*).

4.1.1.1 Current Ratio (CR)

Current Ratio merupakan rasio yang digunakan untuk mengetahui seberapa jauh Aktiva Lancar dapat digunakan untuk menutupi kewajiban-kewajiban lancarnya. Hal ini berarti ketika Current Ratio berada dalam persentase yang tinggi keadaan keuangan perusahaan bisa dikatakan dalam keadaan likuid.

Current Ratio dapat dicari dengan menggunakan rumus:

$$\text{Rasio Lancar} = \frac{\text{Aktiva Lancar}}{\text{Hutang Lancar}} \times 100\%$$

1) Pada Saat Perusahaan Berstatus Perusahaan Umum (Perum)

Berdasarkan perhitungan, maka didapatkan Current Ratio Perumka sebagaimana disebutkan dalam tabel 4.1

Tabel 4.1
Current Ratio PERUMKA (dalam jutaan rupiah)
Tahun periode 1994 - 1998

Tahun	Current Assets (Rp)	Current Liabilities (Rp)	CR (%)	Skor
1994	471.363	49.734	947,76	3
1995	477.683	58.530	816,13	3
1996	564.483	73.680	766,13	3
1997	656.066	128.846	509,19	3
1998	750.072	180.814	414,83	3
		Rata-rata	690,81	

Sumber : Neraca dan Laporan R/L Perumka (data diolah)

a. Tahun 1994

Dari tabel di atas diketahui bahwa Current Ratio pada tahun 1994 sebesar 947,76%. Current Ratio tahun ini merupakan yang tertinggi dibandingkan tahun-tahun sesudahnya dalam periode Perumka. Hal ini disebabkan oleh Aktiva Lancar lebih besar proporsinya dari pada Hutang Lancar. Aktiva lancar sebesar Rp. 471.363.474.742,- sedangkan hutang lancar sebesar Rp. 49.734.460.114,-. Sekalipun dapat dilihat bahwa tiap tahunnya mengalami peningkatan, baik aktiva lancar maupun hutang lancarnya namun dalam perbandingan Current Ratio persentasenya lebih tinggi. Hal ini berarti setiap Rp. 1,- hutang lancar dijamin dengan Rp. 9,47 aktiva lancar. Jika menggunakan prinsip kehati-hatian sebesar 200% maka dapat dikatakan perusahaan dalam keadaan sangat likuid. Dengan nilai bobot 3, dalam tahun ini perusahaan kereta api yang merupakan perusahaan yang bergerak pada sektor infrastruktur berada pada skor paling tinggi.

b. Tahun 1995

Tahun ini Current Asset mengalami penambahan sebesar Rp. 6.320.080.146,- atau sebesar 0,01% dari tahun sebelumnya. Dan Current Liabilities juga mengalami perubahan sebesar Rp. 8.795.820.772,- atau sekitar 0,15%. Dilihat dari persentase kenaikan Current Asset yang hanya sebesar 0,01% dibandingkan dengan persentase kenaikan hutang lancarnya maka *Current Ratio* bisa dipastikan mengalami penurunan, dimana tahun 1994 sebesar 947,76% maka tahun ini hanya berkisar 816,13%. Angka ini berarti Rp. 1,- hutang lancar dijamin oleh aktiva lancar sebesar Rp. 8,16. Skor menurut Keputusan Menteri BUMN juga masih menandakan bahwa keadaan keuangan perusahaan likuid, dengan bobot 3.

c. Tahun 1996

Current Asset tahun ini juga mengalami peningkatan, bahkan dengan penambahan yang cukup tajam dari tahun sebelumnya. Dibandingkan tahun 1995, Current Asset tahun ini meningkat sebesar Rp. 86.799.535.129,- atau sebesar 0,15% dari tahun kemarin. Namun Current Asset yang sebesar Rp. 564.483.090.017,- ini, kenaikannya masih lebih rendah dari pada kenaikan Current Liabilities yang berkisar 0,21% atau perubahan sebesar Rp. 15.149.779.579,- dari tahun kemarin. Hal ini mengakibatkan Current Ratio menurun, sehingga pada tahun ini Current Ratio hanya berkisar 766,13%. Sekalipun dari skor masih tetap dapat dikatakan likuid karena masih di atas 125% untuk perusahaan yang bergerak dalam bidang infrastruktur.

d. Tahun 1997

Current asset sebesar Rp. 656.066.798.528,- dibandingkan dengan Current Liabilities sebesar Rp. 128.845.646.219,- maka dengan perhitungan didapat nilai Current Ratio sebesar 509,19%. Current Rasio mengalami penurunan dari pada tahun kemarin yang berkisar 766,13%. Perubahan ini disebabkan persentase kenaikan Current Asset hanya 0,14% bahkan menurun dari persentase kenaikan tahun sebelumnya yaitu 0,15%. Di sisi lain Current Liabilities justru meningkat sebesar 0,43% dari peningkatan tahun sebelumnya yang hanya 0,21%. Hal ini mengakibatkan penurunan nilai Current Ratio yang berarti tiap Rp. 1 hutang lancar dijamin oleh aktiva lancar sebesar Rp. 5,09. dengan angka ini keadaan perusahaan masih dikatakan likuid mengacu pada prinsip kehati-hatian sebesar 2:1 dan menurut Keputusan Menteri BUMN masih mendapat skor 3.

e. Tahun 1998

Tahun ini Current Asset masih mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya dengan peningkatan sebesar Rp. 94.005.705.837,- namun secara persentase mengalami penurunan sebesar 0,13% dari tahun sebelumnya. Dan Current Liabilities meningkat hanya sebesar Rp. 51.969.027.450,- dari tahun sebelumnya atau dengan penurunan persentase sebesar -0,29%. Posisi Current Asset sendiri pada tahun ini sebesar Rp. 750.072.504.365,- dan Current Liabilities sebesar Rp. 180.814.673.669,-. Keadaan ini masih dikatakan likuid karena Current Ratio masih di atas 200% yaitu pada posisi 414,83% dan masih dengan bobot skor 3.

2) Pada Saat Perusahaan Berstatus Perusahaan Perseroan (PT. Persero)

Berdasarkan perhitungan, maka didapatkan Current Ratio PT. KAI (Persero) sebagaimana disebutkan dalam tabel 4.2

Tabel 4.2
Current Ratio PT. KAI (dalam jutaan rupiah)
Tahun periode 1999 - 2002

Tahun	Current Assets (Rp)	Current Liabilities (Rp)	CR (%)	Skor
1999	706.572	187.765	376,31	3
2000	731.679	352.669	207,47	3
2001	705.234	418.707	168,43	3
2002	785.110	392.243	200,16	3
		Rata-rata	238,09	

Sumber : Neraca dan Laporan R/L PT. KAI (data diolah)

a. Tahun 1999

Pada tahun ini, perusahaan kereta api berada dalam posisi transisi yaitu masa perubahan status badan hukum sesuai dengan apa yang tercantum dalam *Sub Loan Agreement* atau tahun ini dicatat sebagai tahun buku dimana Pemerintah menyelenggarakan berbagai proyek perkereta-apian yang dananya diperoleh dari bantuan/pinjaman luar negeri. Dalam posisi ini, dilihat dari neraca terdapat aktiva lancar sebesar Rp. 706.572.446.620,- dengan hutang lancarnya Rp. 187.765.488.408,- yang berarti aktiva lancar mengalami penurunan sebesar – 0,06% dari tahun sebelumnya dalam periode Perumka. Pos neraca yang paling berpengaruh dalam penurunan jumlah aktiva lancar adalah penurunan deposito, deposito jaminan kontrak dan piutang hutang pajak, sedangkan kenaikan hutang lancar dipengaruhi oleh kenaikan hutang pajak, hutang perusahaan kepada Pemerintah, kenaikan hutang pegawai, pendapatan diterima di muka dan hutang lain-lain. Persentase perubahan Current Asset mengalami penurunan hingga negatif dalam artian Current Asset menurun sebesar Rp. 43.500.057.745,- dari tahun sebelumnya. Di sisi lain, Current Liabilities mengalami peningkatan yaitu sebesar Rp. 6.950.814.739,- atau hanya sebesar 0,04% dari tahun sebelumnya. Sekalipun demikian, keadaan keuangan perusahaan masih menempati skor 3 yaitu dengan Current Ratio sebesar 376,31%.

b. Tahun 2000

Tahun ini merupakan tahun kedua perusahaan berstatus Perusahaan Perseroan. Dari tabel, aktiva lancar yang diperoleh sebesar Rp. 731.679.690.262,- . Dengan demikian mengalami peningkatan sebesar Rp. 25.107.243.642,- atau sebesar

0,03% dari tahun 1999. Tetapi peningkatan Current Asset tidak sebanding dengan peningkatan Current Liabilities yang mencapai peningkatan 0,47% atau Rp. 164.904.363.687,-, dengan pembengkakan kewajiban atau hutang kepada pihak ketiga dimana tahun 1999 hutang tersebut hanya sebesar Rp. 36.119.494.395,- menjadi Rp. 144.371.037.926,-. Current Ratio turun di tahun ini menjadi 207,47%. Hal ini berarti Rp. 1 hutang lancar dijamin dengan aktiva lancar sebesar Rp. 2,07. berdasarkan prinsip kehati-hatian sebesar 200% maka perusahaan dikatakan likuid, begitu juga dengan skor yang didapat yaitu 3.

c. Tahun 2001

Current Asset Rp. 705.234.345.884,- mengalami penurunan sebesar Rp. 26.445.344.378,- atau sebesar -0,04% dari tahun sebelumnya. Penurunan ini dipengaruhi oleh pendapatan YMH diterima dimana tahun 2000 sebesar Rp. 31.235.768.421,- menurun menjadi Rp. 1.907.105.467,-. Di sisi lain jumlah Current Liabilities mengalami kenaikan sebesar 0,16% atau Rp. 66.037.384.292,- dari tahun sebelumnya dengan Current Liabilities mencapai Rp. 418.707.236.387,-. Hal ini disebabkan oleh pembengkakan pada pendapatan diterima di muka dimana tahun sebelumnya hanya sebesar Rp. 1.003.259.208,- menjadi Rp. 30.533.818.786,-. Pada tahun sebelumnya, kenaikan Current Liabilities terkait oleh hutang pada pihak ketiga, namun tahun ini hutang tersebut justru menurun menjadi Rp. 124.626.351.231,- yaitu dengan penghapusan hutang pada Pemerintah (PDS). Dengan persentase kenaikan hutang lancar dengan aktiva lancar yang tidak sebanding, maka Current Ratio menurun menjadi 168,43%. Jika didasarkan pada prinsip kehati-hatian sebesar 200% maka posisi Current Ratio

dapat dikatakan kurang atau tidak likuid. Namun menurut Keputusan Menteri BUMN yang meletakkan skor 3, posisi ini masih sama dari tahun-tahun sebelumnya.

d. Tahun 2002

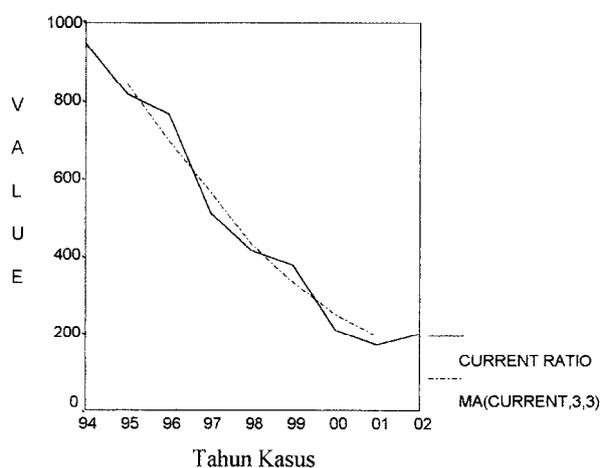
Pada tahun ini Current Ratio mengalami perbaikan dari tahun sebelumnya yang hanya 168,43% kurang dari 200%. Current Ratio tahun ini mencapai 200,16% lebih besar dari standar. Hal ini disebabkan oleh aktiva lancar yang mengalami kenaikan hingga 0,10% atau sebesar Rp. 79.875.659.742,- dari tahun sebelumnya atau aktiva lancar sebesar Rp. 785.110.005.625,-. Peningkatan aktiva lancar terkait oleh peningkatan kas dan hutang, jumlah piutang dan penambahan piutang PPN masukan (tahun sebelumnya piutang PPN masukan ini kosong), sedangkan jumlah kewajiban lancar justru mengalami penurunan sebesar Rp. 26.463.912.369,- atau -0,07% dari tahun sebelumnya. Keadaan kewajiban lancar yang menurun ditandai oleh menurunnya pendapatan diterima di muka. Posisi kenaikan persentase Current Asset dengan Current Liabilities tersebut mengindikasikan kenaikan Current Ratio dan dengan bobot 3, keadaan keuangan perusahaan di tahun ini masih bisa dikatakan dalam keadaan likuid.

3) Rekapitulasi Analisa Current Ratio Sebelum dan Sesudah Perubahan Status

Current Ratio merupakan salah satu rasio likuiditas yang dicari dengan membandingkan antara aktiva lancar dengan hutang lancarnya. Dari analisa

Current Ratio Perusahaan Kereta Api sebelum dan sesudah perubahan status badan hukum diperoleh sebagai berikut :

Gambar 4.1
Current Ratio : Aktual VS Moving Average 3 Tahun



Sumber : Pertumbuhan Current Ratio Tahun 1994-2002 (Data Diolah)

1. Dari gambar 4.1 dapat dilihat kecenderungan yang terjadi pada Current Ratio dimana dari perhitungan fluktuasi yang terjadi tidak rata dan menunjukkan grafik yang terus menurun dari tahun 1994 hingga tahun 2001. Dengan membandingkan perhitungan dengan rata-rata bergerak 3 tahun, fluktuasi yang tidak rata tersebut dapat terlihat lebih halus.
2. Skor yang diperoleh dengan standar penilaian menurut Kep.Men BUMN No:KEP-100/MBU/2002 dijelaskan tidak ada perbedaan antara sebelum dan sesudah perubahan status perusahaan dari Perumka menjadi PT. KAI (Persero). Dari tahun 1994 sampai dengan 2002, Current Ratio masih dalam skor yang sama yaitu 3. Dengan skor 3 dapat dipastikan bahwa keadaan keuangan perusahaan sangat likuid. Hal ini dapat diartikan bahwa tidak ada

kendala likuiditas untuk memenuhi Current Obligation dengan menggunakan elemen aktiva lancarnya.

3. Current Asset mengalami posisi tertinggi pada tahun 2002 yaitu sebesar Rp. 785.110.005.626,- serta posisi terendah pada tahun 1994 dengan Current Asset sebesar Rp. 471.363.474.742,-. Perubahan persentase Current Asset tertinggi terjadi pada tahun 1995 ke tahun 1996 dengan kenaikan sebesar 0,15% atau sekitar Rp. 86 miliar. Sekalipun terjadi fluktuasi, namun perusahaan mampu untuk terus meningkatkan Current Assetnya hingga tahun 2002.
4. Pada tahun 2000, Current Liabilities mengalami peningkatan cukup besar yaitu sekitar 0,47% atau Rp. 164 miliar dari tahun sebelumnya, sekalipun pada tahun ini persentase kenaikan Current Liabilities merupakan yang tertinggi, namun posisi Current Liabilities tertinggi terjadi pada tahun 2001 yang mencapai Rp. 418.707.236.387,-. Sebaliknya, perusahaan dapat menekan Current Liabilities paling rendah pada tahun 1994 yaitu sebesar Rp. 49.734.460.114,-.
5. Menurut perhitungan, Current Ratio tertinggi terjadi pada tahun 1994 dengan persentase 947,76% dan Current Ratio terendah terjadi pada tahun 2001 yaitu 168,43%. Dari gambar 4.1 dapat dilihat bahwa dari tahun 1994 sampai 2000 perusahaan kereta api mengalami penurunan likuiditas, namun pada tahun 2002 perusahaan dapat memperbaiki keadaan likuiditasnya. Aktiva lancar digunakan untuk menjamin hutang-hutangnya didasarkan pada prinsip kehati-hatian 200%, pada tahun 2001 perusahaan tidak bisa memenuhi prinsip kehati-hatian 200% yang berarti berada dalam keadaan kurang likuid.

4.1.1.2 Cash Ratio

Cash Ratio dapat diartikan sebagai kemampuan untuk membayar hutang-hutang yang segera harus dipenuhi dengan kas yang tersedia dalam perusahaan dan efek yang dapat segera diuangkan. Dengan demikian, bila Cash Ratio tinggi berarti semakin likuid karena kas dan efek bisa menjamin lebih besar setiap hutang lancarnya. Cash Ratio dicari menggunakan rumus:

$$\text{Cash Ratio} = \frac{\text{Kas} + \text{Bank} + \text{Surat Berharga Jangka Pendek}}{\text{Current Liabilities}} \times 100\%$$

1) Pada Saat Perusahaan Berstatus Perusahaan Umum (Perum)

Berdasarkan perhitungan, maka didapatkan Cash Ratio Perumka sebagaimana disebutkan dalam tabel 4.3

Tabel 4.3
Cash Ratio PERUMKA (dalam jutaan rupiah)
Tahun periode 1994 - 1998

Tahun	Kas&Bank (Rp)	Srt. Berharga Jk. Pdk (Rp)	Current Liabilities (Rp)	CR (%)	Skor
1994	49.781	152.225	49.734	406,17	3
1995	69.258	119.878	58.530	323,14	3
1996	95.874	185.511	73.680	381,9	3
1997	127.608	226.467	128.845	247,81	3
1998	79.665	334.953	180.814	229,31	3
			Rata-rata	323,07	

Sumber : Neraca dan Laporan R/L Perumka (data diolah)

a. Tahun 1994

Dari tabel 4.3, diketahui Kas dan Bank Rp. 49.781.205.675,- sedangkan Surat Berharga Jangka Pendek sebesar Rp. 152.225.803.625,- yang semuanya terdiri dari deposito. Current Liabilities menunjukkan jumlah Rp. 49.734.460.114,- dimana Current Liabilities terdiri dari hutang pajak, hutang kepada Pemerintah, hutang pihak ketiga, hutang pegawai, hutang lain-lain, dan pendapatan diterima di muka. Dari perhitungan tersebut, didapat Cash Ratio sebesar 406,17%. Jika menggunakan prinsip kehati-hatian 100% untuk Cash Ratio, maka posisi Cash Ratio untuk tahun ini dalam keadaan sangat likuid, atau berarti setiap hutang lancar Rp. 1,- dijamin oleh kas dan efek sebesar Rp. 4,06. Keputusan Menteri BUMN mencantumkan skor 3 untuk perusahaan BUMN Infrastruktur dengan Cash Ratio lebih dari 35%.

b. Tahun 1995

Pada tahun ini Cash Ratio mengalami penurunan, dengan Kas dan Bank sebesar Rp. 69.258.258.451,- atau kenaikan dari tahun sebelumnya sebesar 0,28%. Namun untuk Surat Berharga Jangka Pendek yang terdiri dari deposito, menurun menjadi Rp. 119.878.784.110,- atau berubah sebesar -0,27%. Sedangkan Current Liabilities mengalami peningkatan sebesar 0,15% atau Rp. 8.795.820.772,- menjadi Rp. 58.530.280.886,-. Posisi ini mengakibatkan Cash Ratio turun dari tahun sebelumnya menjadi 323,14%. Dengan demikian dapat diartikan bahwa Rp. 1,- hutang lancar dijamin dengan kas dan bank dan surat berharga jangka pendek sebesar Rp. 3,23, dan masih lebih besar dari prinsip kehati-hatian 1:1. Skor yang

diberikan masih tetap sama yaitu 3, dan menandakan posisi keuangan perusahaan dalam keadaan likuid.

c. Tahun 1996

Dari tabel diatas, terdapat peningkatan kas dan bank sebesar Rp. 26.616.696.386,- atau 0,28% adari tahun sebelumnya. Deposito/surat berharga jangka pendek juga mengalami peningkatan sebesar Rp. 65.633.057.288,- atau 0,35% menjadi Rp. 185.511.841.398,- di tahun ini. Sedangkan Current Liabilities juga mengalami peningkatan sebesar 0,21% menjadi Rp. 73.680.060.465,-. Dengan komposisi kenaikan persentase kas dan bank, surat berharga jangka pendek dan Current Liabilities, dapat dipastikan bahwa Cash Ratio mengalami peningkatan sebesar 381,90% dan masih dengan skor yang sama yaitu 3. Kenaikan Cash Ratio ini terkait oleh peningkatan deposito, kas dan bank serta penghapusan komponen hutang lancar yaitu hutang kepada pemerintah. Keadaan keuangan perusahaan tahun ini masih sangat likuid.

d. Tahun 1997

Kas dan Bank tahun ini mengalami peningkatan sebesar 0,25% atau Rp. 31.733.049.903,- menjadi Rp. 127.608.004.740,-. Surat berharga jangka pendek juga mengalami peningkatan sebesar Rp. 40.955.267.835,- atau 0,18% menjadi Rp. 226.467.109.233,- di tahun ini. Peningkatan surat berharga jangka pendek terkait oleh penambahan komponennya yaitu deposito jaminan kontrak sebesar Rp. 23.417.572.228,- dimana tahun sebelumnya Rp. 0,-. Sedangkan Current Liabilities juga mengalami peningkatan sebesar 0,43% menjadi Rp. 128.845.646.219,-. Peningkatan sebesar 0,43% dari tahun sebelumnya

dipengaruhi oleh hutang kepada Pemerintah (DPS) sebesar Rp. 10.599.174.143,- yang mana tahun sebelumnya Rp. 0,-. Disamping peningkatan hutang pada pihak ketiga, biaya YMH dibayar, hutang pegawai dan hutang lain-lain, Cash Ratio menurun dari tahun 1996 menjadi 274, 81%. Meskipun Cash Ratio menurun, tetapi masih diatas standar dan skornya masih 3.

e. Tahun 1998

Dari tabel kas dan bank sebesar Rp. 79.665.287.506,- mengalami penurunan sebesar Rp. 47.942.717.234,- atau sebesar -0,60% dari tahun sebelumnya. Sedangkan surat berharga jangka pendek mengalami peningkatan sebesar 0,32% menjadi Rp. 334.953.959.339,-. Di sisi lain, Current liabilities juga mengalami peningkatan sekitar 0, 29% atau sebesar Rp. 51.969.027.450,- menjadi Rp. 180.814.673.669,- di tahun ini. Perubahan hutang lancar terkait oleh peningkatan hutang pada pihak ketiga sebesar Rp. 101.168.430.918,- dimana tahun sebelumnya hutang ini hanya sebesar Rp. 53.419.571.622,- disamping peningkatan hutang-hutang lainnya. Dari komposisi kenaikan persentase masing-masing komponen Cash Ratio ini, maka bisa dipastikan Cash Ratio mengalami penurunan sehingga menjadi 229,31%. Posisi Cash Ratio demikian masih dikatakan likuid karena masih lebih besar dari standar yang telah ditetapkan.

2) Pada saat Perusahaan Berstatus Perusahaan Perseroan (PT. Persero)

Berdasarkan perhitungan, maka didapatkan Cash Ratio PT.KAI (Persero) sebagaimana disebutkan dalam tabel 4.4

Tabel 4.4
Cash Ratio PT. KAI (dalam jutaan rupiah)
Tahun periode 1999 - 2002

Tahun	Kas&Bank (Rp)	Srt. Berharga Jk. Pdk (Rp)	Current Liabilities (Rp)	Cash Ratio (%)	Skor
1999	122.233	225.609	187.765	185,25	3
2000	114.251	216.920	352.669	93,9	3
2001	108.483	218.260	418.707	78,04	3
2002	139.372	146.948	392.243	73	3
			Rata-rata	107,55	

Sumber : Neraca dan Laporan R/L PT. KAI (data diolah)

a. Tahun 1999

Tahun ini merupakan tahun transisi perusahaan kereta api dari perusahaan yang berstatus badan hukum Perum menjadi PT. Persero. Posisi keuangan perusahaan per 31 Desember 1999 menunjukkan kenaikan pada kas dan bank dari tahun 1998 sebesar 0,35% menjadi Rp. 122.233.425.287,-. Namun untuk surat berharga jangka pendek mengalami penurunan yang cukup besar yaitu sebanyak Rp. 109.344.612.269,- atau sebesar -0,48% sehingga menjadi Rp. 225.609.347.070,-. Di sisi lain, Current Liabilities mengalami peningkatan sebesar 0,04% menjadi Rp. 187.765.488.408,-. Peningkatan hutang lancar terjadi pada hampir semua komponen hutang lancar, namun hutang pada pihak ketiga justru menurun dari Rp. 101.168.430.918,- menjadi Rp. 36.119.494.396,-. Melihat posisi persentase kenaikan masing-masing pos Cash Ratio, maka ditahun ini Cash Ratio turun menjadi 185,25%, masih bisa dikatakan likuid dan dengan skor 3.

b. Tahun 2000

Penurunan terjadi pada komponen kas dan bank dan surat berharga jangka pendek. Kas dan Bank turun sebesar Rp. 7.982.194.376,- atau -0,07% dan surat berharga jangka pendek turun sebesar -0,04% dimana tahun ini sebesar Rp. 216.920.703.322,-. Di sisi lain, Current Liabilities justru meningkat tajam sebesar Rp. 164.904.363.687,- atau sekitar 0,47% menjadi Rp. 352.669.852.095,- di tahun ini. Peningkatan hutang lancar ini dipengaruhi oleh peningkatan pos hutang pada pihak ketiga sekitar 108 miliar rupiah dan biaya YMH dibayar sekitar 50 miliar rupiah. Hal ini mengakibatkan Cash Ratio turun drastis menjadi 93,90%, bahkan jika menganut prinsip kehati-hatian sebesar 100%, maka bisa dibilang keadaannya tidak likuid, karena Rp. 1,- hutang lancar tidak bisa ditutup oleh Rp. 1,- kas dan bank dan surat berharga jangka pendek. Namun dilihat dari skor Cash Ratio menurut Keputusan Menteri BUMN, posisi ini masih dapat dikatakan likuid seperti tahun sebelumnya.

c. Tahun 2001

Tahun ini kas dan bank juga mengalami penurunan yaitu sekitar -0,05%. Kas dan bank tahun ini sebesar Rp. 108.483.881.866,-. Sedangkan surat berharga jangka pendek mengalami kenaikan sebesar 0,01% menjadi Rp. 218.260.137.887,-. Di sisi lain, Current Liabilities meningkat sebesar 0,16% menjadi Rp. 418.707.236.387,-. Kenaikan Current Liabilities sebesar 0,16% disebabkan peningkatan hutang lain-lain yang mencapai 47 miliar rupiah, biaya YMH dibayar 25 miliar rupiah, dan pendapatan diterima dimuka sebesar 29 miliar rupiah. Dari posisi ini, Cash ratio menunjukkan penurunan menjadi 78,04%, jauh

di bawah standar/prinsip kehati-hatian 100%. Sekalipun demikian, keadaan ini masih tetap berskor 3.

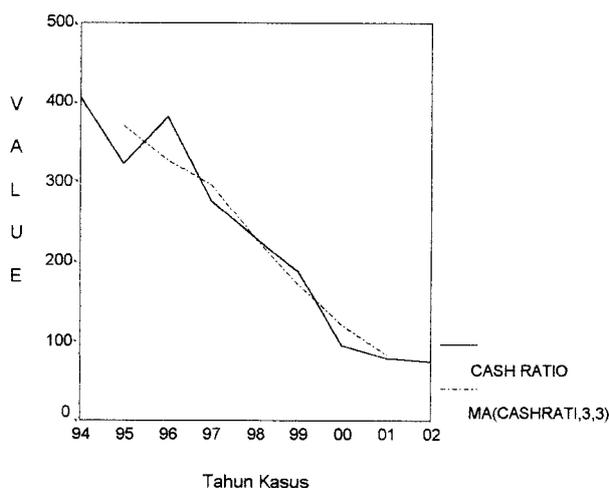
d. Tahun 2002

Kas dan bank tahun ini justru mengalami peningkatan sebesar Rp. 30.888.575.789,- atau 0,22% dari tahun sebelumnya. Kas dan bank tahun 2002 sebesar Rp. 139.372.457.655,- sedangkan dilihat dari tabel maka komponen surat berharga jangka pendek menurun hingga Rp. 146.948.725.512,- di tahun ini atau sebesar -0,49%. Current Liabilities juga mengalami penurunan yaitu sebesar Rp. 26.463.912.369,- atau sekitar -0,07% dan mengakibatkan Current Liabilities tahun ini menjadi Rp. 392.243.324.018,-. Penurunan ini masih dibilang kecil dari pada penurunan surat berharga jangka pendeknya. Persentase kenaikan ataupun penurunan masing-masing komponen ini mengakibatkan Cash Ratio turun menjadi 73%, sekalipun skor juga masih tetap sama yaitu 3.

3) Rekapitulasi Analisa Cash Ratio Sebelum dan Sesudah Perubahan Status

Cash Ratio merupakan salah satu rasio yang digunakan untuk mengukur likuiditas perusahaan melalui perbandingan antara kas dan efek (atau yang setara dengan kas) dengan hutang lancarnya. Dengan mengadakan perbandingan antara tahun-tahun sebelum dan setelah Perusahaan Kereta Api merubah status badan hukumnya menjadi Perusahaan Perseroan, maka dapat diketahui bahwa likuiditas perusahaan kereta api melalui perhitungan Cash Ratio adalah sebagai berikut :

Gambar 4.2
Cash Ratio : Aktual VS Moving Average 3 Tahun



Sumber : Pertumbuhan Cash Ratio Tahun 1994-2002 (Data Diolah)

1. Dari gambar 4.2 dapat dilihat kecenderungan yang terjadi pada Cash Ratio dimana dari perhitungan fluktuasi yang terjadi tidak rata dan menunjukkan grafik yang terus menurun dari tahun 1996 hingga tahun 2000. Dengan membandingkan perhitungan dengan rata-rata bergerak 3 tahun, fluktuasi yang tidak rata tersebut dapat terlihat lebih halus.
2. Dari data dan penjelasan Cash Ratio Perusahaan Kereta Api sebelum dan sesudah perubahan status badan hukum terlihat bahwa tidak ada perubahan pada penilaian Cash Ratio menurut Kep.Men BUMN No:KEP-100/MBU/2002 tentang Kesehatan Perusahaan. Dari tahun 1994 sampai 2002, skor yang diperoleh adalah 3. Hal ini berarti perusahaan masih dinilai likuid pada tahun-tahun tersebut.

3. Tahun 2002, perolehan Kas dan Bank merupakan yang tertinggi dari tahun-tahun sebelumnya, yaitu senilai Rp. 139.372.457.655,- dan perolehan Kas dan Bank terendah pada tahun 1994 yaitu Rp. 49.781.205.675,-.
4. Pada pos Surat Berharga jangka Pendek, terdapat peningkatan yang cukup tajam dari tahun 1995 ke tahun 1996 dengan peningkatan 0,35% atau sekitar Rp. 65 miliar. Penurunan yang cukup tajam sebesar 0,48% terjadi antara tahun pergantian status badan hukum perusahaan yaitu tahun 1998 ke tahun 1999 yang diakibatkan oleh menurunnya deposito dan deposito jaminan kontrak yang cukup besar.
5. Pada tahun 2001, pos Hutang Lancar mengalami peningkatan dan merupakan yang tertinggi dari tahun-tahun yang lain. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya hutang lain-lain sekitar Rp. 47 miliar dan pendapatan diterima di muka sekitar Rp. 29 miliar. Padahal hutang kepada Pemerintah pada tahun 2001 sudah dihapus. Sebaliknya Hutang Lancar terendah terjadi pada tahun 1994 yaitu sebesar Rp. 49.734.460.114,-.
6. Standar Cash Ratio sebesar 1 : 1 dapat ditepati perusahaan dari tahun 1994 sampai tahun 1999, setelah itu Cash Ratio mengalami penurunan hingga mencapai 73% pada tahun 2002. Menurut prinsip kehati-hatian 1 : 1 maka pada tahun 2000 sampai 2002 keadaan keuangan perusahaan bisa dikatakan kurang likuid.

4.1.2 Analisa Rentabilitas

Rentabilitas suatu perusahaan merupakan kemampuan perusahaan untuk mendapatkan laba dengan semua sumber yang ada. Kemampuan ini disebut juga rasio keuntungan atau *Profitability Ratios*. Rentabilitas atau Profitabilitas berhubungan dengan rasio-rasio yang menunjukkan hasil akhir dari sejumlah kebijaksanaan dan keputusan-keputusan. Analisa Rentabilitas yang dihitung meliputi ROE (Imbalan kepada pemegang saham) dan ROI (Imbalan Investasi).

4.1.2.1 Return On Equity (ROE)

ROE merupakan kemampuan dari modal sendiri untuk menghasilkan keuntungan bagi pemegang saham preferen dan saham biasa. Dengan kata lain, ROE merupakan suatu rasio yang menunjukkan seberapa besar keuntungan yang menjadi hak modal sendiri. Semakin besar ROE akan semakin baik, karena pengembalian atau imbalan kepada pemegang saham semakin besar. Namun demikian, ROE yang tinggi tidak selalu mencerminkan baiknya kinerja perusahaan. ROE dihitung menggunakan rumus:

$$\text{ROE} = \frac{\text{Laba setelah pajak}}{\text{Modal sendiri}} \times 100\%$$

1) Pada Saat Perusahaan Berstatus Perusahaan Umum (Perum)

Berdasarkan perhitungan, maka didapatkan Return On Equity Perumka sebagaimana disebutkan dalam tabel 4.5

Tabel 4.5
Return On Equity (ROE) PERUMKA (dalam jutaan rupiah)
Tahun periode 1994 - 1998

Tahun	Laba Setelah Pajak (Rp)	Modal Sendiri (Rp)	ROE (%)	Skor
1994	5.161	1.099.379	0,47	1,5
1995	15.427	1.134.313	1,36	3
1996	16.798	1.210.749	1,39	3
1997	30.370	1.312.951	2,31	3
1998	57.719	1.395.281	4,14	5
Rata-rata			1,93	

Sumber : Neraca dan Laporan R/L Perumka (data diolah)

a. Tahun 1994

Pada tabel diatas, diketahui EAT (*Earning After Tax*) tahun 1994 sebesar Rp. 5.161.139.632,- yang diperoleh dari laba setelah pajak sebesar Rp. 6.406.147.240,- dikurangi dengan laba/rugi luar biasa sebesar Rp. 1.245.007.608,- sedangkan modal sendiri sebesar Rp. 1.099.379.263.371,- diperoleh dari modal dan cadangan dikurangi dengan laba tahun yang berjalan dikurangi dengan aktiva non produktif atau aktiva tetap dalam pelaksanaan. Dari perhitungan didapat nilai ROE hanya sebesar 0,47% yang berarti bahwa setiap Rp. 1,- modal sendiri hanya bisa menghasilkan keuntungan Rp. 0,0047. Keadaan demikian sangat tidak menyenangkan terutama bagi para pemegang saham. Bisa dibilang tahun ini tidak bisa menghasilkan laba yang berarti dari setiap modal yang digunakan untuk memperoleh keuntungan. Bahkan skor yang didapat menurut Kep Men BUMN hanya 1,5 atau sangat rendah.

b. Tahun 1995

EAT tahun ini mengalami peningkatan sebesar 0,67% dari tahun sebelumnya yang telah menunjukkan keadaan yang tidak menguntungkan. Dari tabel diketahui EAT sebesar Rp. 15.427.989.591,- sedangkan di sisi lain, modal sendiri juga mengalami peningkatan, namun hanya sebesar 0,03% atau Rp. 34.934.084.627,- menjadi Rp. 1.134.313.347.998,-. Peningkatan EAT dengan persentase yang cukup besar disebabkan adanya peningkatan pada pos pendapatan dan biaya operasi yang juga cukup besar dari tahun sebelumnya. Dengan persentase kenaikan masing-masing komponen tersebut, maka dipastikan bahwa ROE mengalami peningkatan menjadi 1,36% pada tahun ini. Namun demikian, keadaan tersebut masih belum menghasilkan keuntungan yang lebih baik bagi pemegang sahamnya, karena Rp. 1,- modal sendiri hanya cukup untuk menghasilkan keuntungan sebesar Rp. 0,01. Tahun ini skor yang didapat dari penilaian naik satu peringkat menjadi 3.

c. Tahun 1996

Tahun ini EAT juga mengalami peningkatan, namun hanya sebesar 0,08% menjadi Rp. 16.798.261.734,- demikian juga dengan modal sendiri yang mengalami peningkatan sebesar 0,06% menjadi Rp. 1.210.749.940.820,-. Persentase kenaikan EAT yang lebih besar dari pada persentase kenaikan modal sendiri mengidentifikasi bahwa ROE mengalami peningkatan, hanya saja masih dalam keadaan yang sama atau belum begitu menguntungkan bagi pemegang sahamnya, karena ROE hanya 1,39%. Skor pada tahun ini sama seperti tahun 1996 yaitu 3.

d. Tahun 1997

Tahun ini EAT mengalami peningkatan yang cukup menggembirakan dari pada tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp. 30.370.195.589,- atau meningkat sebesar 0,45%. Peningkatan EAT ini masih terkait oleh peningkatan pendapatan dan biaya non operasi. Di sisi lain, modal sendiri hanya meningkat sebesar 0,08% atau Rp. 102.201.859.218,- menjadi Rp. 1.312.951.800.038,- di tahun ini. Peningkatan yang cukup besar pada komponen EAT menjadikan ROE meningkat yaitu sebesar 2,31%. Hanya saja masih belum menampakkan keuntungan yang disyaratkan oleh para pemegang saham. Skor menurut penilaian Kep Men BUMN juga masih sama, yaitu 3.

e. Tahun 1998

EAT mengalami kenaikan yang cukup besar pada tahun ini dari tahun kemarin. Perubahan EAT yang cukup besar yaitu naik sekitar 0,47% atau Rp. 27.349.154.079,- dan menjadikan EAT yang paling besar diantara tahun-tahun yang lain. Kenaikan ini masih terkait dengan peningkatan pendapatan non operasi yang terdiri dari pendapatan usaha tambahan, persewaan dan lain-lain. EAT tahun ini berjumlah Rp. 57.719.349.668,-, sedangkan modal sendiri juga mengalami peningkatan namun cukup kecil yaitu hanya 0,06% dari tahun sebelumnya. Modal sendiri tahun ini berjumlah Rp. 1.395.281.850.947,-. Komposisi persentase kenaikan tersebut menjadikan nilai ROE meningkat cukup besar dimana tahun ini sebesar 4,14% yang merupakan ROE tertinggi dari tahun-tahun yang lain, dalam artian setiap Rp. 1,- modal sendiri menghasilkan keuntungan sebesar Rp. 0,04. Memang masih kecil, namun skor yang diperoleh meningkat menjadi 5.

2) Pada Saat Perusahaan Berstatus Perusahaan Perseroan (PT. Persero)

Berdasarkan perhitungan, maka didapatkan Return On Equity PT. KAI (Persero) sebagaimana disebutkan dalam tabel 4.6

Tabel 4.6
Return On Equity (ROE) PT. KAI (dalam jutaan rupiah)
Tahun periode 1999 - 2002

Tahun	Laba Setelah Pajak (Rp)	Modal Sendiri (Rp)	ROE (%)	Skor
1999	46.512	2.132.128	2,18	3
2000	39.337	2.158.510	1,82	3
2001	19.025	2.125.998	0,89	1,5
2002	17.824	2.263.182	0,79	1,5
Rata-rata			1,42	

Sumber : Neraca dan Laporan R/L PT. KAI (data diolah)

a. Tahun 1999

Tahun ini merupakan tahun yang sangat penting bagi perusahaan dimana tahun ini memasuki tahun transisi dan perubahan status badan hukum perusahaan, demikian juga dengan posisi keuangan perusahaan. Dari laporan laba rugi per 31 Desember 1999, EAT tahun ini justru mengalami penurunan sebesar Rp. 11.206.473.894,- atau -0,24% dengan EAT sebesar Rp. 46.512.875.774,-. EAT yang turun pada tahun ini disebabkan turunnya pendapatan operasi sekitar Rp. 183 miliar, turunnya kompensasi pemerintah sebesar Rp. 13 miliar, dan turunnya pendapatan lain-lain pada pendapatan non operasi sekitar Rp. 95 miliar. Di sisi lain, modal sendiri naik cukup besar dengan peningkatan sebesar 0,35% atau modal sendiri tahun ini menjadi Rp. 2.132.128.963.531,- karena kenaikan modal

dan cadangan. Hal ini mengakibatkan ROE menurun menjadi sebesar 2,18% diikuti dengan turunnya skor dari 5 menjadi 3.

b. Tahun 2000

Pada laporan R/L tahun ini, pos kompensasi pemerintah diganti dengan pos PSO (Public Service Obligation) dimana pos ini mengalami peningkatan sebesar Rp. 237 miliar. Sekalipun terdapat peningkatan subsidi pemerintah, namun EAT justru mengalami penurunan sebesar 0,18% menjadi Rp. 39.337.792.192,-. Hal ini diakibatkan oleh pos laba/rugi luar biasa mengalami kerugian sebesar Rp. 15.481.353.733,-. Modal sendiri mengalami peningkatan hanya sebesar 0,01% atau menjadi Rp. 2.158.510.293.731,- yang menjadikan ROE turun menjadi 1,82% dengan bobot skor 3. Posisi ini sangat tidak menguntungkan bagi para pemegang saham.

c. Tahun 2001

EAT tahun ini mengalami penurunan yaitu sekitar Rp. 20 miliar atau -1,07%. Terjadinya penurunan karena keuntungan yang didapat dari pendapatan non operasi turun sekitar Rp. 12 miliar. Disamping itu juga diakibatkan turunnya PSO yang sangat besar yaitu sekitar Rp 210 miliar. EAT tahun ini hanya sebesar Rp. 19.025.267.277,- dan modal sendiri sebesar Rp. 2.125.998.343.145,- atau menurun 0,02% dari tahun kemarin. Sekalipun sama-sama terdapat penurunan diantara komponen ROE, namun penurunan EAT lebih tajam dari penurunan modal sendiri. ROE tahun ini menjadi 0,89% dengan diikuti penurunan skor menjadi 1,5.

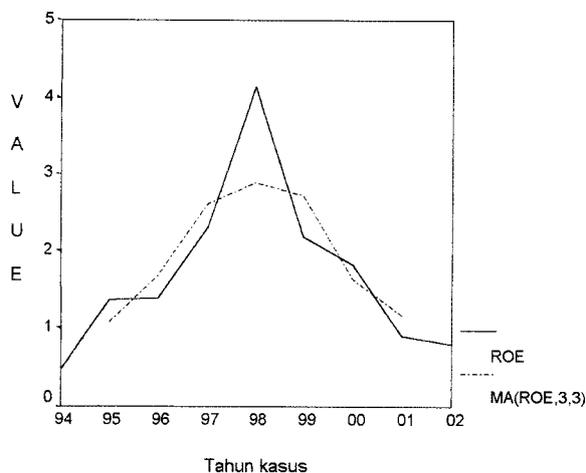
d. Tahun 2002

Jumlah EAT masih mengalami penurunan yaitu sebesar 0,07% menjadi Rp. 17.824.148.764,- di tahun ini. Hal ini disebabkan oleh turunnya pendapatan non operasi dan adanya pajak tangguhan sekitar Rp.18 miliar. Sekalipun pada pendapatan operasi mengalami peningkatan sekitar Rp. 256 miliar dan penambahan pos PSO sebesar Rp. 15 miliar. Di sisi lain, modal sendiri mengalami kenaikan sebesar 0,06% atau sekitar Rp. 137 miliar menjadi Rp. 2.263.182.160.759,-. Dengan persentase kenaikan modal sendiri dan penurunan EAT tersebut mengakibatkan ROE turun menjadi 0,79% dengan skor 1,5.

3) Rekapitulasi Analisa ROE Sebelum dan Sesudah Perubahan Status

Sebagai salah satu rasio yang digunakan untuk mengukur rentabilitas atau kemampuan mendapatkan keuntungan, maka ROE diperoleh dari membandingkan laba setelah pajak (EAT) dengan modal sendirinya. Pada analisa diperoleh kesimpulan ROE sebagai berikut:

Gambar 4.3
ROE : Aktual VS Moving Average 3 Tahun



Sumber : Pertumbuhan ROE Tahun 1994-2002 (Data Diolah)

1. Dari gambar 4.3, ROE aktual terlihat berfluktuasi dengan membentuk kerucut dengan perolehan ROE tertinggi pada tahun 1998. Sekalipun dengan merata-rata 3 tahun, kecenderungan yang terjadi pada ROE terlihat seperti garis lengkung yang cukup simetris.
2. Dari skor ROE yang diperoleh dengan penilaian menurut kep Men BUMN No: KEP-100/MBU/2002 tentang penilaian kesehatan perusahaan dari tahun ke tahun terjadi perubahan dengan posisi ROE tertinggi pada tahun 1998 dengan skor 5. Sedangkan tahun 1994 dan dua tahun terakhir data (2001 dan 2002) skornya hanya 1,5.
3. Posisi EAT (Laba Setelah Pajak) tertinggi terjadi pada tahun 1998 yaitu sebesar Rp. 57.719.349.668,- atau bisa dikatakan terjadi peningkatan yang cukup tajam pada pos laba setelah pajak dari tahun sebelumnya. Sedangkan EAT terendah terjadi pada tahun 1994 yang hanya Rp. 5.161.139.632,-.
4. Pada pos modal sendiri, peningkatan terbesar terjadi pada tahun 1999 yaitu sebesar 0,35% atau Rp. 736 Miliar dari tahun sebelumnya. Namun posisi modal sendiri tertinggi terjadi pada tahun 2002 yaitu sebesar Rp. 2.263.182.160.759,- dan terendah terjadi pada tahun 1994 yaitu sebanyak Rp. 1.099.379.263.371,-.
5. Persentase ROE tertinggi terjadi pada tahun 1998 yaitu sebesar 4,14% seiring dengan meningkatnya EAT yang cukup tajam. Pada posisi ini keuntungan yang diperoleh lebih besar dibandingkan tahun-tahun yang lain, sekalipun demikian sebagai perusahaan infrastruktur, PT. KAI belum dapat memperlihatkan pengembalian modal yang layak bagi pemegang sahamnya.

Dari gambar 4.3 dapat dilihat adanya kenaikan ROE terus menerus hingga tahun 1998, setelah itu adanya pergantian status badan hukum dan peristiwa-peristiwa luar biasa justru menjadikan ROE menurun seiring dengan bertambahnya tahun. ROE paling kecil terdapat pada tahun 1994 yaitu dengan persentase 0,47%.

4.1.2.2 Return On Investment (ROI)

ROI merupakan kemampuan dari modal yang diinvestasikan dalam keseluruhan aktiva untuk menghasilkan keuntungan neto. ROI juga dapat digunakan untuk mengevaluasi efektivitas perusahaan. Hal ini juga dapat berarti bahwa jika ROI tinggi maka kemampuan dari suatu investasi untuk menghasilkan laba bersih juga tinggi. ROI dicari menggunakan rumus:

$$\text{ROI} = \frac{\text{EBIT} + \text{Penyusutan}}{\text{Capital Employeed}} \times 100\%$$

1) Pada Saat Perusahaan Berstatus Perusahaan Umum (Perum)

Berdasarkan perhitungan, maka didapatkan Return On Investment Perumka sebagaimana disebutkan dalam tabel 4.7

Tabel 4.7
Return On Investment (ROI) PERUMKA (dalam jutaan rupiah)
Tahun periode 1994 - 1998

Tahun	EBIT (Rp)	Penyusutan (Rp)	Capital Employed (Rp)	ROI (%)	Skor
1994	5.161	46.125	1.722.177	2,98	2,5
1995	15.427	56.079	1.994.776	3,58	3
1996	16.798	63.686	2.119.714	3,8	3
1997	30.370	82.320	2.738.707	4,11	3
1998	57.719	101.774	3.046.444	5,24	3,5
Rata-rata				3,94	

Sumber : Neraca dan Laporan R/L Perumka (data diolah)

a. Tahun 1994

Dari tabel diatas, diketahui EBIT sebesar Rp. 5.161.139.632,- dengan penyusutan sebesar Rp. 46.125.057.015,-. Komponen EBIT terdiri dari laba sebelum bunga dan pajak dikurangi dengan laba/rugi pos luar biasa. Sedangkan Penyusutan diperoleh dari penambahan aktiva pos sarana, prasarana dan AT. Fasilitas. Di sisi lain, terdapat Capital Employed sebesar Rp. 1.722.177.487.629,-. ROI diperoleh dari perhitungan sebesar 2,98% yang berarti setiap Rp. 1,- modal yang diinvestasikan hanya menghasilkan keuntungan Rp. 0,02 untuk para investor. Skor dari penilaian Kep Men BUMN untuk ROI tahun 1994 ini adalah 2,5.

b. Tahun 1995

Pada tahun ini EBIT mengalami peningkatan yang cukup besar dari tahun 1994, yaitu sebesar 0,67% atau sekitar Rp. 10 miliar, dan menghasilkan EBIT sebesar Rp. 15. 427.989.590,- diikuti dengan kenaikan penyusutan sebesar 0,18% menjadi Rp. 56.079.629.663,-. Di sisi lain, Capital Employed juga mengalami

peningkatan sebesar 0,14% dari tahun sebelumnya menjadi Rp. 1.994.776.555.713,-. Kenaikan persentase ini menyebabkan ROI naik sebesar 3,58% atau dengan skor lebih tinggi yaitu 3.

c. Tahun 1996

Tahun 1996, EBIT hanya meningkat sebesar 0,08% atau Rp. 1.370.272.144,- sehingga tahun ini EBIT menjadi Rp. 16.798.261.734,-. Penyusutan juga mengalami peningkatan yaitu sebesar 0,12% menjadikan penyusutan naik menjadi Rp. 63.686.098.263,-. Hal ini karena AT. Fasilitas naik sebesar satu miliar rupiah. Sedangkan Capital Employed mengalami kenaikan 0,06% menjadi Rp. 2.119.714.586,-. Kenaikan komponen ROI ini mengakibatkan ROI menjadi 3,80% atau lebih tinggi 0,38% dari tahun 1995. Skor ROI tahun ini masih tetap sama, yaitu 3.

d. Tahun 1997

Tahun ini EBIT mengalami peningkatan yang cukup besar yaitu meningkat sebesar 0,45% atau senilai Rp. 13.571.933.855,- menjadi Rp. 30.370.195.589,-. Peningkatan EBIT ini terkait oleh peningkatan pendapatan operasi dan pendapatan lain-lain. Sedangkan kompensasi pemerintah masih tetap sama yaitu sebesar Rp. 31,5 miliar. Penyusutan juga mengalami peningkatan sebesar 0,23% atau menjadi Rp. 82.320.937.312,- di tahun ini. Di sisi lain Capital Employed juga meningkat sebesar 0,23% atau sebesar Rp. 618.992.476.436,- menjadi Rp. 2.738.707.278.022,- di tahun ini. ROI meningkat menjadi 4,11% dan masih dalam skor yang sama yaitu 3.

e. Tahun 1998

Tahun 1998 merupakan tahun yang dinilai mempunyai ROI yang cukup bagus dari tahun-tahun sebelumnya, yaitu dengan ROI sebesar 5,24% atau dengan skor yang meningkat menjadi 3,5. Peningkatan ROI ini dipengaruhi oleh peningkatan EBIT hampir sebesar 0,5% atau peningkatan sebesar Rp. 27.349.154.079,- dari tahun sebelumnya. Di tahun ini EBIT mencapai Rp. 57.719.349.668,-. Peningkatan EBIT ini terkait oleh kenaikan pendapatan non operasi dimana sebelumnya sebesar Rp. 66 miliar menjadi Rp. 142 miliar. Penyusutan juga meningkat namun hanya sebesar 0,19% menjadi Rp. 101.774.812.332,-. Di sisi lain, Capital Employed mengalami peningkatan sebesar 0,10% atau sekitar Rp. 307 miliar, menjadi Rp. 3.046.444.186.654,-. Namun peningkatan ROI tersebut masih belum berarti secara signifikan karena Rp. 1,- investasi hanya mampu menghasilkan keuntungan sebesar Rp. 0,05.

2) Pada Saat Perusahaan Berstatus Perusahaan Perseroan (PT. Persero)

Berdasarkan perhitungan, maka didapatkan Return On Investment PT. KAI (Persero) sebagaimana disebutkan dalam tabel 4.8

Tabel 4.8
Return On Investment (ROI) PT. KAI (dalam jutaan rupiah)
Tahun periode 1999 - 2002

Tahun	EBIT (Rp)	Penyusutan (Rp)	Capital Employed (Rp)	ROI (%)	Skor
1999	52.567	100.203	2.553.078	5,98	3,5
2000	39.337	84.706	2.956.130	4,2	3
2001	19.025	110.079	3.164.627	4,08	3
2002	37.631	139.181	3.765.633	4,7	3
Rata-rata				4,74	

Sumber : Neraca dan Laporan R/L PT. KAI (data diolah)

a. Tahun 1999

Pada tahun pergantian status badan hukum dari perusahaan umum menjadi perusahaan perseroan ini, EBIT justru mengalami penurunan sebesar 0,10% atau menurun sebesar Rp. 5.151.615.209,- menjadi Rp. 52.567.734.459,- pada tahun ini. Penurunan EBIT tahun ini disebabkan menurunnya pendapatan operasi sekitar Rp. 182 miliar, turunnya kompensasi pemerintah sekitar Rp. 13 miliar, disamping juga penurunan pendapatan non operasi dan penurunan lain-lain. Penyusutan juga mengalami penurunan namun hanya sebesar 0,02% menjadi Rp. 100.203.737.753,-. Begitu pula penurunan pada komponen Capital Employed yaitu sebesar 0,19% menjadi Rp. 2.553.070.010.680,- pada tahun ini. Adanya penurunan persentase masing-masing komponen tersebut, menghasilkan ROI sebesar 5,98% dan masih bertahan pada skor 3,5.

b. Tahun 2000

Mulai tahun ini, kompensasi Pemerintah diganti dengan pos PSO atau pos Public Service Obligation yang jumlahnya meningkat hampir sebanyak Rp. 237

miliar. Sekalipun terdapat peningkatan yang besar pada pos PSO, namun EBIT justru menurun sebesar 0,34%. Penurunan EBIT yang cukup besar ini disebabkan peningkatan biaya-biaya sebesar Rp. 269 miliar. Penyusutan juga mengalami penurunan lebih dari Rp. 15 miliar atau -0,18% dari tahun sebelumnya menjadi Rp. 84.706.365.488,-. Di sisi lain, Capital Employed justru mengalami peningkatan sebesar 0,14% menjadi Rp. 2.956.130.919.505,-. Hal ini mengakibatkan ROI turun menjadi 4,20% dengan disertai penurunan skor menjadi 3.

c. Tahun 2001

EBIT turun drastis pada tahun ini dengan penurunan lebih dari Rp. 20 miliar, atau penurunan sekitar 1,07% sehingga EBIT hanya sebesar Rp. 19.025.267.277,-. Penurunan EBIT yang cukup besar ini terkait oleh penurunan pendapatan non operasi sekitar Rp. 12 miliar, peningkatan biaya-biaya yang mencapai Rp. 35 miliar, dan penurunan pada pos PSO sebesar Rp. 210 miliar. Penyusutan mengalami peningkatan sebesar 0,23% menjadi Rp. 25.373.229.891,-. Di lain pihak, Capital Employed mengalami peningkatan 0,07% atau sebesar Rp. 208.497.025.266,- menjadi Rp. 3.164.627.944.771,- pada tahun ini. Hal ini mengakibatkan ROI turun menjadi 4,08% dan skor masih tetap sama yaitu 3.

d. Tahun 2002

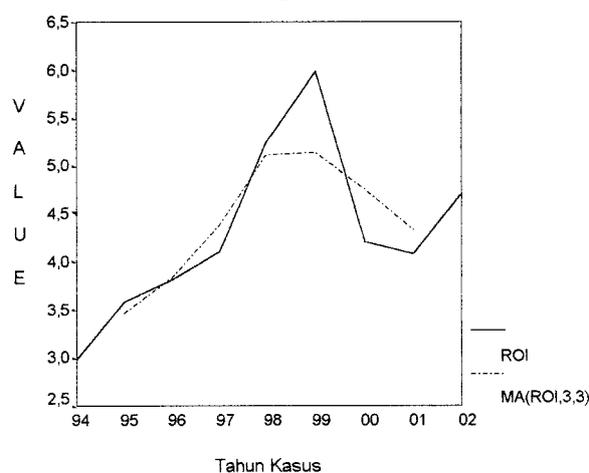
Tahun ini EBIT mengalami peningkatan yang cukup besar dari tahun sebelumnya yakni sebesar 0,49% atau EBIT tahun ini menjadi Rp. 37.631.973.346,-. Peningkatan EBIT dipengaruhi oleh peningkatan PSO sebesar Rp. 15 miliar dan pendapatan operasi sebesar Rp. 301 miliar, sekalipun dari pos

biaya umum juga mengalami peningkatan sebesar Rp. 94 miliar. Penyusutan naik sebesar 0,21% menjadi Rp. 139.181.266.451,-. Capital Employed mengalami peningkatan sebesar 0,16% atau sekitar Rp. 601 miliar menjadi Rp. 3.765.633.686.198,- di tahun ini. ROI tahun 2002 naik menjadi 4,70% dari tahun sebelumnya sekalipun masih dengan skor yang sama.

3) Rekapitulasi Analisa ROI sebelum dan sesudah perubahan status

ROI merupakan salah satu rasio keuntungan yang diukur melalui perbandingan antara EBIT dan Penyusutan dengan Capital Employed. Dari analisa ROI dapat diperoleh data sebagai berikut :

Gambar 4.4
ROI : Aktual VS Moving Average 3 Tahun



Sumber : Pertumbuhan ROI Tahun 1994-2002 (Data Diolah)

1. Pada gambar 4.4 terdapat perbedaan antara grafik ROI hasil perhitungan dengan grafik ROI dengan rata-rata bergerak 3 tahun. Dimana rata-rata bergerak juga digunakan untuk memperhalus fluktuasi atau lonjakan dan mengamati kecenderungan ROI setiap tahunnya.

2. Skor yang diperoleh ROI sebelum dan sesudah perubahan status badan hukum dengan standar penilaian menurut Kep.Men BUMN No: KEP-100/MBU/2002 memperlihatkan skor awal tahun data (1994) sebesar 2,5 terus menerus naik dan pada tahun pergantian status yaitu pada tahun 1998 dan 1999 mencapai skor 3,5. Kemudian setelah tahun 1999, ROI mengalami penurunan skor yang cukup stabil yaitu 3.
3. Pada tahun 1998, EBIT menunjukkan jumlah yang paling besar dari pada tahun-tahun yang lain yaitu mencapai Rp. 57.719.349.668,- dan mencapai EBIT terendah pada tahun 1994 yaitu sekitar Rp. 5 miliar.
4. Penyusutan mengalami jumlah tertinggi pada tahun 2002 sebanyak Rp. 139.181.266.451,- dan terendah pada tahun 1994 sebanyak Rp. 46.125.057.015,-. Penyusutan yang terdiri dari sarana, pra sarana dan AT. fasilitas mengalami peningkatan tiap tahun hingga tahun 1998. Di tahun pergantian (1999) penyusutan justru menurun, namun kemudian kembali meningkat untuk tahun-tahun sesudahnya.
5. Peningkatan juga terjadi pada Capital Employed yaitu dari tahun 1994 hingga tahun 1998 yang mencapai jumlah tertinggi pada saat perusahaan berstatus PERUMKA, yaitu sebanyak Rp. 3.046.444.186.654,-. Pada tahun 1999 mengalami penurunan sebanyak 0,19%, dan tahun 2000 hingga 2002 terus meningkat hingga mencapai jumlah tertinggi yaitu Rp. 3.765.633.686.198,-.
6. ROI tertinggi terjadi pada tahun 1999 yang mencapai 5,98% dan terendah terjadi pada tahun 1994 yaitu 2,98%. Diantara tahun 1994 hingga 1998, ROI bergerak naik secara perlahan-lahan dan mencapai puncak pada tahun 1999.

Namun kemudian turun stabil. Posisi ROI tertinggi pada tahun 1999 mengindikasikan bahwa perusahaan kereta api dapat mengelola Capital Employed secara lebih bagus dan berupaya untuk menghasilkan keuntungan yang lebih besar dengan adanya kemampuan mandiri perusahaan dalam mencari keuntungan.

4.1.3 Analisa Aktivitas

Analisa aktivitas suatu perusahaan berarti mengukur keefektifan perusahaan dalam mengelola sumber-sumber dananya. Hal ini dapat juga diartikan bahwa suatu rasio aktivitas merupakan suatu alat untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam mengatur persediaan bahan mentah, barang dalam proses, dan barang jadi serta berbagai kebijakan manajemen dalam mengelola aktiva lainnya beserta kebijakan pemasarannya. Unsur-unsur aktiva dalam neraca sangat diperlukan dalam analisa aktivitas. Biasanya rasio aktivitas diukur dengan istilah perputaran unsur-unsur aktivanya. Analisa aktivitas yang dihitung dalam bab ini adalah Collection Periods (CP), Perputaran Persediaan (PP), dan Perputaran Total Asset (TATO).

4.1.3.1 Collection Periods (CP)

Collection Periods merupakan alat yang digunakan untuk menunjukkan berapa banyak waktu yang diperlukan untuk mengumpulkan piutang. Periode pengumpulan piutang yang baik adalah bila pengumpulannya kurang dari 60 hari atau dapat juga diartikan makin kecil harinya berarti makin baik atau makin cepat.

Menurut Kep Men BUMN, Collection Periods (CP) dapat dicari menggunakan rumus:

$$\text{Collection Periods} = \frac{\text{Total piutang usaha}}{\text{Total pendapatan usaha}} \times 365 \text{ hari}$$

1) Pada Saat Perusahaan Berstatus Perusahaan Umum (Perum)

Berdasarkan perhitungan, maka didapatkan Collection Periods Perumka sebagaimana disebutkan dalam tabel 4.9

Tabel 4.9
Collection Periods PERUMKA (dalam jutaan rupiah)
Tahun periode 1994 - 1998

Tahun	Tot. Piutang Usaha (Rp)	Tot. Pendapatan Usaha (Rp)	CP (hari)	Skor
1994	87.033	510.689	62	3,5
1995	128.010	602.720	78	3,5
1996	84.699	715.918	43	4
1997	107.644	823.934	48	4
1998	105.469	1.083.466	36	4
			Rata-rata	53,2

Sumber : Neraca dan Laporan R/L Perumka (data diolah)

a. Tahun 1994

Total piutang usaha pada tahun 1994 sebesar Rp. 87.033.538.476,- berasal dari piutang niaga sebesar Rp. 52.494.813.824,-, piutang pegawai Rp. 595.467.415,-, piutang lain-lain Rp. 36.915.031.730,- dikurangi dengan cadangan piutang ragu-ragu sebesar Rp. 2.971.774.493,-. Sedangkan total pendapatan usaha sebesar Rp. 510.689.491.093,- diperoleh dari jumlah pendapatan operasi, jumlah

penerimaan dan jumlah pendapatan non operasi. Dari perhitungan, Collection Periods adalah 62 hari. Collection Periods demikian berarti bahwa pengumpulan piutang setiap 62 hari sekali. Collection Periods masih dikatakan cukup baik, karena standar Collection Periods adalah 60 hari. Skor yang ditetapkan menurut Kep Men BUMN tahun 2002 tentang penilaian kesehatan perusahaan pada kriteria Collection Periods adalah 3,5.

b. Tahun 1995

Tahun ini total piutang usaha mengalami peningkatan sebesar 0,32% atau Rp. 40.976.802.716,- menjadi Rp. 128.010.341.192,-. Peningkatan ini disebabkan naiknya pos piutang lain-lain kurang lebih sebesar Rp. 5 miliar. Peningkatan juga terjadi pada total pendapatan usaha yaitu sekitar Rp. 92 miliar atau 0,15% sehingga total pendapatan usaha tahun ini menjadi Rp. 602.720.677.703,-. Collection Periods tahun ini meningkat menjadi 78 hari. Dalam artian bahwa waktu pengumpulan piutang lebih lambat 16 hari dari tahun 1994. skor menurut penilaian masih tetap sama dengan tahun sebelumnya yaitu sebesar 3,5.

c. Tahun 1996

Perubahan terjadi pada pos piutang usaha, yaitu menurun sebanyak Rp. 43.310.532.736,- atau sebanyak -0,51%. Penurunan total piutang usaha sebanyak 0,51% ini terkait oleh penurunan piutang lain-lain sekitar Rp. 46 miliar, sedangkan total pendapatan usaha justru mengalami peningkatan sebesar 0,16% atau Rp. 113.198.104.515,- menjadi Rp. 715.918.782.218,- di tahun ini. Collection Periods mengalami penurunan hari menjadi 43 hari, yang berarti waktu yang diperlukan untuk mengubah piutang menjadi kas hanya selama 43 hari.

Tahun 1996 Collection Periods mendapat skor 4, menandakan kenaikan peringkat lebih baik.

d. Tahun 1997

Pada tahun ini semua komponen piutang usaha mengalami kenaikan, sehingga total piutang usaha naik dengan persentase 0,21% atau sekitar Rp. 22 miliar sehingga menjadi Rp. 107.644.468.210,-. Kenaikan juga dialami oleh pendapatan usaha yaitu sebesar 0,13% atau Rp. 108.015.557.906,- dengan total pendapatan usaha menjadi Rp. 823.934.340.124,-. Kenaikan tersebut disebabkan semua komponen pendapatan usaha juga mengalami kenaikan. Namun persentase kenaikan pendapatan lebih kecil daripada persentase kenaikan piutang sehingga Collection Periods naik menjadi 48 hari yang berarti waktu pengumpulan piutang lebih lambat 5 hari dibanding tahun 1996. Sekalipun demikian, skor tahun ini masih sama dengan tahun kemarin, yaitu 4.

e. Tahun 1998

Jumlah total piutang usaha dalam tabel sebesar Rp. 105.469.634.144,- pada tahun ini menandakan adanya penurunan sebesar Rp. 2.174.834.066,- atau -0,02%. Hal ini terjadi karena piutang niaga turun hampir sebesar Rp. 14 miliar sedangkan cadangan piutang ragu-ragu justru naik sekitar Rp. 400 juta. Di sisi lain, total pendapatan usaha naik sebesar 0,24% atau sekitar Rp. 259 miliar mengakibatkan total pendapatan usaha tahun ini menjadi Rp. 1.083.466.197.424,-. Kenaikan sebesar 0,24% terkait oleh kenaikan pendapatan non operasi hampir sebesar Rp. 80 miliar. Adanya persentase kenaikan total pendapatan usaha yang

cukup besar mengakibatkan Collection Periods turun atau berputar lebih cepat 12 hari dari pada tahun 1997. namun sekor masih tetap sama dengan tahun 1997.

2) Pada Saat Perusahaan Berstatus Perusahaan Perseroan (PT. Persero)

Berdasarkan perhitungan, maka didapatkan Collection Periods PT. KAI (Persero) sebagaimana disebutkan dalam tabel 4.10

Tabel 4.10
Collection Periods PT. KAI (dalam jutaan rupiah)
Tahun periode 1999 - 2002

Tahun	Tot. Piutang Usaha (Rp)	Tot. Pendapatan Usaha (Rp)	CP (hari)	Skor
1999	104.492	1.349.597	17	4
2000	106.182	1.704.523	23	4
2001	129.999	1.718.125	28	4
2002	204.166	2.027.931	37	4
Rata-rata			25,92	

Sumber : Neraca dan Laporan R/L PT. KAI (data diolah)

a. Tahun 1999

Pada tabel diatas, total piutang tahun 1999 usaha sebesar Rp. 104.492.822.169,- atau mengalami penurunan dari tahun 1998 sebesar 0,01%. Adanya penurunan piutang usaha yang hanya sebesar Rp. 976 juta tidak mempengaruhi pendapatan usahanya yang justru meningkat sebesar 0,20% atau sebesar Rp. 266.131.730.009,-. Padahal jumlah penerimaan turun sekitar Rp. 13 miliar. Total pendapatan usaha pada tahun 1999 ini mencapai Rp. 1.349.597.927.433,-. Collection Periods menjadi berputar lebih cepat menjadi 17

hari. Tahun ini merupakan tahun yang paling singkat dalam pengumpulan piutangnya dari pada tahun-tahun sebelumnya. Skor menurut penilaian adalah 4.

b. Tahun 2000

Pada tahun 2000 ini, total piutang usaha naik sebesar Rp. 1.689 juta atau sebesar 0,02% menjadi Rp. 106.182.296.157,-. Di sisi lain, peningkatan sebesar 0,21% terjadi pada total pendapatan usaha menjadi Rp. 1.704.523.071.768,- dimana peningkatan disebabkan oleh naiknya penerimaan dari Pemerintah atau yang lebih dikenal sebagai PSO (*Public Service Obligation*) dimana tahun 1999 hanya sebesar Rp.18 miliar sedangkan tahun ini menjadi Rp. 255 miliar. Di samping penerimaan, kenaikan terjadi pada pos pendapatan operasi sebesar Rp. 622 miliar. Collection Periods berputar lebih lambat dari tahun 1999, dan tahun ini waktu pengumpulan piutangnya adalah 23 hari. Penilaian Collection Periods mendapat skor 4.

c. Tahun 2001

Adanya kenaikan pada komponen piutang usaha mengakibatkan kenaikan total piutang usaha sebesar 0,18% atau Rp. 22 miliar dengan total Rp. 129.999.494.226,-. Di lain pihak, total pendapatan usaha juga mengalami kenaikan, namun hanya sebesar 0,01% menjadi Rp. 1.718.125.667.773,- pada tahun ini. Persentase kenaikan total piutang usaha yang lebih besar dari pada persentase kenaikan total pendapatan usahanya mengakibatkan Collection Periods naik menjadi 28 hari, dengan skor 4.

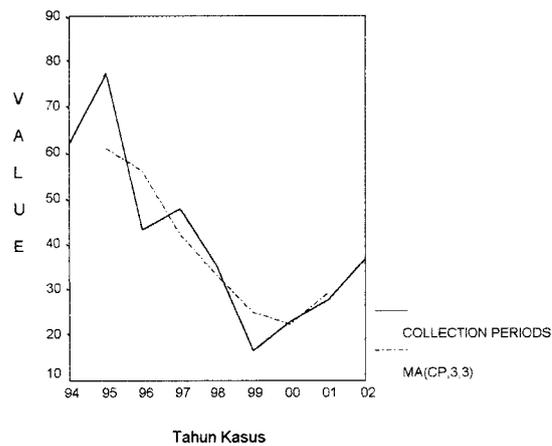
d. Tahun 2002

Pada tahun ini total piutang usaha sebesar Rp. 204.166.127.792,- atau naik hampir sebesar Rp. 75 miliar. Bisa dikatakan terjadi kenaikan sebesar 0,36% dari tahun 2001. Kenaikan memang terjadi disemua komponen piutang usaha, namun kenaikan yang cukup besar terjadi pada pos piutang niaga yang meningkat hampir sebesar 60 miliar. Di sisi lain, jumlah pendapatan usaha naik sebesar 0,15% atau sebesar Rp. 309 miliar. Kenaikan pendapatan usaha menjadi Rp. 2.027.931.389.458,- ini disebabkan kenaikan pada pos pendapatan operasi sebesar Rp. 30 miliar dan pos penerimaan sebesar Rp. 15 miliar. Collection Periods tahun ini mengalami kenaikan sebesar 9 hari atau lebih lambat dari tahun 2001. sedangkan skor dalam penilaian Collection periods masih tetap sama, yaitu 4.

3) Rekapitulasi Analisa Collection Periods Sebelum dan Setelah Perubahan Status

Collection Periods merupakan salah satu rasio aktivitas yang sangat penting untuk mengukur seberapa efektif perusahaan dalam mengelola sumber-sumber dananya. Collection Periods merupakan perbandingan antara Total Piutang Usaha dengan Total Pendapatan Usahanya. Melalui analisa dapat ditarik kesimpulan tentang Collection Periods sebagai berikut :

Gambar 4.5
Collection Periods : Aktual VS Moving Average 3 Tahun



Sumber : Pertumbuhan Collection Periods Tahun 1994-2002 (Data Diolah)

1. Pada gambar 4.5 Collection Periods berfluktuasi dan mencapai nilai terendah pada tahun 1999 dengan moving average 3 tahun, fluktuasi yang nampak dalam perhitungan collection periods menjadi lebih halus dan linear.
2. Dari penilaian menurut Kep.Men BUMN No:KEP-100/MBU/2002, skor dari tahun sebelum perubahan status badan hukum perusahaan meningkat terutama pada tahun 1995 ke tahun 1996 dengan skor 3,5 menjadi 4. Namun demikian kenaikan skor hanya pada tahun tersebut, untuk tahun selanjutnya skornya tetap sama yaitu 4.
3. Komponen Total Piutang Usaha terus mengalami peningkatan dari tahun 1994 hingga tahun 2002. Peningkatan total piutang usaha terbesar terjadi pada tahun 2002 yaitu sebesar 0,36% dengan Total Piutang Usaha sebesar Rp. 204.166.127.792,-. Sebaliknya jumlah Piutang Usaha paling rendah terjadi pada tahun 1996, yaitu sebanyak Rp. 84.699.808.456,-. Sedangkan untuk tahun-tahun lainnya mengalami fluktuasi yang cukup stabil.

4. Total Pendapatan Usaha mengalami jumlah paling besar pada tahun 2002 yang mencapai Rp. 2.027.931.389.458,- dan terendah tahun 1994 yaitu sebanyak Rp. 510.689.491.093,-. Pos pendapatan usaha ini memiliki pengaruh yang sangat penting pada masa transisi/pergantian status badan hukum perusahaan disebabkan terdapat penerimaan/subsidi dari Pemerintah, dimana pada tahun 1994 ke tahun 1995 turun sebesar Rp. 3 miliar dan stabil hingga tahun 1998. Subsidi dari Pemerintah tersebut berganti menjadi proyek PSO mulai tahun 1999 dengan jumlah yang berubah-ubah setiap tahunnya.
5. Collection Periods meningkat setiap tahun dan mencapai Collection Periods tercepat pada tahun 1999 dengan waktu pengumpulan piutang 17 hari dalam 1 perputaran. Dengan demikian pada waktu itu perusahaan dapat dikatakan sangat efektif dalam operasinya.

4.1.3.2 Perputaran Persediaan

Perputaran Persediaan (PP) merupakan salah satu alat untuk menganalisa aktifitas perusahaan yang didefinisikan sebagai kemampuan dana yang tertanam dalam inventori atau persediaan berputar dalam suatu periode tertentu atau likuiditas dari inventori dan tendensi untuk adanya “*Over Stock*”. Hal ini berarti Perputaran Persediaan menunjukkan seberapa cepat persediaan berputar dalam siklus produksi normal. Perputaran Persediaan atau *Inventory Turnover* dicari dengan menggunakan rumus :

$$\text{Perputaran Persediaan} = \frac{\text{Total Persediaan}}{\text{Total Pendapatan Usaha}} \times 365 \text{ hari}$$

1) Pada Saat Perusahaan Berstatus Perusahaan Umum (Perum)

Berdasarkan perhitungan, maka didapatkan Perputaran Persediaan Perumka sebagaimana disebutkan dalam tabel 4.11

Tabel 4.11
Perputaran Persediaan PERUMKA (dalam jutaan rupiah)
Tahun periode 1994 – 1998

Tahun	Tot. Persediaan (Rp)	Tot. Pendapatan Usaha (Rp)	PP (hari)	Skor
1994	163.361	510.689	117	3
1995	175.171	602.720	106	3
1996	192.567	715.918	98	3
1997	191.526	823.934	85	3,5
1998	219.769	1.083.466	74	3,5
		Rata-rata	95,98	

Sumber : Neraca dan Laporan R/L Perumka (data diolah)

a. Tahun 1994

Dari perhitungan, diketahui total persediaan sebesar Rp. 163.361.352.680,- dimana persediaan terdiri dari bahan baku, suku cadang, rel, wessel, alat perambat, bantalan, balas, peralatan sinyal, pintu perlintasan, peralatan listrik, peralatan telekomunikasi, cat, bahan bangunan, jembatan, peralatan jembatan, BBM, kayu bakar, batu bara, bahan pelumas, solar, minyak bekas, kertas balai grafika, bahan pembantu balai grafika, barang hasil cetakan, inventaris dan lain-lain. Selain itu persediaan seperti pos-pos yang lain juga dibagi dalam beberapa daerah eksploitasi, wilujawa dan kantor pusat. Sedangkan Total Pendapatan terdiri dari jumlah pendapatan operasi, penerimaan dan pendapatan non operasi yang totalnya mencapai Rp. 510.689.491.093,-. Perputaran Persediaan pada tahun ini

adalah 117 hari. Hal ini berarti dana atau modal kerja yang tertanam dalam inventori berputar 117 hari dalam 365 hari. Dengan Perputaran Persediaan 117 hari skor menurut penilaian Kep.Men BUMN No:KEP-100/MBU/2002 adalah 3.

b. Tahun 1995

Total Persediaan menunjukkan peningkatan sebesar 0,07% atau sekitar Rp. 11 miliar dari tahun sebelumnya, Sehingga Perputaran Persediaan tahun ini menjadi Rp. 175.171.601.301,-. Total pendapatan usaha juga meningkat sebesar 0,15% atau sekitar Rp. 92 miliar. Peningkatan pendapatan ini disebabkan pendapatan operasi dan pendapatan non operasi meningkat, sekalipun penerimaan dari Pemerintah turun sebanyak Rp. 3 miliar. Namun demikian Perputaran Persediaan mengalami perioded perputaran lebih cepat yaitu 106 hari. Dalam artian jika semakin rendah Perputaran Persediaan jumlah modal kerja yang dibutuhkan semakin tinggi. Skor dalam penilaian adalah 3.

c. Tahun 1996

Pada tahun ini persediaan naik sebesar 0,09% atau Rp. 17 miliar menjadi Rp. 192.567.564.952,-. Begitu pula dengan Total Pendapatan Usaha yang juga mengalami peningkatan sebesar Rp. 113.198.104.505,- atau 0,16%. Peningkatan pendapatan usaha disebabkan oleh naiknya pendapatan operasi sebesar Rp. 106 miliar dan pendapatan non operasi sebesar Rp. 7 miliar sehingga Total Pendapatan Usaha mencapai Rp. 715.918.782.218,- pada tahun ini. Perputaran persediaan turun hingga 98 hari, yang berarti lebih cepat dari tahun sebelumnya. Kecepatan dalam Perputaran Persediaan juga berhubungan dengan rasio lancarnya. Sekalipun

terdapat Perputaran Persediaan yang lebih baik dari tahun 1995, skor yang diperoleh masih tetap sama yaitu 3.

d. Tahun 1997

Dari tabel diketahui bahwa terjadi penurunan pada Total Persediaan sebanyak Rp. 1.041.239.560,- atau -0,01% menjadi Rp. 191.526.325.392,- pada tahun ini. Di lain pihak Total Pendapatan justru naik sebesar 0,13% atau Rp. 108.015.557.906,- sehingga menjadi Rp. 823.934.340.124,- di tahun ini. Persentase penurunan pada Total Persediaan dan persentase kenaikan pada Total Pendapatan Usaha menyebabkan Perputaran Persediaan turun menjadi 85 hari, atau bisa dikatakan berputar lebih cepat. Perhitungan Perputaran Persediaan berada di antara 60 dan 90 hari dimana dalam penilaian skor menurut Kep.men BUMN ini naik dari tahun sebelumnya menjadi 3,5.

e. Tahun 1998

Pada tahun terakhir perusahaan berstatus Perum ini, Total Persediaan naik menjadi Rp. 219.769.457.590,- atau perubahan sebesar Rp. 28 miliar dengan kenaikan sebesar 0,13%. Total Pendapatan Usaha juga mengalami kenaikan cukup besar yaitu Rp. 259 miliar atau 0,24% menjadi Rp 1.083.466.197.424,-. Kenaikan ini dipengaruhi oleh kenaikan pendapatan non operasi yang mencapai sebesar Rp. 76 miliar. Perputaran Persediaan turun menjadi 74 hari pada tahun ini yang berarti lebih cepat 11 hari dari tahun sebelumnya dengan skor 3,5.

2) Pada Saat Perusahaan Berstatus Perusahaan Perseroan (PT.Persero)

Berdasarkan perhitungan, maka didapatkan Perputaran Persediaan Perumka sebagaimana disebutkan dalam tabel 4.12

Tabel 4.12
Perputaran Persediaan PT. KAI (dalam jutaan rupiah)
Tahun periode 1999 - 2002

Tahun	Tot. Persediaan (Rp)	Tot. Pendapatan Usaha (Rp)	PP (hari)	Skor
1999	238.344	1.349.597	38	4
2000	249.676	1.704.523	53	4
2001	238.055	1.718.125	51	4
2002	272.865	2.027.931	49	4
Rata-rata			47,74	

Sumber : Neraca dan Laporan R/L PT. KAI (data diolah)

a. Tahun 1999

Peningkatan terjadi baik pada Total Persediaan maupun Total Pendapatan Usaha pada tahun ini. Total Persediaan naik sebesar 0,08% atau sekitar Rp. 18 miliar dari tahun kemarin menjadi Rp. 238.344.274.688,-. Di lain pihak pendapatan operasi justru turun sebesar Rp. 108 miliar, namun Total Pendapatan Usaha naik sebesar Rp. 266 miliar atau sebanyak 0,20% menjadi Rp. 1.349.597.927.433,-. Pada tahun awal perusahaan berstatus perusahaan perseroan ini, Perputaran Persediaan mengalami penurunan atau berputar lebih cepat, yaitu dalam 38 hari. Dibandingkan tahun kemarin, aktivitas perusahaan yang terlihat dalam Perputaran Persediaan ini lebih bersemangat. Sehingga skor dalam penilaian menurut Kep.Men BUMN ini setingkat lebih baik, yaitu dengan skor 4.

b. Tahun 2000

Pada tahun ini, perubahan terjadi dengan adanya peningkatan Total Persediaan sebanyak Rp. 11 miliar atau sekitar 0,05% menjadi Rp. 249.676.253.455,-, begitu juga dengan Total Pendapatan Usaha yang naik sebesar 0,21% atau sekitar Rp. 266 miliar. Total Pendapatan Usaha pada tahun ini sebesar Rp. 1.704.523.071.768,-. Kenaikan pendapatan yang cukup besar ini dibandingkan dengan persentase kenaikan Total Persediaannya menjadikan Perputaran Persediaan naik menjadi 53 hari atau melambat 15 hari dari tahun sebelumnya. Skor Perputaran Persediaan tahun ini yaitu 4.

c. Tahun 2001

Dari tabel dapat dilihat adanya penurunan terhadap Total Persediaan PT. KAI sebesar Rp. 11 miliar atau sekitar -0,05%. Di sisi lain Total Pendapatan Usaha naik namun hanya sekitar 0,01% atau sebanyak Rp. 13 miliar dari tahun kemarin menjadi Rp. 1.718.125.667.773,-. Kenaikan Pendapatan Usaha dan penurunan Persediaan mengakibatkan Perputaran Persediaan turun menjadi 51 hari, dalam artian lebih cepat 2 hari dari tahun 2000. Skor dalam penilaian masih tetap sama yaitu 4.

d. Tahun 2002

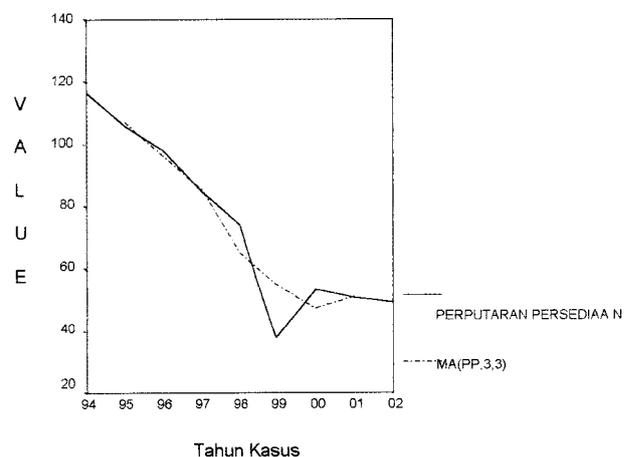
Pada tahun ini terjadi peningkatan pada komponen Perputaran Persediaan, yaitu total Persediaan meningkat sebesar 0,13% atau sekitar Rp. 34 miliar dari tahun sebelumnya. Begitu juga pada Total Pendapatan yang naik 0,15% atau meningkat sebanyak Rp. 309 miliar menjadi Rp. 2.027.931.389.458,- di mana tahun sebelumnya hanya Rp. 1.718.125.667.773,-. Persentase kenaikan masing-

masing komponen ini mengakibatkan Perputaran Persediaan turun menjadi 49 hari dengan memperoleh skor 4. Hal ini berarti Perputaran Persediaan tahun ini lebih efektif dari tahun kemarin.

3) Rekapitulasi Analisa Perputaran Persediaan Sebelum dan Sesudah Perubahan Status

Perputaran Persediaan juga merupakan salah satu alat untuk mengukur keefektifan perusahaan dalam mengelola sumber-sumbernya. Perputaran Persediaan merupakan perbandingan antara Total Persediaan dengan Total Pendapatan Usaha. Dari hasil analisa diperoleh kesimpulan Perputaran Persediaan sebagai berikut :

Gambar 4.6
Perputaran Persediaan : Aktual VS Moving Average 3 Tahun



Sumber : Pertumbuhan Collection Periods Tahun 1994-2002 (Data Diolah)

1. Pada gambar 4.6 Perputaran Persediaan dengan metode Moving Average 3 tahun terlihat seperti garis linear dibandingkan dengan fluktuasi yang tampak dalam perhitungan.
2. Menurut penilaian Kep.Men BUMN No:KEP-100/MBU/2002 skor dari tahun 1994 hingga tahun 1998 mengalami peningkatan. Pada tahun 1994 skor yang diperoleh dari hasil perhitungan adalah 3, kemudian naik pada tahun 1997 menjadi 3,5. Pada saat berstatus perusahaan perseroan, skor Perputaran Persediaan meningkat menjadi 4 dan stabil hingga tahun 2002.
3. Total Persediaan tertinggi terjadi pada tahun 2002 yaitu mencapai Rp. 272.865.985.005,- dan terendah pada tahun 1994 yaitu Rp. 163.361.352.608,-. Total Persediaan terus mengalami kenaikan hingga tahun 2002.
4. Total Pendapatan Usaha mengalami peningkatan tiap tahunnya dengan jumlah tertinggi Rp. 2.027.931.389.458,- pada tahun 2002. Sekalipun pada tahun 1999 terjadi penurunan pada pos penerimaan dan pendapatan non operasi, namun Total Pendapatan Usaha masih cukup besar. Posisi terendah terjadi pada tahun 1994 yaitu Rp. 510.689.491.093,-.
5. Perputaran Persediaan mengalami peningkatan untuk tiap tahunnya. Hal ini berarti semakin tinggi Perputaran Persediaan, jumlah modal kerja yang dibutuhkan semakin rendah. Perputaran Persediaan tertinggi terjadi pada tahun 1994 yang mencapai 117 hari hingga kemudian turun mencapai titik terendah atau Perputaran Persediaan paling cepat pada tahun 1999 yaitu 38 hari, kemudian naik pada tahun 2001 dan turun pada tahun 2002 menjadi 49 hari.

4.1.3.3 Perputaran Total Assets (TATO)

Perputaran Total Assets atau Total Assets Turnover merupakan kemampuan dana yang tertanam dalam keseluruhan aktiva berputar dalam suatu periode tertentu atau kemampuan modal yang diinvestasikan untuk menghasilkan “*revenue*”. Total Assets Turnover mengukur perputaran dari semua asset yang dimiliki oleh perusahaan. Meningkatnya Total Assets Turnover perusahaan dapat berarti bahwa perusahaan menghasilkan volume bisnis yang cukup tinggi dibandingkan investasi dalam total aktiva. Berdasarkan standar yang berlaku, Total Assets Turnover dapat dikatakan sangat baik bila menunjukkan nilai lebih dari 120% dan dapat dikatakan berada dalam kondisi sangat sehat. Total Assets Turnover merupakan salah satu rasio aktivitas yang dicari dengan rumus:

$$\text{Total Assets Turnover} = \frac{\text{Total Pendapatan}}{\text{Capital Employed}} \times 100\%$$

1) Pada Saat Perusahaan Berstatus Perusahaan Umum (Perum)

Berdasarkan perhitungan, maka didapatkan Total Asses Turnover Perumka sebagaimana disebutkan dalam tabel 4.13

Tabel 4.13
Perputaran Total Assets (TATO) PERUMKA (dalam jutaan rupiah)
Tahun periode 1994 - 1998

Tahun	Tot. Pendapatan Usaha (Rp)	Capital Employed (Rp)	TATO (%)	Skor
1994	510.689	1.722.177	29,65	1
1995	602.720	1.994.776	30,21	1
1996	715.918	2.119.714	33,77	1
1997	823.934	2.738.707	30,08	1
1998	1.083.466	3.046.444	34,69	1
Rata-rata			31,68	

Sumber : Neraca dan Laporan R/L Perumka (data diolah)

a. Tahun 1994

Dari tabel diketahui bahwa Total Pendapatan Usaha mencapai Rp. 510.689.491.093,-. Jumlah ini berasal dari pendapatan operasi Rp. 444.395.079.585,-, penerimaan atau subsidi dari pemerintah Rp. 34.500.000.000,-, dan pendapatan non operasi sebesar Rp. 31.794.411.508,-. Capital Employed menunjukkan Rp. 1.722.177.487.629,- yang berasal dari total aktiva sebesar Rp. 1.795.375.450.956,- dikurangi dengan aktiva tetap non produktif sebesar Rp. 73.197.963.327,-. Perhitungan Total Asset Turnover mendapatkan hasil 29,65%. Persentase demikian dapat diartikan bahwa setiap Rp. 1,- aktiva selama satu tahun dapat menghasilkan pendapatan sebesar Rp. 0,29. Skor dalam penilaian perusahaan yang bergerak dalam sektor infrastruktur menurut Kep Men Bumn ini adalah 1.

b. Tahun 1995

Pada tahun ini, terjadi peningkatan sebesar 0,15% atau sekitar Rp. 92 miliar terhadap total pendapatan, padahal jumlah penerimaan dana dari pemerintah justru

menurun sebanyak Rp. 3 miliar. Sehingga total pendapatan tahun ini sebesar Rp. 602.720.677.713,-. Di sisi lain, Capital Employed naik sebesar 0,14% atau sekitar Rp. 272 miliar menjadi Rp. 1.994.776.555.713,-. Persentase kenaikan total pendapatan lebih besar daripada persentase kenaikan Capital Employed, sehingga mengindikasikan bahwa perusahaan lebih efisien dalam mengelola aktivasnya daripada tahun sebelumnya. Total Assets Turnover naik menjadi 30,21% dengan skor 1.

c. Tahun 1996

Berdasarkan perhitungan, Total Assets Turnover tahun ini meningkat sebanyak 3,56% atau menjadi 33,77%. Peningkatan Total Assets Turnover berarti setiap Rp. 1,- aktiva dalam periode satu tahun dapat menghasilkan pendapatan sebesar Rp. 0,33. Peningkatan Total Assets Turnover dipicu oleh meningkatnya total pendapatan usaha sebesar 0,16% atau sekitar Rp. 113 miliar dari tahun sebelumnya, sehingga tahun ini menjadi Rp. 715.918.782.218,-. Peningkatan juga terjadi pada Capital Employed, namun hanya sekitar 0,06% atau sebesar Rp. 124 miliar. Total Assets Turnover sebesar 33,77% dengan skor yang sama dengan tahun sebelumnya yaitu 1.

d. Tahun 1997

Total pendapatan usaha tahun ini meningkat sebesar 0,13% atau sekitar Rp. 108 miliar menjadi Rp. 823.934.340.124,-. Peningkatan tersebut disebabkan adanya peningkatan pada pendapatan operasi sebesar Rp. 10 miliar. Sekalipun penerimaan masih sama yaitu Rp. 31,5 miliar. Di sisi lain, Capital Employed juga meningkat sebesar Rp. 618 miliar atau 0,23% . Peningkatan Capital Employed

ini disebabkan adanya peningkatan pada total aktiva sebesar Rp. 384 miliar. Dengan persentase kenaikan demikian, menyebabkan Total Assets Turnover turun sebesar 30,08% di tahun ini. Penilaian atau skor yang didapat pada tahun ini juga masih sama dengan tahun sebelumnya.

e. Tahun 1998

Pada tahun ini total pendapatan usaha naik sebesar 0,24% atau sekitar Rp. 259 miliar dari tahun 1997 menjadi Rp. 1.083.466.197.424,-. Kenaikan pendapatan disebabkan pendapatan operasi naik sekitar Rp. 183 miliar dan pendapatan non operasi naik sekitar Rp. 76 miliar. Di sisi lain, Capital Employed naik sebesar 0,10% atau sekitar Rp. 307 miliar. Persentase kenaikan komponen Total Assets Turnover ini mengakibatkan kenaikan Total Assets Turnover sebesar 34,69%. Tahun ini perusahaan lebih efisien dalam menggunakan aktiva. Skor dalam penilaian masih tetap sama yaitu 1.

2) Pada Saat Perusahaan Berstatus Perusahaan Perseroan (PT. Persero)

Berdasarkan perhitungan, maka didapatkan Total Assets Turnover PT. KAI (Persero) sebagaimana disebutkan dalam tabel 4.14

Tabel 4.14
Perputaran Total Assets (TATO) PT. KAI (dalam jutaan rupiah)
Tahun periode 1999 – 2002

Tahun	Tot. Pendapatan Usaha (Rp)	Capital Employed (Rp)	TATO (%)	Skor
1999	1.349.597	2.553.078	51,35	1,5
2000	1.704.523	2.956.130	57,66	1,5
2001	1.718.125	3.164.627	54,29	1,5
2002	2.027.931	3.765.633	53,85	1,5
		Rata-rata	54,29	

Sumber : Neraca dan Laporan R/L PT. KAI (data diolah)

a. Tahun 1999

Pada tahun ini, perusahaan berstatus perusahaan perseroan, dimana perusahaan diperbolehkan mencari laba sendiri. Dari laporan rugi laba perusahaan, diketahui bahwa total pendapatan usaha PT. KAI naik sebesar Rp. 266 miliar atau sekitar 0,20% dari tahun sebelumnya. Di sisi lain, Capital Employed justru mengalami penurunan sebesar Rp. 493 miliar atau -0,19% menjadi Rp. 2.553.078.010.680,-. Dari persentase kenaikan pendapatan usaha dan penurunan Capital Employed, Total Assets Turnover pada tahun ini naik cukup besar dari tahun kemarin yaitu 51,35%. Pada tahun ini sekalipun sangat jauh dari standar 120%, namun masih dapat dikatakan lebih baik karena terjadi peningkatan pada rasio ini. Skor yang didapat pada tahun ini 1,5.

b. Tahun 2000

Pada tahun ini terjadi peningkatan pendapatan usaha sebesar 0,21% atau sekitar Rp. 354 miliar. Peningkatan ini karena adanya proyek PSO atau pos penerimaan yang meningkat sebesar Rp. 237 miliar dari tahun sebelumnya. Selain itu dari pendapatan operasi dan pendapatan non operasi juga mengalami

peningkatan. Di lain pihak, Capital Employed juga mengalami kenaikan sebesar 0,14% atau Rp. 403 miliar menjadi Rp. 2.956.138.919.505,-. Peningkatan demikian menjadikan Total Assets Turnover naik menjadi sebesar 57,66% dengan skor 1,5. Total Assets Turnover pada tahun ini merupakan yang tertinggi daripada tahun-tahun yang lain, atau dapat berarti pengelolaan aktiva perusahaan semakin efektif.

c. Tahun 2001

Dari laporan rugi laba perusahaan, komponen pendapatan usaha mengalami kenaikan 0,01% atau sekitar Rp. 13 miliar sehingga total pendapatan usaha tahun ini menjadi Rp. 1.718.125.667.773,-. Peningkatan juga terjadi pada Capital Employed yaitu sebesar 0,07% atau Rp. 208 miliar menjadi Rp. 3.164.627.994.771,- pada tahun 2001. Persentase kenaikan pendapatan usaha masih lebih kecil dari persentase kenaikan Capital Employed sehingga Total Assets Turnover turun menjadi 54,29% dengan skor yang masih sama dengan tahun 2000.

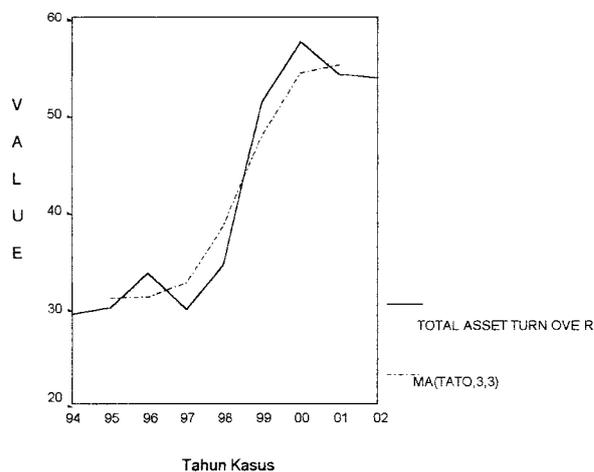
d. Tahun 2002

Tahun ini total pendapatan usaha mengalami peningkatan sebesar 0,15% atau Rp. 309 miliar dari tahun sebelumnya. Kenaikan ini dipengaruhi oleh naiknya PSO sebesar Rp. 15 miliar disamping pendapatan operasi yang meningkat sebesar Rp. 301 miliar. Di lain pihak, Capital Employed juga meningkat lebih besar dari pada peningkatan pendapatan usaha yaitu sebesar 0,16% atau 601 miliar menjadi Rp. 3.765.633.686.198,-. Total Assets Turnover tahun ini turun menjadi 53,85% sekalipun dengan skor yang masih sama yaitu 1,5.

3) Rekapitulasi Analisa Total Assets Turnover Sebelum dan Sesudah Perubahan Status

Total Assets Turnover (TATO) merupakan suatu kemampuan aktiva berputar untuk menghasilkan pendapatan. Total Assets Turnover merupakan perbandingan antara Total Pendapatan dengan Capital Employed. Dari hasil analisa diperoleh Total Assets Turnover sebagai berikut:

Gambar 4.7
Total Assets Turnover : Aktual VS Moving Average 3 Tahun



Sumber : Pertumbuhan Total Assets Turnover Tahun 1994-2002 (Data Diolah)

1. Pada gambar 4.7 , dapat diketahui bahawa Total Assets Turnover mengalami peningkatan yang cukup tajam pada tahun 1997 hingga tahun 2000. Namun peningkatan tersebut jika dilihat menggunakan data aktual atau perhitungan terlihat kasar dibandingkan dengan merata-rata data selama 3 tahun yang terlihat seperti garis linear.

2. Skor yang diperoleh dari perhitungan menurut standar Kep Men BUMN No: KEP-100/MBU/2002 memberikan perbedaan yang cukup jelas antara periode sebelum dan sesudah pergantian status badan hukum perusahaan kereta api. Pada periode Perumka, skor Total Assets Turnover dari tahun 1994 hingga 1998 sama yaitu 1. Namun ketika perusahaan berstatus PT. KAI (Persero), dari tahun 1999 hingga tahun 2002, skornya naik menjadi 1,5 dan tetap stabil.
3. Capital Employed juga mengalami peningkatan tiap tahunnya, terutama pada saat perusahaan berstatus perusahaan umum. Pada tahun 1999, Capital Employed mengalami penurunan sebesar 0,19% dari tahun 1998. namun demikian, pada tahun-tahun berikutnya Capital Employed kembali naik dan mencapai jumlah tertinggi pada tahun 2002 yaitu sebesar Rp. 3.765.633.686.198,- dan terendah pada tahun 1994 sebesar Rp. 1.722.177.487.629,-.
4. Total Assets Turnover tertinggi terjadi pada tahun 2000 yang mencapai 57,66% dan terendah pada tahun 1994 yaitu 29,65%. Dari tabel dapat dilihat bahwa Total Assets Turnover terus mengalami peningkatan. Hal ini berarti perusahaan kereta api dalam periode perputaran aktivasinya semakin baik.

4.1.4 Analisa Solvabilitas

Solvabilitas suatu perusahaan dapat didefinisikan sebagai kemampuan aktiva perusahaan dibiayai oleh hutang. Rasio solvabilitas merupakan rasio yang menghitung sejauh mana perusahaan mempunyai aktiva atau kekayaan yang cukup untuk membayar semua hutangnya. Analisa solvabilitas menggambarkan

kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka panjangnya atau kewajiban-kewajibannya pada saat perusahaan dilikuidasi. Analisa solvabilitas berhubungan dengan hutang jangka panjang serta pos-pos yang sifatnya jangka panjang.

4.1.4.1 Total Modal Sendiri Terhadap Total Aktiva (TMS terhadap TA)

Total Modal Sendiri terhadap Total Aktiva (TMS terhadap TA) menunjukkan persentase investasi dalam Total Aktiva yang dibelanjai dengan dana yang berasal dari modal sendiri. Dengan demikian berarti berapa bagian dari aktiva yang dapat digunakan untuk menjamin hutang. Total Modal Sendiri terhadap Total Aktiva dicari menggunakan rumus:

$$\text{TMS terhadap TA} = \frac{\text{Total Modal Sendiri}}{\text{Total Assets}} \times 100\%$$

1) Pada Saat Perusahaan Berstatus Perusahaan Umum (Perum)

Berdasarkan perhitungan, maka didapatkan rasio Total Modal Sendiri terhadap Total Aktiva Perumka sebagaimana disebutkan dalam tabel 4.15

Tabel 4.15
Total Modal Sendiri Terhadap Total Aktiva PERUMKA (dalam jutaan rupiah)
Tahun periode 1994 – 1998

Tahun	Tot. Modal Sendiri (Rp)	Total Aktiva (Rp)	TMS terhadap TA (%)	Skor
1994	1.172.577	1.788.969	65,54	4,5
1995	1.209.183	2.052.452	58,91	5
1996	1.285.765	2.176.805	59,07	5
1997	1.389.659	2.786.914	49,86	5,5
1998	1.472.014	3.142.188	46,85	5,5
Rata-rata			56,05	

Sumber : Neraca dan Laporan R/L Perumka (data diolah)

a. Tahun 1994

Dari tabel diketahui bahwa total modal sendiri pada tahun 1994 berjumlah Rp. 1.172.577.226.698,- yang didapat dari jumlah modal dan cadangan sebesar Rp. 1.178.983.373.938,- dikurangi dengan laba tahun yang berjalan sebesar Rp. 6.406.147.240,-. Sedangkan total asset sebesar Rp. 1.788.969.303.716,- didapat dari total aktiva sebesar Rp. 1.795.375.450.956,- dikurangi dengan laba tahun yang berjalan. Dari perhitungan didapat bahwa analisa Total Modal Sendiri terhadap Total Aktiva sebesar 65,54%. Persentase tersebut berarti bahwa dari setiap Rp. 0,65 aktiva digunakan untuk menjamin hutang jangka panjangnya. Hal ini berarti jika persentase semakin kecil maka makin cepat keadaan perusahaan menjadi insolvabel. Skor yang diperoleh dari penilaian menurut Kep men BUMN adalah 4,5 untuk perusahaan infrastruktur.

b. Tahun 1995

Pada tahun ini terjadi peningkatan pada komponen Total Modal Sendiri sebesar 0,03% atau sebesar Rp. 36 miliar menjadi Rp. 1.209.183.922.948,-. Total

asset juga meningkat sebanyak 0,13% atau sekitar Rp. 263 miliar. Perubahan total asset yang menunjukkan peningkatan tersebut disebabkan pos aktiva tetap fasilitas lebih besar Rp. 34 miliar selain itu juga peningkatan pada rekening administratif sebesar Rp. 8 miliar dari tahun 1994. Persentase kenaikan tersebut mengakibatkan Total Modal Sendiri terhadap Total Aktiva turun menjadi 58,91%. Menurut Kep.Men BUMN tersebut, penilaian rasio Total Modal Sendiri terhadap Total Aktiva yang baik adalah berada diantara 30% - 50%, baik untuk perusahaan infrastruktur maupun non infrastruktur, sehingga skor Total Modal Sendiri terhadap Total Aktiva tahun ini naik menjadi 5.

c. Tahun 1996

Total Modal Sendiri mengalami kenaikan sebesar 0,06% sama dengan kenaikan total assetnya. Total Modal Sendiri naik menjadi Rp. 1.285.765.774.176,- pada tahun ini, begitu pula dengan total asset yang tahun ini menjadi Rp. 2.176.805.206.202,-. Sekalipun persentase kenaikan komponen Total Modal Sendiri terhadap Total Aktiva sama, namun jumlah total aktiva lebih besar dari modal sendirinya sehingga rasio Total Modal Sendiri terhadap Total Aktiva naik menjadi 59,07% dalam artian Rp. 1,- aktiva dapat menjamin Rp. 0,59 hutangnya. Skor yang diperoleh pada tahun ini sama dengan tahun 1995 yaitu 3.

d. Tahun 1997

Pada tahun ini, Total Modal Sendiri hanya naik sebanyak 0,07% atau sekitar Rp. 103 miliar menjadi Rp. 1.389.659.501.192,-. Jika dibandingkan dengan kenaikan total asset yang mencapai 0,22% atau peningkatan Rp. 610 miliar sehingga menjadi Rp. 2.786.914.025.680 pada tahun ini, maka dapat diketahui

bahwa rasio Total Modal Sendiri terhadap Total Aktiva mengalami penurunan yakni hampir sebesar 10%. Tahun 1997 ini, rasio Total Modal Sendiri terhadap Total Aktiva menjadi 49,86%. Namun menurut penilaian Kep Men BUMN ini, persentase demikian terlihat cukup baik bahkan memberikan skor lebih tinggi dari tahun sebelumnya, yaitu 5,5.

e. Tahun 1998

Dari tabel terlihat bahwa Total Modal Sendiri mengalami peningkatan sebesar 0,06% atau Rp. 82 miliar. Dimana sebelumnya Rp. 1.389 miliar sedang tahun ini sebesar Rp. 1.472.014.338.121,-. Total asset juga mengalami peningkatan sebesar 0,11% atau Rp. 355 miliar menjadi Rp. 3.142.188.396.624,-. Peningkatan total asset ini lebih dipengaruhi oleh aktiva administratifnya. Rasio Total Modal Sendiri terhadap Total Aktiva mengalami penurunan menjadi 46,85% dengan skor yang masih sama dengan tahun 1997 yaitu 5,5.

2) Pada Saat Perusahaan Berstatus Perusahaan Perseroan (PT. Persero)

Berdasarkan perhitungan, maka didapatkan rasio Total Modal Sendiri terhadap Total Aktiva PT. KAI (Persero) sebagaimana disebutkan dalam tabel

Tabel 4.16
Total Modal Sendiri Terhadap Total Aktiva PT. KAI (dalam jutaan rupiah)
Tahun periode 1999 – 2002

Tahun	Tot. Modal Sendiri (Rp)	Total Aktiva (Rp)	TMS terhadap TA (%)	Skor
1999	2.207.419	2.676.079	82,49	4
2000	2.233.983	3.007.747	74,27	4,3
2001	2.201.476	3.219.667	68,38	4,5
2002	2.337.830	3.838.430	60,91	4,5
		Rata-rata	71,51	

Sumber : Neraca dan Laporan R/L PT. KAI (data diolah)

a. Tahun 1999

Jumlah modal sendiri pada tahun pergantian status badan hukum perusahaan kereta api dari perusahaan umum menjadi perusahaan perseroan ini naik cukup besar dari tahun 1998 yakni peningkatan sebesar 0,33% atau sekitar Rp. 735 miliar sehingga menjadi Rp. 2.207.419.137.577,-. Peningkatan Total Modal Sendiri ini dipengaruhi oleh meningkatnya modal awal hampir sebesar 1141 miliar, sekalipun terdapat pengurangan yang juga cukup besar dari pos-pos lainnya dalam modal dan cadangan. Di sisi lain, Total Aktiva justru mengalami pengurangan sebesar Rp. 466 miliar atau -0,17% menjadi Rp. 2.676.079.523.064,- pada tahun ini. Persentase kenaikan maupun penurunan komponen Total Modal Sendiri terhadap Total Aktiva tersebut mengakibatkan rasio ini menjadi 82,49% dan penilaiannya turun dengan skor 4.

b. Tahun 2000

Pada tahun 2000, Total Modal Sendiri naik hanya sebesar 0,01% atau Rp. 26 miliar dan menjadi Rp. 2.233.983.380.700,-. Di sisi lain, Total Asset justru

mengalami kenaikan sebesar Rp. 331 miliar atau 0,11% menjadi Rp. 3.007.747.568.015 pada tahun ini. Kenaikan Total Asset disebabkan adanya peningkatan hampir pada semua pos aktiva. Dengan persentase kenaikan Total Modal Sendiri yang hanya 0,01% dibanding persentase kenaikan total assetnya yang mencapai 0,11% mengakibatkan rasio Total Modal Sendiri terhadap Total Asset turun menjadi 74,27% namun dengan skor setingkat lebih tinggi yaitu 4,25.

c. Tahun 2001

Jumlah modal sendiri pada tahun 2001 sebesar Rp. 2.201.476.571.448,- yang berarti -0,01% atau turun sebanyak Rp. 32 miliar. Hal ini disebabkan oleh adanya pos koreksi tahun berjalan naik menjadi Rp. 26 miliar, yang mana tahun sebelumnya Rp. 0,-. Lain halnya dengan total asset yang naik 0,07% atau sebesar Rp. 211 miliar menjadi Rp. 3.219.667.780.897,- pada tahun ini. Kenaikan asset ini terkait oleh meningkatnya aktiva lain-lain yang mencapai Rp. 183 miliar. Total Modal Sendiri terhadap Total Aktiva mengalami penurunan menjadi 68,38 % dengan skor lebih tinggi dari tahun sebelumnya yaitu 4,5 atau bisa dikatakan dalam keadaan solvabel.

d. Tahun 2002

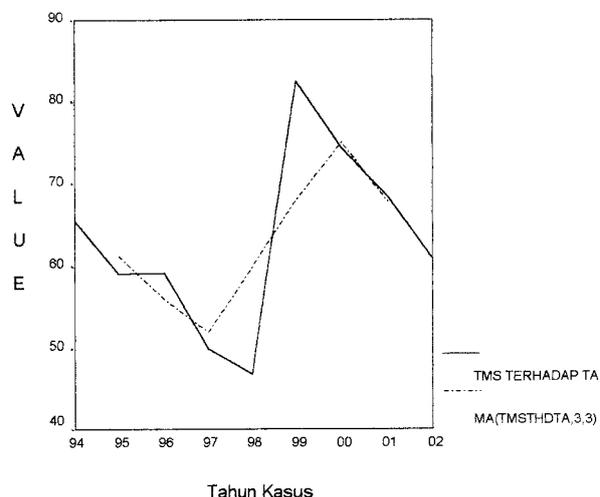
Pada tahun ini, Total Modal Sendiri naik 0,06% atau Rp. 136 miliar dibanding tahun 2001, sehingga menjadi Rp. 2.337.830.096.963,-. Peningkatan modal sendiri tersebut disebabkan ada kenaikan pada jumlah L/R yang ditahan yaitu naik sebesar Rp. 49 miliar disamping juga kenaikan pada pos-pos ekuitas yang lain. Di sisi total asset terjadi kenaikan sebesar 0,16% disebabkan peningkatan pada aktiva lain-lain yang mencapai Rp. 113 miliar disamping peningkatan pada pos aktiva

yang lain. Rasio Total Modal Sendiri terhadap Total Aktiva turun menjadi 60,91% dengan skor 4,5 atau masih dikatakan solvabel.

3) Rekapitulasi Analisa Total Modal Sendiri Terhadap Total Aktiva Sebelum dan Sesudah Perubahan Status

Rasio Total Modal Sendiri terhadap Total Aktiva merupakan salah satu alat untuk mengukur solvabilitas perusahaan. Rasio Total Modal Sendiri terhadap Total Aktiva adalah perbandingan antara Total Modal Sendiri dengan Total Asset. Dari analisa rasio Total Modal Sendiri terhadap Total Asset tiap tahun dalam periode yang berbeda, ditarik kesimpulan TMS terhadap TA sebagai berikut:

Gambar 4.8
TMS Terhadap TA: Aktual VS Moving Average 3 Tahun



Sumber : Pertumbuhan TMS terhadap TA Tahun 1994-2002 (Data Diolah)

1. Gambar 4.8 memperlihatkan fluktuasi yang cukup besar pada rasio Total Modal Sendiri terhadap Total Aktiva. Pada tahun 1998-1999 terjadi lonjakan

yang mengakibatkan rasio ini naik drastis, namun terlihat dalam perhitungan terjadi penurunan setelah tahun 1999. Jika dibandingkan dengan grafik yang ditunjukkan dengan moving average 3 tahun, maka lonjakan dan penurunan terlihat semacam trend yang berulang.

2. Skor menurut perhitungan Kep.Men BUMN No: KEP-100/MBU/2002 dari tahun 1994 hingga tahun 1998 atau pada saat perusahaan berstatus Perusahaan Umum, naik dari 4,5 menjadi 5 dan mencapai skor paling tinggi yaitu 5,5 pada tahun 1997 dan 1998. Sedangkan pada saat berstatus Perusahaan Perseroan skor tahun 1999 turun menjadi 4 dan kemudian kembali naik hingga tahun 2002 yaitu 4,5.
3. Total Modal Sendiri mencapai jumlah paling tinggi pada tahun 2002 yaitu sebesar Rp. 2.337.830.096.963,- dan terendah pada tahun 1994 yaitu Rp. 1.172.577.226.698,-. Total Modal Sendiri tiap tahun baik dalam periode Perumka ataupun PT. KAI (Persero) terus mengalami peningkatan dengan peningkatan tertinggi pada tahun 1999 yaitu 0,33% dari tahun tahun 1998.
4. Total Asset mengalami jumlah tertinggi pada tahun 2002 yaitu sebesar Rp. 3.838.430.479.648,- dan terendah pada tahun 1994 yaitu Rp. 1.788.969.303.716,-. Setiap tahun Total Asset terus mengalami kenaikan.
5. Total Modal Sendiri terhadap Total Aktiva (TMS terhadap TA) mencapai persentase tertinggi pada tahun 1999, yaitu pada saat pergantian status badan hukum perusahaan dengan rasio sebesar 82,49%, namun dalam perhitungan menurut Kep Men BUMN , skor yang paling baik adalah pada tahun 1998 dengan rasio sebesar 46,85%.

4.1.5 Penilaian Tingkat Kesehatan Perusahaan Secara Keseluruhan

PT. KAI (Persero) merupakan salah satu perusahaan infrastruktur yang bergerak pada sektor perhubungan, telekomunikasi dan pariwisata bidang sarana perhubungan. Penilaian tingkat kesehatan perusahaan telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri BUMN No: KEP-100/MBU/2002. Pada tabel 4.17 penulis menganalisa secara keseluruhan rasio finansial sebagaimana telah ditentukan dalam Keputusan Menteri BUMN tersebut.

Dengan mengadakan perbandingan antara tahun-tahun sebelum dan sesudah perubahan status badan hukum perusahaan kereta api dari perusahaan umum menjadi perusahaan perseroan, maka dapat diketahui bahwa:

1. Perusahaan berada dalam kriteria “Kurang Sehat” baik pada saat perusahaan berstatus badan hukum perusahaan umum (dengan tahun data 1994 – 1998) maupun pada saat berstatus badan hukum perusahaan perseroan, sekalipun dalam status badan hukum PT (Persero) perusahaan mempunyai peluang lebih besar untuk mencari keuntungan dan mengelola semua aktivitya dengan potensi sendiri. Pada tahun 1994 sampai tahun 1996 perusahaan berada dalam kriteria “kurang sehat” dengan posisi “BB”, pada tahun 1997 sampai tahun 2000 perusahaan masih dalam kriteria “kurang sehat” dengan peningkatan posisi menjadi “BBB”, namun setelah tahun 2000 perusahaan mengalami penurunan total skor sehingga berada dalam posisi “BB” dan masih dalam kriteria “kurang sehat”. Total skor yang diperoleh dari analisa finansial menunjukkan bahwa pada tahun perusahaan berstatus Perumka justru terlihat membaik dan mencapai total skor tertinggi pada tahun 1998 yaitu 28,5.

Namun setelah pergantian status badan hukum menjadi PT. KAI (Persero) kinerja keuangan semakin menurun sekalipun masih tetap dalam kategori yang sama dengan pada saat berstatus Perumka.

2. Pada tahun 1994, Cash Ratio merupakan yang tertinggi dari tahun-tahun yang lain, baik dalam periode Perumka maupun periode PT. KAI (Persero). Dengan Cash Ratio yang sangat tinggi yaitu mencapai 406,17%, lebih besar dari prinsip kehati-hatian 100%. Hal ini disebabkan perusahaan cukup baik dalam mengelola Hutang Lancarnya serta memperoleh Kas dan Efek yang cukup besar. Namun demikian, persediaan berputar selama 117 hari dan merupakan Perputaran Persediaan paling lambat dari tahun-tahun yang lainnya, dengan kata lain perusahaan kurang bagus dalam mengelola persediaannya.
3. Pada tahun 1995, yang paling menonjol adalah analisa Collection Periodsnya, dimana merupakan waktu pengumpulan piutang paling lambat dari tahun-tahun yang lain yaitu 78 hari. Dengan demikian, banyak piutang yang tidak dibayar tepat pada waktunya pada tahun ini, sekalipun masih dinilai cukup baik.
4. Pada tahun 1996, perusahaan mulai berhasil memperbaiki Collection Periodsnya dari tahun 1995 yaitu dari 78 hari menjadi 43 hari. Dilihat dari likuiditas perusahaan, tahun ini mengalami penurunan dari tahun-tahun sebelumnya, namun masih tetap dapat dikatakan dalam keadaan likuid.
5. pada tahun 1997, terjadi penurunan pada rasio likuiditas, kenaikan pada rasio rentabilitas, serta aktivitas perusahaan yang cukup efektif dengan menekan

Collection Periods dan Perputaran Persediaannya. Rasio Total Modal Sendiri terhadap Total Aktiva naik sebesar 1% dari tahun 1996.

6. Pada tahun 1998, ROE terlihat paling menonjol diantara tahun-tahun yang lain. Adanya peningkatan laba setelah pajak yang cukup tinggi tidak sebanding dengan peningkatan modal sendiri yang hanya 0,06%
7. Pada tahun 1999, perusahaan berganti status badan hukum menjadi Perusahaan Perseroan, dengan demikian perusahaan mulai mandiri dan berusaha mencari keuntungan dengan kekuatan sendiri. Namun demikian, pada tahun ini pos penerimaan justru mulai menurun dari tahun-tahun pada masa periode Perumka yang terlihat stabil. Pada masa transisi ini, perusahaan juga dihadapkan pada kondisi-kondisi luar biasa yang mengakibatkan Total Pendapatan baik itu pendapatan operasi maupun pendapatan non operasi menurun. Hampir semua rasio yang mengukur tingkat kesehatan perusahaan mengalami penurunan kecuali rasio aktivitas dan solvabilitas.
8. Pada tahun 2000, penurunan terjadi pada rasio-rasio likuiditas, rasio-rasio rentabilitas, dan rasio-rasio solvabilitas. Sebaliknya rasio-rasio aktivitas mengalami peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya.
9. Pada tahun 2001, kondisi finansial perusahaan semakin menurun, hal ini terlihat jelas pada likuiditas perusahaan. Current rasio menunjukkan persentase terendah dibanding tahun-tahun yang lain dalam artian perusahaan berada dalam posisi kurang likuid jika didasarkan pada prinsip kehati-hatian 200%.

10. Pada tahun 2002, perusahaan mulai berusaha untuk memperbaiki kondisi finansialnya. Current Ratio mulai mengalami peningkatan dan memenuhi prinsip kehati-hatian 200%. Sekalipun demikian, Cash Ratio pada tahun ini merupakan yang terendah dibanding tahun-tahun yang lalu, dimana Cash Ratio hanya mencapai 73% atau kurang dari prinsip kehati-hatian 1 : 1

4.2 Uji Signifikansi menggunakan Paired Sample T Test

Paired Sample T Test menurut Santosa (2000, hlm. 155) merupakan uji statistik inferensi yang digunakan untuk dua sample yang berpasangan dimana sebuah sample dengan subyek yang sama namun mengalami dua perlakuan atau pengukuran yang berbeda. Dalam kasus ini, *Paired Sample T Test* digunakan untuk mengetahui apakah terdapat peningkatan yang signifikan dari berbagai indikator yang ada.

1. Analisa Likuiditas

Melalui perhitungan menurut Keputusan Menteri BUMN No:KEP-100/MBU/2002 dan analisa menggunakan Time Series (Moving Average) menghasilkan Current Ratio dan Cash Ratio yang mengalami penurunan bahkan pada saat berada dalam periode perusahaan perseroan. Karena tidak terdapat peningkatan, maka analisa likuiditas tidak memerlukan pengujian signifikansi.

2. Analisa Rentabilitas

Melalui perhitungan menurut Keputusan Menteri BUMN No:KEP-100/MBU/2002 dan analisa menggunakan Time Series (Moving Average),

analisa rentabilitas yang tercermin dalam ROE dan ROI menunjukkan kenaikan yang tajam atau nilai tertinggi ketika berada pada awal tahun pergantian status badan hukum perusahaan, sekalipun selanjutnya menunjukkan penurunan. Namun demikian, tidak terdapat peningkatan yang signifikan. Hal ini dibuktikan dengan uji Paired Sample T Test sebagai berikut:

Tabel 4.18
ROE :Paired Samples Correlations

	N	Correlation	Sig.
Pair 1 ROE Sebelum & ROE Sesudah	4	-,834	,166

Tabel 4.19
ROI :Paired Samples Correlations

	N	Correlation	Sig.
Pair 1 ROI Sebelum & ROI Sesudah	4	-,731	,269

Uji Signifikansi untuk ROE menunjukkan 'Sig' = 0,166 (lebih besar dari $\alpha = 0,1$) yang menyatakan bahwa tidak terdapat peningkatan yang signifikan. Demikian uji Signifikansi untuk ROI yang menunjukkan 'Sig' = 0,269 (lebih besar dari $\alpha = 0,1$). Baik ROE maupun ROI memiliki korelasi 'negatif' dan mendekati 1 yang berarti berkorelasi kuat dan berlawanan arah.

3. *Analisa Aktivitas*

Melalui perhitungan menurut Keputusan Menteri BUMN No:KEP-100/MBU/2002 dan analisa menggunakan Time Series (Moving Average), terjadi peningkatan yang cukup tajam pada rasio aktivitas yang tercermin pada

Collection Periods dan Total Asset Turnover. Melalui uji signifikansi didapatkan hasil sebagai berikut:

Tabel 4.20
CP :Paired Samples Correlations

	N	Correlation	Sig.
Pair 1 CP Sebelum & CP Sesudah	4	-,591	,409

Tabel 4.21
PP :Paired Samples Correlations

	N	Correlation	Sig.
Pair 1 PP Sebelum & PP Sesudah	4	-,589	,411

Tabel 4.22
TATO :Paired Samples Correlations

	N	Correlation	Sig.
Pair 1 TATO Sebelum & TATO Sesudah	4	,115	,885

Collection Periods menunjukkan angka 'Sig' = 0,409 (lebih besar dari $\alpha = 0,1$), yang menyatakan peningkatan tersebut tidak signifikan. Perputatan Persediaan menunjukkan angka 'Sig' = 0,411 (lebih besar dari $\alpha = 0,1$), sehingga menyatakan tidak signifikan. Baik Collection Periods dan Perputaran Persediaan menghasilkan korelasi yang negatif atau berlawanan arah. Total Asset Turnover menghasilkan angka 'Sig' = 0,885 (lebih besar dari $\alpha = 0,1$), yang juga menyatakan peningkatan tersebut tidak signifikan dan menghasilkan korelasi yang positif atau searah.

4. Analisa Solvabilitas

Melalui perhitungan menurut Keputusan Menteri BUMN No:KEP-100/MBU/2002 dan analisa menggunakan Time Series (Moving Average), analisa solvabilitas yang tercermin dalam rasio total modal sendiri terhadap total aktiva menunjukkan peningkatan yang sangat tajam pada saat perusahaan berstatus PT. Kereta Api (Persero), setelah sebelumnya pada saat berstatus Perumka justru terus mengalami penurunan. Melalui uji signifikansi didapatkan hasil sebagai berikut:

Tabel 4.23
TMS terhadap TA :Paired Samples Correlations

	N	Correlation	Sig.
Pair 1 TMS terhadap TA Sebelum & TMS terhadap TA Sesudah	4	,953	,047

Rasio TMS terhadap TA menunjukkan angka korelasi positif 0,953 (mendekati 1) yang berarti memiliki hubungan yang kuat dan positif, dan angka 'Sig' menunjukkan 0,047 yang berarti terdapat peningkatan rasio TMS terhadap TA yang signifikan terhadap α 5%.

4.3 Analisa Statistik Non Parametrik Menggunakan Uji Peringkat Bertanda Wilcoxon (Wilcoxon Signed Rank Test)

Uji peringkat bertanda Wilcoxon (*Wilcoxon's Signed Rank Test*) digunakan untuk mengevaluasi perlakuan (*treatment*) tertentu pada dua pengamatan, antara sebelum dan sesudah adanya perlakuan tertentu (Machfoedz, 1999: hlm. 60). Untuk membuktikan ada tidaknya perbedaan yang signifikan antara kinerja

finansial perusahaan sebelum dan sesudah perubahan status badan hukum perusahaan menjadi perusahaan perseroan, maka penulis menggunakan uji Wilcoxon dengan cara merata-rata setiap rasio finansial pada saat perusahaan berstatus Perumka dan pada saat berstatus PT. Kereta Api (Persero), yang telah ditetapkan dari perhitungan menurut Keputusan Menteri BUMN No: KEP-100/MBU/2002 tentang Penilaian Kesehatan Perusahaan.

Langkah-langkah pengujian adalah sebagai berikut:

1. Penentuan Hipotesa

Hipotesa yang penulis gunakan adalah sebagai berikut:

H₀: Tidak ada perbedaan kinerja keuangan PT. KAI (Persero) antara sebelum dan sesudah perubahan status badan hukum menjadi perusahaan perseroan.

H_a: Kinerja keuangan PT. KAI (Persero) lebih besar daripada kinerja keuangan sebelum perusahaan menjadi perusahaan perseroan (dalam hal ini adalah ketika perusahaan berbentuk Perum)

Pengujian pada kasus ini menggunakan uji satu sisi karena yang dicari adalah apakah kinerja setelah perubahan status badan hukum dari Perum menjadi PT (Persero), “naik” atau “turun”.

2. Pengambilan keputusan

Dalam pengambilan keputusan, penulis menggunakan *Z* hitung dan angka probabilitas yang diperoleh dari hasil analisa Wilcoxon dengan data pada tabel 4.24

Tabel 4.24
Rata-rata Rasio Keuangan Sebelum dan Sesudah Perubahan Status Badan Hukum

No	Rasio	Rata-rata Sebelum	Rata-rata Sesudah
1	CR	690,81	238,09
2	Cash Ratio	323,07	107,55
3	ROE	1,93	1,42
4	ROI	3,94	4,74
5	Collection Period	53,23	25,92
6	Perputaran Persediaan	95,98	47,74
7	Total Asset Turnover	31,68	54,29
8	TMS terhadap TA	56,05	71,51

Sumber: Hasil Perhitungan Menurut Kep.Men BUMN No:KEP-100/MBU/2002 (data diolah)

a. Perhitungan dapat dicari menggunakan rumus:

$$Z = \frac{T - (1/4 N (N+1))}{\sqrt{1/24 (N) (N+1) (2N+1)}}$$

dimana T = Selisih terkecil

N = Jumlah Sampel

b. Atau menggunakan komputer, dimana penulis menggunakan program SPSS untuk menghasilkan perhitungan lebih akurat. Dari analisa Wilcoxon, didapatkan hasil sebagai berikut:

NPar Tests Wilcoxon Signed Ranks Test

Ranks

		N	Mean Rank	Sum of Ranks
SESUDAH - SEBELUM	Negative Ranks	5 ^a	5,40	27,00
	Positive Ranks	3 ^b	3,00	9,00
	Ties	0 ^c		
	Total	8		

a SESUDAH < SEBELUM

b SESUDAH > SEBELUM

c SEBELUM = SESUDAH

Test Statistics^b

	SESUDAH - SEBELUM
Z	-1,260 ^a
Asymp. Sig. (2-tailed)	,208

a Based on positive ranks.

b Wilcoxon Signed Ranks Test

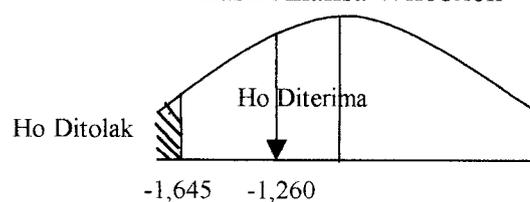
Dasar pengambilan keputusan dengan uji Z :

1. Jika statistik hitung (angka z output) > statistik tabel (tabel z), maka H_0 ditolak.
2. Jika statistik hitung (angka z output) < statistik tabel (tabel z), maka H_0 diterima.

Z hitung dari analisis Wilcoxon diatas adalah : -1,260 (Z didasarkan pada rangking yang positif). Sedangkan Z tabel, dengan α 5% atau tingkat kepercayaan 95%, adalah : $50\% - 5\% = 45\%$ atau 0,45. Pada tabel Z untuk luas 0,45 didapat angka tabel sekitar -1,645 (tanda “ - “ menyesuaikan dengan angka Z output).

Karena angka Z output $-1,260 < -1,645$, maka **H_0 diterima**. Dari kesimpulan diatas, berarti adanya perubahan status badan hukum perusahaan kereta api dari berstatus badan hukum Perumka menjadi PT. KAI (Persero) tidak mempunyai pengaruh secara signifikan.

Gambar 4.9
Hasil Analisa Wilcoxon



Dasar pengambilan keputusan dengan probabilitas :

1. Jika probabilitas $> 0,05$ (atau $\alpha = 5\%$), maka H_0 diterima
2. Jika probabilitas $< 0,05$ (atau $\alpha = 5\%$), maka H_0 ditolak.

Dalam kolom Asymp. Sig. (2-tailed) atau Asymptotic Significance untuk uji 2 sisi adalah 0,208. karena pada kasus ini penulis menggunakan uji 1 sisi, maka probabilitasnya menjadi $0,208 : 2 = 0,104$. Dengan demikian probabilitas hasil perhitungan tersebut berada diatas atau lebih besar dari $\alpha=0,05$. (**0,104 > 0,05**). Dengan demikian **H_0 diterima**, atau dengan kesimpulan tidak ada pengaruh yang signifikan dengan adanya perubahan status badan hukum perusahaan kereta api dari Perum menjadi Perusahaan Perseroan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil perhitungan menurut Kep.Men BUMN No:KEP-100/MBU/2002 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Perusahaan, analisa *Time Series* menggunakan *Moving Avarage* atau rata-rata bergerak 3 tahun, uji *Paired Sample T Test* untuk uji signifikansi serta pengujian hipotesis menggunakan *Wilcoxon's Sign Rank Test*, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Berdasarkan perhitungan menggunakan penilaian menurut Kep.Men BUMN No:KEP-100/MBU/2002 terlihat bahwa :
 - a. Current Ratio justru mengalami penurunan tiap tahun baik selama periode Perumka maupun periode PT. KAI (Persero). Pada tahun 2002 perusahaan mulai memperbaiki aktiva lancar dan meminimalkan hutang lancarnya sehingga pada tahun 2002 Current Ratio dapat memenuhi standar atau prinsip kehati-hatian 200%. Penurunan terlihat jelas pada saat fluktuasi Current Ratio diperhalus dengan *Moving Avarage* 3 tahun.
 - b. Cash Ratio juga mengalami kondisi yang sama dengan Current Ratio. Likuiditas perusahaan menurun cukup tajam terutama pada tahun 2000 hingga tahun 2002. Likuiditas perusahaan yang semakin menurun terutama pada saat berstatus Perusahaan Perseroan disebabkan perusahaan tidak dapat mengimbangi hutang lancarnya yang membesar dengan perolehan aktiva lancarnya.

- c. ROE terus meningkat selama periode Perumka dan mencapai puncaknya pada tahun 1998. Setelah tahun 1998, ROE mengalami penurunan seiring dengan berubahnya status badan hukum perusahaan hingga perolehan laba setelah pajak tidak sebanding dengan modal yang digunakan untuk memperoleh keuntungan.
- d. ROI juga mengalami puncaknya pada masa pergantian status badan hukum perusahaan, yaitu antara tahun 1998-1999. Perolehan laba di tahun-tahun awal berstatus Perseroan justru rendah sehingga mengakibatkan ROI kembali menurun setelah tahun 1999.
- e. Collection Periods menandakan peningkatan setelah perusahaan berstatus PT. KAI (Persero). Hal ini dibuktikan dengan pengumpulan piutang yang lebih cepat dan mencapai waktu pengumpulan tercepat pada tahun 1999.
- f. Perputaran Persediaan semakin menurun setiap tahunnya, akan tetapi pada tahun 1999 mengalami waktu perputaran paling cepat dan naik cukup stabil setelah tahun 1999. Dengan demikian, keefektifan perusahaan dalam mengelola persediaannya semakin baik.
- g. Total Assets Turnover semakin meningkat seiring dengan berubahnya status badan hukum perusahaan menjadi Perusahaan Perseroan. Pada tahun 2000 Total assets Turnover mengalami kenaikan paling tinggi, disebabkan oleh besarnya penerimaan dari Pemerintah atau lebih dikenal dengan PSO (*Project service Obligation*) yang mencapai 92% dari tahun sebelumnya.

- h. Total Modal Sendiri terhadap Total Aktiva bergerak turun selama periode Perumka. Pada awal tahun perusahaan berstatus Perusahaan Perseroaan (tahun 1999) rasio ini mengalami kenaikan yang sangat tinggi, akan tetapi kembali menurun secara perlahan-lahan setelah tahun 1999.

Dengan demikian, dapat disimpulkan sekaligus menjawab pokok permasalahan tentang ada tidaknya perubahan secara signifikan indikator keuangan dengan adanya perubahan status perusahaan kereta api dari Perumka menjadi PT. KAI (Persero), yaitu rasio-rasio aktivitas bergerak efektif setiap tahunnya pada saat berstatus Perumka dan semakin efektif setelah berstatus PT. Kereta Api (Persero), namun peningkatan rasio aktivitas tersebut tidak signifikan. Sedangkan rasio solvabilitas mengalami peningkatan yang tajam pada saat berstatus PT. Kereta Api (Persero) setelah sebelumnya (pada saat berstatus Perumka) mengalami penurunan. Peningkatan rasio solvabilitas tersebut signifikan dengan α 5%. Hal ini karena adanya kemandirian perusahaan untuk mendapatkan laba yang tercermin dari peningkatan pendapatan usaha perusahaan yang semakin besar mulai tahun 2000, dimana pendapatan usaha tersebut terdiri dari pendapatan operasi, penerimaan dari Pemerintah dan pendapatan non operasi.

2. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis melalui metode *Wilcoxon's Sign Rank Test* dengan merata-rata rasio keuangan yang didapat dari perhitungan menurut Kep.Men BUMN No:KEP-100/MBU/2002 sebelum dan sesudah perubahan status badan hukum, maka dapat disimpulkan bahwa : “tidak ada perbedaan kinerja keuangan perusahaan kereta api yang signifikan untuk

tahun-tahun sebelum dan sesudah perubahan status badan hukum tersebut”. Dalam pengujian Wilcoxon didapat Z hitung $-1,260$ lebih kecil dari Z tabelnya ($-1,645$), dimana H_0 yang berarti “tidak ada perbedaan” **diterima**. Hal ini karena perubahan status badan hukum yang terhitung pada tanggal 1 Juni 1999 dimana mulai tanggal tersebut Perumka dinyatakan bubar, dengan ketentuan bahwa segala hak, kewajiban, kekayaan serta pegawai Perumka beralih kepada Perseroan yang baru. Sesuai Undang-undang Nomor 13 Tahun 1992 tentang Perkereta-apian, Perseroan merupakan badan penyelenggara perkereta-apian yang menjalankan kegiatan usaha berorientasi laba. Namun demikian, Perseroan juga mengemban misi Pemerintah dalam bidang pelayanan umum perkereta-apian. Jadi, Perseroan masih menerima subsidi dan bantuan pengadaan sarana, pra sarana dan fasilitas perkereta-apian melalui PSO (*Public Service Obligation*) dan IMO (*Infrastructure Maintenance and Operation*) dan sebaliknya Perseroan juga membayar biaya penggunaan prasarana kereta api (*Track Access Charge-TAC*), sekalipun terdapat penambahan modal yang cukup besar ketika perusahaan berubah status menjadi Perusahaan Perseroan.

5.2 Saran

1. Likuiditas perusahaan kereta api mengalami penurunan justru ketika perusahaan berstatus Perseroan. Sekalipun masih dalam taraf wajar atau tidak begitu jauh di bawah prinsip kehati-hatian. Hal ini dibuktikan dengan terus menurunnya Cash Ratio dan Current Ratio. Untuk dapat menaikkan likuiditas,

perusahaan dapat mengupayakan penambahan *funds* untuk mengurangi atau membayar hutang lancarnya, baik dengan cara menambah modal sendiri atau dengan mengupayakan tambahan hutang jangka panjang. Selain itu, likuiditas juga dapat ditingkatkan dengan penjualan aktiva tetap untuk menambah aktiva lancarnya, misalnya dengan disimpan sebagai kas atau dibeli bahan-bahan untuk kegiatan operasi. Namun untuk penjualan aktiva tetap perlu diperhatikan manfaatnya, apakah perlu sekali atau tidak, karena perusahaan kereta api merupakan perusahaan infrastruktur dimana aktiva tetap seperti sarana gerak, prasarana dan fasilitas-fasilitas merupakan modal utama perusahaan menjalankan operasinya. Hal ini berarti pengurangan likuiditas dapat digunakan untuk mengganti atau menambah aktiva tetap yang sudah tidak layak pakai atau melebihi umur ekonomisnya guna menjamin kelancaran kegiatan operasinya.

2. Rentabilitas perusahaan yang dalam hal ini dihitung menggunakan ROE dan ROI mencapai tingkat tertinggi pada tahun 1998 sampai 1999. Dengan kesimpulan bahwa perusahaan harus lebih mempertimbangkan adanya penambahan modal asing, apakah akan memberikan efek yang menguntungkan terhadap modal sendiri apabila '*rate of return*' dari pada tambahan modal (modal asing) tersebut lebih besar dari pada biaya modalnya atau bunganya atau malah sebaliknya.
3. Analisa aktifitas perusahaan setelah perubahan status menjadi Perusahaan Perseroan justru terlihat semakin baik. Peningkatan terlihat pada waktu pengumpulan piutang yang lebih singkat, waktu Perputaran Persediaan

menjadi Kas yang semakin singkat dan *Turnover of Operating Assets* yang tinggi. Oleh karena itu penting bagi perusahaan untuk mempertahankannya, atau perusahaan juga bisa menambah modal usaha (*Operating Assets*) untuk mengupayakan penambahan penjualan yang sebesar-besarnya.

4. Solvabilitas perusahaan yang tercermin dalam rasio Total Modal Sendiri terhadap Total Aktiva, menunjukkan tingkat tertinggi pada tahun 1997 sampai tahun 1998, kemudian menurun perlahan-lahan. Oleh karena itu perusahaan dapat mengupayakan penambahan aktiva tanpa menambah hutang atau menambah aktiva relatif besar dari pada tambahan hutangnya. Perusahaan juga dapat mengurangi hutang tanpa mengurangi aktiva atau mengurangi hutang relatif lebih besar dari pada berkurangnya aktiva. Namun bagaimanapun, untuk meningkatkan solvabilitas, perusahaan diharuskan untuk memberikan tambahan pada modal sendiri.

Sebagai salah satu prasyarat Bank Dunia (*World Bank*) untuk memberikan pinjaman kepada Pemerintah dalam rangka menandai proyek efisiensi perkeretaapian atau *Railway Efficiency Project (REP)* yang dituangkan dalam *Loan Agreement* Nomor 4106-IND tanggal 15 Januari 1997, maka Perum Kereta Api harus berbentuk Perusahaan Perseroan (PT. Persero) dengan harapan perusahaan kereta api bisa lebih mandiri dengan menghasilkan prestasi atau keuntungan yang lebih besar. Oleh karena itu perlu kiranya perusahaan kereta api memanfaatkan sebaik-baiknya adanya bantuan *funds* tersebut untuk memperlancar atau mengefektifkan dan mengefisiensikan kegiatan operasi perusahaan serta tetap mengupayakan keselamatan dan kenyamanan konsumennya.

DAFTAR PUSTAKA

- Brigham (1992). *Fundamental of Financial Management*. 6th Ed. Orlando: The Dryden Perss.
- Daft, R. L, dan E. Salim ,dkk. (terj.) (2001). *Manajemen*. Edisi Kelima. Jilid I. Jakarta: Erlangga.
- Dajan, A. (1986). *Pengantar Metode Statistik*. Jilid I. Jakarta: LP3ES.
- Damaianty, W. (2001). *Analisis Perbedaan Kinerja Keuangan dan Likuiditas Saham Sebelum dan Setelah Emisi Bukti Right (Studi Pada Perusahaan Yang Terdaftar di BEJ)*. Skripsi Sarjana (Tidak dipublikasikan). Yogyakarta: Fakultas ekonomi UII.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. (1995). *Kamus Besar Bahasa Indonesia. Edisi Kedua*. Cet. Keempat. Jakarta: Balai Pustaka
- Gibson, Donnely dan S. Tjiptowardoyo. (1995). *Manajemen*. Edisi 9. Jilid 9. Cet. Pertama. Jakarta: Erlangga.
- Harahap, S. S. (1999). *Analisa Kritis Atas Laporan Keuangan*. Edisi Pertama. Cet. Pertama. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Harnanto. (1985). *Analisa Laporan Keuangan*. Edisi Pertama. Cet. Pertama. Yogyakarta: BPFE
- Jusuf, A H. (1997). *Dasar Dasar Akuntansi*. Jilid Pertama. Yogyakarta: Bagian Penerbitan STIE YKPN
- Kansil, C. S. T. (1995). *Hukum Perusahaan Indonesia*. Cet. 5. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Koeswoyo, F dan A. Yuliani. (2001). "Evaluasi Kinerja BUMN Sebelum dan Sesudah Go Public (Studi Kasus Pada 4 BUMN Yang Telah Go Public)". *Jurnal Manajemen*, Vol 1, No 1 (Des 2001), hal 49-65.
- Machfoedz, M. (1999). "Evaluasi Kinerja Perusahaan Perbankan Sebelum dan Sesudah Menjadi Perusahaan Publik di Bursa Efek Jakarta (BEJ)". *Kelola*, Nc. 20/VIII/1999, hal 54-69.
- Mason, R.D., D.A. Lind, dan U.Wikarya (terj.) (1999). *Teknik Statistika Untuk Bisnis Ekonomi*. Jilid 2. Edisi kesembilan. Cet. 1. Jakarta: Erlangga.

Mucharina, I. (2002). *Evaluasi Kinerja Keuangan Pada PT. Indonesia Satellite Corporation Tbk. (PT. Indosat Tbk.) dan PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk. (PT. Telkom Tbk.) Sebelum dan Selama Krisis Ekonomi di Indonesia*. Skripsi Sarjana (Tidak dipublikasikan). Yogyakarta: Fakultas Ekonomi UII.

Mulyadi. (1993). *Akuntansi Manajemen Konsep, Manfaat dan Rekayasa*. Edisi Kedua. Yogyakarta: BP. STIE YKPN.

Munawir, S (2000). *Analisa Laporan Keuangan*. Edisi Empat. Yogyakarta: Liberty

Pangastuti, D.A. (1992). *Analisis Perbandingan Likuiditas dan Profitabilitas Perusahaan Sebelum dan Sesudah Go Public*. Tesis Magister Manajemen (Tidak dipublikasikan). Yogyakarta: Program Pasca Sarjana UGM.

Riyanto, B. (1994). *Dasar Dasar Pembelanjaan Perusahaan*. Edisi keempat. Cet. Pertama. Yogyakarta: BPFE.

Saleh, S. (1996). *Statistik Non Parametrik*. Edisi 2. Cet. 1. Yogyakarta: BPFE.

Santoso, S. (2001). *Buku Latihan SPSS: Statistik Non Parametrik*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia.

Sartono, R. A. (1995). *Manajemen Keuangan Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: BPFE.

Siegel, S. (1997). *Statistik Non Parametrik untuk Ilmu-ilmu Sosial*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Tempo, 6 Januari 2002

Triyono. (2002). "Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah". *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, Vol. I, No. 2 (Sept), 139-152.

Weston, J. F., dan T. E. Copeland, , dan J. Wasana. (terj.) (1987). *Manajemen Keuangan*. Edisi Kedelapan. Jakarta: Erlangga.

Weston, J. F., E. F. Bringham, dan A. Sirait (terj.) (1994). *Dasar Dasar Manajemen Keuangan*. Edisi 9. Cet. 1. Jakarta: Erlangga.

Widjaya, I. G. R. (2000). *Hukum Perusahaan dan Undang Undang dan Peraturan Pelaksanaan di Bidang Usaha*. Cet. 1. Jakarta: Kesaint Blanc.

DAFTAR PERUNDANG-UNDANGAN

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia, No. 198/KMK.016/1998 tanggal 24 Maret 1998 tentang *Penilaian Tingkat Kesehatan Badan Usaha Milik Negara*.

Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara, No: KEP-100/MBU/2002 tanggal 4 Juni 2002 tentang *Penilaian Tingkat Kesehatan Badan Usaha Milik Negara*.

LAMPIRAN



KEMENTERIAN
BADAN USAHA MILIK NEGARA

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
NOMOR : KEP-100/MBU/2002

TENTANG
PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN BADAN USAHA MILIK NEGARA

MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA

- Menimbang :
- a. bahwa perkembangan dunia usaha dalam situasi perekonomian yang semakin terbuka perlu dilandasi dengan sarana dan sistem penilaian kerja yang dapat mendorong perusahaan ke arah peningkatan efisiensi dan daya saing;
 - b. bahwa dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 198/KMK.016/1998 dan Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Badan Usaha Milik Negara/Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Negara Nomor Kep.215/M- BUMN/1999 telah ditetapkan ketentuan tentang penilaian tingkat kesehatan/penilaian tingkat kinerja Badan Usaha Milik Negara;
 - c. bahwa dengan dialihkannya kedudukan, tugas dan wewenang Menteri BUMN pada Perusahaan Perseroan (PERSERO), Perusahaan Umum (PERUM), dan Perusahaan Jawatan (PERJAN) kepada Menteri Badan Usaha Milik Negara, maka dipandang perlu meninjau kembali keputusan sebagaimana tersebut pada huruf b, khususnya Keputusan Menteri Keuangan Nomor 198/KMK.016/1998.
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c, perlu ditetapkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Badan Usaha Milik Negara.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1969 (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 16; Tambahan Lembaran Negara Nomor 2890) tentang Bentuk-Bentuk Usaha Negara menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan (PERSERO) (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3731) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2001 (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4101);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1998 tentang Perusahaan Umum (PERUM) (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3732);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perusahaan Jawatan (PERJAN) (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3928);



Keputusan Menteri
Badan Usaha Milik Negara
Nomor : KEP-100/MBU/2002
Tanggal : 4 Juni 2002

KEMENTERIAN
BADAN USAHA MILIK NEGARA

-2-

6. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2001 tentang Pengalihan Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan pada Perusahaan Perseroan (PERSERO), Perusahaan Umum (PERUM) dan Perusahaan Jawatan (PERJAN) kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4137);
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 228/ Tahun 2001.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA TENTANG PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN BADAN USAHA MILIK NEGARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini, yang dimaksud dengan:

1. Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya dalam Keputusan ini disingkat BUMN, adalah Perusahaan Perseroan (PERSERO) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 dan Perusahaan Umum (PERUM) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1998.
2. Anak Perusahaan BUMN adalah Perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas yang sekurang-kurangnya 51% sahamnya dimiliki oleh BUMN.

Pasal 2

- 1) Penilaian Tingkat Kesehatan BUMN berlaku bagi seluruh BUMN non jasa keuangan maupun BUMN jasa keuangan kecuali Persero Terbuka dan BUMN yang dibentuk dengan Undang-undang tersendiri.
- 2) BUMN non jasa keuangan adalah BUMN yang bergerak dibidang infrastruktur dan non infrastruktur sebagaimana pada lampiran I.
- 3) BUMN jasa keuangan adalah BUMN yang bergerak dalam bidang usaha perbankan, asuransi, jasa pembiayaan dan jasa penjaminan.

BAB II/3



Keputusan Menteri
Badan Usaha Milik Negara
Nomor : KEP-100-MBU/2002
Tanggal : 4 Juni 2002

KEMENTERIAN
BADAN USAHA MILIK NEGARA

-3-

BAB II
PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN

Pasal 3

(1) Penilaian Tingkat Kesehatan BUMN digolongkan menjadi :

- a. SEHAT, yang terdiri dari :
 - AAA apabila total (TS) lebih besar dari 95
 - AA apabila $80 < TS \leq 95$
 - A apabila $65 < TS \leq 80$
- b. KUPANG SEHAT, yang terdiri dari :
 - BBB apabila $50 < TS \leq 65$
 - BB apabila $40 < TS \leq 50$
 - B apabila $30 < TS \leq 40$
- c. TIDAK SEHAT, yang terdiri dari :
 - CCC apabila $20 < TS \leq 30$
 - CC apabila $10 < TS \leq 20$
 - C apabila $TS \leq 10$

(2) Tingkat Kesehatan BUMN ditetapkan berdasarkan penilaian terhadap kinerja Perusahaan untuk tahun buku yang bersangkutan yang meliputi penilaian :

- a. Aspek Keuangan.
- b. Aspek Operasional.
- c. Aspek Administrasi.

(3) Penilaian Tingkat Kesehatan BUMN sesuai keputusan ini hanya diterapkan bagi BUMN apabila hasil pemeriksaan akuntan terhadap perhitungan keuangan tahunan perusahaan yang bersangkutan dinyatakan dengan kualifikasi "Wajar Tanpa Pengecualian" atau kualifikasi "Wajar Dengan Pengecualian" dari akuntan publik atau Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan.

(4) Penilaian Tingkat Kesehatan BUMN ditetapkan setiap tahun dalam pengesahan laporan tahunan oleh Rapat Umum Pemegang Saham atau Menteri BUMN untuk Perusahaan Umum (PERUM).

BAB III
BADAN USAHA MILIK NEGARA NON JASA KEUANGAN

Pasal 4

(1) Penilaian Tingkat Kesehatan BUMN yang bergerak dibidang non jasa keuangan dibedakan antara BUMN yang bergerak dalam bidang infrastruktur selanjutnya disebut BUMN INFRASTRUKTUR dan BUMN yang bergerak dalam bidang non infrastruktur yang selanjutnya disebut BUMN NON INFRASTRUKTUR dengan pengelompokan sebagaimana pada lampiran I.



Keputusan Menteri
Badan Usaha Milik Negara
Nomor : KEP-100/MBU/2002
Tanggal : 4 Juni 2002

KEMENTERIAN
BADAN USAHA MILIK NEGARA

-4-

- (2) Perubahan pengelompokan BUMN dalam kategori BUMN INFRASTRUKTUR dan BUMN NON INFRASTRUKTUR sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara.

Pasal 5

- (1) BUMN INFRASTRUKTUR adalah BUMN yang kegiatannya menyediakan barang dan jasa untuk kepentingan masyarakat luas, yang bidang usahanya meliputi :
- Pembangkitan, transmisi atau pendistribusian tenaga listrik.
 - Pengadaan dan atau pengoperasian sarana pendukung pelayanan angkutan barang atau penumpang baik laut, udara atau kereta api.
 - Jalan dan jembatan tol, dermaga, pelabuhan laut atau sungai atau danau, lapangan terbang dan bandara.
 - Bendungan dan irigrasi.
- (2) Penambahan atau pengurangan bidang-bidang atau jenis-jenis kegiatan untuk menentukan kriteria BUMN INFRASTRUKTUR sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara.
- (3) BUMN NON INFRASTRUKTUR adalah BUMN yang bidang usahanya diluar bidang usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 6

Indikator Penilaian Aspek Keuangan, Aspek Operasional, Aspek Administrasi BUMN yang bergerak di bidang usaha non jasa keuangan sebagaimana terdapat dalam Tata Cara Penilaian Tingkat Kesehatan BUMN non jasa keuangan (Lampiran II).

BAB IV
BADAN USAHA MILIK NEGARA JASA KEUANGAN

Pasal 7

Penilaian tingkat kesehatan BUMN jasa keuangan dibedakan antara BUMN yang bergerak dalam bidang usaha perbankan, asuransi, jasa pembiayaan dan jasa penjaminan..

Pasal 8

Pengelompokan BUMN yang bergerak dalam bidang usaha jasa keuangan dan indikator penilaian Hasil penilaian Aspek Keuangan, Aspek Operasional, Aspek Administrasi ditetapkan dengan Keputusan Menteri BUMN tersendiri.



KEMENTERIAN
BADAN USAHA MILIK NEGARA

Keputusan Menteri
Badan Usaha Milik Negara
Nomor : KEP-100/MBU.2002
Tanggal : 4 Juni 2002

-5-

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

BUMN wajib menerapkan penilaian Tingkat Kesehatan BUMN berdasarkan keputusan ini kepada Anak Perusahaan BUMN sesuai dengan bidang usaha Anak Perusahaan BUMN yang bersangkutan.

Pasal 10

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka:

1. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 198/KMK.016/1998 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Badan Usaha Milik Negara ;
2. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Badan Usaha Milik Negara/Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Negara Nomor Kep.215/M- BUMN/1999 tentang Penilaian Tingkat Kinerja Badan Usaha Milik Negara, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Keputusan ini mulai berlaku untuk penilaian Tingkat Kesehatan BUMN tahun buku 2002.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal: 04 Juni 2002

MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA

t t d

LAKSAMANA SUKARDI

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum

ttd

Victor Hutapea
NIP 060051008



Lampiran I : 1/4
Keputusan Menteri
Badan Usaha Milik Negara
Nomor : KEP-100/MBU/2002
Tanggal : 4 Juni 2002

KEMENTERIAN
BADAN USAHA MILIK NEGARA

SALINAN

TABEL KELOMPOK BUMN
INFRA STRUKTUR DAN NON INFRA STRUKTUR

No.	BUMN INFRA STRUKTUR	BUMN NON INFRA STRUKTUR
1.	SEKTOR INDUSTRI DAN PERDAGANGAN	
		Bidang Industri Pupuk dan Semen
		1. PT Pupuk Sriwidjaja
		2. PT Asean Aceh Fertilizer
		3. PT Semen Baturaja
		4. PT Semen Kupang
		Bidang Niaga
		1. PT Dharma Niaga
		2. PT Pantja Niaga
		3. PT Cipta Niaga
		4. PT Sarinah
		Bidang Industri Farmasi dan Aneka Industri
		1. PT Bhanda Ghara Reksa
		2. PT Berdikari
		3. PT Indo Farma
		4. PT Kimia Farma
		5. PT Bio Farma
		6. PT Rajawali Nusantara Indonesia
		7. PT Garam
		8. PT Industri Gelas
		9. PT Industri Soda Indonesia
		10. PT Sandang Nusantara
		11. PT Cambrics Primisima
		Bidang Pertambangan dan Energi
		1. PT Sarana karya
		2. PT Batubara Bukit Asam
		3. PT Konservasi Energi Abadi
		4. PT Batan Tehnologi
		5. PT Perusahaan Gas Negara
		Bidang Kertas, Percetakan dan Penerbitan
		1. PT Kertas Leces
		2. PT Kertas Kraft Aceh
		3. PT Pradnya Paramita
		4. PT Balai Pustaka



Lampiran I : 2/4
Keputusan Menteri
Badan Usaha Milik Negara
Nomor : KEP-100-MBU/2002
Tanggal : 4 Juni 2002

KEMENTERIAN
BADAN USAHA MILIK NEGARA

TABEL KELOMPOK BUMN
INFRA STRUKTUR DAN NON INFRA STRUKTUR

No.	BUMN INFRA STRUKTUR	BUMN NON INFRA STRUKTUR
		Bidang Industri Strategis
		1. PT Dirgantara Indonesia
		2. PT DAHANA
		3. PT Barata Indonesia
		4. PT Boma Bisma Indra
		5. PT Krakatau Steel
		6. PT Industri Kereta Api
		7. PT Industri Telekomunikasi Indonesia
		8. PT Len Industri
II.	SEKTOR KAWASAN INDUSTRI JASA KONSTRUKSI DAN KONSULTAN KONSTRUKSI	
		Bidang Kawasan Industri
		1. PT Kawasan Berikat Nusantara
		2. PT Kawasan Industri Makasar
		3. PT kawasan Industri Medan
		4. PT Kawasan Industri Wijaya
		5. PT PDI Batam
		Bidang Konstruksi Bangunan
		1. PT Nindya Karya
		2. PT Wijaya Karya
		3. PT Waskita Karya
		4. PT Adhi Karya
		5. PT Brantas Abipraya
		6. PT Hutama Karya
		7. PT Istaka Karya
		8. PT Pembangunan Perumahan
		Bidang Konsultan Konstruksi
		1. PT Bina Karya
		2. PT Indah Karya
		3. PT Indra Karya
		4. PT Virama Karya
		5. PT Yodya Karya
		Bidang Penunjang Konstruksi dan Jalan Tol
		1. PT Amarta Karya
		2. PT Dok Perkapalan Kodja Bahari
		3. PT Dok dan Perkapalan Surabaya
		4. PT Industri Kapal Indonesia
		5. PT Jasa Marga



Lampiran I : 3/4
Keputusan Menteri
Badan Usaha Milik Negara
Nomor : KEP-100/MBU/2002
Tanggal : 4 Juni 2002

KEMENTERIAN
BADAN USAHA MILIK NEGARA

TABEL KELOMPOK BUMN
INFRA STRUKTUR DAN NON INFRA STRUKTUR

No.	BUMN INFRA STRUKTUR	BUMN NON INFRA STRUKTUR
III.	SEKTOR PERHUBUNGAN, TELEKOMUNIKASI DAN PARIWISATA	
	Bidang Prasarana Perhubungan Laut	
	1. PT Pelabuhan Indonesia I	
	2. PT Pelabuhan Indonesia II	
	3. PT Pelabuhan Indonesia III	
	4. PT Pelabuhan Indonesia IV	
	5. PT Rukindo	
	6. PT Varuna Tirta Prakasya	
	Bidang Prasarana Perhubungan Udara	
	1. PT Angkasa Pura I	
	2. PT Angkasa Pura II	
	Bidang Sarana Perhubungan	
	1. PT Pelayaran Djakarta Lloyd	1. PT Pelayaran Nasional Indonesia
	2. PT Angkutan Sungai, Danau dan P. nyeberangan	2. PT Garuda Indonesia
	3. PT Pelayaran Bahitera Adiguna	3. PT Merpati Airlines
	4. PT Kereta Api Indonesia	
		Bidang Pos
		1. PT Pos Indonesia
		Bidang Pariwisata
		1. PT Hotel Indonesia dan Natour
		2. PT Pengembangan Pariwisata Bali
		3. PT TWC Borobudur, Prambanan & Ratu Boko
		Bidang Penyiaran
		1. PT Televisi Republik Indonesia
IV.	SEKTOR PERTANIAN, PERKEBUNAN KEHUTANAN PERDAGANGAN	
		Bidang Perkebunan
		1. PT Perkebunan Nusantara I
		2. PT Perkebunan Nusantara II
		3. PT Perkebunan Nusantara III
		4. PT Perkebunan Nusantara IV
		5. PT Perkebunan Nusantara V
		6. PT Perkebunan Nusantara VI
		7. PT Perkebunan Nusantara VII
		8. PT Perkebunan Nusantara VIII
		9. PT Perkebunan Nusantara IX



Lampiran I : 4/4
Keputusan Menteri
Badan Usaha Milik Negara
Nomor : KEP-100/MBU/2002
Tanggal : 4 Juni 2002

KEMENTERIAN
BADAN USAHA MILIK NEGARA

TABEL KELOMPOK BUMN
INFRA STRUKTUR DAN NON INFRA STRUKTUR

NO.	BUMN INFRA STRUKTUR	BUMN NON INFRA STRUKTUR
		10. PT Perkebunan Nusantara X
		11. PT Perkebunan Nusantara XI
		12. PT Perkebunan Nusantara XII
		13. PT Perkebunan Nusantara XIII
		14. PT Perkebunan Nusantara XIV
		Bidang Perikanan
		1. PT Usaha Mina
		2. PT Perikanan Samodra Besar
		3. PT Tirta Raya Mina
		4. PT Perikani
		Bidang Pertanian
		1. PT Petani
		2. PT Sang Hyang Seri
		Bidang Kehutanan
		1. PT Inhutani I
		2. PT Inhutani II
		3. PT Inhutani III
		4. PT Inhutani IV
		5. PT Perhutani
V.	SEKTOR PELAYANAN UMUM	
	1. Perum Perumnas	
	2. Perum Jasa Tirta I	
	3. Perum Jasa Tirta II	
	4. Perum Prasarana Perikanan Samodra Besar	
	5. Perum PPD	
	6. Perum Damri	
		1. Perum Percetakan Negara RI
		2. Perum Sarana Pengembangan Usaha
		3. Perum Peruri
		4. Perum Pegadaian
		5. Perum PFN

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum

ttd

Victor Hutapea
NIP. 060051008

MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA

t t d

LAKSAMANA SUKARDI



KEMENTERIAN
BADAN USAHA MILIK NEGARA

Lampiran II: 1/18
Keputusan Menteri
Badan Usaha Milik Negara
Nomor : KEP-100/MBU/2002
Tanggal : 4 Juni 2002

SALINAN

TATA CARA PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN
BUMN NON JASA KEUANGAN

ASPEK KEUANGAN

1. Total bobot
 - BUMN INFRA STRUKTUR (Infra) 50
 - BUMN NON INFRA STRUKTUR (Non infra) 70
2. Indikator yang di nilai dan masing-masing bobotnya.
Dalam penilaian aspek keuangan ini, indikator yang dinilai dan masing-masing bobotnya adalah seperti pada tabel 1 dibawah ini :

Tabel 1 : Daftar indikator dan bobot aspek keuangan

Indikator	Bobot	
	Infra	Non Infra
1. Imbalan kepada pemegang saham (ROE)	15	20
2. Imbalan Investasi (ROI)	10	15
3. Rasio Kas	3	5
4. Rasio Lancar	4	5
5. Colection Periods	4	5
6. Perputaran persediaan	4	5
7. Perputaran total asset	4	5
8. Rasio modal sendiri terhadap total aktiva	6	10
Total Bobot	50	70

3. Metode Penilaian
 - a. Imbalan kepada pemegang saham/Return On Equity (ROE)

Rumus:

$$\text{ROE} : \frac{\text{Laba setelah Pajak}}{\text{Modal Sendiri}} \times 100 \%$$

Definisi :

- Laba setelah Pajak adalah Laba setelah Pajak dikurangi dengan laba hasil penjualan dari :
 - Aktiva tetap
 - Aktiva Non Produktif
 - Aktiva Lain-lain
 - Saham Penyertaan Langsung



KEMENTERIAN
BADAN USAHA MILIK NEGARA

Lampiran II: 2/18
Keputusan Menteri
Badan Usaha Milik Negara
Nomor : KEP-100/MBU/2002
Tanggal : 4 Juni 2002

- Modal Sendiri adalah seluruh komponen Modal Sendiri dalam neraca perusahaan pada posisi akhir tahun buku dikurangi dengan komponen Modal sendiri yang digunakan untuk membiayai Aktiva Tetap dalam Pelaksanaan dan laba tahun berjalan. Dalam Modal sendiri tersebut di atas termasuk komponen kewajiban yang belum ditetapkan statusnya.
- Aktiva Tetap dalam pelaksanaan adalah posisi pada akhir tahun buku Aktiva Tetap yang sedang dalam tahap pembangunan.

Tabel 2: Daftar skor penilaian ROE

ROE (%)	Skor	
	Infra	Non Infra
15 < ROE	15	20
13 < ROE ≤ 15	13,5	18
11 < ROE ≤ 13	12	16
9 < ROE ≤ 11	10,5	14
7,9 < ROE ≤ 9	9	12
6,6 < ROE ≤ 7,9	7,5	10
5,3 < ROE ≤ 6,6	6	8,5
4 < ROE ≤ 5,3	5	7
2,5 < ROE ≤ 4	4	5,5
1 < ROE ≤ 2,5	3	4
0 < ROE ≤ 1	1,5	2
ROE < 0	1	0

Contoh perhitungan :

PT "A" (BUMN Non Infra) mempunyai ROE 10 %, maka sesuai tabel 2 skor untuk indikator ROE adalah 14.

b. Imbalan Investasi/Return On Investment (ROI)

Rumus :

$$\text{ROI} = \frac{\text{EBIT} + \text{Penyusutan}}{\text{Capital Employed}} \times 100\%$$

Definisi :

- EBIT adalah laba sebelum bunga dan pajak dikurangi laba dari hasil penjualan dari :
 - Aktiva Tetap
 - Aktiva lain-lain
 - Aktiva Non Produktif
 - Saham penyertaan langsung
- Penyusutan adalah Depresiasi, Amortisasi dan Depleksi
- Capital Employed adalah posisi pada akhir tahun buku Total Aktiva dikurangi Aktiva Tetap dalam pelaksanaan.



KEMENTERIAN
BADAN USAHA MILIK NEGARA

Lampiran II: 3/18
Keputusan Menteri
Badan Usaha Milik Negara
Nomor : KEP-100/MBU/2002
Tanggal : 4 Juni 2002

Tabel 3 : Daftar Skor penilaian ROI

ROI (%)	Skor	
	Infra	Non Infra
18 < ROI	10	15
15 < ROI ≤ 18	9	13,5
13 < ROI ≤ 15	8	12
12 < ROI ≤ 13	7	10,5
10,5 < ROI ≤ 12	6	9
9 < ROI ≤ 10,5	5	7,5
7 < ROI ≤ 9	4	6
5 < ROI ≤ 7	3,5	5
3 < ROI ≤ 5	3	4
1 < ROI ≤ 3	2,5	3
0 < ROI ≤ 1	2	2
ROI < 0	0	1

Contoh perhitungan :

PT "A" (BUMN Infra) memiliki ROI 14 %, maka sesuai tabel 3 skor untuk indikator ROI adalah 8

c. Rasio Kas/Cash Ratio

Rumus:

$$\text{Cash Ratio} = \frac{\text{Kas} + \text{Bank} + \text{Surat Berharga Jangka pendek}}{\text{Current Liabilities}} \times 100 \%$$

Definisi :

- Kas, Bank dan surat Berharga Jangka Pendek adalah posisi masing-masing pada akhir tahun buku.
- Current Liabilities adalah posisi seluruh kewajiban Lancar pada akhir tahun buku.

Tabel 4 : Daftar skor penilaian cash ratio

Cash Ratio = x (%)	Skor	
	Infra	Non Infra
x ≥ 35	3	5
25 ≤ x < 35	2,5	4
15 ≤ x < 25	2	3
10 ≤ x < 15	1,5	2
5 ≤ x < 10	1	1
0 ≤ x < 5	0	0

Contoh perhitungan :

PT "A" (BUMN Infra) memiliki cash ratio sebesar 32%, maka sesuai tabel 4 skor untuk indikator cash ratio adalah 2,5



KEMENTERIAN
BADAN USAHA MILIK NEGARA

d. Rasio Lancar/Current Ratio

Rumus :

$$\text{Current ratio} = \frac{\text{Current Asset}}{\text{Current Liabilities}} \times 100\%$$

Definisi :

- Current Asset adalah posisi Total Aktiva Lancar pada akhir tahun buku
- Current Liabilities adalah posisi Total Kewajiban Lancar pada akhir tahun buku.

Tabel 5 : Daftar skor penilaian current ratio

Current Ratio = x (%)	Skor	
	Infra	Non Infra
125 <= x	3	5
110 <= x < 125	2,5	4
100 <= x < 110	2	3
95 <= x < 100	1,5	2
90 <= x < 95	1	1
x < 90	0	0

Contoh perhitungan :

PT "A" (BUMN Non Infra) memiliki current ratio sebesar 115 %, maka sesuai tabel 5 skor untuk Indikator Current Ratio adalah 4

e. Collection Periods (CP)

Rumus :

$$CP = \frac{\text{Total Piutang Usaha}}{\text{Total Pendapatan Usaha}} \times 365 \text{ hari}$$

Definisi :

- Total Piutang Usaha adalah posisi Piutang Usaha setelah dikurangi Cadangan Penyisihan Piutang pada akhir tahun buku.
- Total Pendapatan Usaha adalah jumlah Pendapatan Usaha selama tahun buku.

Tabel 6 : Daftar skor penilaian collection periods

CP = x (hari)	Perbaikan = x (hari)	Skor	
		Infra	Non Infra
x <= 60	x > 35	4	5
60 < x <= 90	30 < x <= 35	3,5	4,5
90 < x <= 120	25 < x <= 30	3	4
120 < x <= 150	20 < x <= 25	2,5	3,5
150 < x <= 180	15 < x <= 20	2	3
180 < x <= 210	10 < x <= 15	1,6	2,4
210 < x <= 240	6 < x <= 10	1,2	1,8
240 < x <= 270	3 < x <= 6	0,8	1,2
270 < x <= 300	1 < x <= 3	0,4	0,6
300 < x	0 < x <= 1	0	0

Skor yang digunakan dipilih yang terbaik dari kedua skor menurut tabel 6 diatas.



KEMENTERIAN
BADAN USAHA MILIK NEGARA

Lampiran II : 5/18
Keputusan Menteri
Badan Usaha Milik Negara
Nomor : KEP-100/MBU/2002
Tanggal : 4 Juni 2002

Contoh perhitungan :

Contoh 1 :
PT "A" (BUMN Non Infra) pada tahun 1999 memiliki Collection Periods 120 hari dan pada tahun 1998 sebesar 127 hari.

Sesuai tabel 6 di atas, maka skor tahun 1999 menurut :

- Tingkat Collection Periods : 4
- Perbaikan Collection periods (7 hari) : 1,8

Dalam hal ini, dipilih skor yang lebih besar yaitu : 4

Contoh 2 :
PT "B" (BUMN Infrastruktur) pada tahun 1999 memiliki Collection Periods 240 hari dan pada tahun 1998 sebesar 272 hari.

Sesuai tabel 6 di atas, maka skor tahun 1999 menurut :

- Tingkat Collection periods : 1,2
- Perbaikan Collection periods (32 hari) : 3,5

Dalam hal ini, dipilih skor yang lebih besar yaitu : 3,5

f. Perputaran Persediaan (PP)

Rumus :

$$PP = \frac{\text{Total Persediaan}}{\text{Total Pendapatan Usaha}} \times 365$$

Definisi :

- Total Persediaan adalah seluruh persediaan yang digunakan untuk proses produksi pada akhir tahun buku yang terdiri dari persediaan bahan baku, persediaan barang setengah jadi dan persediaan barang jadi ditambah persediaan peralatan dan suku cadang.
- Total Pendapatan Usaha adalah Total Pendapatan Usaha dalam tahun buku yang bersangkutan.

Tabel 7 : Daftar skor penilaian perputaran persediaan

PP = x (hari)	Perbaikan (hari)	Skor	
		Infra	Non Infra
$x \leq 60$	$35 < x \leq 60$	4	5
$60 < x \leq 90$	$30 < x \leq 35$	3,5	4,5
$90 < x \leq 120$	$25 < x \leq 30$	3	4
$120 < x \leq 150$	$20 < x \leq 25$	2,5	3,5
$150 < x \leq 180$	$15 < x \leq 20$	2	3
$180 < x \leq 210$	$10 < x \leq 15$	1,6	2,4
$210 < x \leq 240$	$6 < x \leq 10$	1,2	1,8
$240 < x \leq 270$	$3 < x \leq 6$	0,8	1,2
$270 < x \leq 300$	$1 < x \leq 3$	0,4	0,6
$300 < x$	$0 < x \leq 1$	0	0

Skor yang digunakan dipilih yang terbaik dari kedua skor menurut tabel 7 di atas.



KEMENTERIAN
BADAN USAHA MILIK NEGARA

Contoh Perhitungan :

Contoh 1 :

PT "A" (BUMN Non Infra) pada tahun 1999 memiliki Perputaran Persediaan 180 hari dan pada tahun 1998 sebesar 195 hari.

Sesuai tabel 7 diatas, maka skor tahun 1999 menurut :

- Tingkat Perputaran Persediaan : 3
- Perbaikan Perputaran Persediaan (15 hari) : 2,4

Dalam hal ini, dipilih skor yang lebih besar yaitu : 3

Contoh 2 :

PT "B" (BUMN Infra struktur) pada tahun 1999 memiliki Perputaran Persediaan 240 hari dan pada tahun 1998 sebesar 272 hari.

Sesuai dengan tabel 7 diatas, maka skor tahun 1999 menurut :

- Tingkat Perputaran Persediaan : 1,2
- Perbaikan Perputaran Persediaan (32 hari) : 3,5

Dalam hal ini, dipilih skor yang lebih besar yaitu : 3,5

g. Perputaran Total Asset/Total Asset Turn Over (TATO)

Rumus :

$$\text{TATO} = \frac{\text{Total Pendapatan}}{\text{Capital Employed}} \times 100 \%$$

Definisi :

- Total Pendapatan adalah Total Pendapatan Usaha dan Non Usaha tidak termasuk pendapatan hasil penjualan Aktiva Tetap
- Capital Employed adalah posisi pada akhir tahun buku total Aktiva dikurangi Aktiva Tetap Dalam Pelaksanaan.

Tabel 8 : Daftar skor penilaian perputaran total asset

TATO = x (%)	Perbaikan = x (%)	Skor	
		Infra	Non Infra
120 < x	20 < x	4	5
105 < x <= 120	15 < x <= 20	3,5	4,5
90 < x <= 105	10 < x <= 15	3	4
75 < x <= 90	5 < x <= 10	2,5	3,5
60 < x <= 75	0 < x <= 5	2	3
40 < x <= 60	x <= 0	1,5	2,5
20 < x <= 40	x < 0	1	2
x <= 20	x < 0	0,5	1,5

Skor yang digunakan dipilih yang terbaik dari kedua skor menurut tabel 8 diatas.

Contoh perhitungan :

Contoh 1 :

PT "A" (BUMN Non Infrastruktur) pada tahun 1999 memiliki Perputaran Total Asset sebesar 70 % dan pada tahun 1998 sebesar 60% hari.



KEMENTERIAN
BADAN USAHA MILIK NEGARA

Lampiran II: 7/18
Keputusan Menteri
Badan Usaha Milik Negara
Nomor : KEP-100/MBU/2002
Tanggal : 4 Juni 2002

Sesuai tabel 8 di atas, maka skor tahun 1999 menurut :
- Tingkat Perputaran Total Asset : 3
- Perbaikan Perputaran Total Asset (10%) : 3,5
Dalam hal ini, dipilih skor yang lebih besar yaitu : 3,5

Contoh 2:
PT "B" (BUMN Infrastruktur) pada tahun 1999 memiliki Perputaran Total Asset sebesar 108 %
dan pada tahun 1998 sebesar 98%.

Sesuai tabel 8 di atas, maka skor tahun 1999 menurut :
- Tingkat Perputaran Total Asset : 3,5
- Perbaikan Perputaran Total Asset (10%) : 2,5
Dalam hal ini, dipilih skor yang lebih besar yaitu : 3,5

h. Rasio Total Modal Sendiri Terhadap Total Asset (TMS terhadap TA)

Rumus:

$$\text{TMS terhadap TA} = \frac{\text{Total Modal Sendiri}}{\text{Total Asset}} \times 100\%$$

Definisi :

- Total Modal Sendiri adalah seluruh komponen Modal Sendiri pada akhir tahun buku diluar dana-dana yang belum ditetapkan statusnya.
- Total Asset adalah Total Asset dikurangi dengan dana-dana yang belum ditetapkan statusnya pada poisisi akhir tahun buku yang bersangkutan.

Tabel 9 : Daftar skor penilaian Rasio Modal Sendiri terhadap Total Asset

TMS thd TA (%) = x	Skor	
	Infra	Non Infra
x < 0	0	0
0 <= x < 10	2	4
10 <= x < 20	3	6
20 <= x < 30	4	7,25
30 <= x < 40	6	10
40 <= x < 50	5,5	9
50 <= x < 60	5	8,5
60 <= x < 70	4,5	8
70 <= x < 80	4,25	7,5
80 <= x < 90	4	7
90 <= x < 100	3,5	6,5

Contoh perhitungan:

PT "B" (BUMN Non Infra) memiliki rasio Modal Sendiri terhadap Total Asset sebesar 35 %, maka sesuai tabel 9 skor untuk indikator rasio Total Modal Sendiri terhadap Total Asset adalah 10.



KEMENTERIAN
BADAN USAHA MILIK NEGARA

Lampiran II: 8/18
Keputusan Menteri
Badan Usaha Milik Negara
Nomor : KEP-100/MBU/2002
Tanggal : 4 Juni 2002

II. ASPEK OPERASIONAL

1. Total Bobot.

-BUMN INFRASTRUKTUR	35
-BUMN NON INFRASTRUKTUR	15
2. Indikator yang dinilai
Indikator yang dinilai meliputi unsur-unsur kegiatan yang dianggap paling dominan dalam rangka menunjang keberhasilan operasi sesuai dengan visi dan misi perusahaan. Beberapa indikator penilaian yang dapat digunakan adalah sebagaimana dalam "*Contoh Indikator Aspek Operasional*"
3. Jumlah Indikator
Jumlah indikator aspek operasional yang digunakan untuk penilaian tingkat kesehatan setiap tahunnya minimal 2 (dua) indikator dan maksimal 5 (lima) indikator, dimana apabila dipandang perlu indikator-indikator yang digunakan untuk penilaian dari suatu tahun ke tahun berikutnya dapat berubah. Misalnya, suatu indikator yang pada tahun sebelumnya selalu digunakan, dalam tahun ini tidak lagi digunakan karena dianggap bahwa untuk kegiatan yang berkaitan dengan indikator tersebut perusahaan telah mencapai tingkatan/standar yang sangat baik, atau karena ada indikator lain yang dipandang lebih dominan pada tahun yang bersangkutan.
4. Sifat penilaian dan kategori penilaian:
Penilaian terhadap masing-masing indikator dilakukan secara kualitatif dengan kategori penilaian dan penetapan skornya sebagai berikut.
 - Baik sekali (BS) : skor = 100% x Bobot indikator yang bersangkutan
 - Baik (B) : skor = 80% x Bobot indikator yang bersangkutan
 - Cukup (C) : skor = 50% x Bobot indikator yang bersangkutan
 - Kurang (K) : skor = 20% x Bobot indikator yang bersangkutanDefinisi untuk masing-masing kategori penilaian secara umum adalah sebagai berikut :
 - Baik sekali : Sekurang-kurangnya mencapai standar normal atau diatas normal baik diukur dari segi kualitas (waktu, mutu dan sebagainya) dan kuantitas (produktivitas, rendemen dan sebagainya).
 - Baik : Mendekati standar normal atau sedikit dibawah standar normal namun telah menunjukkan perbaikan baik dari segi kuantitas (produktivitas, rendemen dan sebagainya) maupun kualitas (waktu, mutu dan sebagainya).
 - Cukup : Masih jauh dari standar normal baik diukur dari segi kualitas (waktu, mutu dan sebagainya) namun kuantitas (produktivitas, rendemen dan sebagainya) dan mengalami perbaikan dari segi kualitas dan kuantitas.
 - Kurang : Tidak tumbuh dan cukup jauh dari standar normal



KEMENTERIAN
BADAN USAHA MILIK NEGARA

5. Mekanisme Penilaian

a. Penetapan indikator dan penilaian masing-masing bobot

- Indikator aspek operasional yang digunakan untuk penilaian setiap tahunnya ditetapkan oleh RUPS untuk PERSERO atau Menteri Badan Usaha Milik Negara untuk PERUM pada pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahunan perusahaan.
- Sebelum pengesahan RKAP tahunan oleh RUPS untuk PERSERO atau Menteri BUMN untuk PERUM, Komisaris/Dewan Pengawas wajib menyampaikan usulan tentang indikator aspek operasional yang digunakan untuk penilaian tahun buku yang bersangkutan dan besar bobot masing-masing indikator tersebut kepada Pemegang Saham untuk PERSERO atau Menteri BUMN untuk PERUM.
- Dalam menyampaikan usulan indikator dan besaran bobot tersebut, Komisaris/Dewan Pengawas wajib memberikan justifikasi mengenai masing-masing indikator aspek operasional yang diusulkan untuk digunakan dan dasar pembobotannya.
- Dalam pengesahan RKAP tahun yang bersangkutan, RUPS untuk PERSERO atau Menteri BUMN untuk PERUM sekaligus menetapkan indikator operasional yang digunakan untuk tahun yang bersangkutan dan masing-masing bobotnya dengan antara lain mempertimbangkan usul Komisaris/Dewan Pengawas tersebut di atas.
- Khusus untuk penilaian tingkat kesehatan tahun buku 2002, Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN yang penilaian tingkat kesehatannya diatur dengan Surat Keputusan ini wajib menyampaikan usul tentang indikator-indikator aspek operasional yang akan digunakan berikut masing-masing bobotnya kepada Kementerian BUMN selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah tanggal Surat Keputusan ini diterbitkan.

b. Mekanisme penetapan nilai

- Sebelum diselenggarakan RUPS untuk PERSERO atau Menteri BUMN untuk PERUM pengesahan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit, Komisaris/Dewan Pengawas wajib menyampaikan kepada Pemegang Saham untuk PERSERO atau Menteri BUMN untuk PERUM penilaian kinerja perusahaan berdasarkan indikator-indikator aspek operasional dan bobot yang telah ditetapkan oleh RUPS untuk PERSERO atau Menteri BUMN untuk PERUM dalam pengesahan RKAP tahun yang bersangkutan.
- Dalam menyampaikan usulan penilaian tersebut Komisaris/Dewan Pengawas diharuskan memberikan justifikasi atas penilaian masing-masing indikator aspek operasional yang digunakan.
- RUPS untuk PERSERO atau Menteri BUMN untuk PERUM dalam pengesahan laporan keuangan menetapkan penilaian terhadap aspek operasional yang antara lain memperhatikan usulan Komisaris/Dewan Pengawas.



KEMENTERIAN
BADAN USAHA MILIK NEGARA

Lampiran II: 10/18
Keputusan Menteri
Badan Usaha Milik Negara
Nomor : KEP-100/MBU/2002
Tanggal : 4 Juni 2002

6. Contoh Perhitungan

BUMN Pelabuhan (infrastruktur)

Indikator yang digunakan	Bobot	Nilai	Skor	Unsur-unsur yang dipertimbangkan
1. Pelayanan kepada pelanggan/ masyarakat.	15	B	12	Turn Round Time (TRT), Waiting Time (WT), dsb.
2. Peningkatan kualitas SDM	10	C	5	Peningkatan Kesejahteraan, Kaderisasi pimpinan, dsb.
3. Research & Development	10	D	8	Kepedulian manajemen terhadap R&D, dsb.
Total	25		35	

III. ASPEK ADMINISTRASI

- Total Bobot
 - BUMN INFRA STRUKTUR (Infra) 15
 - BUMN NON INFRASTRUKTUR (Non infra) 15
- Indikator yang dinilai dan masing-masing bobotnya
Dalam penilaian aspek administrasi, indikator yang dinilai dan masing-masing bobotnya adalah seperti pada tabel 10 di bawah ini.

Tabel 10 : Daftar indikator dan bobot aspek Administrasi.

Indikator	Bobot	
	Infra	Non Infra
1. Laporan Perhitungan Tahunan	3	3
2. Rancangan RKAP	3	3
3. Laporan Periodik	3	3
4. Kinerja PUKK	6	6
TOTAL	15	15

3. Metode Penilaian

- Laporan Perhitungan Tahunan
 - Standar waktu penyampaian perhitungan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik atau Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan harus sudah diterima oleh Pemegang Saham untuk PERSERO atau Menteri BUMN untuk PERUM paling lambat akhir bulan kelima sejak tanggal tutup buku tahun yang bersangkutan.



KEMENTERIAN
BADAN USAHA MILIK NEGARA

Lampiran II: 11/18
Keputusan Menteri
Badan Usaha Milik Negara
Nomor : KEP-100/MBU/2002
Tanggal : 4 Juni 2002

Penentuan nilai

Tabel 11 : Daftar penilaian waktu penyampaian Laporan Audit

Jangka Waktu Laporan Audit Diterima	Skor
- sampai dengan akhir bulan keempat sejak tahun buku perhitungan tahunan ditutup	3
- sampai dengan akhir bulan kelima sejak tahun buku perhitungan tahunan ditutup	2
- lebih dari akhir bulan kelima sejak tahun buku perhitungan tahunan ditutup	0

- Contoh Perhitungan :

Laporan audit terhadap laporan perhitungan tahunan BUMN PT "A" (periode tahun buku 1/1/1997 sampai dg 31/12/1997) diterima oleh Pemegang Saham (sesuai tanggal agenda diterima) pada tanggal 2 Mei 1998. Sesuai tabel 11 di atas, nilai PT "A" untuk ketepatan waktu penyampaian laporan perhitungan tahunan adalah 2.

b. Rancangan RKAP

- Sesuai ketentuan pasal 13 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 1998, pasal 27 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 1998, RUPS untuk PERSERO atau Menteri BUMN untuk PERUM dalam pengesahan rancangan RKAP tahunan harus sudah diterima 60 hari sebelum memasuki tahun anggaran yang bersangkutan.
- Penentuan Nilai

Tabel 12 : Daftar penilaian waktu penyampaian rancangan RKAP

Jangka waktu surat diterima sampai dengan memasuki tahun anggaran yang bersangkutan	Skor
- 2 bulan atau lebih cepat	3
- kurang dari 2 bulan	0

- Contoh 1:

Tahun anggaran BUMN PT "A" dimulai 1/1/1999.

Rancangan RKAP BUMN PT "A" diterima oleh Pemegang Saham (sesuai tanggal agenda diterima) tanggal 29 Oktober 1998. Sesuai tabel 12 di atas pada butir pertama di atas, nilai PT "A" untuk ketepatan waktu penyampaian rancangan RKAP adalah 3.

- Contoh 2

Tahun anggaran BUMN PT "A" diterima oleh Pemegang Saham (sesuai tanggal agenda diterima) tanggal 5 Desember 1998. Sesuai tabel 12 di atas pada butir kedua di atas, nilai PT "A" untuk ketepatan waktu penyampaian rancangan RKAP adalah 0.



Lampiran II: 12/18
Keputusan Menteri
Badan Usaha Milik Negara
Nomor : KEP-100/MBU/2002
Tanggal : 4 Juni 2002

KEMENTERIAN
BADAN USAHA MILIK NEGARA

c. Laporan Periodik

- Waktu penyampaian laporan.

Laporan periodik Triwulanan harus diterima oleh Komisaris/Dewan Pengawas dan Pemegang Saham untuk PERSERO atau Menteri BUMN untuk PERUM paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhirnya periode laporan.

- Penentuan nilai

Tabel 13 : Daftar penilaian waktu penyampaian Laporan Periodik

Jumlah keterlambatan dalam 1 tahun	Skor
lebih kecil atau sama dengan 0 hari	3
$0 < x \leq 30$ hari	2
$0 < x \leq 60$ hari	1
< 60 hari	0

- Contoh Perhitungan

Laporan periodik Triwulanan PT "S" periode anggaran 1 Januari sampai dengan 31 Desember untuk tahun penilaian diterima Pemegang Saham untuk PERSERO atau Menteri BUMN untuk PERUM masing-masing sebagai berikut:

Triwulanan	Berakhir Periode	Tanggal diterima
I	31/3 199x	5/5 199x
II	30/5 199x	15/7 199x
III	30/9 199x	31/10 199x
IV	31/12 199x	10/2 199x+1

- Perhitungan jumlah hari keterlambatan

- Triwulan I 4
- Triwulan II 0
- Triwulan III 0
- Triwulan IV 9

Jumlah hari keterlambatan 13 sehingga mendapatkan nilai 2.

Catatan: Laporan periodik sekurang-kurangnya terdiri dari:

- 1) Laporan pelaksanaan RKAP
- 2) Laporan pelaksanaan Proyek Pengembangan
- 3) Laporan pelaksanaan Anak Perusahaan
- 4) Laporan pelaksanaan penugasan (jika ada)
- 5) Laporan pelaksanaan PUKK



Lampiran II: 14/18
Keputusan Menteri
Badan Usaha Milik Negara
Nomor : KEP-100/MBU/2002
Tanggal : 4 Juni 2002

KEMENTERIAN
BADAN USAHA MILIK NEGARA

Jumlah dana yang disalurkan oleh BUMN PT "A" tahun 1999 Rp. 9.500 terdiri dari :

- Pinjaman Rp. 8.500
- Hibah Rp. 1.000

Efektivitas penyaluran dana = $9.500/10.000 \times 100\%$

Sesuai dengan tabel 14 di atas, maka skor untuk indikator yang bersangkutan adalah 3.

d.2. Tingkat kolektibilitas penyaluran pinjaman.

Rumus :
$$\frac{\text{Rata-rata tertimbang kolektibilitas pinjaman PUKK}}{\text{Jumlah pinjaman yang disalurkan}} \times 100\%$$

Definisi :

- Rata-rata tertimbang kolektibilitas pinjaman PUKK adalah perkalian antara bobot kolektibilitas (%) dengan saldo pinjaman untuk masing-masing kategori kolektibilitas sampai dengan periode akhir tahun buku yang bersangkutan. Bobot masing-masing tingkat kolektibilitas adalah sebagai berikut:

- Lancar 100 %
- Kurang lancar 75 %
- Ragu-ragu 25 %
- Macet 0 %

- Jumlah pinjaman yang disalurkan adalah seluruh pinjaman kepada Usaha Kecil dan Koperasi sampai dengan periode akhir tahun buku yang bersangkutan.

Tabel 15 : Daftar penilaian tingkat pengembalian dana PUKK.

Tingkat pengembalian (%)	> 70	40 s.d. 70	10 s.d. 40	<10
Skor	3	2	1	0

Contoh Perhitungan:

Posisi pinjaman kepada usaha kecil dan koperasi BUMN PT "A" s.d. akhir tahun buku 1999 adalah Rp. 3.000 juta, terdiri dari (Rp.juta)

- Lancar = 1.500
- Kurang lancar = 500
- Ragu-ragu = 900
- Macet = 100

Jumlah 3.000



KEMENTERIAN
BADAN USAHA MILIK NEGARA

Rata-rata tertimbang kolektibilitas pinjaman PUKK adalah sebagai berikut:

- Lancar	1.500	x	100 %	=	1.500
- Kurang lancar	500	x	75 %	=	375
- Ragu-ragu	800	x	25 %	=	225
- Macet	100	x	0 %	=	0

Jumlah rata-rata tertimbang 2.100

Tingkat kolektibilitas pengembalian pinjaman adalah $\frac{2.100}{3000} \times 100 \% = 70 \%$

3000

Sesuai dengan tabel 15 di atas maka skor untuk indikator tingkat kolektibilitas pengembalian pinjaman adalah 2.

LAIN-LAIN

1. Dalam penilaian tingkat kesehatan BUMN, Direksi diberikan opsi untuk tidak memperhitungkan proyek/investasi pengembangan yang sudah dinyatakan operasi komersial menurut standar Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan atau standar umum yang berlaku untuk BUMN tersebut selama 2 (dua) tahun apabila:
 - a. Dalam 2 tahun sejak operasi komersial, proyek/investasi pengembangan dimaksud, belum mencapai utilisasi sebesar 60 %, atau;
 - b. Periode operasi komersial dengan utilisasi di atas 60 % dalam satu tahun penilaian kurang dari 9 bulan.
2. Dalam hal proyek/investasi pengembangan tersebut tidak diperhitungkan dalam penilaian tingkat kesehatan, maka Direksi harus memisahkan secara tegas laporan keuangan yang meliputi Neraca, Laba/Rugi dan Aliran Kas untuk proyek/investasi pengembangan dimaksud dari laporan keuangan perusahaan. Selanjutnya perhitungan tingkat kesehatan hanya didasarkan laporan keuangan perusahaan di luar laporan keuangan proyek/investasi pengembangan.



Lampiran II: 16/18
Keputusan Menteri
Badan Usaha Milik Negara
Nomor : KEP-160/MBU/2002
Tanggal : 4 Juni 2002

KEMENTERIAN
BADAN USAHA MILIK NEGARA

CONTOH INDIKATOR ASPEK OPERASIONAL

INDIKATOR	UNSUR-UNSUR YANG DIJADIKAN PERTIMBANGAN	CONTOH APLIKASI TERHADAP UNSUR-UNSUR YANG DIPERTIMBANGKAN	
		BUMN/SEKTOR	UNSUR-UNSUR YANG DAPAT DIPERTIMBANGKAN
(1)	(2)	(3)	(4)
Pelayanan kepada Pelanggan/Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Perbaikan kualitas sarana & prasarana untuk kepentingan/kepuasan pelanggan. ✓ Ke-ersediaan pelayanan purna jual (after sales service) ✓ Perbaikan mutu produk. ✓ Pengembangan jalur distribusi. ✓ Pelayanan gangguan/troubles. ✓ Penyederhanaan birokrasi yang menguntungkan bagi pelanggan. ✓ Kecepatan pelayanan. ✓ Guidance yang jelas bagi pelanggan. ✓ Peningkatan fasilitas keselamatan bagi pelanggan/pemakai jasa. 	Pelabuhan Pengairan (PERUM Otorita Jatuluhur dan PERUM Jasa Tirta) PLN Jalan Tol Garuda/MNA Bandara	Turn Round Time (TRT), Berthing Time (BT), Waiting Time (WT), dsb Pemenuhan supply air kepada PDAM/industri pengendalian banjir, pengendalian daerah serapan sungai. Frekuensi pemadaman, lama rata-rata pemadaman, kecepatan pelayanan gangguan. Kualitas jalan, indikator traffic sign. On time performance. Kebersihan terminal Bandara.
		Ferkebunan Kereta Api/pelayaran/penerbangan PLN Pengairan (PERUM Otorita Jatuluhur dan PERUM Jasa Tirta) Konsultan Pertambangan	Rendemen, produksi per hektar, dsb. Load factor penumpang dan barang, penumpang-kui-ton, dsb. Susut teknis, susut distribusi, dsb. Pelaksanaan kegiatan operasi dan pemeliharaan (O & P) Men-hour terjual, dsb. Jam jalan kapal keruk, excavator, dsb.
2. Efisiensi produksi dan produktivitas	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Peningkatan utilisasi faktor-faktor produksi/assets idle. ✓ Peningkatan rendemen. ✓ Peningkatan produktivitas per satuan faktor produksi. ✓ Pengurangan susut/loses, baik susut teknis, susut distribusi, maupun susut karena faktor lainnya. ✓ Peningkatan nilai men-hour. ✓ Peningkatan jam jalan rata-rata mesin (dalam batas-batas toleransi). 		



Lampiran II: 17/18
Keputusan Menteri
Badan Usaha Milik Negara
Nomor : KEP-100/MBU/2002
Tanggal : 4 Juni 2002

KEMENTERIAN
BADAN USAHA MILIK NEGARA

(1)	(2)	(3)	(4)
Pemeliharaan kontinuitas produksi.	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Kewajiban melakukan pemeliharaan sarana dan prasarana produksi sesuai persyaratan standar. ✓ Eksplorasi SDA dengan orientasi jangka panjang. ✓ Pelaksanaan checking rutin terhadap fasilitas-fasilitas umum. ✓ Kepatuhan pengoperasian peralatan sesuai dengan batas kapasitas yang direkomendasikan. ✓ Replacement sarana dan prasarana yang sudah tidak produktif. 	<p>Perkebunan</p> <p>Pelabuhan</p> <p>Transportasi</p>	<p>Kepatuhan terhadap aturan penyadapan karet, regenerasi tanaman tidak produktif.</p> <p>Pemeliharaan fasilitas dermaga, pengerukan alur /kolam, dsb.</p> <p>Pemeliharaan sarana transportasi Bus, kereta api, kapal atau pesawat.</p>
Inovasi produk baru	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Kreativitas dalam meningkatkan kualitas produk sesuai dengan kebutuhan pelanggan. ✓ Penciptaan produk-produk baru ✓ Peningkatan penguasaan teknologi. 	<p>Kontraktor</p> <p>Industri kimia dasar</p>	<p>Hak patent, hak cipta, temuan metode konstruksi baru, dsb.</p> <p>Konservasi energi, produk-produk baru yang prospektif, dsb.</p>
Peningkatan kualitas SDM	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Muru diklar. ✓ Penyelenggaraan pendidikan formal dan informal sesuai kebutuhan (dalam negeri dan luar negeri) 	Berlaku umum untuk semua sektor	<p>Penyelenggaraan diklar sesuai kebutuhan.</p> <p>Kaderisasi pimpinan.</p> <p>Peningkatan kesejahteraan Kepedulian manajemen terhadap R & D.</p>
Research & Development (R & D).	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Pengembangan metode baru yang prospektif. ✓ Hasil riset yang bermanfaat. ✓ Perhatian perusahaan terhadap R & D. 	Berlaku umum untuk semua sektor	Kepedulian manajemen terhadap R & D.
Hasil pelaksanaan penugasan Pemerintah.	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Pencapaian sasaran. ✓ Efisiensi dalam mencapai sasaran. ✓ Perhatian manajemen terhadap keberhasilan penugasan. 	Berlaku umum untuk semua sektor	Pencapaian sasaran, efisiensi dalam pencapaian sasaran.



Lampiran II: 18/18
Keputusan Menteri
Badan Usaha Milik Negara
Nomor : KEP-100/MBU/2002
Tanggal : 4 Juni 2002

KEMENTERIAN
BADAN USAHA MILIK NEGARA

(1)	(2)	(3)	(4)
8. Kepedulian terhadap lingkungan.	<ul style="list-style-type: none">✓ Kebersihan lingkungan.✓ Pelaksanaan AMDAL.✓ Reklamasi.✓ Estate regulation.	Berlaku umum untuk semua sektor Kebutanan Pertambangan Industri manufaktur Kawasan Industri	Kebersihan lingkungan kerja. Reboisasi, AMDAL. Reklamasi daerah eks tambang, AMDAL. AMDAL. Estate regulation, AMDAL.

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum

ttd

Victor Hutapea
NIP 060051008

MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA

t t d

LAKSAMANA SUKARDI

-----gpm poof-----



PT. KERETA API (Persero)

KANTOR PUSAT



KEPUTUSAN DIREKSI PT. KERETA API (PERSERO)

NOMOR : KEP.U/OT.003/I/4/KA.2001

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA LAKSANA PT. KERETA API (PERSERO)

DIREKSI PT. KERETA API (PERSERO),

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka restrukturisasi perkeretaapian, Susunan Organisasi dan Tata Laksana Satuan Organisasi Tingkat Direktorat, Pusat dan Satuan Pengawasan Intern di Lingkungan PT Kereta Api (Persero) yang dibentuk berdasarkan SK Direksi Nomor : Kep.U/OT.003/XI/03/KA.1999 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan;
- b. bahwa dalam rangka restrukturisasi perkeretaapian diperlukan organisasi perusahaan yang lebih akuntabel dan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna dalam mengelola sarana kereta api, potensi pelatihan, prasarana penunjang dan perkeretaapian di Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan dan lingkungan Jabotabek, diperlukan adanya pengelolaan yang lebih professional dan mandiri;
- c. bahwa untuk lebih meningkatkan efisiensi, pelayanan dan keselamatan serta pengembangan usaha, dipandang perlu untuk menetapkan Susunan Organisasi dan Tata Laksana Satuan Organisasi Tingkat Kantor Pusat, Divisi Sarana, Divisi Pelatihan, Divisi Usaha Pendukung, Divisi Regional Sumatera Utara, Divisi Regional Sumatera Barat, Divisi Regional Sumatera Selatan, Divisi Angkutan Perkotaan Jabotabek, Anak Perusahaan PT Restoran Kereta Api dan Daerah Operasi I sampai dengan IX di Jawa;
- d. bahwa untuk melaksanakan butir c tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Mengingat

1. Undang - Undang Nomor : 13 Tahun 1992 tentang Perkeretaapian / Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor : 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3479;

UTAMAKAN KESELAMATAN DAN PELAYANAN

2. Undang-Undang Nomor 1 / 1995 tentang Perseroan Terbatas;
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 12 Tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan (Persero);
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 19 Tahun 1998 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum Kereta Api Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) Kereta Api;
5. Peraturan Pemerintah Nomor : 69 Tahun 1998 tentang Sarana dan Prasarana Kereta Api;
6. Peraturan Pemerintah Nomor : 81 Tahun 1998 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api;
7. Peraturan Pemerintah Nomor : 98 Tahun 1999 tanggal 22 Desember 1999 tentang Pengalihan Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan selaku Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atau Pemegang Saham pada Perusahaan Perseroan (Persero) dan Perseroan Terbatas yang sebagian sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia kepada Menteri Negara Penanaman Modal dan Pembinaan Badan Usaha Milik Negara yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 1 Tahun 2000 dan Peraturan Pemerintah Nomor : 48 Tahun 2000;
8. Surat Keputusan Bersama antara Menteri Perhubungan, Menteri Keuangan dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional (Kepala BAPPENAS) Nomor : 1204.MK03 1999 Tahun 1999 tentang Pembiayaan atas Pelayanan Umum Angkutan Kereta Api Penumpang Kelas Ekonomi, Pembiayaan atas Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Kereta Api, serta Biaya atas Penggunaan Sarana KA.

- Memperhatikan :
- a. Akta Notaris Imas Fatimah, SH Nomor : 02 tanggal 1 Juni 1999 tentang Pendirian PT. Kereta Api (Persero);
 - b. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor : C-17171 HT.01.01.TH.99 tanggal 1 Oktober 1999 tentang Pengesahan Akta Pendirian PT Kereta Api (Persero);
 - c. Surat Dewan Komisaris kepada Direksi PT. Kereta Api (Persero) Nomor : 60/DEKOM/XI/2000 tanggal 23 November 2000 tentang Re-Organisasi PT. Kereta Api (Persero) yang disusuli dengan Surat Nomor : 68/DEKOM/XII/2000 tanggal 21 Desember 2000 tentang Persetujuan Organisasi PT Kereta Api (Persero).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKSI PT. KERETA API (PERSERO)
TENTANG ORGANISASI DAN TATA LAKSANA PT. KERETA
API (PERSERO)

PERTAMA : Susunan Organisasi PT. Kereta api (Persero).

- a. Susunan Organisasi Tingkat Pusat terdiri dari :
 - 1) Direktorat Keuangan;
 - 2) Direktorat Teknik;
 - 3) Direktorat Operasi;
 - 4) Direktorat Personalia dan Umum;
 - 5) Direktorat Pengembangan Usaha;
 - 6) Pusat - Pusat :
 - a) Pusat Perencanaan dan Pengembangan;
 - b) Pusat Logistik;
 - 7) Satuan Pengawasan Intern.
- b. Susunan Organisasi Tingkat Divisi dan Daerah Operasi :
 - 1) Divisi :
 - a) Divisi Sarana;
 - b) Divisi Pelatihan;
 - c) Divisi Usaha Pendukung;
 - d) Divisi Regional I Sumatera Utara;
 - e) Divisi Regional II Sumatera Barat;
 - f) Divisi Regional III Sumatera Selatan;
 - g) Divisi Angkutan Perkotaan Jabotabek.
 - 2) Daerah Operasi :
 - a) Daerah Operasi I Jakarta;
 - b) Daerah Operasi II Bandung;
 - c) Daerah Operasi III Cirebon;
 - d) Daerah Operasi IV Semarang;
 - e) Daerah Operasi V Purwokerto;
 - f) Daerah Operasi VI Yogyakarta;
 - g) Daerah Operasi VII Madiun;
 - h) Daerah Operasi VIII Surabaya;
 - i) Daerah Operasi IX Jember.
- c. Anak Perusahaan PT Restoran Kereta Api.

KEDUA

: Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Laksana Satuan Organisasi Tingkat Kantor Pusat dan Daerah di Lingkungan PT. Kereta Api (Persero) adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran I sampai dengan Lampiran XI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Surat Keputusan ini.

- KETIGA : Segala perubahan, tambahan dan pengaturan yang berkaitan dengan organisasi dan tata laksana yang diatur dalam keputusan ini ditetapkan dengan Keputusan Direksi tersendiri.
- KEEMPAT : Sejak berlakunya keputusan ini, maka keputusan atau peraturan berikut dinyatakan tidak berlaku :
- a. Keputusan Direksi Nomor : Kep. U/OT.003/XI/03/KA-99 tanggal 08 November 1999 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Tingkat Direktorat, Pusat dan Satuan Pengawasan Intern di Lingkungan Kantor Pusat PT. Kereta Api (Persero);
 - b. Keputusan Direksi PERUMKA Nomor : Kep.U/OT.003/III/12/KA-99, tanggal 29 Maret 1999 tentang Pembentukan Daerah Operasi Jabctabek;
 - c. Peraturan lain yang bertentangan dan atau tidak sesuai lagi dengan keputusan ini.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : B A N D U N G
PADA TANGGAL : 2 JANUARI 2001

a.n. DIREKSI PT. KERETA API (Persero)
DIREKTUR UTAMA,

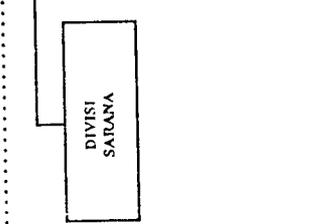
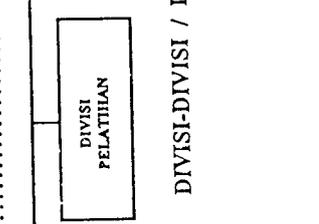
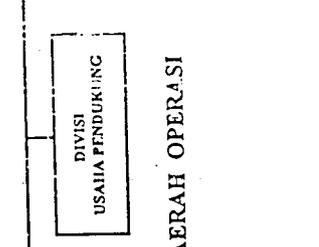
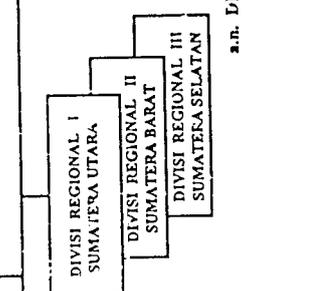
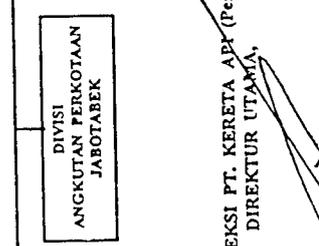
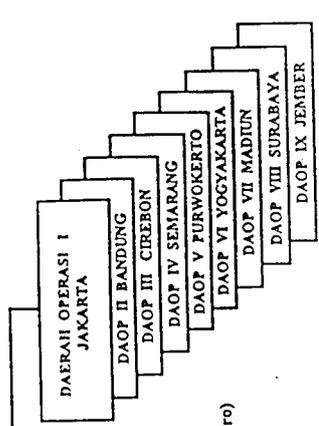
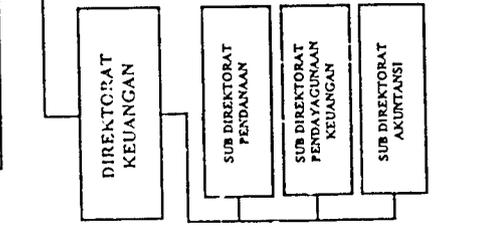
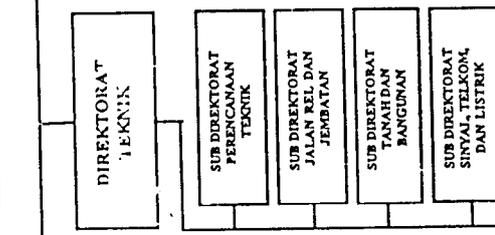
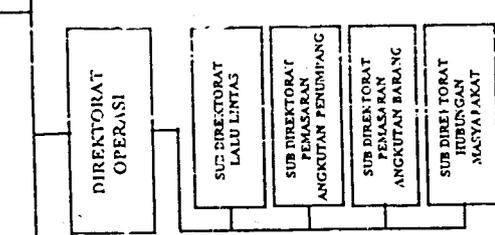
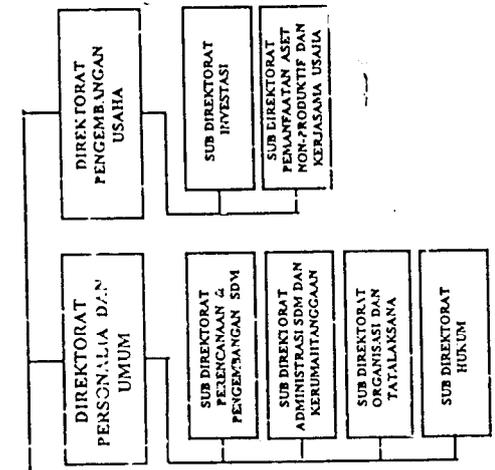
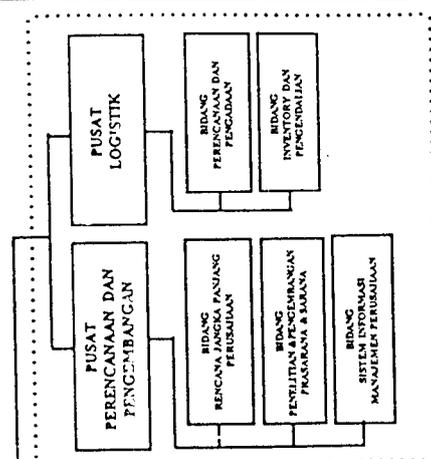
BADAR ZAENIE
NIPP. 14277

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
PT. KERETA API (Persero)

DIREKSI

- KETUA : DIREKTUR UTAMA**
ANGGOTA : 1. DIREKTUR KEUANGAN
 2. DIREKTUR TEKNIK
 3. DIREKTUR OPERASI
 4. DIREKTUR PERSONALIA DAN UMUM
 5. DIREKTUR PENGEMBANGAN USAHA

SATUAN
PENGAWASAN INTERN
(SPI)



DIVISI-DIVISI / DAERAH OPERASI

a.n. DIREKSI PT. KERETA API (Persero)
DIREKTUR UTAMA,

BADAR ZAENIF
NIPP 14277

LAMPIRAN : II

SK DIREKSI PT KERETA API (PERSERO)

NOMOR : KEP.U/OT.003/1/4/KA.2001

TANGGAL : 2 JANUARI 2001

**KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI DAN
TATA LAKSANA KANTOR PUSAT**

BAB I

DIREKTORAT KEUANGAN

Bagian Pertama

Direktorat Keuangan

Pasal 1

- (1) Direktorat Keuangan adalah satuan organisasi di lingkungan Kantor Pusat PT Kereta Api (Persero);
- (2) Direktorat Keuangan dipimpin oleh seorang Direktur sebagai anggota Direksi yang bertanggung jawab kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);
- (3) Bagian Struktur Organisasi Direktorat Keuangan sebagaimana tercantum pada Lampiran II.1.

Pasal 2

Direktur Keuangan mempunyai tugas pokok membina dan mengelola keuangan, serta menetapkan kebijakan tentang pendanaan, pendayagunaan keuangan dan akuntansi.

Pasal 3

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana tersebut pada Pasal 2, Direktorat Keuangan mempunyai fungsi :

- a. Penatausahaan kas besar, perhitungan *Public Service Obligation* (PSO), *Infrastructure Maintenance and Operation* (IMO), *Track Acces Charge* (TAC), transaksi antar unit usaha dan analisis perumusan dan penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP), perencanaan kebutuhan dan pencarian sumber dana, pelaksanaan otorisasi dan pengendalian anggaran, distribusi dana, serta penatausahaan biaya;
- b. Perumusan, penyusunan dan pengendalian peraturan keuangan dan administrasi anggaran, pelaksanaan pengesahan pembayaran, perhitungan, penyelesaian dan pelaporan perpajakan, asuransi dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR), serta melaksanakan kesekretariatan Direktorat Keuangan;

- c. Perumusan dan penyusunan sistem dan prosedur akuntansi, penyusunan laporan rugi/laba, pembuatan laporan keuangan, pembinaan akuntansi daerah, pelaksanaan verifikasi buku kas stasiun, serta pembinaan pemeriksa kas, laporan keuangan kompilasi DAOP di Jawa dan pengurusan barang inventaris.

Pasal 4

Direktorat Keuangan terdiri dari :

- a. Sub Direktorat Pendanaan ;
- b. Sub Direktorat Pendayagunaan Keuangan;
- c. Sub Direktorat Akuntansi.

Bagian Kedua

Sub Direktorat Pendanaan

Pasal 5

- (1) Sub Direktorat Pendanaan adalah satuan organisasi di lingkungan Kantor Pusat PT Kereta Api (Persero) yang berada di bawah Direktorat Keuangan;
- (2) Sub Direktorat Pendanaan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Direktorat yang bertanggung jawab kepada Direktur Keuangan.

Pasal 6

Sub Direktorat Pendanaan mempunyai tugas pokok merumuskan dan menyusun program perencanaan anggaran dan pencarian sumber dana; pelaksanaan otorisasi, pelaporan pelaksanaan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP), pengendalian dan distribusi dana, tata usaha kas besar Kantor Pusat; perhitungan PSO, IMO, TAC dan transaksi antar unit usaha, serta analisis biaya.

Pasal 7

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana tersebut pada Pasal 6, Sub Direktorat Pendanaan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan RKAP Tahunan, perencanaan kebutuhan dan pencarian sumber dana;
- b. Pelaksanaan otorisasi dan pengendalian anggaran, serta evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan RKAP;
- c. Pengendalian dan distribusi dana, serta penatausahaan kas besar di Kantor Pusat;
- d. Penyusunan perhitungan PSO, IMO, dan TAC, transaksi antar unit usaha dan analisis biaya.

Pasal 8

Sub Direktorat Pendanaan terdiri dari 4 (empat) Seksi, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi:

- a. Seksi Perencanaan Anggaran dan Pencarian Sumber Dana;
- b. Seksi Pelaksanaan Otorisasi dan Pelaporan Pelaksanaan RKAP;
- c. Seksi Pengendalian, Distribusi Dana dan Tata Usaha Kas Besar Kantor Pusat;
- d. Seksi Perhitungan PSO, IMO, TAC, Transaksi Antar Unit Usaha dan Analisis Biaya.

Pasal 9

- (1) Seksi Perencanaan Anggaran dan Pencarian Sumber Dana mempunyai tugas pokok menyusun rencana kerja anggaran perusahaan, rencana kebutuhan dan pencarian sumber dana;
- (2) Seksi Pelaksanaan Otorisasi dan Pelaporan Pelaksanaan RKAP mempunyai tugas pokok melaksanakan pengendalian dan penyiapan otorisasi anggaran, serta evaluasi dan penyusunan realisasi RKAP;
- (3) Seksi Pengendalian dan Distribusi Dana dan Tata Usaha Kas Besar Kantor Pusat mempunyai tugas pokok melaksanakan pengendalian dan distribusi dana, penyelenggaraan tata laksana perbendaharaan, serta pengelolaan tata usaha kas besar Kantor Pusat;
- (4) Seksi PSO, IMO, TAC, Transaksi Antar Unit Usaha dan Analisis Biaya mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan peraturan dan perhitungan PSO beserta perhitungan dan analisis biaya, penyusunan peraturan dan perhitungan IMO dan TAC, serta mengatur tata laksana pembebanan transaksi keuangan antar unit usaha, analisis tarif-tarif pembebanan dan analisis perhitungan biaya.

Bagian Ketiga

Sub Direktorat Pendayagunaan Keuangan

Pasal 10

- (1) Sub Direktorat Pendayagunaan Keuangan adalah satuan organisasi di lingkungan Kantor Pusat PT Kereta Api (Persero) yang berada di bawah Direktorat Keuangan;
- (2) Sub Direktorat Pendayagunaan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Direktorat yang bertanggung jawab kepada Direktur Keuangan.

Pasal 11

Sub Direktorat Pendayagunaan Keuangan mempunyai tugas pokok merumuskan dan menyusun program pendayagunaan keuangan.

Pasal 12

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana tersebut pada Pasal 11, Sub Direktorat Pendayagunaan Keuangan mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan dan pengendalian peraturan keuangan, serta pelaksanaan administrasi anggaran Kantor Pusat;
- b. Pelaksanaan pengesahan pembayaran internal maupun eksternal transaksi keuangan di Kantor Pusat;
- c. Perhitungan penyelesaian dan pelaporan perpajakan dan asuransi;
- d. Pelaksanaan penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi (TGR), kesekretariatan Direktur Keuangan dan administrasi keuangan umum lainnya.

Pasal 13

Sub Direktorat Pendayagunaan Keuangan terdiri dari 4 (empat) Seksi masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi:

- a. Seksi Administrasi Anggaran Kantor Pusat dan Peraturan Keuangan;
- b. Seksi Pengesahan Pembayaran;
- c. Seksi Perpajakan dan Asuransi;
- d. Seksi Administrasi Keuangan Umum.

Pasal 14

- (1) Seksi Administrasi Anggaran Kantor Pusat dan Peraturan Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan administrasi anggaran dan penyusunan peraturan keuangan;
- (2) Seksi Pengesahan Pembayaran mempunyai tugas pokok melaksanakan pengesahan pembayaran internal maupun eksternal transaksi keuangan Kantor Pusat;
- (3) Seksi Perpajakan dan Asuransi mempunyai tugas pokok melaksanakan perhitungan kewajiban pajak, administrasi dan pelaporan perpajakan, serta administrasi asuransi aset dan angkutan;
- (4) Seksi Administrasi Keuangan Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan penyelesaian TGR, kesekretariatan Kantor Direktur Keuangan, serta pemantauan dana Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi (PUKK) dan administrasi keuangan umum lainnya.

- Laporan triwulan III Ku 19216

Bagian Keempat
Sub Direktorat Akuntansi

Pasal 15

- (1) Sub Direktorat Akuntansi adalah satuan organisasi di lingkungan Kantor Pusat PT Kereta Api (Pesero) yang berada di bawah Direktorat Keuangan;
- (2) Sub Direktorat Akuntansi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Direktorat yang bertanggung jawab kepada Direktur Keuangan.

Pasal 16

Sub Direktorat Akuntansi mempunyai tugas pokok merumuskan dan menyusun program sistem dan prosedur akuntansi dan laporan keuangan; pembuatan laporan keuangan, pelaksanaan verifikasi kas stasiun dan pembinaan pemeriksa kas, pembuatan laporan keuangan kompilasi DAOP di Jawa dan pengurusan inventaris kekayaan milik negara.

Pasal 17

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana tersebut pada Pasal 16, Sub Direktorat Akuntansi mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan sistem dan prosedur akuntansi, pembuatan laporan manajemen, penyusunan laporan rugi/laba dan analisis laporan keuangan;
- b. Pembuatan laporan keuangan kompilasi DAOP di Jawa dan pengurusan barang inventaris kekayaan milik negara;
- c. Pembuatan laporan keuangan Kantor Pusat, penyusunan laporan keuangan perusahaan, serta pembinaan akuntansi daerah;
- d. Pelaksanaan verifikasi buku kas stasiun dan pembinaan pemeriksa kas.

Pasal 18

Sub Direktorat Akuntansi terdiri dari 4 (empat) Seksi masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi :

- a. Seksi Sistem Akuntansi dan Analisis Laporan Keuangan;
- b. Seksi Akuntansi Jawa dan Pengurusan Barang Inventaris Kekayaan Milik Negara;
- c. Seksi Laporan Keuangan dan Pelaksanaan Akuntansi Kantor Pusat;
- d. Seksi Verifikasi Kas Stasiun.

Pasal 19

- (1) Seksi Sistem Akuntansi dan Analisis Laporan Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan sistem dan prosedur akuntansi, analisis laporan keuangan dan penyusunan laporan manajemen, serta penyusunan laporan rugi/laba dan kontribusi jaringan;
- (2) Seksi Akuntansi Jawa dan Pengurusan Barang Inventaris Kekayaan Milik Negara melaksanakan pemantauan dan pengendalian rekening hubungan pembukuan antar Daerah Operasi di Jawa serta unit akuntansi di Sumatera, penyusunan laporan keuangan kompilasi Daerah Operasi di Jawa dan pengurusan barang inventaris kekayaan milik negara;
- (3) Seksi Laporan Keuangan dan Pelaksanaan Akuntansi Kantor Pusat mempunyai tugas pokok melaksanakan akuntansi transaksi keuangan Kantor Pusat, pemantauan dan pengendalian rekening hubungan pembukuan antara Unit Akuntansi di Sumatera, Unit Akuntansi di Jawa dan Unit Akuntansi PT Kereta Api (Persero) secara menyeluruh, serta penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasi PT Kereta Api (Persero);
- (4) Seksi Verifikasi Kas Stasiun mempunyai tugas pokok melaksanakan verifikasi buku kas stasiun dan rekening koran pendapatan perusahaan, penyiapan laporan pendapatan bulanan, serta pembinaan pemeriksa kas daerah dan pemeriksa kas stasiun.

BAB II

DIREKTORAT TEKNIK

Bagian Pertama

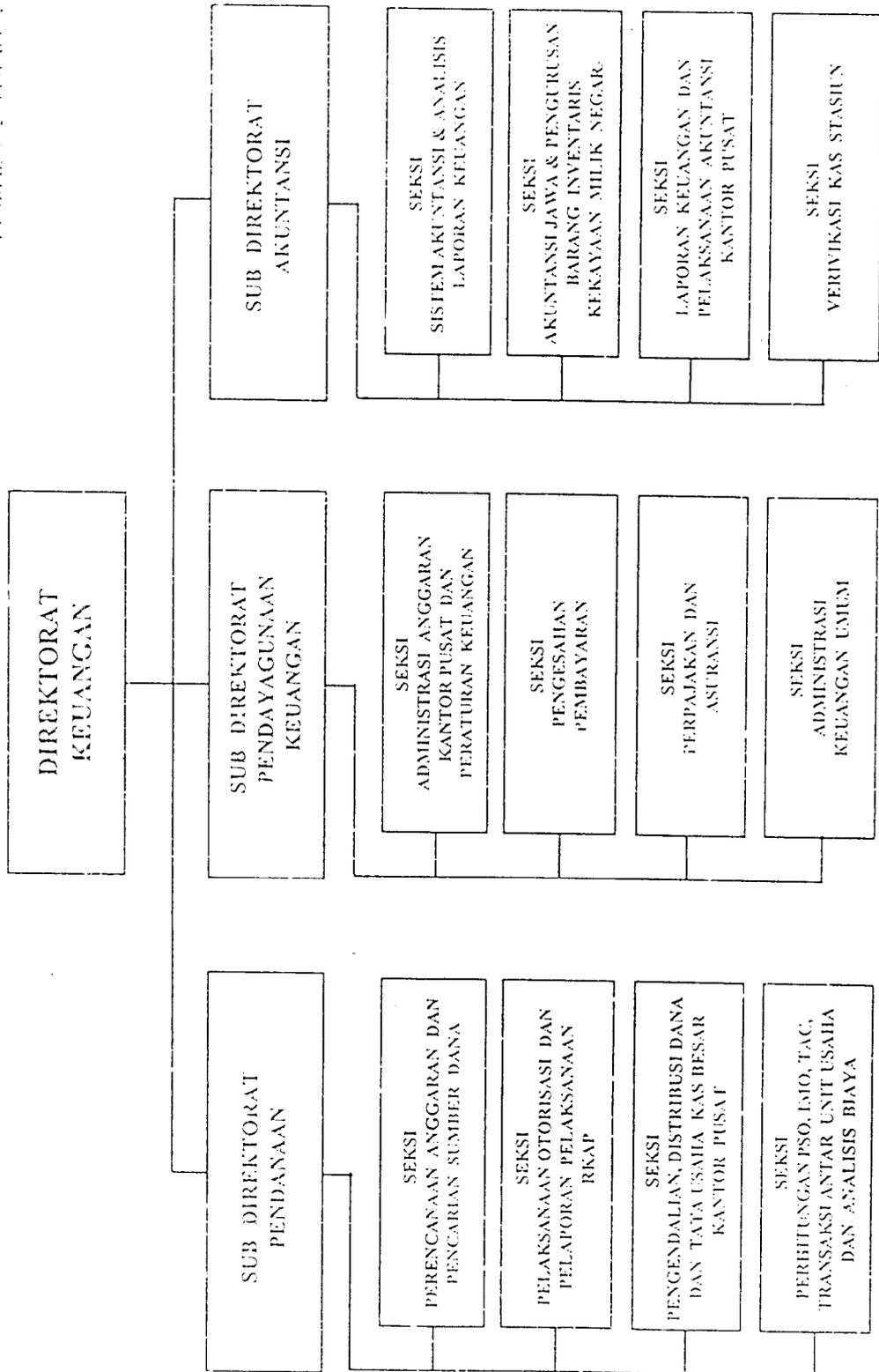
Direktorat Teknik

Pasal 20

- (1) Direktorat Teknik adalah satuan organisasi di lingkungan Kantor Pusat PT Kereta Api (Persero);
- (2) Direktorat Teknik dipimpin oleh seorang Direktur sebagai anggota Direksi yang bertanggung jawab kepada RUPS;
- (3) Bagan Struktur Organisasi Direktorat Teknik sebagaimana tercantum pada Lampiran II.2.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DIREKTORAT KEUANGAN

LAMPIRAN 311
SK. DIREKSI PT. KERETA API (Perkerindo)
NOMOR : SK/PT/003/14277
TANGGAL : 2 JANUARI 1977



Dr. D. DIREKSI PT. KERETA API (Perkerindo)
DIREKTUR UTAMA

ILHAM ZAENIE
SK/PT/003/14277

NERACA KOMPARATIF PT. KERETA API (PERSERO)

PER 31 DESEMBER 2002

KEWAJIBAN DA

URAIAN	PER 31 - 12 - 2002 (Rp)	PER 31 - 12 - 2001 (Rp)	NO	URAIAN	PER 31 - 12 - 2002 (Rp)	31
AKTIVA				V. KEWAJIBAN		
AKTIVA LANCAR				1. Kewajiban Lancar		
Rekening Bank	139.372.457.655	95.903.267.699		a. Hutang Pajak	9.291.342.698	
Saldo	59.465.902.057	143.325.588.587		b. Hutang Pada Pem. (PDS)		
Saldo Jaminan Kontrak	87.442.823.455	81.254.802.325		c. Hutang Pada Pihak ke III	142.773.812.118	1
Saldo Niaga	128.360.633.776	69.294.750.640		d. Hutang Pegawai	10.661.440.893	
Saldo Pegawai	1.361.353.078	1.261.245.656		e. Hutang Lain-lain	36.019.326.357	
Saldo Lain-lain	77.998.131.037	59.025.750.178		f. Biaya YMH Dibayar	176.811.112.006	1
Saldo 4 s.d. 6	207.720.117.891	126.581.746.474		g. Pendapatan Diterima Dimuka	12.656.977.027	
Saldo Piutang Raportage	(3.553.930.099)	(1.713.174.517)		h. Kartika	4.029.312.919	
Saldo Piutang Pihak	204.168.127.792	124.868.571.957		Jumlah Kewajiban Lancar	392.243.324.018	3
Saldo Dibayar Dimuka	16.204.334.005	14.267.132.333		2. Kewajiban Jangka Panjang		
Saldo Dibayar Dimuka	5.070.741.786	3.272.936.892		a. Bridging Financing	25.005.391.433	
Saldo Pendapatan YMH Diterima	272.778.099	2.554.669.091		b. SLA	73.979.031.361	
Saldo Piutang PPN Masukan	183.225.772			c. Bantuan Pemerintah yang belum ditentukan statusnya	603.439.324.087	5
Saldo Piutang	272.855.985.005	237.815.414.257		d. Pinjaman Bank	86.496.311.859	
JUMLAH AKTIVA LANCAR	785.110.005.626	704.262.401.141		Jml Kewajiban Jangka Panjang	788.920.658.747	6
AKTIVA TETAP (AT)				JUMLAH KEWAJIBAN	1.181.163.982.765	9
ASSET BERAKIF				VI. EKUITAS		
Saldo Awal	630.767.442.703	568.828.911.252		1. Modal Awal	2.200.000.000.000	2
Saldo Perolehan	101.745.508.292	101.745.508.292		2. PMP		
Saldo Perolehan	750.672.544.483	750.672.544.483		a. Tunai		
Saldo Perolehan	621.745.948.995	535.749.983.957		b. Realisasi DIPI/APBN		
Saldo Perolehan	241.481.917.135	242.904.406.833		Jumlah PMP 2		
Jumlah Saldo Awal	2.346.408.331.608	2.199.901.354.817		3. Laba(Rugi) Tahun Berjalan		
ASSET BERAKIF				a. Kantor Pusat, Divisi	(181.970.579.519)	(
Saldo Tanah	2.024.138.298	2.224.538.298		b. Wilu Jawa	260.566.674.701	
Saldo Tanah	2.661.428.891	2.777.509.331		c. E S S	2.165.070.288	
Saldo Tanah	3.421.735.155	2.748.581.915		d. E S B	(36.327.567.002)	
Saldo Tanah	263.631.179.175	277.697.001.845		e. E S U	(42.602.255.714)	
Saldo Tanah	1.521.270.900	678.260.282		Jumlah R/L Tahun Berjalan	1.851.142.754	
Saldo Tanah	91.570.893.741	91.536.950.511		4. Laba Rugi Yg Ditahan :		
Jumlah Praterata 2	368.206.545.160	377.662.862.182		a. Saldo s/d Tahun Berjalan	49.199.851.324	
ASSET LAIN				b. Koreksi Tahun Berjalan		
a. Kendaraan Bermotor	3.908.214.286	3.486.184.286		Jumlah L/R Yg Ditahan	49.199.851.324	
b. Barang Inventaris	27.407.925.111	26.995.916.341		5. Cadangan Modal		
c. Mesin dan Peralatan	28.252.112.070	25.656.272.394		a. Cadangan Tujuan	88.630.245.639	
d. Alat yang bergerak	21.398.285.160	20.535.011.393		b. Cadangan Umum		
Jumlah Fasilitas 3	80.966.536.627	76.673.384.414		c. Selisih Likuidasi		
Jumlah ASSET BERAKIF	(411.036.951.514)	(271.633.117.823)		Jumlah Cadangan Modal	88.630.245.639	
JUMLAH AKTIVA TETAP	2.404.574.462.881	2.382.404.483.590		JUMLAH EKUITAS	2.339.681.239.717	2
AKTIVA LAIN-LAIN				VII. KEWAJIBAN ADMINISTRATIF		
1. Aktiva Dalam Penyelidikan	66.107.090.315	7.406.917.541		Hutang Dana Pensiun	319.436.399.920	
2. Barang Dalam Penjualan				VIII. REKENING KORAN		
3. Perediaan Tidak Produktif	26.796.041.416	49.006.372.604		1. Kantor Pusat		2
4. Aktiva Tidak Produktif	74.447.935.204	75.627.400.199		2. Wilu Jawa		(1
5. Revisi antara Persebaran	529.276.375	(3.866.224.078)		3. ESS		
6. Revisi antara Piutang				4. ESB		
7. Piutang Jang Muka UO	138.948.768.700	67.727.434.610		5. ESU		
8. Aktiva Pihak Tanggungan	4.131.640.965	22.960.030.464		JUMLAH REKENING KORAN		
JUMLAH AKTIVA LAIN-LAIN	331.160.753.975	218.864.931.240		JUMLAH KEWAJIBAN & EKUITAS	3.840.281.622.402	3
AKTIVA ADMINISTRATIF						
Saldo Bank Dana Pensiun	1.991.399.920	3.135.426.935				
Saldo Dana Pensiun	316.945.000.000	262.345.000.000				
Saldo Dana Pensiun	500.000.000	500.000.000				
JUMLAH AKTIVA ADMINISTRATIF	319.436.399.920	265.980.426.935				
JUMLAH AKTIVA	3.840.281.622.402	3.571.532.242.906				

PT. KERETA API (PERSERO)
 PERHITUNGAN RUGI LABA
 1 JANUARI S.D 31 DESEMBER 2002

NO	U R A I A N	JUMLAH
1	PENDAPATAN OPERASI	
	a. Angkutan Penumpang	1,467,914,970,419
	b. Angkutan Barang	451,613,778,702
	c. Pendapatan Operasi Lainnya	6,345,845,356
	Jumlah Pendapatan Operasi (1)	<u>1,925,874,594,477</u>
2	P S O	60,000,000,000
3	Jumlah 3 (1+2)	<u>1,985,874,594,477</u>
4	BIAYA OPEFASI LANGSUNG	
	a. Angkutan KA	15314336318
	1) Bahan Bakar	244,966,055,616
	2) Pemeliharaan Sarana	226,734,255,575
	3) Leasing PT. INKA	8,473,712,902
	4) Pegawai	
	a) Operasi	142,904,260,501
	b) Pemeliharaan Sarana	47,002,132,564
	Jumlah (4)	<u>189,906,393,065</u>
	5) Pemilikan	120,799,353,698
	a) Penyusutan Sarana Gerak	0
	b) Asuransi Sarana Gerak	120,799,353,698
	Jumlah (5)	<u>120,799,353,698</u>
	Jumlah BOL Angkutan KA	<u>790,879,770,856</u>
	b. Penunjang Angkutan KA	19,644,509,167
	1) Biaya Langsung Restorka	45,955,755,456
	2) Tugasp	6,375,309,797
	3) Angkutan Lanjutan	505,200,736
	4) Biaya Operasi TPK	72,480,775,156
	Jumlah BOL Penunjang Angkutan KA	<u>72,480,775,156</u>
	Jumlah BOL (4a+4b)	<u>863,360,546,012</u>
5	BIAYA OPERASI TDK LANGSUNG (BOTL)	
	A. Biaya I M O	168,636,102,076
	1. Pemeliharaan Prasarana Pokok	
	2. Pegawai I M O	107,481,894,380
	a. Pegawai Pemel. Prasarana Pokok	97,043,886,194
	b. Pegawai Pengop. Prasarana Pokok	41,337,695,611
	c. Pegawai Perencanaan & Pengawasan	
	Jumlah 2	<u>245,863,476,185</u>
	B. Pemel. Prasarana Pendukung	18,576,831,960
	C. Penyusutan Prasarana Pendukung	6,790,249,278
	D. Biaya Umum Stasiun Langsiran	75,122,001,183
	1) Pegawai	24,356,331,788
	2) Lainnya	99,478,332,971
	Jumlah D	<u>1,070,534,785</u>
	E. Malapetaka	743,666,578
	F. Biaya Umum Pegawai TPK	0
	G I M O	0
	H. T A C	<u>541,159,193,833</u>
	Jumlah BOTL (5)	<u>1,404,519,739,845</u>
6	Jumlah Biaya Operas (5+3)	<u>581,354,854,632</u>
7	Laba/Rugi Operasi (3-6)	

PT. KERETA API (PERSERO)
 PERHITUNGAN RUGI LABA
 1 JANUARI S.D 31 DESEMBER 2002

NO	U R A I A N	JUMLAH
8	BIAYA JUMUM	301,754,689,484
	a. Biaya Pegawai Umum	9,222,108,110
	b. Biaya Penjualan	5,624,042,573
	c. Biaya Pendidikan	0
	d. Biaya Renbang	8,843,323,774
	e. Biaya Umum Restorka	943,630,493
	f. Biaya Umum Balai Grafika	60,384,551,242
	g. Biaya Umum Kantor Pusat	19,391,737,962
	h. Biaya Umum Eksploatasi	84,802,349,451
	i. Biaya Umum Daop/Inspeksi	25,658,236,530
	j. Biaya Umum Balai Yasa	19,071,443,888
	k. Biaya Umum Instalasi Tetap	15,158,637,483
	l. Biaya Umum Dipo	4,053,677,652
	m. Biaya Umum Dipo Mekanik	3,116,282,854
	n. Biaya Umum Gudang	1,073,342,392
	o. Biaya Umum Inklaring	1,915,760,344
	p. Biaya Umum Terminal Peti Kemas	6,628,735,439
	q. Biaya Umum Mr ss/Wisma	400,008,719
	r. Biaya Umum BPLT Yk	523,797,662
	s. Biaya Umum P G M	827,685,048
	t. Biaya Umum Pusdiklat	160,666,825
	u. Biaya Kendaraan Bermotor	(1,366,060,251)
	v. Selisih Persediaan	11,591,663,475
	w. Biaya Penyusutan AT Fas. (AT Umum)	34,919,950
	x. Biaya Pemeliharaan Tanah & Bangunan	0
	y. Biaya Piutang Ragu-ragu	0
	z. Biaya Umum Pendidikan	1,704,593,604
	a. Biaya Divisi Sarana K. Pusat	760,824,181
	b. Biaya Divisi Usaha Pendukung	373,885,913
	c. B. Umum Sub. Divisi Properti dan Periklanan	336,511,360
	d. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	2,788,630,110
	Jumlah (8)	585,779,676,267
9	LABA RUGI USAHA (7-8)	(4,424,821,635)
10	PENDAPATAN NON OPERASI	
	1. Pendapatan Usaha Tambahan	297,816,011
	a. Penjualan Jasa Teknis	0
	b. Biaya Penjualan Jasa Teknis	0
	Jumlah 1a	297,816,011
	b. Iklan	1,298,652,847
	c. K. S. O	86,088,238
	Jumlah 1	1,682,557,096
	2. Persewaan	17,584,511,641
	3. Lain-lain	22,789,726,244
11	JUMLAH PENDAPATAN NON OPERASI BIAYA NON OPERASI	42,056,794,981
12	LABA (RUGI) PERUSAHAAN SEBELUM POS LUAR BIASA	37,631,973,346
13	LABA (RUGI) LUAR BIASA	(15,973,006,010)
14	LABA (RUGI) PERUSAHAAN SETELAH POS LUAR BIASA	21,658,967,336
15	PPH BADAN	979,435,083
16	PAJAK TANGGUHAN	18,828,389,499
17	LABA (RUGI) PERUSAHAAN SETELAH PAJAK	1,851,142,754

NERACA KOMPARATIF PT. KERETA API (PERSERO)
PER 31 DESEMBER 2002

KEWAJIBAN DA

URAIAN	PER		NO	URAIAN	PER	
	31 - 12 - 2002 (Rp)	31 - 12 - 2001 (Rp)			31 - 12 - 2002 (Rp)	31
NCAR				V. KEWAJIBAN		
Bank	139.372.437.655	96.903.267.699		1. Kewajiban Lancar		
Pinjaman	59.465.902.057	143.325.588.587		a. Hutang Pajak	9.291.342.698	
Asuransi	87.482.823.455	81.254.802.325		b. Hutang Pada Pem. (PDS)		
Pegawai	128.360.633.776	62.294.750.640		c. Hutang Pada Pihak ke III	142.773.812.118	1
Lain-lain	1.361.353.078	1.261.245.656		d. Hutang Pegawai	10.661.440.893	
	77.998.131.037	56.025.750.178		e. Hutang Lain-lain	36.019.326.357	
	207.720.117.891	126.581.746.474		f. Biaya YMH Dibayar	176.811.112.006	1
	(3.553.900.099)	(1.713.174.517)		g. Pendapatan Diterima Dimuka	(12.656.977.027)	
	204.166.127.792	124.868.571.957		h. Kartika	4.029.312.919	
	16.204.364.005	14.267.130.333		Jumlah Kewajiban Lancar	392.243.324.018	3
	5.090.741.786	3.272.936.192		2. Kewajiban Jangka Panjang		
	272.378.099	2.554.669.091		a. Bridging Financing	25.005.391.433	
	189.225.772			b. SLA	73.975.031.365	
	272.865.985.035	237.815.414.257		c. Bantuan Pemerintah yang belum ditentukan statusnya	603.439.324.087	5
JUMLAH AKTIVA LANCAR	785.110.095.626	704.282.401.141		d. Pinjaman Bank	86.496.311.859	
				Jml Kewajiban Jangka Panjang	788.920.658.747	6
TETAP (ATI)				JUMLAH KEWAJIBAN	1.181.163.982.765	9
Peralatan	630.767.412.703	568.628.911.252		VI. EKUITAS		
Peralatan	101.745.508.292	101.745.508.292		1. Modal Awal	2.200.000.000.000	2
Peralatan	750.672.544.483	750.672.544.483		2. PMP		
Peralatan	621.740.948.995	535.749.983.957		a. Tunai		
Peralatan	241.461.917.135	242.904.406.631		b. Realisasi DIPI/APBN		
Peralatan	2.346.408.831.608	2.199.901.354.817		Jumlah PMP 2		
Peralatan	2.224.538.298	2.224.538.298		3. Laba(Rugi) Tahun Berjalan :		
Peralatan	2.650.428.891	2.777.509.331		a. Kantor Pusat, Divisi	(181.970.579.519)	
Peralatan	3.427.735.155	2.748.581.915		b. Wilu Jawa	260.566.674.701	
Peralatan	283.631.679.175	277.697.001.845		c. E S S	2.165.070.288	
Peralatan	4.521.270.900	678.260.282		d. E S B	(36.377.667.002)	
Peralatan	91.550.393.741	91.536.950.511		e. E S U	(42.602.255.714)	
Peralatan	356.206.546.160	377.662.862.182		Jumlah R/L Tahun Berjalan	1.851.142.754	
Peralatan	3.108.214.286	3.486.184.286		4. Laba Rugi Yg Ditahan :		
Peralatan	27.407.026.111	26.995.916.341		a. Saldo s/d Tahun Berjalan	49.199.851.324	
Peralatan	26.252.112.070	25.656.272.394		b. Koreksi Tahun Berjalan		
Peralatan	21.398.285.160	20.535.011.393		Jumlah L/R Yg Ditahan	49.199.851.324	
Peralatan	80.656.536.627	6.673.384.414		5. Cadangan Modal		
Peralatan	(411.706.951.514)	(271.833.117.823)		a. Cadangan Tujuan	88.630.245.639	
JUMLAH AKTIVA TETAP	2.404.574.462.881	2.382.404.483.590		b. Cadangan Umum		
				c. Selisih Likuidasi		
				Jumlah Cadangan Modal	88.630.245.639	
AKTIVA LAIN-LAIN				JUMLAH EKUITAS	2.339.681.239.717	2
Barang Dalam Penyediaan	85.107.130.315	7.405.917.541		VII. KEWAJIBAN ADMINISTRATIF		
Barang Dalam Penyediaan	2.796.341.416	49.009.372.504		Hutang Dana Pensiun	319.436.399.920	
Barang Dalam Penyediaan	74.647.936.204	75.627.400.189		VIII. REKENING KORAN		
Barang Dalam Penyediaan	529.276.375	(3.866.224.078)		1. Kantor Pusat		2
Barang Dalam Penyediaan	138.948.768.700	67.727.434.610		2. Wilu Jawa		(1)
Barang Dalam Penyediaan	4.131.540.965	22.960.030.464		3. ESS		
JUMLAH AKTIVA LAIN-LAIN	331.160.753.975	218.864.931.240		4. ESB		
				5. ESU		
AKTIVA ADMINISTRATIF				JUMLAH REKENING KORAN		
Hutang Dana Pensiun	1.991.399.920	3.135.426.935		JUMLAH KEWAJIBAN & EKUITAS	3.840.281.622.402	3
Hutang Dana Pensiun	316.945.000.000	262.345.000.000				
Hutang Dana Pensiun	500.000.000	500.000.000				
JUMLAH AKTIVA ADMINISTRATIF	319.436.399.920	265.980.426.935				
JUMLAH AKTIVA	3.840.281.622.402	3.571.532.242.906				

PT. KERETA API (PERSERO)
 PERHITUNGAN RUGI LABA
 1 JANUARI S.D 31 DESEMBER 2002

NO	U R A I A N	JUMLAH
1.	PENDAPATAN OPERASI	
	a. Angkutan Penumpang	1,467,914,970,419
	b. Angkutan Barang	451,613,778,702
	c. Pendapatan Operasi Lainnya	6,345,845,356
	Jumlah Pendapatan Operasi (1)	<u>1,925,874,594,477</u>
2	P S O	60,000,000,000
3	Jumlah 3 (1+2)	<u>1,985,874,594,477</u>
4	BIAYA OPERASI LANGSUNG	
	a. Angkutan KA	15314336318
	1) Bahar Bakar	244,966,055,616
	2) Pemeliharaan Sarana	226,734,255,575
	3) Leasing PT. INKA	8,473,712,902
	4) Pegawai	
	a) Operasi	142,904,260,501
	b) Pemeliharaan Sarana	47,002,132,564
	Jumlah (4)	<u>189,906,393,065</u>
	5) Pemilikan	
	a. Penyusutan Sarana Gerak	120,799,353,698
	b) Asuransi Sarana Gerak	0
	Jumlah (5)	<u>120,799,353,698</u>
	Jumlah BOL Angkutan KA	<u>790,879,770,856</u>
	b. Penunjang Angkutan KA	
	1) Biaya Langsung Restorka	19,644,509,167
	2) Tugslag	45,955,755,456
	3) Angkutan Lanjutan	6,375,309,797
	4) Biaya Operasi TPK	505,200,736
	Jumlah BOL Penunjang Angkutan KA	<u>72,480,775,156</u>
	Jumlah BOL (4a+4b)	<u>863,360,546,012</u>
5.	BIAYA OPERASI TDK LANGSUNG (BOTL)	
	A. Biaya I M O	168,636,102,076
	1. Pemeliharaan Prasarana Pokok	
	2. Pegawai I M O	107,481,894,380
	a. Pegawai Pemel. Prasarana Pokok	97,043,886,194
	b. Pegawai Pengop. Prasarana Pokok	41,337,695,611
	c. Pegawai Perencanaan & Pengawasan	
	Jumlah 2	<u>245,863,476,185</u>
	B. Pemel. Prasarana Pendukung	18,576,831,960
	C. Penyusutan Prasarana Pendukung	6,790,249,278
	D. Biaya Umum Stasiun Langsiran	
	1) Pegawai	75,122,001,183
	2) Lainnya	24,356,331,788
	Jumlah D	<u>99,478,332,971</u>
	E. Malapetaka	1,070,534,785
	F. Biaya Umum Pegawai TPK	743,666,578
	G I M O	0
	H T A C	0
	Jumlah BOTL (5)	<u>541,159,193,833</u>
6.	Jumlah Biaya Operasi (5+3)	<u>1,404,519,739,845</u>
7.	Laba/Rugi Operasi (3-6)	<u>581,354,854,632</u>

PT. KERETA API (PERSERO)
 PERHITUNGAN RUGI LABA
 1 JANUARI S.D 31 DESEMBER 2002

NO	URAIAN	JUMLAH
8	BIAYA UMUM	301,754,689,484
	a. Biaya Pegawai Umum	9,222,108,110
	b. Biaya Penjualan	5,624,042,573
	c. Biaya Pendidikan	0
	d. Biaya Renbang	8,843,323,774
	e. Biaya Umum Restorka	943,630,493
	f. Biaya Umum Balai Grafika	60,384,551,242
	g. Biaya Umum Kantor Pusat	19,391,737,962
	h. Biaya Umum Eksploitasi	84,802,349,451
	i. Biaya Umum Daop/Inspeksi	25,658,236,530
	j. Biaya Umum Balai Yasa	19,071,443,888
	k. Biaya Umum Instalasi Tetap	15,158,637,483
	l. Biaya Umum Dipo	4,053,677,652
	m. Biaya Umum Dipo Mekanik	3,116,282,854
	n. Biaya Umum Gudang	1,073,342,392
	o. Biaya Umum Inklaring	1,915,760,344
	p. Biaya Umum Terminal Peti Kemas	6,628,735,439
	q. Biaya Umum Mr ss/Wisma	400,008,719
	r. Biaya Umum BPLT YK	523,797,662
	s. Biaya Umum P G M	827,685,048
	t. Biaya Umum Pusdiklat	160,666,825
	u. Biaya Kendaraan Bermotor	(1,366,060,251)
	v. Selisih Persediaan	11,591,663,475
	w. Biaya Penyusutan AT Fas.(AT Umum)	34,919,950
	x. Biaya Pemeliharaan Tanah & Bangunan	0
	y. Biaya Piutang Ragu-ragu	1,704,593,604
	z. Biaya Umum Pendidikan	760,824,181
	a. Biaya Divisi Sarana K.Pusat	373,885,913
	b. Biaya Divisi Usaha Pendukung	336,511,360
	c. B Umum Sub. Divisi Properti dan Periklanan	2,788,630,110
	d. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	585,779,676,267
	Jumlah (8)	(4,424,821,635)
9	LABA RUGI USAHA (7-8)	
10	PENDAPATAN NON OPERASI	
	1. Pendapatan Usaha Tambahan	297,816,011
	a. Penjualan Jasa Teknis	0
	b. Biaya Penjualan Jasa Teknis	297,816,011
	Jumlah 1a	1,298,652,847
	b. Iklan	86,088,238
	c. K. S. O	1,682,557,096
	Jumlah 1	17,584,511,641
	2. Persewaan	22,789,726,244
	3. Lain-lain	42,056,794,981
11	JUMLAH PENDAPATAN NON OPERASI BIAYA NON OPERASI	
12	LABA (RUGI) PERUSAHAAN SEBELUM POS LUAR BIASA	37,631,973,346
13	LABA (RUGI) LUAR BIASA	(15,973,006,010)
14	LABA (RUGI) PERUSAHAAN SETELAH POS LUAR BIASA	21,658,967,336
15	PPH BADAN	979,435,083
16	PAJAK TANGGUHAN	18,828,389,499
17	LABA (RUGI) PERUSAHAAN SETELAH PAJAK	1,851,142,754

NERACA KOMPARATIF PT. KERETA API (PERSERO)
PER 31 DESEMBER 2001
(UNAUDITED)

KEWAJIBAN DAN EKUITAS

URAIAN	PER	PER	NO	URAIAN	PER	PER
	31 - 12 - 2001	31 - 12 - 2000			31 - 12 - 2001	31 - 12 - 2000
	(Rp)	(Rp)			(Rp)	(Rp)
AKTIVA				V. KEWAJIBAN		
Bank	108,483,881,866	114,251,230,911		1. Kewajiban Lancar		
Bank	126,873,000,000	73,579,855,005		a. Hutang Pajak	7,238,251,077	9,179,849,976
Bank Jaminan Kontrak	91,387,137,887	143,340,848,317		b. Hutang Pada Pem. (PDS)	-	3,800,466,534
Utang Niaga	69,802,401,840	54,863,205,673		c. Hutang Pada Pihak ke III	124,626,351,231	144,371,037,926
Utang Pegawai	1,261,245,653	1,319,830,122		d. Hutang Pegawai	7,575,799,436	17,466,773,352
Utang Lain-lain	60,649,021,247	51,553,761,585		e. Hutang Lain-lain	105,150,245,830	58,096,683,153
Jumlah 4 s.d. 6	131,712,668,743	107,736,797,380		f. Biaya YMH Dibayar	143,415,922,027	118,551,077,946
Piutang ragu-ragu	(1,713,174,517)	(1,554,501,223)		g. Pendapatan Diterima Dimuka	30,533,818,786	1,003,259,208
Piutang	129,999,494,226	106,182,296,157		h. Kartika	166,848,000	200,704,000
Utang Dibayar dimuka	5,467,909,487	11,345,633,585		Jumlah Kewajiban Lancar	418,707,236,387	352,669,852,095
Utang Dibayar dimuka	2,907,297,042	2,067,804,411		2. Kewajiban Jangka Panjang		
Pendapatan YMH Diterima	1,907,105,407	31,235,768,421		a. Bridging Financing	45,010,460,150	-
Utang PPN Masukan	152,789,022	-		b. Hutang Pensiun Pada Pegawai	278,493,085,977	201,943,740,325
Persediaan	238,055,730,947	249,676,253,455		c. Bantuan Pemerintah yang belum ditentukan statusnya	-	-
JUMLAH AKTIVA LANCAR	705,234,345,884	731,679,690,262		Jml Kewajiban Jangka Panjang	323,503,546,127	201,943,740,325
TETAP (AT)				JUMLAH KEWAJIBAN	742,210,782,514	554,613,592,420
RANA GERAK				VI. EKUITAS		
a. Lok Up				1. Modal Awal	2,200,000,000,000	2,200,000,000,000
b. Lok Diesel	484,805,982,738	464,182,984,168		2 PMP		
c. Kereta Rel Diesel	101,745,508,292	101,745,508,292		a. Tunai	-	-
d. Kereta Rel Listrik	434,719,281,393	411,658,848,805		b. Realisasi DIP/APBN	-	-
e. Kereta Prumpang Boga	412,623,739,861	400,459,355,686		Jumlah PMP 2	-	-
f. Gerbong	242,904,406,833	241,811,741,900		3. Laba(Rugi) Tahun Berjalan :		
Jumlah Sarana Gerak	1,676,798,919,117	1,619,858,438,851		a. Kantor Pusat	(105,179,417,268)	(65,462,332,306)
RASARANA				b. Wilu Jawa	157,151,987,240	126,895,528,704
a. Inst Telekomunikasi	2,224,538,298	1,677,280,293		c. ESS	45,272,399,120	25,612,108,228
b. Inst Listrik	2,777,503,331	2,659,442,329		d. ESS B	(32,615,482,166)	(32,713,474,530)
c. Inst Air dan Minyak	2,748,581,915	2,365,250,717		e. ESS U	(44,191,094,749)	(30,475,391,637)
d. Gedung Dinas	277,697,001,845	243,874,455,515		Jumlah RL Tahun Berjalan	20,438,392,177	23,854,438,459
e. Rumah Dinas	678,280,282	678,280,282		4. Laba Rugi Yg Ditahan :		
f. Tanah	91,686,122,407	91,686,122,407		a. Saldo s.d Tahun Berjalan	-	26,751,535,709
Jumlah Prasarana 2	377,812,054,078	342,940,839,548		b. Koreksi Tahun Berjalan	-	26,751,535,709
FASILITAS				Jumlah LJR Yg Ditahan	-	26,751,535,709
a. Kendaraan Bermotor	3,486,184,286	2,678,909,619		5. Cadangan Modal	1,476,571,448	7,231,844,991
b. Barang Inventaris	26,656,673,224	18,659,220,232		JUMLAH EKUITAS	2,221,914,963,625	2,257,839,819,159
c. Mesin dan Peralatan	25,656,272,394	23,317,771,065				
d. Inst. yang bergerak	20,535,011,393	19,028,490,633				
Jumlah Fasilitas 3	76,334,141,297	63,684,391,549				
4. AKUMULASI PENYUSUTAN	(252,970,864,733)	(143,146,374,249)				
JUMLAH AKTIVA TETAP	1,877,974,229,759	1,883,337,295,599				
AKTIVA LAIN-LAIN				VII. KEWAJIBAN ADMINISTRATIF		
1. Aktiva Dalam Penyelesaian	92,362,115,984	47,210,591,382		Hutang Dana Pensiun	275,980,426,935	219,150,594,895
2. Barang Dalam Perjalanan						
3. Persediaan Tidak Produktif	48,769,055,814	19,854,706,326				
4. AT Tidak Produktif	75,478,228,303	75,473,086,969				
5. Rek. Antara Persediaan	(3,866,224,078)	3,944,840,953				
6. Rek. Antara Piutang AT	168,173,994,473	50,953,199,988				
JUMLAH AKTIVA LAIN-LAIN	380,917,170,496	197,436,425,618				
AKTIVA ADMINISTRATIF				VIII. REKENING KORAN		
1. Kas dan Bank, Dana Pensiun	3,135,426,935	1,515,594,895		1. Kantor Pusat	2,102,345,797,985	2,140,663,437,240
2. Deposito Dana Pensiun	262,345,000,000	217,135,000,000		2. Wilu Jawa	(1,486,240,344,728)	(1,673,975,506,331)
3. Piutang Dana Pensiun	10,500,000,000	500,000,000		3. ESS	(368,768,787,686)	(302,317,074,449)
JUMLAH AKTIVA ADMINISTRATIF	275,980,426,935	219,150,594,895		4. ESS	(103,978,984,121)	(86,835,017,417)
				5. ESU	(143,357,681,450)	(77,535,839,043)
				JUMLAH REKENING KORAN	-	-
JUMLAH AKTIVA	3,240,106,173,074	3,031,604,006,474		JUMLAH KEWAJIBAN & EKUITAS	3,240,106,173,074	3,031,604,006,474

PT. KERETA API (Persero)

LAPORAN LABA (RUGI)

YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2001 DAN 31 DESEMBER 2000

PENJELASAN	PER 31 - 12 - 2001 (Rp.)	PER 31 - 12 - 2000 (Rp.)
PENDAPATAN OPERASI		
1. Angkutan Penumpang	1,242,708,247,253	1,086,200,944,247
2. Angkutan Barang	375,760,372,278	298,417,981,169
3. Pendapatan Operasi Lainnya	5,896,946,558	4,118,538,491
JUMLAH PENDAPATAN OPERASI	1,624,365,566,089	1,388,737,463,907
P.S.O.	45,000,000,000	255,307,054,000
JUMLAH (I+II)	1,669,365,566,089	1,644,044,517,907
BIAYA OPERASI LANGSUNG		
a. Angkutan KA		
1) Bahan Bakar	181,985,559,150	146,357,871,692
2) Pemeliharaan Sarana	246,471,055,029	243,008,683,600
3) Leasing PT.INKA	6,391,550,791	8,105,249,561
4) Pegawai		
a) Operasi	99,095,365,335	80,487,739,719
b) Pemeliharaan Sarana	56,731,778,528	42,892,031,806
Jumlah Butir 4)	155,827,143,863	123,379,771,525
5) Pemilikan		
a) Penyusutan Sarana Gerak	93,491,926,841	68,652,149,209
b) Asuransi Sarana Gerak	-	-
Jumlah Butir 5)	93,491,926,841	68,652,149,209
JUMLAH B O L ANGGUTAN KA	684,167,235,674	589,503,725,587
b. Penunjang Angkutan KA		
1) Biaya Langsung Restorka	15,200,996,511	13,634,821,804
2) Tuslag	32,227,123,709	39,913,095,358
3) Angkutan Lanjutan	3,699,706,951	3,911,762,662
4) Biaya Operasi TFK	-	111,012,970
JUMLAH B O L Penunjang angkutan	51,127,827,171	57,570,692,994
JUMLAH B O L (II)	735,295,062,845	647,074,418,581
BIAYA OPERASI TIDAK LANGSUNG		
1. Pemeliharaan Prasarana Pokok	183,821,091,432	139,515,263,430
2. Pegawai IMO :		
a. Pegawai Pemi. Prasarana Pokok	88,560,826,088	91,634,154,977
b. Pegawai Pengoperasi Prasarana Pokok	65,237,984,620	-
c. Pegawai Renwas	22,164,856,221	-
Jumlah Pegawai IMO	175,963,666,999	91,634,154,977
3. Pemeliharaan Prasarana Pendukung	14,304,837,255	17,318,108,652
4. Penyusutan Prasarana Pendukung	6,418,407,645	6,025,584,816
Biaya Umum Stasiun Langsiran		
1) Pegawai	69,949,412,522	91,909,865,934
2) Lainnya	19,343,976,548	17,753,510,194
Jumlah Butir IV.e	89,293,389,070	109,668,376,128
f. Malapetaka	1,417,352,121	1,245,808,610
g. Biaya Umum Pegawai TPK	607,959,824	454,249,806
h. I M O	-	(316,216,500,000)
i. T A C	-	512,339,554,000
j. Asuransi Prasarana Pokok	-	-
JUMLAH B O T L (IV)	471,826,704,346	561,984,600,419
JUMLAH BIAYA OPERASI (III + IV)	1,207,121,767,191	1,209,059,019,000
RUGI/LABA OPERASI (I+II)-(III+IV)	462,243,798,898	434,985,498,907
Dipindahkan	462,243,798,898	434,985,498,907

NO.	PENJELASAN	PER 31 - 12 - 2001 (Rp.)	PER 31 - 12 - 2000 (Rp.)
I.	PENDAPATAN OPERASI Pindahan	462,243,798,898	434,985,498,907
V.	BIAYA UMUM		
	a. Biaya Pegawai Umum	215,130,827,445	218,455,026,866
	b. Biaya Penjualan	10,235,664,085	6,812,892,237
	c. Biaya Pendidikan	3,861,121,883	4,521,716,203
	d. Biaya Perenc. dan Pengembangan	-	6,679,617,965
	e. Biaya Umum Restorka	5,984,026,791	4,456,404,420
	f. Biaya Umum Balai Grafika	355,516,204	416,659,235
	g. Biaya Umum Kantor Pusat	53,060,202,309	34,438,285,322
	h. Biaya Umum Divisi Regional	14,448,955,803	14,383,169,655
	i. Biaya Umum Daop/inspeksi	94,362,761,086	88,424,390,384
	j. Biaya Umum Balai Yasa	29,995,323,958	20,967,716,572
	k. Biaya Umum Instalasi Tetap	15,914,074,904	11,888,875,769
	l. Biaya Umum Dipo	16,639,556,375	11,747,149,301
	m. Biaya Umum Dipo Mekanik	4,449,381,489	3,566,080,883
	n. Biaya Umum Gudang	7,734,633,305	3,808,882,682
	o. Biaya Umum Inklaring	-	1,791,072,487
	p. Biaya Umum TPK	2,055,434,136	1,747,689,293
	q. Biaya Umum Mess/Wisma	3,726,354,576	2,667,974,069
	r. Biaya Umum BPLT Yk.	670,353,405	290,649,383
	s. Biaya Umum P G M	835,855,402	396,552,257
	t. Biaya Umum Pusdiklat	1,024,521,676	944,613,108
	u. Biaya Umum Kendaraan Bermotor	181,530,769	134,933,936
	v. Biaya Umum Pendidikan	926,197,388	888,482,351
	w. Selisih Persediaan	(867,327,103)	(949,237,299)
	x. Biaya Penyusutan AT Fas.(AT Umum)	10,169,260,893	10,028,631,463
	y. Biaya Pemel. Tanah dan Bangunan	102,000,743	-
	z. P B B	982,405,278	6,227,306,414
	aa. Biaya Piutang Ragu-Ragu	-	1,340,725,520
	JUMLAH BIAYA UMUM (V)	491,978,633,305	456,126,260,576
	RUGI/LABA USAHA ((I+II)-(III+IV)-V)	(29,734,834,407)	(21,140,761,669)
VI.	PENDAPATAN NON OPERASI		
	1 Pendapatan Usaha Tambahan		
	a) Penjualan Jasa Teknis	2,310,969,521	924,062,279
	b) Biaya Penjualan Jasa Teknis	-	-
	Jumlah Butir a) dan b)	2,310,969,521	924,062,279
	c) Iklan	964,671,035	906,899,350
	d) K S O	-	257,883,000
	Jumlah Butir VI.1	3,275,640,576	2,088,844,639
	2 Persewaan	8,748,324,547	11,252,914,299
	3 Lain-lain	36,736,136,561	47,136,794,923
	JUMLAH PENDAPATAN NON OPERASI	48,760,101,684	60,478,553,861
	Rugi Non Operasi		
	LABA (RUGI) PERUSAHAAN SEBELUM POS LUAR BIASA	19,025,267,277	39,337,792,192
	LABA (RUGI) LUAR BIASA	1,413,124,900	(15,481,353,733)
	PPh Pasal 25	-	-
	RUGI/LABA SETELAH POS LUAR BIASA	20,438,392,177	23,856,438,459

NERACA KOMPARATIF PT. KERETA API (PERSERO)

PER 31 DESEMBER 2000 DAN PER 31 DESEMBER 1999

(AUDITED)

KEWAJIBAN DAN EKUITAS

URAIAN	PER	PER	NO	URAIAN	PER	PER
	31 - 12 - 2000 (Rp)	31 - 12 - 1999 (Rp)			31 - 12 - 2000 (Rp)	31 - 12 - 1999 (Rp)
LANCAR				V. KEWAJIBAN		
Rekening Bank	114,251,230,911	122,233,425,267		1 Kewajiban Lancar		
Deposito	73,579,665,005	193,652,429,265		a Hutang Pihak	9,179,949,976	10,201,020,656
Asuransi Kontrak	143,340,849,317	31,956,917,605		b Hutang Pada Pem (PDS)	3,600,466,534	13,563,100,140
Hutang Niaga	54,863,200,673	44,296,569,647		c Hutang Pada Pihak ke III	144,371,037,925	36,119,494,396
Hutang Pegawai	1,313,630,122	1,227,565,373		d Hutang Pegawai	17,466,773,352	12,639,152,556
Hutang Lain-lain	51,553,761,595	59,182,514,377		e Hutang Lain-lain	58,297,367,153	61,913,666,945
Jumlah 4 s.d 6	107,736,737,360	104,703,660,397		f Biaya YMH Dibayar	118,551,077,946	51,376,656,951
d Hutang ragu-ragu	(1,554,501,223)	(213,847,228)		g Pendapatan Ditunda Dimuka	1,023,259,200	1,651,943,764
Umlah Piutang	106,182,236,137	104,489,813,169		Jumlah Kewajiban Lancar	352,639,652,095	197,765,456,406
Bayar Dimuka	11,345,633,565	8,480,943,594		2 Kewajiban Jangka Panjang		
Bayar Dimuka	2,067,804,411	712,303,873		a Hutang Pada BI	-	-
Pendapatan YMH Diterima	31,236,759,421	6,609,329,949		b Hutang PLN	-	-
Hutang FPN Masukan				c Bantuan Pemerintah yang belum ditentukan statusnya	201,943,740,325	67,508,526,615
Persediaan	249,676,253,455	299,344,274,699		Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	201,943,740,325	67,508,526,615
JUMLAH AKTIVA LANCAR	731,679,690,262	706,572,446,620		JUMLAH KEWAJIBAN	554,613,592,420	275,374,017,023
NETAP (AT)				VI. EKUITAS		
PRASARANA CERAK				1 Modal Awal	2,200,000,000,000	2,200,000,000,000
a Lok. Uap				2 PMP		
b Lok. Diesel	464,182,934,186	392,082,825,411		a Tunai	-	-
c Kereta Rel Diesel	101,745,508,292	101,361,763,277		b Realisasi DIP/APBN	-	-
d Kereta Rel Listrik	411,658,848,805	334,193,193,655		Jumlah PMP 2	-	-
e Kereta Penumpang Loge	400,459,355,696	355,476,806,798		3 Laba(Rugi) Tahun Berjalan :		
f Gerbong	241,811,741,900	166,360,437,526		a Kantor Pusat	(6,452,332,306)	(5,315,618,194)
Jumlah Sarana Gerak 1	1,610,658,436,651	1,349,455,026,667		b Wilu Jawa	126,695,528,704	96,970,639,095
PRASARANA				c E S S	25,612,108,228	20,610,996,000
a Inst Telekomunikasi	1,677,268,298	2,413,475,298		d E S B	(32,713,474,530)	(14,210,207,616)
b Inst Listrik	2,659,442,729	2,633,260,066		e E S U	(30,475,391,637)	(10,476,663,805)
c Inst Avionik	2,366,250,717	1,754,817,115		Jumlah R/L Dilaikan	23,656,438,459	27,578,305,709
d Gedung Dinar	243,874,456,515	233,300,997,316		4 Laba Rugi Yg Dilaikan		
e Rumah Dinas	678,280,282	605,789,282		a Saldo s.d Tahun Berjalan	-	-
f Tanah	91,686,122,407	91,590,115,250		b Koreksi Tahun Berjalan	26,751,536,709	-
Jumlah Prasarana 2	342,940,838,546	332,578,405,349		Jumlah L/R Th Yg Dilaikan	26,751,536,709	-
FASILITAS				5 Cadangan Modal	7,231,844,991	7,419,137,577
a Kendaraan Bermotor	2,678,909,619	1,700,598,619		JUMLAH EKUITAS	2,257,839,819,159	2,234,997,973,285
b Barang Inventaris	18,659,220,222	14,866,951,267				
c Mesin dan Peralatan	23,317,771,075	21,437,695,929				
d Inst. yang bergerak	19,028,490,039	18,909,210,633				
Jumlah Fasilitas 3	63,684,391,549	56,984,456,448				
AKUMULASI PENYUSUTAN	(143,146,374,249)	(58,452,189,356)				
JUMLAH AKTIVA TETAP	1,883,337,295,699	1,880,565,708,108				
AKTIVA LAIN-LAIN				VII. KEWAJIBAN ADMINISTRATIF		
1 Aktiva Dalam Penyelesaian	47,210,591,362	22,931,672,560		Hutang Dana Pensiun	219,150,594,895	192,156,368,464
2 Barang Dalam Penanganan						
3 Persediaan Tidak Produktif	19,654,706,326	15,560,369,843				
4 AT Tidak Produktif	75,473,090,000	75,290,174,046				
5 Rek. Antara Persediaan	3,944,840,563	9,413,002,049				
6 Rek. Antara Piutang/AT	50,953,199,968	(1,371,936)				
JUMLAH AKTIVA LAIN-LAIN	197,436,425,618	123,233,835,580		VIII. REKENING KORAN		
AKTIVA ADMINISTRATIF				1 Kantor Pusat	2,140,663,437,240	1,972,561,064,615
Kas dan Bank Dana Pensiun	1,515,594,895	10,401,369,464		2 Wilu Jawa	(1,673,975,506,331)	(1,466,665,778,492)
Deposito Dana Pensiun	217,136,000,000	182,366,000,000		3 ESS	(302,317,074,449)	(303,567,723,846)
Piutang Dana Pensiun	500,000,000	500,000,000		4 ESB	(6,835,017,417)	(93,545,820,141)
JUMLAH AKTIVA ADMINISTRATIF	219,150,594,895	193,286,368,464		5 ESU	(7,536,839,043)	(93,450,742,146)
				JUMLAH REKENING KORAN		
JUMLAH AKTIVA	3,031,604,006,474	2,703,658,358,772		JUMLAH KEWAJIBAN & EKUITAS	3,031,604,006,474	2,703,658,358,772

NO	U R A I A N	TAHUN 2000	TAHUN 1999
1.	PENDAPATAN OPERASI		
	a. Angkutan Penumpang	1.086.200.944.247	562.874.138.298
	b. Angkutan Barang	298.417.981.169	162.314.614.474
	c. Pendapatan Operasi Lainnya	4.118.538.491	1.001.168.917
	Jumlah Pendapatan Operasi (1)	1.388.737.463.907	726.789.921.689
2.	P S O	255.307.054.000	18.374.985.000
3.	Jumlah 3 (1+2)	1.644.044.517.907	745.164.906.689
4.	BIAYA OPERASI LANGSUNG (BOL)		
	a. Angkutan KA		
	1) Bahan Bakar	146.357.871.692	88.058.793.395
	2) Pemeliharaan Sarana	243.008.683.600	127.530.874.089
	3) Leasing PT INKA	8.105.249.561	4.673.512.539
	4) Pegawai		
	a) Operasi	80.487.739.719	41.455.143.703
	b) Pemeliharaan Sarana	42.892.031.806	24.109.083.667
	Jumlah (4)	123.379.771.525	65.564.227.370
	5) Pemilikan		
	a) Penyusutan Sarana Gerak	68.652.149.209	47.366.654.361
	b) Asuransi Sarana Gerak	0	3.395.012.266
	Jumlah (5)	68.652.149.209	51.261.666.627
	Jumlah BOL Angkutan KA	589.503.725.587	337.089.074.020
	b. Penunjang Angkutan KA		
	1) Biaya Langsung Restorka	13.634.821.804	8.757.181.832
	2) Tugslag	39.913.095.358	15.781.334.851
	3) Angkutan Lanjutan	3.911.762.862	2.070.352.454
	4) Biaya Operasi TPK	111.012.970	0
	Jumlah BOL Penunjang Angkutan KA	57.570.692.994	26.608.869.137
5.	Jumlah BOL (4a+4b)	647.074.418.581	363.697.943.157
6	BIAYA OPERASI TIDAK LANGSUNG (BOTL)		
	a. Pemeliharaan Prasarana Pokok	139.515.263.430	71.240.911.262
	b. Pegawai Pemel. Prasarana Pokok	91.634.154.977	45.748.031.293
	c. Pemel. Prasarana Pendukung	17.318.108.652	17.917.509.058
	d. Penyusutan Prasarana Pendukung	6.025.584.816	4.109.265.473
	e. Biaya Umum Stasiun Langsiran		
	1) Pegawai	91.909.865.934	45.497.096.438
	2) Lainnya	17.758.510.194	6.835.925.582
	Jumlah e	109.668.376.128	52.333.022.020
	f. Malapetaka	1.245.808.610	234.417.451
	g. Biaya Umum Pegawai TPK	454.249.806	190.323.969
	h. I M O	(316.216.500.000)	
	i. T A C	512.339.554.000	
	j. Asuransi Prasarana Pendukung	0	0
	Jumlah BOTL (d)	561.984.600.419	191.773.480.526
7	Jumlah Biaya Operasi (5+6)	1.209.059.019.000	555.471.423.683
	Laba Rugi Operasi (3-7)	434.985.498.907	189.693.483.006

NO	U R A I A N	TAHUN 2000	TAHUN 1999
9	BIAYA UMUM		
	a. Biaya Pegawai Umum	218.455.026.866	93.035.001.995
	b. Biaya Penjualan	6.812.892.237	4.806.321.674
	c. Biaya Pendidikan	4.521.716.203	3.372.461.577
	d. Biaya Renbang	6.679.617.965	2.315.799.042
	e. Biaya Umum Restorka	4.456.404.420	1.851.204.169
	f. Biaya Umum B. Grafika	416.659.235	490.223.784
	g. Biaya Umum Kantor Pusat	34.488.285.322	15.928.426.989
	h. Biaya Umum Wilu/Eksploatasi	14.383.169.655	6.997.434.392
	i. Biaya Umum Daop/Inspeksi	88.424.390.384	35.195.783.235
	j. Biaya Umum Balai Yasa	20.967.716.572	2.104.998.497
	k. Biaya Umum Instalasi Tetap	11.888.875.769	2.749.011.397
	l. Biaya Umum Dipo	11.747.149.301	2.036.709.848
	m. Biaya Umum Dipo Mekanik	3.566.080.883	1.180.640.295
	n. Biaya Umum Gudang	3.808.882.632	1.868.660.559
	o. Biaya Umum Inklaring	1.791.072.487	369.535.235
	p. Biaya Umum TPK	1.747.689.293	1.127.161.457
	q. Biaya Umum Mess/Wisma	2.667.974.069	1.217.414.274
	r. Biaya Umum BPLT Yk	290.649.383	114.933.969
	s. Biaya Umum P G M	396.552.257	155.630.803
	t. Biaya Umum Pusdiklat	944.613.108	430.822.279
	u. Biaya Kendaraan Bermotor	134.933.936	98.806.632
	v. Biaya Umum Pendidikan	888.482.351	116.954.768
	w. Selisih Persediaan	(949.237.299)	(995.958.608)
	x. Biaya Penyusutan AT Fasilitas (AT Umum)	10.028.631.463	6.476.260.522
	y. P B G	6.227.306.414	4.267.865.435
	z. Biaya Piutang Ragu-ragu	1.340.725.620	213.847.228
	Jumlah (9)	456.126.260.576	187.525.951.447
10	LABA RUGI USAHA (8-9)	(21.140.761.669)	2.167.531.559
C.	PENDAPATAN NON OPERASI		
	1. Pendapatan Usaha Tambahan		
	a. Penjualan Jasa Teknis	924.062.279	992.112.422
	b. Biaya Penjualan Jasa Teknis	-	0
	Jumlah	924.062.279	992.112.422
	b. Iklan	906.899.360	297.799.789
	c. K S O	257.883.000	2.350.000
	Jumlah 1	2.088.844.639	1.292.262.211
	2. Persewaan	11.252.914.299	4.255.300.432
	3. Lain-lain	47.136.794.923	36.552.988.337
	Rugi Non Operasi	0	(13.603.570.771)
	JUMLAH PENDAPATAN NON OPERASI	60.478.553.861	28.496.980.209
D.	LABA (RUGI) PERUSAHAAN SEBELUM POS LUAR BIASA	39.337.792.192	30.664.511.768
	LABA (RUGI) LUAR BIASA	(15.481.353.733)	446.324.840
	LABA (RUGI) SETELAH POS LUAR BIASA	23.856.438.459	31.110.836.608
	PPH BADAN (PPH Pasal 25)	0	3.532.000.900
	LABA (RUGI) PERUSAHAAN SETELAH PAJAK	23.856.438.459	27.578.835.708



LAPORAN KEUANGAN PT. KA (PERSERO)
LABA (RUGI) PER 31 DESEMBER 1999
(AUDITED)

3.

NO	PENJELASAN	PER 31 - 12 - 1999 (Rp)
1.	PENDAPATAN OPERASI	
	a. Angkutan Penumpang	562,874,138,298
	b. Angkutan Barang	162,314,614,474
	a. Pendapatan Operasi Lainnya	1,601,168,917
	Jumlah Pendapatan Operasi	726,789,921,689
2.	Kompensasi Pemerintah	18,374,985,000
	Jumlah Pendapatan (1+2)	745,164,906,689
3.	BIAYA OPERASI LANGSUNG (BOL)	
	a. Angkutan KA ;	
	1). Bahan Bakar	88,058,793,395
	2). Pemeliharaan Sarana	127,530,874,089
	3). Leasing PT INKA	4,673,512,539
	4). Pegawai ;	
	a). Operasi	41,455,143,703
	b). Pemeliharaan Sarana	24,109,083,667
	<i>Jumlah 4).</i>	65,564,227,370
	5). Femilikan ;	
	a). Penyusutan Sarana Gerak	47,866,654,361
	b). Asuransi Sarana Gerak	3,395,012,266
	<i>Jumlah 5).</i>	51,261,666,627
	Jumlah BOL Angkutan KA	337,089,074,020
	b. Penunjang Angkutan KA ;	
	1). Biaya Langsung Restorka	8,757,181,832
	2). Tuslag	15,781,334,851
	3). Angkutan Lanjutan	2,070,352,454
	4). Biaya Operasi TPK	0
	Jumlah BOL Penunjang Angkutan KA	26,608,869,137
	Jumlah Biaya Operasi Langsung (BOL)	363,697,943,157
4.	BIAYA OPERASI TIDAK LANGSUNG (BOTL)	
	a. Pemeliharaan Prasarana Pokok	71,240,911,262
	b. Pegawai Pemeliharaan Prasarana Pokok	45,748,031,293
	c. Pemeliharaan Prasarana Pendukung	17,917,509,058
	d. Penyusutan Prasarana Pendukung	4,109,265,473
	e. Biaya Umum Stasiun Langsiran	
	1). Pegawai	45,497,096,438
	2). Lainnya	6,835,925,582
	<i>Jumlah e.</i>	52,333,022,020
	f. Malajetaka	234,417,451
	g. Biaya Umum Pegawai TPK	190,323,969
	h. Asuransi Prasarana Pendukung	0
	Jml Biaya Operasi Tidak Langsung (BOTL)	191,773,480,526
	Jumlah Biaya Operasi (3+4)	555,471,423,683
5.	Laba Rugi Operasi (1+2)-(3+4)	189,693,483,006
	Dipindahkan	189,693,483,006

NO	PENJELASAN	PER 31 - 12 - 1999 (Rp)
	Pindahan	189,693,483,006
6.	BIAYA UMUM	
	a. Biaya Pegawai Umum	93,035,001,995
	b. Biaya Penjualan	4,806,321,674
	c. Biaya Pendidikan	3,372,461,577
	d. Biaya Renbang	2,315,799,042
	e. Biaya Umum Restorka	1,851,204,169
	f. Biaya Umum Balai Grafika	490,223,784
	g. Biaya Umum Kantor Pusat	15,928,426,989
	h. Biaya Umum Pendidikan	116,954,768
	i. Biaya Umum Wilu/Eksploitasi	6,997,434,392
	j. Biaya Umum Daop/Inspeksi	35,195,783,235
	k. Biaya Umum Balai Yasa	2,104,998,497
	l. Biaya Umum Instalasi Tetap	2,749,011,397
	m. Biaya Umum Dipo	2,036,709,848
	n. Biaya Umum Dipo Mekanik	1,180,640,295
	o. Biaya Umum Gudang	1,868,660,559
	p. Biaya Umum Inkla'ing	369,535,235
	q. Biaya Umum TPK	1,127,161,457
	r. Biaya Umum Mess/Wisma	1,217,414,274
	s. Biaya Umum BPLT YK	114,933,969
	t. Biaya Umum PGM	155,630,803
	u. Biaya Umum Pusdiklat	430,822,279
	v. Biaya Kendaraan Bermotor	98,806,632
	w. Selisih Persediaan	(995,958,608)
	x. Biaya Phystn AT. Fas. (AT. Umum)	6,476,260,522
	y. Biaya PBB	4,267,865,435
	z. Biaya Piutang ragu-ragu	213,847,228
	Jumlah Biaya Umum	187,525,951,447
7.	Laba Rugi Usaha (5-6)	2,167,531,559
8.	PENDAPATAN NON OPERASI	
	1. Pendapatan Usaha Tambahan ;	
	a. Penjualan Jasa Teknis	992,112,422
	b. Biaya Penjualan Jasa Teknis	0
	<i>Jumlah a+b.</i>	992,112,422
	c. Iklan	297,799,789
	d. KSO	2,350,000
	<i>Jumlah Pendapatan Usaha Tambahan</i>	1,292,262,211
	2. Persewaan	4,255,300,432
	3. Lain-lain	36,552,988,337
	Jumlah Pendapatan Non Operasi	42,100,550,980
	Rugi Non Operasi	(13,603,570,771)
	Jumlah Pendapatan Non Operasi	28,496,980,209
	LABA (RUGI) SEBELUM POS LUAR BIASA	30,664,511,768
	Laba (Rugi) Luar biasa	446,324,840
	LABA (RUGI) SETELAH POS LUAR BIASA	31,110,836,608
	PPH Badan (PPH Pasal 25)	3,532,000,900
	LABA (RUGI) SETELAH PAJAK	27,578,835,708

RUSAHAAN UMUM KERETA API
 RHITUNGAN R/L KOMPARATIF
 ANUARI S.D 31 DESEMBER 1998

D.	U R A I A N	1998	1997
	PENDAPATAN OPERASI		
	a. Angkutan Penumpang	692,287,805,002	519,100,127,701
	b. Angkutan Barang	212,928,851,556	203,878,323,122
	c. Pendapatan Operasi Lainnya	3,943,866,197	3,380,532,884
	Jumlah Pendapatan Operasi (1)	909,160,522,755	726,358,983,707
2.	Kompensasi Pemerintah	31,500,000,000	31,500,000,000
3.	Jumlah 3 (1+2)	940,660,522,755	757,858,983,707
4.	BIAYA OPERASI LANGSUNG		
	a. Angkutan KA		
	1) Bahan Bakar	103,151,691,618	81,553,460,839
	2) Pemeliharaan Sarana	152,785,747,387	130,963,601,516
	3) Leasing PT INKA	15,147,260,998	0
	4) Pegawai		
	a) Operasi	56,416,518,528	45,196,959,762
	b) Pemeliharaan Sarana	31,072,156,545	28,808,089,977
	Jumlah (4)	87,488,675,073	74,005,049,739
	5) Pemilikan		
	a) Penyusutan Sarana Gerak	80,781,027,262	60,072,916,420
	b) Asuransi Sarana Gerak	0	0
	Jumlah (5)	80,781,027,262	60,072,916,420
	Jumlah BOL Angkutan KA	439,354,402,338	346,595,028,514
	b. Penunjang Angkutan KA		
	1) Biaya Langsung Restorka	10,090,755,356	7,706,447,527
	2) Tuslag	21,751,598,177	10,711,435,850
	3) Angkutan Lanjutan	3,452,977,379	3,320,502,162
	4) Biaya Operasi TPK	756,195,253	992,481,784
	Jumlah BOL Penunjang Angkutan KA	36,051,526,165	22,730,867,323
5.	Jumlah BOL (4a+4b)	475,405,928,503	369,325,895,837
6	B.OPERASI TDK LANGSUNG (BOTL)		
	a. Pemeliharaan Prasarana Pokok	83,419,378,638	54,568,847,525
	b. Pegawai Pemel. Prasarana Pokok	63,095,087,988	51,587,460,673
	c. Pemel. Prasarana Pendukung	13,714,521,330	9,932,908,180
	d. Penyusutan Prasarana Pendukung	7,119,690,335	8,958,317,495
	e. B. Umum Stasiun Langsiran		
	1) Pegawai	59,296,639,067	47,117,056,918
	2) Lainnya	9,312,435,468	8,068,909,698
	Jumlah e	68,609,074,535	55,185,966,616
	f. Malapetaka	391,247,478	564,093,720
	g. Biaya Umum Pegawai TPK	600,100,663	379,564,971
	h. Asuransi Prasarana Pendukung	0	0
	Jumlah BOTL (f)	236,949,100,967	181,177,159,180
7	Jumlah Biaya Operasi (5-6)	712,355,029,470	550,503,055,017
8	Laba Rugi Operasi (3-7)	228,305,493,285	207,355,928,690

PERUSAHAAN UMUM KERETA API
 PERHITUNGAN R/L KOMPARATIF
 1 JANUARI S.D 31 DESEMBER 1998

NO.	U R A I A N	1998	1997
	Pindahan	228,305,493,285	207,355,928,690
9	BIAYA UMUM		
	a. Biaya Pegawai Umum	130,046,596,213	99,948,944,223
	b. Biaya Penjualan	3,927,129,915	3,446,703,159
	c. Biaya Pendidikan	2,009,344,085	3,490,193,461
	d. Biaya Renbang	3,415,009,286	2,876,659,053
	e. Biaya Umum Restorka	4,150,712,821	2,200,254,579
	f. Biaya Umum B. Grafika	454,728,793	805,581,842
	g. Biaya Umum K.Pusat	37,866,451,792	30,364,544,223
	h. Biaya Umum Wiliu/Eksploatasi	9,234,111,558	7,798,359,761
	i. Biaya Umum Daop/Inspeksi	60,312,130,488	39,038,151,873
	j. Biaya Umum Balai Yasa	19,244,148,907	11,168,081,682
	k. Biaya Umum Instalasi Tetap	6,561,802,175	4,482,585,503
	l. Biaya Umum Dipo	11,407,197,940	8,039,773,495
	m. Biaya Umum Dipo Mekanik	3,693,837,180	2,466,595,059
	n. Biaya Umum Gudang	2,162,177,940	3,205,715,425
	o. Biaya Umum Inklaring	695,501,792	142,417,890
	p. Biaya Umum TPK	684,010,996	633,714,918
	q. Biaya Umum Mess/Wisma	1,972,731,086	1,622,355,026
	r. Biaya Umum BPLT Yk	253,016,342	183,431,018
	s. Biaya Umum P G M	292,289,881	167,770,445
	t. Biaya Umum Pusklat	447,276,845	0
	u. Biaya Kendaraan Bermotor	93,767,158	0
	v. Selisih Persediaan	(378,095,061)	1,600,880,384
	w. B. Penyusutan AT Fas.(AT Urnum)	13,874,094,735	13,289,703,397
	x. Biaya P B B	0	5,167,584,844
	x. Biaya Piutang Ragu-ragu	0	547,750
	y. Biaya Urnum Pendidikan	971,845,419	920,540,508
	Jumlah (9)	313,391,818,286	243,061,089,518
10	LABA RUGI USAHA (8-9)	(85,086,325,001)	(35,705,160,828)
C. PENDAPATAN NON OPERASI			
1.	Pendapatan Usaha Tambahan		
	a. Penjualan Jasa Teknis	1,542,967,739	2,143,052,379
	b. Biaya Penjualan Jasa Teknis	0	596,745,800
	Jumlah 1a	1,542,967,739	1,546,306,579
	b. Iklan	591,920,271	589,231,681
	b. K S O	240,448,850	817,396,228
	Jumlah 1	2,375,336,860	2,952,934,488
2.	Persewaan	9,025,452,338	8,806,444,324
3.	Lain-lain	131,404,885,471	54,315,977,605
	JUMLAH PENDAPATAN NON OPERASI	142,805,674,669	66,075,356,417
D.	LABA (RUGI) PERUSAHAAN SEBELUM		
	POS LUAR BIASA	57,719,349,668	30,370,195,589
	LABA (RUGI) LUAR BIASA	1,414,710	(1,869,242,093)
	LABA (RUGI) PERUSAHAAN SETELAH		
	POS LUAR BIASA	57,720,764,378	28,500,953,496

LAPORAN KEUANGAN POKOK
A. NERACA KOMPARATIF PER 31 DESEMBER 1997 DAN 31 DESEMBER 1996
(SETELAH AUDIT)

PASIVA

KETERANGAN	PER 31 DESEMBER 1997		PER 31 DESEMBER 1996	
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
AKTIVA LANCAR				
Kas dan Bank	127,602,004,740	95,874,254,837		
Deposito (Termasuk valas)	203,049,537,003	183,511,841,070		
Deposito Jaminan Kontrak	23,417,572,228	0		
Piutang Niaga	70,360,282,401	51,962,710,667		
Piutang Pegawai	653,937,993	387,044,531		
Piutang Lain-lain	37,500,062,043	25,119,878,834		
<i>Audit 4116</i>	108,514,282,437	87,669,634,056		
<i>(869,814,277)</i>		<i>(2,969,825,870)</i>		
Cadangan Piutang Ragu-ragu	107,644,468,210	84,699,808,256		
<i>Audit 4116</i>	1,020,560,990	1,923,777,920		
1. Biaya Dibayar Dimuka	457,238,472	2,730,310,824		
0. Pendapatan Yang Diterima	1,306,893,178	1,139,658,924		
1. Piutang PPN Masukan	35,195,313	35,172,900		
2. Persewaan	191,526,325,392	192,567,564,952		
Jumlah Aktiva Lancar	656,066,798,528	564,483,090,017		
AKTIVA TETAP				
1. Sarana Gerak		124,188,572		
a. Lok Up	246,035,572	514,373,011,933		
b. Lok Diesel	601,131,455,523	74,533,545,332		
c. Kereta Rel Diesel	140,637,644,832	233,879,424,196		
d. Kereta Rel Listrik	487,546,635,306	337,939,261,749		
e. Kereta Pemumpang	343,533,561,808	183,891,775,118		
f. Garibong	236,123,467,130	1,346,671,206,900		
<i>Audit 4116</i>	1,849,218,800,171	1,346,671,206,900		
2. Prasarana		3,833,422,721		
a. Instalasi Telekomunikasi	4,156,412,921	4,058,500,329		
b. Instalasi Listrik	4,907,943,978	2,813,921,259		
c. Instalasi Air dan Minyak	2,962,067,600	196,913,002,795		
d. Gedung Dinas	261,532,063,024	7,656,592,181		
e. Rumah Dinas	7,968,463,084	141,962,345,252		
f. Tanah	140,343,465,773	357,160,183,137		
<i>Audit 4116</i>	421,832,456,560	357,160,183,137		
3. Fasilitas		7,853,644,942		
a. Kendaraan Bertukor	8,224,012,062	22,539,159,050		
b. Barang Inventaris	26,069,724,604	66,390,187,773		
c. Mesin dan Peralatan	55,250,259,750	65,305,392,619		
d. Instalasi Bergarak	65,338,720,544	147,290,384,384		
<i>Audit 4116</i>	154,903,717,260	1,851,141,776,421		
<i>Jumlah Aktiva Tetap</i>	<i>2,425,954,974,011</i>	<i>(410,112,445,362)</i>		
<i>Akumulasi Penyusutan</i>	<i>(489,660,440,693)</i>	<i>1,441,029,331,053</i>		
<i>Nilai Baku Aktiva Tetap</i>	<i>1,936,294,533,318</i>	<i>1,441,029,331,053</i>		
II AKTIVA LAIN-LAIN		5,020,990,767		
1. Pekerjaan Dalam Proses	4,487,190,830	2,983,156,310		
2. AT Dalam Proses	3,924,696,714	689,914,707		
3. Barang Dalam Perjalanan	2,456,251,547	19,343,131,232		
4. Persewaan Non Produktif	37,557,931,157	75,015,833,356		
5. Aktiva Tetap Non Produktif	76,707,701,154	268,166,000		
6. Aktiva Tetap Bekas Produktif	0	3,339,550,997		
7. Rek. Akt. Peng. Persewaan	3,105,968,662	0		
8. Sisa dari Persewaan	0	0		
<i>Jumlah Aktiva Lain-lain</i>	<i>128,239,720,073</i>	<i>106,860,742,964</i>		
SAHAM PENYERTAAN (PT Dan Saha Tiga Pihak)	1,150,600,000	1,150,000,000		
IV. AKTIVA ADMINISTRATIF		737,470,908		
1. Kas dan Bank Dana Pensiun	103,936,257	80,450,000,000		
1. Deposito Dana Pensiun	93,560,000,000	81,207,470,908		
<i>Jumlah Aktiva Administratif</i>	<i>93,663,936,257</i>	<i>81,207,470,908</i>		
TOTAL AKTIVA	2,815,414,979,176	2,194,738,634,942		
LIUTANG				
1. Hutang Lancar				
a. Hutang Pajak	3,376,365,909	3,259,523,864		
b. Hutang Pada Pemerintah (DPS)	10,599,174,143	0		
c. Hutang Pada Pihak Ketiga	53,419,571,622	39,802,047,856		
d. Hutang Pegawai	5,700,457,307	1,605,640,793		
e. Hutang Lain-lain	7,170,153,313	1,873,251,174		
f. Biaya Yang Dibayar	46,106,390,225	25,824,660,241		
g. Partisipasi Dikirim Diterima	2,473,533,700	1,314,936,587		
<i>Jumlah Hutang Lancar</i>	<i>128,845,646,219</i>	<i>73,680,060,465</i>		
2. Hutang Jangka Panjang				
a. Hutang Pada BI	0	0		
b. Hutang PLII	1,174,744,942,012	736,151,900,653		
<i>Jumlah Hutang Jangka Panjang</i>	<i>1,174,744,942,012</i>	<i>736,151,900,653</i>		
<i>Jumlah Hutang</i>	<i>1,303,590,588,231</i>	<i>809,831,961,118</i>		
Modal dan Cadangan				
1. Modal awal	1,059,022,000,000	1,059,022,000,000		
2. PMP				
a. Tunai	119,156,948,562	170,001,224,000		
b. Reksian DIP/APBN	198,925,456,773	97,126,423,255		
<i>Jumlah PMP</i>	<i>318,082,405,335</i>	<i>267,127,647,255</i>		
3. Laba (Kugi) Tahun Berjalan				
a. Kantor Pusat	(4,455,462,406)	13,966,062,024		
b. Wilya Jawa	43,447,361,618	7,433,742,009		
c. ESS	34,631,111,268	34,162,882,695		
d. ESS B	(19,616,295,802)	(12,027,038,843)		
e. ESS U	(25,473,761,182)	(20,010,277,147)		
<i>Jumlah Laba Tahun Berjalan</i>	<i>28,190,953,496</i>	<i>17,522,370,742</i>		
4. Laba Rugi Yang Ditahan				
a. Saldo s.d. Tahun Berjalan	7,468,609,256	9,616,124,921		
b. Koreksi Tahun Berjalan	0	0		
<i>Jumlah Laba Rugi Yang Ditahan</i>	<i>7,468,609,256</i>	<i>9,616,124,921</i>		
5. Cadangan	4,992,486,601	0		
<i>Jumlah Modal & Cadangan</i>	<i>1,418,160,454,682</i>	<i>1,803,601,202,916</i>		
PASIVA ADMINISTRATIF				
Hutang Dana Pensiun	93,663,936,257	81,207,470,908		
TOTAL PASIVA	2,815,414,979,176	2,194,738,634,942		

KESPM HAL 1.

LOKUTRETAUDIT97-REKUT-NEROG-BALI-974

B. PERUSAHAAN UMUM KERETA API
PERHITUNGAN LABA (RUGI) KOMPARATIF PERUMKA

NO.	U R A I A N	TAHUN 1997	TAHUN 1996
1.	PENDAPATAN OPERASI		
	a. Angkutan Penumpang	519.100.127.701	441.809.923.898
	b. Angkutan Barang	203.878.323.122	184.221.926.028
	c. Pendapatan Operasi Lainnya	3.380.532.884	2.612.699.549
	Jumlah Pendapatan Operasi	726.358.983.707	628.644.549.475
2.	Kompensasi Pemerintah	31.500.000.000	31.500.000.000
3.	Jumlah (1+2)	757.858.983.707	660.144.549.475
4.	BIAYA OPERASI LANGSUNG		
	a. Angkutan KA		
	1) Bahan Bakar	81.553.460.839	72.805.216.398
	2) Pemeliharaan Sarana	130.963.601.516	134.816.225.732
	3) Leasing PT INKA	0	
	4) Pegawai		
	a) Operasi	45.196.959.762	38.992.401.369
	b) Pemeliharaan Sarana	28.808.089.977	16.619.009.732
	Jumlah	74.005.049.739	55.611.411.101
	5) Pemilikan		
	a) Penyusutan Sarana Gerak	60.072.916.420	44.606.774.095
	b) Asuransi Sarana Gerak	0	
	Jumlah	60.072.916.420	44.606.774.095
	Jumlah BOL Angkutan KA	346.595.028.514	307.839.627.326
	b. Penunjang Angkutan KA		
	1) Biaya Langsung Restora	7.706.447.527	6.770.994.934
	2) Tuslag	10.711.435.850	7.422.391.265
	3) Angkutan Lanjutan	3.320.502.162	3.250.133.966
	4) Biaya Operasi TPK	992.481.784	790.528.137
	Jumlah BOL Penunjang Angkutan KA	22.730.867.323	18.233.958.302
	Jumlah BOL (4a+4b)	369.325.895.837	326.073.585.628
5.	B. OPERASI TDK LANGSUNG (BOTL)		
	a. Pemeliharaan Prasarana Pokok	54.568.847.525	59.997.359.250
	b. Pegawai Pemcl. Frasarana Pokok	51.587.460.673	43.010.856.889
	c. Pemcl. Frasarana Pendukung	9.932.908.180	13.249.111.250
	d. Penyusutan Prasarana Pendukung	8.958.317.495	5.230.372.362
	e. B. Umum Stasiun Langsiran		
	1) Pegawai	47.117.056.918	39.313.246.657
	2) Lainnya	8.068.909.698	6.959.983.582
	Jumlah	55.185.966.616	46.273.230.239
	f. Malapetaka	564.093.720	375.445.948
	g. Biaya Umum Pegawai TPK	379.564.971	221.999.453
	h. Asuransi Prasarana Pendukung	0	
	Jumlah BOTL	181.177.159.180	168.358.375.391
6.	Jumlah Biaya Operasi (4+5)	550.503.055.017	494.421.961.019
7.	Laba Rugi Operasi (3-6) dipindahkan ...	207.355.928.690	165.712.588.456

NO.	U R A I A N	TAHUN 1997	TAHUN 1996
	Pindahan	207.355.928.690	165.712.588.456
8.	BLAYA UMUM		
	a. Biaya Pegawai Umum	99.948.944.223	87.200.484.486
	b. Biaya Penjualan	3.446.703.159	4.739.485.250
	c. Biaya Pendidikan	3.490.193.461	4.194.350.190
	d. Biaya Rebang	2.876.659.053	1.529.242.886
	e. Biaya Umum Restorka	2.200.254.579	2.117.971.989
	f. Biaya Umum B. Grafika	805.581.842	50.922.655
	g. Biaya Umum K. Pusat	30.364.544.223	15.309.925.055
	h. Biaya Umum Wilu/Eksplorasi	7.798.359.761	8.607.488.433
	i. Biaya Umum Daop/Inspeksi	39.038.151.873	35.527.670.060
	j. Biaya Umum Balai Yasa	11.168.081.682	11.199.380.535
	k. Biaya UMum Instalasi Tetap	4.482.585.503	5.491.095.550
	l. Biaya Umum Dipo	8.039.773.495	6.906.308.839
	m. Biaya Umum Gudang	3.205.715.425	1.732.330.761
	n. Biaya Umum Inklaring	142.417.890	412.447.091
	o. Biaya Umum TPK	633.714.918	465.568.485
	p. Biaya Umum Mess/Wisma	1.622.355.026	1.648.790.060
	q. Biaya Umum BPLT Yk	183.431.018	197.497.987
	r. Biaya P B B	5.167.584.844	113.501.834
	o. Biaya Umum P G M	167.770.445	102.279.490
	s. Biaya Umum Pendidikan	920.540.508	618.079.677
	l. Biaya Umum Dipo Mekanik	2.466.595.059	3.395.165.033
	u. Selisih Persediaan	1.600.880.384	(720.381.687)
	v. E. Penyusutan AT Fas.(AT Umum)	13.289.703.397	13.848.951.806
	w. Biaya Piutang Ragu-ragu	547.750	
	Jumlah	243.061.089.518	204.688.589.465
9.	LABA RUGI USAHA (7-8)	(35.705.160.828)	(38.975.971.009)
10.	PENDAPATAN DAN BIAYA NON OPERASI		
	a. Usaha Tambahan		
	1) a. Pend. Penjualan Jasa Teknis	2.143.052.379	4.500.799.594
	b. Biaya Penjualan Jasa Teknis	596.745.800	763.410.119
	Jumlah 1)	1.546.306.579	3.737.389.475
	2) Iklan	589.231.681	486.945.099
	3) K S O	817.396.228	1.167.309.094
	Jumlah a.	2.952.934.488	5.391.643.668
	b. Persewaan	8.806.444.324	10.950.267.734
	c. Lain-lain	54.315.977.605	39.432.263.341
	LABA RUGI NON OPERASI	66.075.356.417	55.774.174.743
11.	LABA (RUGI) PERUSAHAAN SEBELUM		
	POS LUAR BIASA (9 +/- 10)	30.370.195.589	16.798.203.734
12.	POS LUAR BIASA		
	a. LABA (RUGI) Penjualan Assets	609.693.012	1.127.167.006
	b. RUGI Akibat PLH di ESS	(2.471.935.105)	0
	Jumlah 12.	(1.869.242.093)	1.127.167.006
13.	LABA (RUGI) PERUSAHAAN SETELAH		
	POS LUAR BIASA (11 +/- 12)	28.500.953.496	17.925.370.740

PERUSAHAAN UMUM KERETA API
A. NERACA KOMPARATIF PER 31 DESEMBER 1996 DAN 1995

AKTIVA

PASIVA

NO	URAIAN	PER	PER	NO	URAIAN	PER	PER
		31-12-1996 (Rp)	31-12-1995 (Rp)			31-12-1996 (Rp)	31-12-1995 (Rp)
I	AKTIVA LANCAR			VI	HUTANG		
	1 Kas dan Bank	93,874,854,837	69,258,256,451		1 Hutang lancar		
	2 Deposito	185,511,841,398	119,878,784,110		a. Hutang Pajak	3,259,523,864	2,027,508,209
	3 Piutang Niaga	51,962,710,667	46,847,153,090		b. Hutang Kepada Pemerintah	0	1,937,500,000
	4 Piutang Pegawai	587,044,551	596,738,427		c. Hutang Pihak Ketiga	39,802,047,856	33,418,180,044
	5 Piutang Lain-lain	35,119,878,836	61,720,853,071		d. Hutang Pegawai	1,605,640,793	1,120,134,185
	Jumlah 3 s.d. 5	87,669,634,056	109,164,744,588		e. Hutang Lain-lain	1,873,251,124	1,786,472,249
	6 Cad. Piut. Ragu-ragu	(2,969,825,800)	(3,154,403,386)		f. Beban YMH Dibayar	25,824,660,241	17,718,155,304
	Jumlah Piutang	84,699,808,256	106,010,341,202		g. Pendapatan Diterima Dimuka	1,314,936,587	522,330,895
	7 Biaya Dibayar Dimuka	1,923,777,920	141,807,230		Jumlah 1	73,680,060,465	58,530,280,886
	8 Pajak Dibayar Dimuka	2,730,310,824	6,404,656,665		2 Hutang Jangka Panjang		
	9 Pend. Ymh Diterima	1,139,658,924	818,107,929		a. Hutang Kepada Pemerintah / D/P	0	0
	10 Piutang Pajak PPN Musukan	35,172,906	0		b. Hutang Kpd. Pemerintah / PLN	736,151,900,653	712,929,765,149
	11 Persediaan	192,567,564,952	175,171,601,301		Jumlah 2	736,151,900,653	712,929,765,149
	Jumlah I	564,483,090,017	477,683,554,888		Jumlah V	809,831,961,118	771,460,046,035
	AKTIVA TETAP			VII	MODAL DAN CADANGAN		
II	1 AT SARANA GERAK				1 Modal Awal	1,059,022,000,000	1,059,022,000,000
	a. Lok Uap	124,188,572	124,188,572		2 P M P		
	b. Lok Diesel	514,303,011,933	508,050,870,351		a. Tunai	120,001,224,000	97,012,236,000
	c. Kereta Rel Diesel	74,533,645,332	82,671,005,955		b. Realisasi DIP (APBR)	97,126,423,255	60,410,915,436
	d. Kereta Rel Listrik	233,879,424,196	228,524,217,957		Jumlah 2	217,127,647,255	157,423,151,436
	e. Kereta Penumpang	337,939,261,749	282,735,044,974		3 Laba Rugi Tahun Berjalan		
	f. Gerbong	135,891,775,118	163,406,201,623		a. Kantor Pusat	13,966,120,024	20,586,094,522
	Jumlah 1	1,346,671,206,900	1,265,411,589,432		b. Wil. Jawa	7,833,742,009	(10,422,118,435)
	2 AT PRASARANA				c. E S S	34,162,882,695	29,129,285,895
	a. Ins. Telekomunikasi	3,833,422,721	3,199,391,721		d. E S B	(18,027,038,843)	(4,497,835,586)
	b. Ins. Listrik	4,058,500,329	3,862,334,604		e. E S U	(20,010,277,145)	(17,601,013,087)
	c. Ins. Air dan Minyak	2,813,921,859	1,685,045,109		Jumlah 3.	17,925,428,740	17,154,413,409
	d. Gedung Dinas	196,915,002,795	184,198,268,648		4 Laba Rugi Yang Ditahan		
	e. Rumah Dinas	7,656,992,181	7,439,139,443		a. Saldo s.d. Tahun Berjalan	9,616,126,921	(7,261,228,488)
	f. Kelengkapan Pelabuhan	0	0		b. Koreksi Tahun Berjalan	0	0
	g. Tanah	141,902,345,252	141,869,723,805		Jumlah 4	9,616,126,921	(7,261,228,488)
	Jumlah 2	357,180,185,137	342,273,933,231		Jumlah VI	1,303,691,202,916	1,226,378,336,357
	3 AT FASILITAS			VIII	PASIVA ADMINISTRATIF		
	a. Kendaraan Bermotor	7,855,644,942	7,403,102,942		Hutang Dana Pensiun	81,207,470,908	71,809,748,271
	b. Barang Inventaris	22,539,159,050	20,328,924,855				
	c. Mesin dan Peralatan	66,390,187,773	53,838,563,172				
	d. Ins. yang Bergesak	50,505,392,619	58,458,737,225				
	Jumlah 3	147,290,384,384	140,029,328,294				
	JUMLAH AKTIVA TETAP	1,851,141,776,421	1,747,714,820,857				
	AKUMULASI PENYUSUTAN	(410,112,445,368)	(344,793,693,810)				
	NILAI BUKU	1,441,029,331,053	1,402,921,127,147				
III	AKTIVA LAIN-LAIN						
	1 Pekerjaan Dalam Proses	6,020,990,767	4,841,734,712				
	2 Aktiva Dalam Penyelesaian	2,983,156,310	5,218,410,602				
	3 Barang Dalam Perjalanan	689,814,702	11,121,575,748				
	4 Persediaan Non Produktif	19,543,131,232	20,202,777,409				
	5 Aktiva Tetap Non Produktif	75,015,833,356	74,870,574,950				
	6 Aktiva Tetap, belum Produksi	268,160,000	0				
	7 Rek. Ant. Peng. Persediaan	3,339,550,397	977,626,936				
	Jumlah III	106,860,742,964	117,233,700,357				
IV	Saham Penyertaan	1,150,000,000					
V	REKENING ADMINISTRATIF						
	1 Kas Bank Dana Pensiun	757,470,908	4,458,748,271				
	2 Deposito Dana Pensiun	80,450,000,000	67,350,000,000				
	Jumlah IV	81,207,470,908	71,808,748,271				
	TOTAL AKTIVA	2,194,730,634,942	2,069,647,130,663		TOTAL KEWAJIBAN & MODAL	2,194,730,634,942	2,069,647,130,663

PERUSAHAAN UMUM KERETA API
LAPORAN RUGI LABA KOMPARATIF
TAHUN 1996 DAN 1995

NO	URAIAN	1996	1995
I	PENDAPATAN OPERASI		
	a. Angkutan Penumpang	441.809.923.898	354.444.154.073
	b. Angkutan Barang	184.221.926.028	166.271.538.989
	c. Pendapatan Operasi Lainnya	2.612.699.549	1.606.063.890
	Jumlah Pendapatan Operasi	628.644.549.475	522.321.756.952
II	KOMPENSASI PEMERINTAH	31.500.000.000	31.500.000.000
	JUMLAH PENDAPATAN	660.144.549.475	553.821.756.952
III	BIAYA OPERASI LANGSUNG (BOL)		
	a. Angkutan KA		
	1) Bahan Bakar	72.805.216.398	70.431.599.070
	2) Pemeliharaan Sarana	134.816.225.732	99.589.445.298
	3) Pegawai		
	a) Operasi	39.992.401.359	33.041.728.411
	b) Pemeliharaan Sarana	16.619.009.732	19.821.741.800
	Jumlah 3)	55.611.411.101	52.863.470.211
	4) Pemilikan		
	a) Penyusutan Sarana Gerak	44.606.774.095	40.305.159.424
	b) Asuransi Sarana Gerak	0	0
	Jumlah 4)	44.606.774.095	40.305.159.424
	Jumlah BOL Angkutan KA	307.639.627.326	263.188.674.003
	b. Penunjang Angkutan KA		
	1) Biaya Langsung Restorke	6.770.094.934	4.050.145.071
	2) Tugasp	7.422.301.265	3.528.986.200
	3) Angkutan Lanjutan	3.250.133.968	5.460.448.933
	4) Biaya Operasi TPK	790.528.137	789.569.271
	Jumlah BOL Penunjang Angkutan KA	18.233.958.302	13.829.151.481
	Jumlah B O L	326.073.585.628	277.017.825.484
IV	BIAYA OPERASI TIDAK LANGSUNG (BOTL)		
	a. Pemeliharaan Prasarana Pokok	59.997.359.250	56.633.716.455
	b. Pegawai Pemeliharaan Prasarana Pokok	43.010.856.889	37.247.835.539
	c. Pemeliharaan Prasarana Pendukung	13.249.111.250	9.276.183.147
	d. Penyusutan Prasarana Pendukung	5.230.372.362	4.832.718.740
	e. Biaya Umum Stasiun Lingsiran		
	1) Pegawai	39.313.248.657	32.602.131.241
	2) Lainnya	6.959.983.582	5.700.659.750
	Jumlah e	46.273.230.239	38.302.790.991
	f. Malapetaka	375.445.948	369.418.086
	g. Biaya Umum Pegawai TPK	221.999.453	236.624.668
	h. Asuransi Prasarana Pendukung	0	0
	Jumlah B O T L	169.359.275.301	146.890.297.626
V	JUMLAH BIAYA OPERASI	494.431.961.019	423.917.113.110
VI	LABA RUGI OPERASI	165.712.588.456	129.904.643.842

PERUSAHAAN UMUM KERETA API
 LAPORAN RUGI LABA KOMPARATIF
 TAHUN 1996 DAN 1995

NO	URAIAN	1996	1995
VII	BIAYA UMUM		
	a. Biaya Pegawai Umum	87.200.484.485	68.951.116.361
	b. Biaya Penjualan	4.739.465.250	4.212.034.361
	c. Biaya Pendidikan	4.194.350.190	1.919.305.145
	d. Biaya Penelitian dan Pengembangan	1.529.242.886	1.919.741.644
	e. Biaya Umum Restorka	2.117.971.989	1.064.307.799
	f. Biaya Umum B. Grafika	50.922.655	381.179.570
	g. Biaya Umum Kantor Pusat	15.309.925.055	8.745.128.111
	h. Biaya Umum Wilu/Eksploatasi	8.607.498.433	9.228.872.306
	i. Biaya Umum Daop/Inspeksi	35.527.670.060	30.847.431.569
	j. Biaya Umum Balak Yasa	11.199.380.535	11.057.941.279
	k. Biaya Umum Instalasi Telap	5.491.095.550	3.709.850.897
	l. Biaya Umum Dipo	6.906.300.839	6.963.642.035
	m. Biaya Umum Gudang	1.732.330.761	1.436.338.966
	n. Biaya Umum Inklaring	412.447.091	78.359.127
	o. Biaya Umum TPKB	465.568.485	379.667.303
	p. Biaya Umum Mess/Wisma/Peristirahatan	1.648.790.060	1.451.992.921
	q. Biaya Umum BPLT Yk	197.497.987	355.810.216
	r. Biaya Umum P G M	102.279.490	181.990.674
	s. Biaya Umum Pusdiklat	618.079.677	569.702.646
	t. Biaya Umum Pendidikan	0	0
	u. Biaya Umum Dipo Mekanik	3.395.168.033	635.110.336
	v. Biaya Kendaraan Bermotor	113.501.834	0
	w. Selisih Persediaan	(720.381.607)	(1.654.703.753)
	x. Biaya Penyusutan AT Fasilitas (AT Umum)	13.848.951.806	10.941.751.499
	y. Asuransi AT Fasilitas (AT Umum)	0	0
	Jumlah Biaya Umum	204.688.559.465	163.375.575.013
VIII	LABA (RUGI) USAHA	(38.975.971.009)	(33.470.931.171)
IX	PENDAPATAN DAN BIAYA NON OPERASI		
	a. Usaha Tambahan		
	1) a) Pendapatan Penjualan Teknis	4.500.799.594	7.602.066.928
	b) Biaya Penjualan Jasa Teknis	763.410.119	4.470.097.502
	Jumlah 1)	3.737.389.475	3.131.979.426
	2) Iklan	488.945.099	1.155.119.861
	3) KSO	1.167.309.094	2.656.779.350
	Jumlah (a)	5.391.643.668	6.944.878.637
	b. Perseman	10.950.267.734	5.919.508.042
	c. Lain-lain	39.432.321.341	38.034.534.082
	LABA (RUGI) NON OPERASI (e+b+c)	55.774.232.743	48.898.920.761
X	LABA (RUGI) PERUSAHAAN SEBELUM POS LUAR BIASA	16.798.261.734	15.427.989.590
XI	LABA (RUGI) LUAR BIASA		
	Re) Penjualan Assest	1.127.167.006	1.133.391.574
	Pendapatan Klaim Asuransi	0	633.032.245
	Jumlah	1.127.167.006	1.766.423.819
XII	LABA (RUGI) PERUSAHAAN SETELAH POS LUAR BIASA	17.925.428.740	17.194.413.409

PERUSAHAAN UMUM KERETA API
I LAPORAN KEUANGAN POKOK
A. NERACA KOMPARATIF PER 31 DESEMBER 1995 DAN 31 DESEMBER 1994

URAIAN	PER		NO	URAIAN	PER	
	31 DES. 1995	31 DES. 1994			31 DES. 1995	31 DES. 1994
AKTIVA LANCAR			V	HUTANG		
1 Kas dan Bank	69.258.250.451	49.781.205.875		1 Hutang lancar		
2 Deposito	119.878.784.110	152.275.003.625		a. Hutang Pajak	2.027.508.209	1.268.048.111
3 Piutang Negara	40.847.153.000	52.404.013.024		b. Hutang Kepada Pemerintah	1.937.500.000	1.937.500.000
4 Piutang Pegawai	590.730.427	595.467.415		c. Hutang Pihak Ketiga	33.418.100.044	23.526.695.111
5 Piutang Lain-lain	61.720.853.071	36.915.031.730		d. Hutang Pegawai	1.120.134.185	1.037.905.611
Jumlah 3 s.d. 5	109.164.744.588	90.005.312.939		e. Hutang Lain-lain	1.706.472.249	1.513.029.311
6 Cad. Piut. Pengu. ragu	(3.154.403.386)	(2.971.774.493)		f. Beban YMLI Dibayar	17.710.155.304	19.069.874.111
Jumlah Piutang	106.010.341.202	87.033.538.476		g. Percepatan Diterima Dimuka	522.330.895	491.337.511
7 Biaya Dibayar Dimuka	141.007.230	7.215.014.451		Jumlah 1	58.530.200.836	49.734.470.111
8 Pajak Dibayar Dimuka	6.464.056.065	10.058.649.592		2 Hutang Jangka Panjang		
9 Pand. Ymlh Diterima	818.107.929	1.087.010.315		a. Hutang Kepada Pemerintah / B	0	1.937.500.000
10 Persediaan	175.171.601.301	163.361.352.608		b. Hutang Kepada Pemerintah / PLN	7.129.229.765.149	500.905.912.611
Jumlah I	477.603.554.888	471.353.474.742		Jumlah 2	7.129.229.765.149	502.843.412.611
AKTIVA TETAP				Jumlah V	771.460.616.035	552.637.872.611
1 AT SARANA GERAK			VI	MODAL DAN CADANGAN		
a Lok. Uap	124.180.572	171.094.156		1 Modal Awal	1.059.022.000.000	1.059.022.000.000
b Lok. Diesel	501.050.870.351	437.211.815.899		2 P M P		
c Kereta Bel Diesel	82.571.065.955	73.938.011.560		a. Tunai	97.012.236.000	73.036.872.011
d Kereta Bel Listrik	228.524.217.957	110.541.408.091		b. Realisasi DIP (APBN)	60.410.915.436	54.185.793.411
e Kereta Perumpong	282.735.044.874	201.872.961.237		Jumlah 2	157.423.151.436	127.222.665.411
f Gedung	103.406.201.623	148.300.631.727		3 Laba Rugi Tahun Berjalan		
Jumlah 1	1.235.411.589.432	872.129.032.608		a. Kantor Pusat	20.506.094.522	16.589.775.411
2 AT PISAFARWA				b. Wilu Jawa	(10.422.118.435)	(12.109.111.111)
a Ins. Telekomunikasi	3.199.391.721	6.397.890.902		c. E S S	29.129.285.805	23.507.891.711
b Ins. Listrik	3.802.334.504	3.579.612.223		d. E S B	(4.497.835.445)	(8.298.935.411)
c Ins. Air dan Minyak	1.635.045.109	1.544.306.109		e. E S U	(17.021.013.087)	(13.093.573.311)
d Gedung Dinas	184.103.258.648	175.501.026.882		Jumlah 3	17.191.413.409	6.406.142.211
e Bantah Dinas	7.439.139.443	7.595.637.314		4 Laba Rugi Yang Ditahan		
f Kelayakan Pelaksanaan	0	137.610.238		a. Saldo s.d. Tahun Berjalan	(7.281.228.488)	(13.975.054.811)
g Tanah	141.659.723.806	141.870.922.846		b. Koreksi Tahun Berjalan	0	308.489.111
Jumlah 2	3.12.273.933.231	336.320.006.574		Jumlah 4	(7.281.228.488)	(13.667.375.711)
3 AT PASIUTAS				Jumlah VI	1.226.378.336.557	1.179.803.373.911
a Kerusakan Bermotor	7.403.102.942	6.973.910.442		VII		
b Barang Inventaris	20.320.924.955	17.273.659.475		PASIVA ADMINISTRATIF		
c Meubel dan Peralatan	53.849.563.172	50.925.296.981		Hutang Dana Pensiun	71.808.748.271	63.754.204.211
d Ins. yang Bergerak	58.450.737.225	31.750.879.485				
Jumlah 3	140.029.328.294	106.923.770.383				
JUMLAH AKTIVA TETAP	1.747.714.820.957	1.415.690.815.565				
AKUMULASI PENYUSUTAN	(344.793.693.810)	(288.319.568.252)				
NILAI BUKU	1.402.921.127.147	1.127.371.247.313				
AKTIVA LAIN-LAIN						
1 Pelaksanaan Dalam Proses	4.041.734.712	1.437.309.816				
2 Aktiva Dalam Penyediaan	5.219.410.602	32.064.533.766				
3 Barang Dalam Perjalanan	11.121.575.748	8.808.405.546				
4 Persediaan Non Produktif	20.202.777.409	26.919.748.638				
5 Aktiva Tetap Non Produktif	74.870.574.060	73.197.963.327				
6 Bek. Perhit. Dengan Proyek	0	28.584.531				
7 Bek. Ant. Pengalihan Persediaan	877.626.836	339.977.062				
Jumlah III	117.233.700.357	132.896.522.686				
V						
REKENING ADMINISTRATIF						
1 Kas dan Bank Dana Pensiun	4.458.748.271	934.204.215				
2 Deposito Dana Pensiun	67.350.000.000	62.800.000.000				
Jumlah IV	71.808.748.271	63.754.204.215				
TOTAL AKTIVA	2.069.647.130.663	1.795.375.450.956		TOTAL KEWAJIBAN & MODAL	2.069.647.130.663	1.795.375.450.956

PERUSAHAAN UMUM KERETA API
LAPORAN LABA RUGI KOMPARATIF 1994 dan 1995

2

NO.	U R A I A N	1995	1994
1.	PENDAPATAN OPERASI		
	a. Angkutan Penumpang	354,444,154,073	292,000,700,673
	b. Angkutan Barang	166,271,538,989	151,532,285,114
	c. Pendapatan Operasi Lainnya	1,606,063,890	862,093,798
	Jumlah Pendapatan Operasi	522,321,756,952	444,395,079,585
2.	Kompensasi Pemerintah	31,500,000,000	31,500,000,000
3.	Jumlah (1+2)	553,821,756,952	475,895,079,585
4.	BIAYA OPERASI LANGSUNG		
	a. Angkutan KA		
	1) Bahan Bakar	70,431,599,070	60,111,513,736
	2) Pemeliharaan Sarana	90,588,445,298	85,016,944,312
	3) Pegawai		
	a) Operasi	33,041,728,411	29,418,671,659
	b) Pemeliharaan Sarana	19,824,741,800	17,257,105,037
	Jumlah	52,866,470,211	46,675,776,696
	4) Pemilikan		
	a) Penyusutan Sarana Gerak	40,305,159,424	32,084,220,921
	b) Asuransi Sarana Gerak	0	200,013,000
	Jumlah	40,305,159,424	32,284,233,921
	Jumlah BOL Angkutan KA	263,188,674,003	224,088,468,665
	b. Penunjang Angkutan KA		
	1) Biaya Langsung Restorka	4,050,145,071	1,497,471,664
	2) Tuglag	3,528,988,200	3,996,009,507
	3) Angkutan Lanjutan	5,460,448,939	7,315,314,367
	4) Biaya Operasi TPK	789,569,271	863,912,114
	Jumlah BOL Penunjang Angkutan KA	13,829,151,481	13,672,707,652
	Jumlah BOL (4a + 4b)	277,017,825,484	237,761,176,317
5.	B. OPERASI TDK LANGSUNG (BOTL)		
	a. Pemeliharaan Prasarana Pokok	56,633,716,455	43,594,612,910
	b. Pegawai Pemel. Prasarana Pokok	37,247,835,539	29,983,439,430
	c. Pemel. Prasarana Pendukung	9,276,183,147	6,774,563,500
	d. Penyusutan Prasarana Pendukung	4,832,718,740	4,905,928,677
	e. B. Umum Stasiun Langsiran		
	1) Pegawai	32,602,131,241	28,983,625,016
	2) Lainnya	5,700,659,750	6,668,340,867
	Jumlah	38,302,790,991	35,651,965,883
	f. Malapetaka	369,418,086	460,705,340
	g. Biaya Umum Pegawai TPK	236,624,668	188,477,831
	h. Asuransi Prasarana Pendukung	0	481,258,500
	Jumlah BOTL	146,899,287,626	122,040,952,071
6.	Jumlah Biaya Operasi (4+5)	423,917,113,110	359,802,128,388
7.	Lab. Rugi Operasi (3 - 6) dipindahkan ...	129,904,643,842	116,092,951,197

PERUSAHAAN UMUM KERETA API
LAPORAN LABA RUGI KOMPARATIF 1994 dan 1995

3

NO.	U R A I A N	1995	1994
	Pindahan	129,904,643,842	116,092,951,197
8.	BIAYA UMUM		
	a. Biaya Pegawai Umum	68,951,116,361	62,200,733,207
	b. Biaya Penjualan	4,212,034,361	3,401,660,882
	c. Biaya Pendidikan	1,919,305,145	2,579,721,870
	d. Biaya Renbang	1,919,741,644	2,184,372,369
	e. Biaya Umum Restorka	1,064,307,799	686,725,395
	f. Biaya Umum B. Grafika	381,179,570	246,700,876
	g. Biaya Umum K.Pusat	8,745,126,111	10,260,772,788
	h. Biaya Umum Wilu/Eksplorasi	9,228,872,308	11,038,359,599
	i. Biaya Umum Daop/Inspeksi	30,847,431,568	21,618,152,973
	j. Biaya Umum Balai Yasa	11,057,941,279	5,687,369,969
	k. Biaya Umum Instalasi Tetap	3,709,856,897	3,545,415,293
	l. Biaya Umum Dipo	6,963,642,035	6,056,914,956
	m. Biaya Umum Gudang	1,435,338,966	2,399,949,578
	n. Biaya Umum Inkiaring	78,359,127	62,499,806
	o. Biaya Umum TPK	379,667,303	325,807,630
	p. Biaya Umum Mess/Wisma	1,451,992,921	1,053,958,192
	q. Biaya Umum BPL Yk	355,810,216	351,512,402
	r. Biaya Umum P G M	181,990,674	86,500,505
	s. Biaya Umum Pusdiklat	569,702,646	389,485,961
	t. Biaya Umum Pendidikan	0	317,885,558
	u. Biaya Umum Dipo Mekanik	635,110,336	337,713,091
	v. Biaya Piutang Ragu-ragu	0	229,492,756
	w. Selisih Persediaan	(1,654,703,753)	(1,470,390,000)
	x. B. Penyusutan AT Fas.(AT Umum)	10,941,751,499	9,134,907,417
	y. Asuransi AT Fas.(AT Umum)	0	0
	Jumlah	163,375,575,013	142,726,223,073
9.	LABA RUGI USAHA (7-8)	(33,470,931,171)	(26,633,271,876)
10.	PENDAPATAN DAN BIAYA NON OPERASI		
	a. Usaha Tambahan		
	1) a. Penerimaan Penjualan Jasa Teknis	7,602,066,928	2,375,771,678
	b. Biaya Penjualan Jasa Teknis	4,470,087,502	115,259,157
	Jumlah 1)	3,131,979,426	2,260,512,521
	2) Iklan	1,156,119,861	396,466,305
	3) K S O	2,656,779,350	0
	b. Persewaan	5,919,508,042	5,255,678,941
	c. Lain-lain	36,034,534,082	23,881,753,741
	Jumlah	48,898,920,761	31,794,411,508
11.	LABA RUGI NON OPERASI		
	LABA (RUGI) PERUSAHAAN SEBELUM POS LUAR BIASA (9 +/- 10)	15,427,989,590	5,161,139,632
12.	POS LUAR BIASA		
	a. RUGI/LABA Penjualan Assets	1,133,391,574	307,266,336
	b. Pendapatan Klaim Asuransi	633,032,245	937,741,272
	Jumlah 12.	1,766,423,819	1,245,007,608
13.	LABA (RUGI) PERUSAHAAN SETELAH POS LUAR BIASA (11 +/- 12)	17,194,413,409	6,406,147,240

PERUSAHAAN UMUM KERETA API
A. NERACA KOMPARATIF PER 31 DESEMBER 1994 DAN 31 DESEMBER 1993

KEWAJIBAN DAN MODAL

URAIAN	PER 31 DESEMBER 1994 (Rp)	PER 31 DESEMBER 1993 (Rp)	NO	URAIAN	PER 31 DESEMBER 1994 (Rp)	PER 31 DESEMBER 1993 (Rp)
(A) LANCAR (AL)				V HUTANG		
a dan Bank	49.781.205.875,00	41.701.546.839,00		1. HUTANG LANCAR (HL)		
posko (Ker. naik Valas)	152.225.803.825,00	205.367.518.730,00		a. Hutang Pajak	1.358.098.285,00	2.898.470.281,00
Kang Naga	52.494.813.824,00	45.051.073.312,00		b. Hutang kepada Pemerintah	1.837.500.000,00	1.837.500.000,00
Kang Pegawai	595.467.415,00	429.845.110,00		c. Hutang pihak ketiga	23.528.095.279,00	19.259.253.596,00
Kang Lain-lain	36.915.031.730,00	14.174.181.281,00		d. Hutang pegawai	1.037.835.817,00	1.554.112.251,00
Jumlah 3 a.d. 5	90.005.312.989,00	59.854.879.703,00		e. Hutang lain-lain	21.362.803.447,00	31.833.074.754,00
dengan Piutang Ragu-ragu	(2.971.774.493,00)	(2.742.261.737,00)		f. Pendapatan diterima dimuka	491.337.506,00	290.287.218,00
yang dibayar dimuka	7.215.814.451,00	59.912.587.966,00		Jumlah HL	48.734.460.114,00	57.872.708.010,00
yang dibayar dimuka	10.058.649.592,00	7.344.078.370,00				
yang belum siap diokupasi	1.487.010.315,00	215.299.750,00		2. HUTANG JANGKA PANJANG (HJP)		
tersediaan	183.361.352.808,00	117.630.171.058,00		a. Hutang pada Pemerintah/BI	1.837.500.000,00	3.875.000.000,00
Jumlah AL	471.363.474.742,00	436.937.820.385,00		b. Hutang pada Pemerintah/PLN	500.995.912.819,00	330.349.865.831,00
				Jumlah HJP	502.995.912.819,00	334.281.865.831,00
(B) TETAP				Jumlah Hutang	552.637.872.803,00	592.134.373.841,00
a. Sertifikat	171.094.156,00	171.094.156,00				
b. Lok Uap	437.211.845.895,00	332.389.220.063,00		VI MODAL DAN CADANGAN		
c. Lok Dinam	73.928.011.500,00	73.928.011.500,00		1. Modal awal	1.059.022.000.000,00	1.059.022.000.000,00
d. Kereta Rel Diesel	110.544.408.091,00	109.116.705.157,00		2. P.M.P.:		
e. Kereta Rel Listrik	201.972.061.219,00	184.049.647.027,00		a. Tunai	73.038.872.000,00	73.038.872.000,00
f. Kereta Penumpang	148.300.631.777,00	146.112.443.798,00		b. Restoran AP/BN	54.185.730.426,00	44.974.423.304,00
g. Gedung	972.129.832.608,00	645.767.183.331,00		Jumlah	127.222.602.426,00	118.011.255.304,00
Jumlah Sertifikat				3. Laba (Rugi) tahun berjalan:		
a. Instalasi Telekomunikasi	6.597.090.962,00	6.231.817.962,00		a. Kantor Pusat	16.589.775.438,00	15.097.658.282,00
b. Instalasi Listrik	3.579.882.223,00	3.579.882.223,00		b. Wktu Jawa	(12.109.111.182,00)	(25.091.581.788,00)
c. Instalasi Ak & Miryak	1.544.306.109,00	1.261.782.617,00		c. E S S	23.307.991.733,00	28.799.433.647,00
d. Gedung Guna	175.501.828.882,00	155.619.838.352,00		d. E B B	(8.288.935.420,00)	(8.865.130.584,00)
e. Rumah Dinas	7.595.667.314,00	7.409.716.508,00		e. E S U	(13.093.573.329,00)	(11.917.362.565,00)
f. Kelengkapan Poliboran	137.810.239,00	137.810.238,00		Jumlah	6.406.147.240,00	13.017.012,00
g. Tanah	141.870.922.846,00	141.538.006.846,00		4. Laba (Rugi) yang ditahan:		
Jumlah Prastrana	336.628.008.574,00	315.784.554.816,00		a. Sejak s.d. 1993	(13.975.864.836,00)	(11.744.470.223,00)
				b. Koreksi tahun 1994	308.489.108,00	(2.244.411.625,00)
Prasana				Jumlah	(13.667.375.728,00)	(13.990.991.848,00)
a. Kereta Bermotor	6.973.940.442,00	6.248.697.441,00		JUMLAH MODAL & CADANGAN	1.178.983.373.938,00	1.163.057.130.488,00
b. Bangg. Invenstasi	17.273.659.475,00	16.051.004.397,00				
c. Mesin dan Peralatan	50.925.298.981,00	36.714.478.913,00		VII PASIVA ADMINISTRATIF		
d. Instalasi Bergerak	31.750.879.485,00	29.817.587.487,00		Hutang Dana Pensiun	63.754.204.215,00	58.301.312.605,00
Jumlah Prasana	106.923.775.383,00	88.831.768.218,00				
JUMLAH AKTIVA TETAP	1.415.600.815.585,00	1.250.383.508.385,00				
KUMULASI PENYUSUTAN	(288.319.543.252,00)	(242.540.566.463,00)				
NILAI BUKU	1.127.281.272.333,00	1.007.842.941.922,00				
AKTIVA LAIN-LAIN (ALL)						
1. Pekerjaan dalam Proses	1.437.309.816,00	1.118.321.820,00				
2. Aktiva dalam Penyelesaian	30.064.533.796,00	11.882.400.538,00				
3. Barang dalam Perjalanan	6.909.405.546,00	6.792.023.271,00				
4. Peralaksanaan Non Produktif	20.919.748.638,00	16.908.443.722,00				
5. Aktiva Tetap Non Produktif	73.197.983.327,00	73.303.982.471,00				
6. Jaminan Bank	-	328.703.299,00				
7. Rak Pemurusan dengan Proyek	28.584.531,00	278.188.601,00				
8. Rak Antara Pengaliran Peralaksanaan	339.977.082,00	0,00				
Jumlah ALL	132.868.522.888,00	110.411.643.822,00				
AKTIVA ADMINISTRATIF						
1. Kas dan Bank Dana Pensiun	954.204.215,00	951.312.605,00				
2. Deposito Dana Pensiun	82.800.000.000,00	67.350.000.000,00				
Jumlah AA	83.754.204.215,00	68.301.312.605,00				
JUMLAH AKTIVA	1.795.375.450.958,00	1.613.493.116.714,00		JUMLAH KEWAJIBAN DAN MODAL	1.795.375.450.958,00	1.613.493.116.714,00

B. PERUSAHAAN UMUM KERETA API
LAPORAN LABA RUGI KOMPATIF

NO	U R A I A N	1994	1993
1.	PENDAPATAN OPERASI		
	a. Angkutan Penumpang	292.000.700.673	253.962.543.883
	b. Angkutan Barang	151.532.285.114	153.669.595.778
	c. Pendapatan Operasi Lainnya	862.093.798	838.533.605
	Jumlah Pendapatan Operasi	444.395.079.585	408.170.673.265
2.	Kompensasi Pemerintah	31.500.000.000	31.500.000.000
3.	Jumlah (1+2)	475.895.079.585	439.670.673.266
4.	BIAYA OPEFASI LANGSUNG		
	a. Angkutan KA		
	1) Bahan Bakar	60.111.513.736	55.902.757.309
	2) Pemeliharaan Sarana	85.016.944.312	77.231.596.423
	3) Pegawai		
	a) Operasi	29.418.671.659	26.664.436.999
	b) Pemeliharaan Sarana	17.257.105.037	16.138.732.021
	Jumlah	46.675.776.696	42.803.169.020
	4) Pemilikan		
	a) Penyusutan Sarana Gerak	32.084.220.921	25.100.705.756
	b) Asuransi Sarana Gerak	200.013.000	1.256.801.072
	Jumlah	32.284.233.921	26.357.506.828
	Jumlah BOL Angkutan KA	224.088.468.665	202.295.029.580
	b. Penunjang Angkutan KA		
	1) Biaya Langsung Restorka	1.497.471.664	2.759.669.859
	2) Tuslag	3.996.009.507	4.607.019.200
	3) Angkutan Lanjutan	7.315.314.367	7.764.354.943
	4) Biaya Operasi TPK	863.912.114	603.986.633
	Jumlah BOL Penunjang Angkutan KA	13.672.707.652	15.735.030.635
	Jumlah BOL (4a+4b)	237.761.176.317	218.030.060.215
5.	B.OPERASI TDK LANGSUNG (BOTL)		
	a. Pemeliharaan Prasarana Pokok	43.594.612.910	43.726.884.753
	b. Pegawai Pemel. Prasarana Pokok	29.983.439.430	28.725.437.065
	c. Pemel. Prasarana Pendukung	6.774.563.500	7.651.727.988
	d. Penyusutan Prasarana Pendukung	4.905.928.677	1.181.929.578
	e. B. Umum Stasiun Langsiran		
	1) Pegawai	28.983.625.016	24.054.094.528
	2) Lainnya	6.668.340.867	4.476.206.012
	Jumlah	35.651.965.883	28.530.300.540
	f. Malapetaka	400.705.340	1.224.967.040
	g. Biaya Umum Pegawai TPK	188.477.831	0
	h. Asuransi Prasarana Pendukung	481.258.500	869.269.061
	Jumlah BOTL	122.040.952.071	111.910.516.031
6.	Jumlah Biaya Operasi (4+5)	359.802.128.388	329.940.576.246
7.	Lab. Rugi Operasi (3-6) dipindahkan ...	116.092.951.197	110.030.097.020

PERUSAHAAN UMUM KERETA API
LAPORAN LABA RUGI KOMPARATIF

3

NO.	U R A I A N	1994	1993
	Pindahan	116.092.951.197	110.030.097.020
8.	BIAYA UMUM		
	a. Biaya Pegawai Umum	62.200.733.207	56.946.273.412
	b. Biaya Penjualan	3.401.660.882	2.630.560.668
	c. Biaya Pendidikan	2.579.721.870	2.647.946.877
	d. Biaya Renbang	2.184.372.369	9.013.709.114
	e. Biaya Umum Restorka	686.725.395	401.249.492
	f. Biaya Umum B. Grafika	246.700.876	249.620.364
	g. Biaya Umum K.Pusat	10.260.772.788	8.904.652.753
	h. Biaya Umum Diklat	389.485.931	0
	h. Biaya Umum Wilu/Eksplorasi	11.038.359.599	10.272.941.924
	i. Biaya Umum Daop/Inspeksi	21.618.152.973	19.349.384.600
	j. Biaya Umum Balai Yasa	5.687.369.969	7.787.250.184
	k. Biaya Umum Instalasi Tetap	3.545.415.293	3.585.941.725
	l. Biaya Umum Dipo	6.056.914.956	5.461.675.455
	m. Biaya Umum Gudang	2.399.949.578	1.590.527.468
	n. Biaya Umum Inklaring	62.499.806	128.889.305
	o. Biaya Umum TPK	325.807.630	260.507.876
	p. Biaya Umum Mess/Wisma	1.053.958.192	1.140.416.636
	q. Biaya Umum BPLT Yk	351.512.402	319.302.799
	r. Biaya Umum P G M	86.500.505	103.230.400
	s. Biaya Umum Pendidikan	317.885.558	320.836.197
	l. Biaya Umum Dipo Mekanik	337.713.091	0
	u. Biaya Piutang Ragu-ragu	229.492.756	31.921.300
	v. Selisih Persediaan	(1.470.390.000)	(687.083.925)
	w. B. Penyusutan AT Fas.(AT Umum)	9.134.907.417	8.415.243.017
	x. Asuransi AT Fas.(AT Umum)	0	0
	Jumlah	142.726.223.073	138.894.997.650
9.	LABA RUGI USAHA (7-8)	(26.633.271.876)	(28.864.900.630)
10.	PENDAPATAN DAN BIAYA NON OPERASI		
	a. Usaha Tambahan		
	1) a. Penerimaan Penjualan Jasa Teknis	2.375.771.678	1.067.935.304
	b. Biaya Penjualan Jasa Teknis	115.259.157	189.790.000
	Jumlah 1)	2.260.512.521	878.145.304
	2) Iklan	396.466.305	263.237.311
	3) K S O	0	0
	b. Persewaan	5.255.678.941	4.187.435.282
	c. Lain-lain	23.881.753.741	25.693.616.256
	LABA RUGI NON OPERASI	31.794.411.508	31.022.434.153
11.	LABA (RUGI) PERUSAHAAN SEBELUM POS LUAR BIASA (9 +/- 10)	5.161.139.632	2.157.533.523
12.	POS LUAR BIASA		
	a. RUGI/LABA Penjualan Assets	307.266.336	5.614.500
	b. Taksiran Rugi Pih	0	(2.590.325.186)
	c. Pendapatan Klaim Asuransi	937.741.272	440.194.175
	Jumlah 12.	1.245.007.608	(2.144.516.511)
13.	LABA (RUGI) PERUSAHAAN SETELAH POS LUAR BIASA (11 +/- 12)	6.406.147.240	13.017.012